



Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul

PERUBAHAN **RPJPD** KABUPATEN GUNUNGKIDUL

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2005-2025

 Jl. Brigjen Katamso No.1, Wonosari-DIY

 (0274) 394124, 391006

 admin@gunungkidulkab.go.id

<http://gunungkidulkab.go.id/>





PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010;
- b. dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdapat beberapa bagian dalam RPJPD yang perlu disesuaikan.;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengubah Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 472);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
13. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 11 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

BAB VI PENUTUP

2. Mengubah lampiran sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal, 26 Desember 2018
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2018 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang berlaku selama 10 tahun telah diupayakan disusun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam penyusunannya juga telah memperhatikan dinamika perkembangan masyarakat, lingkungan strategis daerah untuk menjawab segala isu dan permasalahan pembangunan selama periode RPJPD. Namun dalam perjalanan pelaksanaan RPJPD terdapat beberapa hal yang harus disesuaikan guna penyempurnaan dokumen RPJPD.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 disusun pada saat masih diterapkan peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008. Setelah RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 ditetapkan, sebagai tindak lanjut ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah yang berakibat pada perubahan susunan organisasi perangkat daerah.

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan dalam RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 yang berkaitan dengan :

1. Mempertajam rumusan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah;
2. Menambahkan rumusan indikator-indikator yang dapat memberikan gambaran dan ukuran keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah;
3. Penambahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

4. Penyesuaian sistematika penyajian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Pada saat proses penyusunan Peraturan Daerah ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Apabila dibandingkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, terdapat beberapa perbedaan mendasar dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk di dalamnya dokumen RPJPD. Salah satu perbedaan adalah berkaitan dengan sistematika penyajian dokumen RPJPD, sehingga dokumen RPJPD yang ada saat ini perlu disesuaikan sistematika penyajiannya.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005–2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
I.1. Latar Belakang	I-1
I.2. Landasan Hukum.....	I-5
I.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-8
I.3.1. Hubungan RPJPD Kabupaten Gunungkidul dengan RPJP Nasional.....	I-9
I.3.2. Hubungan RPJPD Kabupaten Gunungkidul dengan RPJPD Provinsi	I-9
I.3.3. Hubungan antara RPJPD dengan RPJMD	I-9
I.3.4. Hubungan antara RPJPD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	I-10
I.4. Maksud Dan Tujuan.....	I-10
I.4.1. Maksud	I-10
I.4.2. Tujuan	I-11
I.5. Sistematika Penulisan	I-11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
II.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
II.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	II-1
II.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	II-11
II.1.3. Wilayah Rawan Bencana	II-18
II.1.4. Demografi.....	II-22
II.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-26
II.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II-26
II.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II-51
II.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-61
II.3. Aspek Pelayanan Umum.....	II-62
II.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	II-63
II.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-94
II.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan	II-139
II.3.4. Fungsi Penunjang Urusan.....	II-150
II.4. Aspek Daya Saing.....	II-159
II.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-159
II.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur	II-162
II.4.3. Iklim Investasi.....	II-165
II.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia	II-166
II.5. Evaluasi Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2010-2015	II-168
II.5.1. Hasil Evaluasi	II-170
II.5.2. Rekomendasi.....	II-174
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	III-1
III.1. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	III-1
III.1.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup	III-1
III.1.2. Demografi.....	III-6
III.1.3. Ekonomi dan Sumberdaya Alam	III-8
III.1.4. Sosial Budaya	III-14
III.1.5. Budaya dan Politik	III-25
III.1.6. Prasarana dan Sarana Daerah	III-29
III.1.7. Pemerintahan.....	III-37
III.1.8. Prediksi Kondisi Umum Daerah	III-40
III.2. Tantangan Dinamika Lingkungan Eksternal	III-45
III.2.1. Peningkatan Kesejahteraan Sosial untuk <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).....	III-46
III.2.2. Pengembangan Kemandirian dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)	III-47

III.2.3.	Pemantapan Pencapaian Visi Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional.....	III-48
III.2.4.	Pemantapan Pencapaian Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Istimewa Yogyakarta.....	III-50
III.3.	Isu Strategis Daerah.....	III-45
III.3.1.	Kemandirian dan Daya Saing Perekonomian untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan	III-53
III.3.2.	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pembangunan Daerah.....	III-53
III.3.3.	Kualitas Sumberdaya Manusia.....	III-54
III.3.4.	Tata Kelola Kepemerintahan Daerah	III-54
III.3.5.	Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	III-55
BAB IV	VISI DAN MISI DAERAH	IV-1
IV.1.	Landasan Filosofis.....	IV-1
IV.2.	Visi.....	IV-3
IV.3.	Misi	IV-4
BAB V	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH	V-1
V.1.	Arah Kebijakan Daerah	V-1
V.1.1.	Arah kebijakan Pembangunan Lima Tahun Pertama (2005 – 2010)	V-12
V.1.2.	Arah kebijakan Pembangunan Lima Tahun Kedua (2010 – 2015)	V-13
V.1.3.	Arah kebijakan Pembangunan Lima Tahun Ketiga (2015 – 2020)	V-14
V.1.4.	Arah kebijakan Pembangunan Lima Tahun Keempat (2021 – 2025)	V-15
V.2.	Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah	V-16
V.2.1.	Pembangunan Perdesaan	V-16
V.2.2.	Pembangunan Perkotaan	V-16
V.2.3.	Pemanfaatan Ruang	V-18
V.2.4.	Pembangunan Wilayah Tertinggal dan Terisolasi.....	V-23
V.2.5.	Pembangunan Hubungan Kerjasama Antar Daerah	V-23
V.3.	Sasaran Pokok Daerah	V-24
V.3.1.	Sasaran Pokok Misi Pertama: Pemerintahan yang Baik dan Bersih.....	V-24
V.3.2.	Sasaran Pokok Misi Pertama: Pemantapan Sistem dan Kelembagaan serta Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia	V-25
V.3.3.	Sasaran Pokok Misi Ketiga: Pemantapan Sistem dan Kelembagaan Perekonomian.....	V-25
V.3.4.	Sasaran Pokok Misi Keempat : Pemantapan Kemampuan Keuangan Daerah.....	V-26
V.3.5.	Sasaran Pokok Misi Kelima: Pemantapan Prasarana Sarana Dasar yang Memadai.....	V-26
V.3.6.	Sasaran Pokok Misi Keenam: Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	V-27
V.4.	Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	V-29
BAB VI	PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas dan Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Gunungkidul	II-3
Tabel 2.2.	Pulau-Pulau di Wilayah Kabupaten Gunungkidul	II-4
Tabel 2.3.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2017 (Jiwa)	II-22
Tabel 2.4.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017	II-25
Tabel 2.5.	Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016.....	II-26
Tabel 2.6.	PDRB Kabupaten Gunungkidul Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)	II-34
Tabel 2.7.	PDRB Kabupaten Gunungkidul Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapanga Usaha Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah).....	II-35
Tabel 2.8	PDRB Kabupaten Gunungkidul Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (%)	II-37
Tabel 2.9.	PDRB Kabupaten Gunungkidul Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (%)	II-38
Tabel 2.10.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Riil Kabupaten Gunungkidul Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017(%)	II-40
Tabel 2.11.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017 (Juta Rp).....	II-42
Tabel 2.12.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017 (Juta Rp).....	II-43
Tabel 2.13.	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2013 - 2017 (%)	II-44
Tabel 2.14.	Distribusi PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2013 - 2017 (%)	II-44
Tabel 2.15.	Rasio Gini Menurut Tipe Daerah di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2016.....	II-45
Tabel 2.16.	Garis Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2017	II-47
Tabel 2.17.	Status kesejahteraan individu per Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015	II-48
Tabel 2.18.	Jumlah Penerima Raskin dan Jenis Kloset per Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016	II-49
Tabel 2.19.	Jumlah Penerima Raskin dan Jenis Kloset per Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016	II-50
Tabel 2.20.	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan WC cemplung Di Kecamatan Saptosari dan Kecamatan Gedangsari Tahun 2016	II-50
Tabel 2.21.	Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2012 - 2016 Kabupaten Gunungkidul	II-51
Tabel 2.22.	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Usia Sekolah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017 (%).....	II-54
Tabel 2.23.	Status Gizi Balita Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014- 2016....	II-61
Tabel 2.24.	Jumlah Grup Kesenian dan Klub Olahraga Tahun 2013 - 2018 ...	II-61
Tabel 2.25.	Aspek Pelayanan Umum Urusan Pendidikan Jenjang SD/MI Kabupaten Gunungkidul 2013-2017	II-64
Tabel 2.26.	Aspek Pelayanan Umum Urusan Pendidikan Jenjang SLTP Kabupaten Gunungkidul 2013-2017	II-64
Tabel 2.27.	Aspek Pelayanan Umum Urusan Pendidikan Jenjang SLTA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017	II-65
Tabel 2.28.	Capaian SPM Bidang Pendidikan Dasar	II-66
Tabel 2.29.	Jenis dan Jumlah Fasilitas Penunjang Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 - 2017.....	II-72
Tabel 2.30.	Jumlah Tenaga Medis yang bekerja di 30 Puskesmas se-Kabupaten Gunungkidul 2013-2017	II-72
Tabel 2.31.	Jumlah Tenaga Kesehatan di RSUD Wonosari Kabupaten Gunungkidul 2017	II-72
Tabel 2.32.	Indikator Kinerja Bidang Kesehatan Kabupaten Gunungkidul	

Tahun 2013-2017.....	II-73
Tabel 2.33. Capaian SPM Bidang Kesehatan.....	II-74
Tabel 2.34. Panjang Jalan menurut Statusnya di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017 (Km).....	II-77
Tabel 2.35. Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017 (Km).....	II-77
Tabel 2.36. Jenis Perkerasan Jalan Kabupaten di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2016 (Km).....	II-77
Tabel 2.37. Kondisi Jembatan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013- 2017(Buah).....	II-78
Tabel 2.38. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum	II-83
Tabel 2.39. Indikator Perumahan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013- 2017	II-87
Tabel 2.40. SPM Bidang Perumahan Rakyat	II-87
Tabel 2.41. Jumlah Aparat, Sarana Keamanan dan Jumlah Pelanggaran K3 Kabupaten Gunungkidul 2013-2017	II-88
Tabel 2.42. SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	II-89
Tabel 2.43. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 – 2017.....	II-91
Tabel 2.44. Capaian SPM Bidang Sosial 2017	II-93
Tabel 2.45. Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017	II-94
Tabel 2.46. Capaian SPM Bidang Ketenagakerjaan	II-95
Tabel 2.47. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017	II-97
Tabel 2.48. Jumlah Pejabat Struktural Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017	II-97
Tabel 2.49. Jumlah Anggota DPRD Gunungkidul Menurut Komisi dan Jenis Kelamin Tahun 2013-2017	II-98
Tabel 2.50. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2017.....	II-99
Tabel 2.51. SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	II-100
Tabel 2.52. SPM Bidang Ketahanan Pangan	II-104
Tabel 2.53. Jumlah Tanah Yang Bersertifikat di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2016.....	II-105
Tabel 2.54. Indeks Pencemaran Air Sungai Yang Melewati Kota Wonosari Tahun 2016.....	II-107
Tabel 2.55. Capaian SPM bidang Lingkungan Hidup	II-109
Tabel 2.56. Jumlah Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013- 2017 ..	II-111
Tabel 2.57. Perkembangan Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017	II-111
Tabel 2.58. Data Desa menurut Indeks Desa Membangun Tahun 2016.....	II-113
Tabel 2.59. Indikator Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017	II-114
Tabel 2.60. Capaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	II-115
Tabel 2.61. Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017	II-116
Tabel 2.62. Capaian SPM Bidang Perhubungan	II-117
Tabel 2.63. Capaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika	II-124
Tabel 2.64. Data Koperasi yang Melaksanakan RAT Tahun 2013- 2017	II-125
Tabel 2.65. Perkembangan Investasi di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2016.....	II-126
Tabel 2.66. Jumlah Izin yang Dilayani Oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2016 ..	II-126
Tabel 2.67. Capaian SPM Bidang Penanaman Modal	II-127
Tabel 2.68. Jumlah Organisasi Kepemudaan, Klub dan Organisasi Olahraga dan Jumlah Gedung Olahraga di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017	II-134
Tabel 2.69. Indikator Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-	

2017	II-136
Tabel 2.70. Capaian SPM Bidang Kesenian	II-137
Tabel 2.71. Jumlah Koleksi, Pustakawan, Pengunjung, Anggota dan Sarana Prasarana Perpustakaan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013- 2017	II-137
Tabel 2.72. Volume, Jumlah SDM dan Sarana Kearsipan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017	II-138
Tabel 2.73. Perkembangan Produksi Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017	II-140
Tabel 2.74. Jumlah Wisatawan Yang Berkunjung ke Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017	II-142
Tabel 2.75. Pendapatan Sektor Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017	II-142
Tabel 2.76. Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Padi dan Palawija Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017	II-143
Tabel 2.77. Perkembangan Indikator Peternakan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017	II-144
Tabel 2.78. Luas Areal, Luas Panen, Jumlah Produksi, Rata-rata Produksi dan Jumlah Petani Komoditas Perkebunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017	II-145
Tabel 2.79. Luas dan Produksi Komoditas Kehutanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2016	II-147
Tabel 2.80. Sarana Perdagangan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013- 2017	II-148
Tabel 2.81. Data Industri Kecil Menengah di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2017	II-149
Tabel 2.82. Jumlah Pemberangkatan Transmigran Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017	II-150
Tabel 2.83. Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2013 - 2017 Kabupaten Gunungkidul	II-152
Tabel 2.84. Data Realisasi Pendapatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 sampai dengan 2017	II-153
Tabel 2.85. Data Realisasi Belanja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015- 2017	II-153
Tabel 2.86. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 s.d. 2016	II-155
Tabel 2.87. Komposisi PNS Kabupaten Gunungkidul Menurut Golongan Tahun 2013-2017	II-156
Tabel 2.88. Jumlah Pejabat Struktural Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017	II-156
Tabel 2.89. Kondisi Jalan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012- 2016	II-162
Tabel 2.90. Jumlah Tenaga Listrik yang Diproduksi, Terjual dan Jumlah Pelanggan Listrik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2017	II-162
Tabel 2.91. Kapasitas Produksi, Kapasitas Air Yang Termanfaatkan, Jumlah Pelanggan Dan Sumber Mata Air Yang Dikelola Oleh PDAM Tirta Handayani Tahun 2012-2016	II-163
Tabel 2.91. Data Pengawasan Teknis Ruang Tahun 2016	II-164
Tabel 2.92. Data Kinerja Penataan Ruang Tahun 2016	II-165
Tabel 2.93. Jumlah Tindak Kriminal Kabupaten Gunungkidul 2013- 2017	II-165
Tabel 2.94. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017	II-167
Tabel 2.95. Komposisi Penduduk dan Angka Beban Tanggungan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017	II-167
Tabel 2.96. Skala Pengukuran Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2012- 2015	II-170
Tabel 2.97. Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2010-2015	II-170
Tabel 5.1 Variabel Penilaian Capaian Visi dan Misi Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Periode 2005-2025	V-28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I-8
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Kabupaten Gunungkidul.....	II-2
Gambar 2.2.	Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Gunungkidul	II-21
Gambar 2.3.	Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2016 (Jiwa).....	II-23
Gambar 2.4.	Persentase Komposisi Penduduk Menurut Umur Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017	II-24
Gambar 2.5.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul (%) Tahun 2012-2017.....	II-39
Gambar 2.6.	PDRB Per Kapita Kabupaten Gunungkidul (Juta Rupiah), Tahun 2013- 2017.....	II-41
Gambar 2.7.	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2012-2016.....	II-43
Gambar 2.8.	Angka Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2017 (%)	II-47
Gambar 2.9.	Angka Melek Huruf Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2016	II-52
Gambar 2.10.	Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2017.....	II-53
Gambar 2.11.	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 – 2016 (%)	II-55
Gambar 2.12.	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 – 2016 (%).....	II-56
Gambar 2.13.	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 – 2016 (%).....	II-57
Gambar 2.14.	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 – 2017.....	II-58
Gambar 2.15.	Angka Kematian Ibu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 – 2016.....	II-59
Gambar 2.16.	Usia Harapan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015.....	II-60
Gambar 2.18.	Jumlah Desa Rawan Pangan dan Gizi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017	II-104
Gambar 2.19.	Jumlah PNS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017	II-155
Gambar 2.20.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dalam PDRB menurut penggunaan atas dasar harga berlaku Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 – 2017 (Juta Rp).....	II-160
Gambar 2.21.	Pengeluaran konsumsi Makanan dan bukan makanan dalam PDRB menurut penggunaan atas dasar harga berlaku Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010– 2014 (Juta Rp)	II-161
Gambar 2.22.	Jumlah Demonstrasi / Unjuk rasa Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 - 2017.....	II-166
Gambar 4.1.	Keterkaitan Visi Daerah Misi Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul 2005 – 2025.....	IV-5

BAB I PENDAHULUAN

I.1. LATARBELAKANG

Pembangunan Daerah adalah bagian dari Pembangunan Nasional. Hakikat pembangunan Daerah adalah mewujudkan tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat tujuan pembangunan nasional ditegaskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

"... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...".

Pencapaian tujuan bernegara di atas mengharuskan adanya peran serta aktif semua komponen bangsa di semua sektor dan di semua Daerah secara berkesinambungan. Adanya keterbatasan sumberdaya, ketidakpastian, serta kepentingan yang berbeda-beda, maka pencapaian tujuan di atas harus diwujudkan melalui suatu sistem perencanaan pembangunan nasional. Pada masa yang lalu, landasan operasional untuk mencapai tujuan bernegara itu adalah Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Namun amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu dengan tidak dibuatnya lagi GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan. Karena itu diperlukan landasan baru bagi pembangunan Nasional dan Daerah untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Untuk tujuan tersebut, arahan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul wajib menyusun semua dokumen rencana pembangunan tersebut. Bagi Kabupaten Gunungkidul, landasan jangka panjang perencanaan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunungkidul. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yang dipedomani dalam penyusunan rencana pembangunan daerah 5 (lima) tahun serta dijabarkan lebih lanjut dalam rencana pembangunan tahunan Daerah, yang terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan bernegara di daerah.

Dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2005 - 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan periode 20 (dua puluh) tahun itu, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menyelenggarakan seluruh tahapan proses penyusunannya secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

Produk hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunan substansi pokok RPJPD Kabupaten Gunungkidul adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. Hasil penyusunan tersebut dirumuskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005–2025.

Hasil pelaksanaan substansi RPJPD yang dipedomani di RPJMD Kabupaten Gunungkidul dalam tahap 1 (2005 – 2010) dan tahap 2 (2010 – 2015) telah menghasilkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat dan telah meletakkan landasan yang kuat bagi Kabupaten Gunungkidul untuk melanjutkan pembangunan pada tahun-tahun yang akan datang. Tahapan pembangunan yang sedang berlangsung yaitu tahap 3 (Tahun 2016 – 2021) dan yang akan berlangsung pada tahap 4 (2021 – 2025) juga akan menghadapi banyak kendala, peluang dan tantangan baru akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia yang mengakibatkan kegiatan pembangunan daerah akan semakin terkait dengan perkembangan dunia internasional.

Seiring dengan perubahan dinamis yang terjadi dan berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi proses perumusan dan pencapaian substansi RPJPD yang telah dirumuskan yaitu dengan ditetapkannya Gunungkidul sebagai bagian *UNESCO Global Geopark Gunung Sewu*, perubahan sosial masyarakat, dan perubahan tata ruang berkaitan dibukanya jalan baru Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), dibukanya akses jalan baru jalur tengah yang menghubungkan Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Gunungkidul, dan adanya Tujuan Pembangunan Yang Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), adanya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3045 K/40/MEM/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Kars (KBAK) Gunung Sewu, dan *Unesco Global Geopark Gunung Sewu*. Selain itu, pemerintah telah mengeluarkan beberapa ketentuan yang mengatur bahwa pada setiap dokumen perencanaan harus dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka dipandang perlu melakukan perubahan RPJPD Kabupaten Gunungkidul.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah telah mengamanatkan adanya Perubahan RPJPD. Dengan ketentuan regulasi tersebut maka, proses perumusan dan penyajian RPJPD Kabupaten Gunungkidul yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 itu sudah tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri tersebut , serta tidak sesuai dengan perkembangan, dinamika, dan tata ruang yang ada.

Di sisi yang lain masih banyak pencapaian sasaran pembangunan daerah yang masih belum optimal. Menurut data SUSENAS tahun 2005, jumlah penduduk miskin tahun 2006, 2007 dan 2008 berturut-turut adalah 194.400 jiwa (28,45%), 192.100 jiwa (28,90%) dan 173.520 jiwa (25,96%). Sementara di tahun 2015, jumlah penduduk miskin telah menurun menjadi 21,73% lalu turun lagi menjadi 19,34% di tahun 2016 dan di tahun 2017, persentase penduduk miskin Kabupaten Gunungkidul masih sebesar 18,65%. Meskipun persentase penduduk miskin mengalami penurunan, namun demikian secara absolut jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul masih relatif besar. Di tahun 2015 dan 2016 jumlah penduduk miskin ada sebanyak 155.000 jiwa dan 136.153 jiwa. Sedangkan di tahun 2017 dengan garis kemiskinan yang ditetapkan sebesar Rp. 277.261,00, jumlah penduduk miskin ada sebesar 135.700 orang.

Dari aspek pemerataan pembangunan, tingkat ketimpangan pendapatan Kabupaten Gunungkidul relatif rendah. Rasio gini Kabupaten Gunungkidul tahun 2007 adalah sebesar 0,2143. Tingkat ketimpangan pendapatan tersebut relatif rendah disebabkan kehidupan penduduk yang lebih homogen dengan mata pencaharian mayoritas pertanian atau sektor tradisional. Namun demikian seiring dengan semakin beragamnya kegiatan ekonomi di perdesaan maka kebijakan pembangunan harus dapat mengantisipasi kecenderungan peningkatan ketimpangan pendapatan tersebut. Walaupun masih dalam kategori moderat, namun tingkat ketimpangan pendapatan kota dan desa di tahun 2015 sudah berada pada angka 0,3190 dan di tahun 2016 meningkat sedikit menjadi 0,3337.

Dari aspek pembangunan manusia, taraf pembangunan manusia di Kabupaten Gunungkidul sudah relatif makin baik. Di

tahun 2010 dan tahun 2011, nilai Indeks Pembangunan Manusia yang dihitung dengan metode yang baru, di Kabupaten Gunungkidul adalah 64,2 dan 64,83. Sedangkan di tahun 2016 dan 2017, nilai Indeks Pembangunan Manusia telah mencapai 67,82 dan 68,73. Namun demikian kinerja pembangunan manusia masih harus dioptimalkan di masa yang akan datang.

Berdasarkan situasi dan kondisi tersebut, perlu terus diupayakan akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan upaya untuk mengurangi ketertinggalan daerah. Dalam kurun waktu mendatang, sangat penting dan mendesak untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah, baik di bidang pengelolaan sumberdaya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaannya sehingga Kabupaten Gunungkidul dapat mengejar ketertinggalan. Adapun risiko apabila Perubahan RPJPD tidak bisa dilakukan pada periode saat ini yaitu: Pertama, evaluasi tahapan RPJPD tidak bisa terukur karena Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005–2025 belum tersedia indikator sasaran pokok pembangunan jangka panjang sebagai alat evaluasi. Kedua, Jika perubahan RPJPD tidak dilakukan maka pembangunan kurang terarah ke depannya sampai dengan tahun 2025 karena kurang mengikuti dinamika perkembangan dalam perubahan lingkungan strategis yang ada seiring dengan banyaknya perkembangan situasi dan kondisi seperti adanya *Sustainable Development Goals (SDGs)* sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dengan demikian pencapaian substansi RPJPD Kabupaten Gunungkidul perubahan ini harus semakin ditingkatkan. Dalam tahap pembangunan yang tersisa, peningkatan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah serta penajaman, penyelarasan, dan penyesuaian terhadap kondisi saat ini dan kebutuhan pada masa yang akan datang harus semakin dioptimalkan.

I.2. LANDASANHUKUM

Landasan Idiil RPJPD adalah Pancasila dan landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

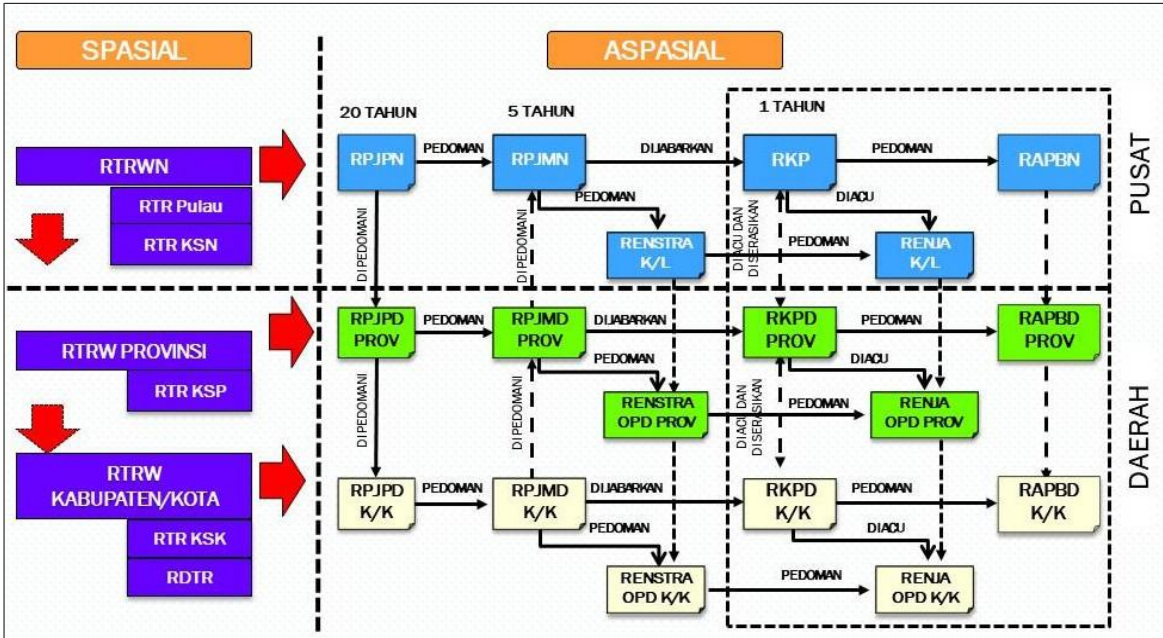
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 472);
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 14. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 11 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);

I.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJPD DENGAN DOKUMENPERENCANAANLAINNYA

Sesuai amanat perundang-undangan, Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Secara grafis, hubungan antara RPJPD dengan dokumen rencana pembangunan lainnya disajikan dalam Gambar 1.1 di bawah.

Gambar 1.1. Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber: Kementrian Dalam Negeri, 2017

I.3.1. Hubungan RPJPD Kabupaten Gunungkidul dengan RPJP Nasional

Sebagaimana telah disebutkan di bagian sebelumnya bahwa Pembangunan Daerah adalah bagian dari Pembangunan Nasional. Karena itu, RPJPD ini merupakan dokumen rencana pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara teknis, RPJPN merupakan salah satu pedoman dasar dalam penyusunan RPJPD ini.

I.3.2. Hubungan RPJPD KabupatenGunungkidul dengan RPJPD Provinsi

Kabupaten Gunungkidul merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, RPJPD ini disusun dengan mempedomani RPJP Nasional dan RPJP Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini sedemikian untuk menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintah daerah dengan fungsi pemerintah pusat dan provinsi. Dengan demikian prioritas pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul dikontekstualisasi dalam kerangka prioritas nasional dan prioritas provinsi.

I.3.3. Hubungan antara RPJPD dengan RPJMD

Selain untuk menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan, perencanaan pembangunan juga alat untuk integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar waktu. Karena itu, dokumen RPJPD ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Gunungkidul. Visi, misi dan arah kebijakan pembangunan serta sasaran pokok jangka panjang daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. Selanjutnya, RPJMD tersebut akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan Daerah.

Keterkaitan antara RPJPD dan RPJMD ini juga diperlukan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan. Pada tataran operasionalnya, keterkaitan tersebut diperlukan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah, menjamin terciptanya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Gunungkidul.

I.3.4. Hubungan antara RPJPD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Aspek lain yang juga harus diperhatikan adalah integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar ruang, baik yang diarahkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Istimewa

Yogyakarta pada lingkup potensi wilayah Kabupaten Gunungkidul. Karena itu, RPJPD ini disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030. Selanjutnya hubungan antara RPJPD dengan RTRW Nasional bahwa RPJPD mengacu dan mengisi pada RTRW Nasional. RPJPD juga mengacu dan mengisi RTRW Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik RTRW Nasional dan RTRW Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pedoman bagi penyusunan RPJPD terutama dalam substansi hal yang bersifat keruangan.

I.4. MAKSUD DAN TUJUAN

I.4.1. Maksud

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) disusun dengan maksud sebagai alat integrasi, sinkronisasi, dan sinergi bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah dalam periode 20 (dua puluh) tahun. Dokumen ini juga memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama.

Dengan demikian, seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan lebih bersifat sinergis, koordinatif, dan melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak yang tercermin pada program-program pembangunan di daerah selama periode 20 (dua puluh) tahun.

Selanjutnya dalam Perubahan RPJPD ini diharapkan dapat lebih mempertajam arah pembangunan dalam sisa tahapan pembangunan jangka panjang Kabupaten Gunungkidul.

I.4.2. Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) disusun dengan tujuan untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Seluruh upaya dilakukan oleh masing-masing pelaku

pembangunan yang bersifat sinergi, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Secara rinci tujuan penyusunan RPJPD adalah:

- a. sebagai pedoman pembangunan jangka panjang daerah bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional;
- b. menyajikan gambaran kondisi umum daerah sekarang dalam konsistensi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai selama 20 (dua puluh) tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misidaerah;
- c. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah;
- d. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah maupun antara pusat dengan daerah;
- e. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- f. menjamin terciptanya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- g. mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

I.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian RPJPD ini mengikuti arahan baru sistematika yang diarahkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Sistematika RPJPD ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan yang menjelaskan tentang:

I.1. Latar Belakang

I.2. Dasar Hukum Penyusunan

I.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya

I.4. Maksud dan Tujuan

I.5. Sistematika Penulisan

Bab II berisi penjelasan tentang Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Gunungkidul, yang meliputi:

II.1. Aspek Geografi dan Demografi

II.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

II.3. Aspek Pelayanan Umum

- II.4. Aspek Daya Saing Daerah
- Bab III berisi penjelasan tentang Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah, yang disajikan dalam subbagian:
- III.1. Permasalahan Pembangunan Daerah
- III.2. Isu Strategis
- Bab IV berisi penjelasan dan uraian tentang Visi dan Misi Daerah, yang disajikan dalam sub bagian:
- IV.1. Visi
- IV.2. Misi
- Bab V berisi penjelasan dan uraian tentang Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah yang disajikan dalam subbagian:
- V.1. Arah Kebijakan Daerah
- V.2. Sasaran pokok
- Bab VI berjudul Penutup, yang memuat tentang kaidah pelaksanaan dan bagian penutup.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

II.1. Aspek Geografi dan Demografi

II.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Ibu Kota Wonosari yang terletak 39 km sebelah tenggara Kota Yogyakarta. Secara yuridis, status Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu daerah kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan Undang-Undang No 15 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 pada saat Gunungkidul dipimpin oleh KRT Labaningrat.

Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 km² atau sekitar 46,63% dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas wilayah dirinci sebagai berikut:

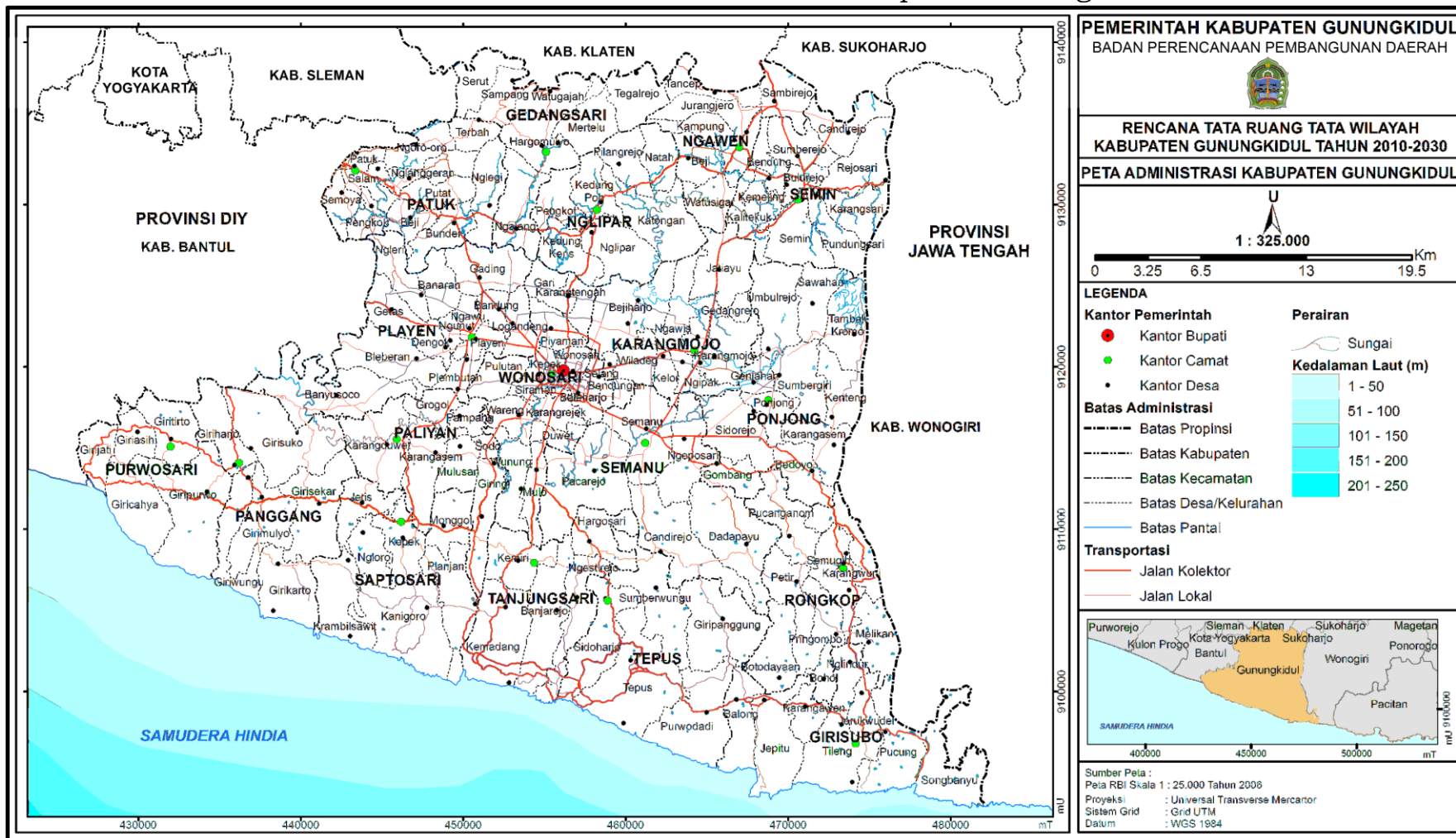
- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia

Gambaran wilayah Kabupaten Gunungkidul secara administratif dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut:



Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Gunungkidul 2005-2025

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Gunungkidul



Sumber : RTRW Kabupaten Gunungkidul 2010-2030

Secara administratif Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi 18 Kecamatan yang meliputi 144 desa dan 1.431 padukuhan. Luas dan pembagian wilayah administratif Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Luas Dan Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Gunungkidul

No	KECAMATAN	LUAS (km ²)	Persentase (%)	JUMLAH DESA	JUMLAH PADUKUHAN	JUMLAH RW
1	Panggang	99,8	6,72	6	44	44
2	Purwosari	71,76	4,83	5	32	32
3	Paliyan	58,07	3,91	7	50	50
4	Saptosari	87,83	5,91	7	60	60
5	Tepus	104,91	7,06	5	83	84
6	Tanjungsari	71,63	4,82	5	72	71
7	Rongkop	83,46	5,62	8	100	100
8	Girisubo	94,57	6,37	8	82	82
9	Semanu	108,39	7,30	5	106	136
10	Ponjong	104,49	7,03	11	119	120
11	Karangmojo	80,12	5,39	9	104	104
12	Wonosari	75,51	5,08	14	103	151
13	Playen	105,26	7,09	13	101	101
14	Patuk	72,04	4,85	11	72	82
15	Gedangsari	68,14	4,59	7	67	67
16	Nglipar	73,87	4,97	7	53	53
17	Ngawen	46,59	3,14	6	67	67
18	Semin	78,92	5,31	10	116	120
Jumlah		1.485,3	100,00	144	1.431	1.525

Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul, (Gunungkidul Dalam Angka 2017)

B. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Gunungkidul berada pada 7°46' LS-8°09' LS dan 110°21' BT-110°50' BT, berada di bagian tenggara dari Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Gunungkidul tidak memiliki kawasan pedalaman maupun kawasan terpencil. Menurut kondisi geografis, desa-desa di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 18 desa pesisir, 56 desa terletak di lereng/punggung bukit dan 70 desa terletak di dataran.

Ditinjau dari posisi geostrategis, Kabupaten Gunungkidul berbatasan langsung dengan Samudera Hindia yang kaya akan sumberdaya laut dan menjadikan Kabupaten Gunungkidul memiliki wilayah berupa kepulauan. Kabupaten Gunungkidul memiliki 28 pulau tersebar pada lima kecamatan, yaitu Purwosari, Panggang, Tanjungsari, Tepus, dan Girisubo. Daftar pulau di wilayah Kabupaten Gunungkidul tersebut disajikan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2.2.
Pulau-Pulau di Wilayah Kabupaten Gunungkidul

No	Kecamatan	Desa	Nama Pulau
1	Purwosari	Giricahyo	Gunungsemar
2	Panggang	Giriwungu	Payung/ Ngunggah
3	Tanjungsari	Kemadang	Ngrawe Jumpino
		Banjarejo	Drini
		Ngestirejo	Watupayung siratan
4	Tepus	Sidoharjo	Watulawang Watukubengan
		Purwodadi	Timang Ngondo Watupayung siung Watupanjang Watulambor Watunganten Lor Watuganten Kidul Watubebek
5	Girisubo	Balong	Watutogog Watumanukan Watusemar Watulumbung Karangmomang
		Jepitu	Jungwok Watutopi Ngusalan Glati/Kalong
		Tileng	Tahu Amben
		Pucung	Gununggandul
		Songbanyu	Godeg Watucetingan/Baron Layar Krokoh

Sumber : RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030

C. Topografi

Berdasarkan kondisi topografi Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 3 (tiga) zona pengembangan, yaitu:

- a. Zona Utara disebut wilayah Batur Agung dengan ketinggian 200m - 700m di atas permukaan laut. Keadaannya berbukit-bukit terdapat sumber- sumber air tanah kedalaman 6m – 12m dari permukaan tanah. Jenis tanah didominasi latosol dengan batuan induk vulkanik dan sedimen taufan. Wilayah ini meliputi Kecamatan Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, dan Ponjong bagian utara.
- b. Zona Tengah disebut wilayah pengembangan Ledok Wonosari, dengan ketinggian 150m – 200m di atas permukaan laut. Jenis tanah didominasi oleh asosiasi mediteran merah dan grumosol hitam dengan bahan induk batu kapur. Sehingga meskipun musim kemarau panjang, partikel- partikel air masih mampu bertahan. Terdapat sungai di atas tanah, tetapi di musim kemarau kering. Kedalaman air tanah berkisar antara 60m – 120m di bawah permukaan tanah. Wilayah ini meliputi Kecamatan Playen, Wonosari, Karangmojo, Ponjong bagian tengah, dan Semanu bagian utara.
- c. Zona Selatan disebut wilayah pengembangan Gunung Seribu (*Duizon gebergton* atau *Zuider gebergton*), dengan ketinggian 0m – 300m di atas permukaan laut. Batuan dasar pembentuknya adalah batu kapur dengan ciri khas bukit-bukit kerucut (*Conical limestone*) dan merupakan kawasan karst. Pada wilayah ini banyak dijumpai sungai bawah tanah. Zone Selatan ini meliputi kecamatan Saptosari, Paliyan, Girisubo, Tanjungsari, Tepus, Rongkop, Purwosari, Panggang, Ponjong bagian selatan, dan Semanu bagian selatan.

Lahan di Kabupaten Gunungkidul mempunyai tingkat kemiringan yang bervariasi yang dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu : (1) datar (0-2%) : 26.768 Ha; (2) bergelombang (3-15%) : 41.435 Ha; (3) curam (16-40%) : 59.452 Ha

dan (4) sangat Curam (>40%) : 20.881 Ha

Wilayah Kabupaten Gunungkidul terletak pada ketinggian yang bervariasi antara 0–800 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kabupaten Gunungkidul yaitu 1.341,71 km² atau 90,33% berada pada ketinggian 100–500 m di atas permukaan laut (dpl). Sedangkan sisanya 7,75% terletak pada ketinggian kurang dari 100 m dpl, dan 1,92% terletak pada ketinggian lebih dari 500-1.000 m dpl.

D. Geologi

Jenis tanah di wilayah Kabupaten Gunungkidul cukup beragam, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Latosol, dengan batuan induk kompleks sedimen tufan dan batuan vulkanik, yang terletak pada wilayah bergunung-gunung, tersebar di wilayah Kecamatan Patuk bagian Utara dan Selatan, Gedangsari, Ngawen, Semin bagian Timur, dan Ponjong bagian Utara
- b. Kompleks latosol dan mediteran merah, dengan batuan induk batugamping, bentuk wilayah bergelombang sampai berbukit, terdapat di wilayah Kecamatan Panggang, Purwosari, Saptosari, Tepus, Tanjungsari, Semanu bagian Selatan dan Timur, Rongkop, Girisubo, serta Ponjong bagian Selatan.
- c. Asosiasi mediteran merah dan renzina, dengan batuan induk batu gamping, bentuk wilayah berombak sampai bergelombang, terdapat di wilayah Kecamatan Ngawen bagian Selatan, Nglipar, Karangmojo bagian Barat dan Utara, Semanu bagian Barat, Wonosari bagian Timur, Utara dan Selatan, Playen bagian Barat dan Utara, serta Paliyan bagian Selatan.
- d. Grumosol hitam, dengan batuan induk batu gamping, bentuk wilayah datar sampai bergelombang, terdapat di wilayah Kecamatan Playen bagian Selatan, Wonosari bagian Barat, Paliyan bagian Utara, dan Ponjong bagian Selatan.
- e. Asosiasi latosol merah dan litosol, dengan bahan induk tufan dan batuan vulkanik intermediet, bentuk wilayah bergelombang sampai berbukit, terdapat di wilayah Kecamatan Semin bagian Utara, Patuk bagian Selatan, dan Playen bagian Barat.

Struktur tanah di Kabupaten Gunungkidul dibedakan atas dasar komposisi komponen pasir, debu, dan lempung, sehingga secara garis besar dipilahkan menjadi tekstur kasar, sedang, dan halus.

E. Hidrologi

Di Kabupaten Gunungkidul terdapat dua daerah aliran sungai (DAS) permukaan yaitu DAS Opak–Oyo dan DAS Dengkeng. Masing-masing DAS itu terdiri dari beberapa Sub DAS yang berfungsi untuk mengairi areal pertanian, juga terdapat DAS bawah permukaan yaitu DAS Bribin.

Air permukaan (sungai dan mata air) banyak dijumpai di Gunungkidul wilayah utara dan tengah. Di wilayah tengah beberapa tempat mempunyai air tanah yang cukup dangkal dan dimanfaatkan untuk sumur ladang. Wilayah selatan Gunungkidul merupakan kawasan *karst* yang jarang ditemukan air permukaan. Di wilayah ini dijumpai sungai bawah tanah seperti Bribin, Ngobaran, dan Seropan serta ditemukan juga telaga musiman yang multiguna bagi penduduk sekitarnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3045/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam *Karst* Gunungsewu sebagian wilayah Kabupaten Gunungkidul merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan bentang alam *karst* berupa kawasan perbukitan batu gamping yang terletak di Kecamatan Wonosari, Ponjong, Panggang, Semanu, Purwosari, Paliyan, Saptosari, Rongkop, Tanjungsari, Tepus, dan Girisubo. Kawasan tersebut perlu dikelola sesuai dengan daya dukung lingkungannya dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi kawasan *karst* yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Jumlah sungai di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 14 buah, sebagian besar terdapat di wilayah utara. Sungai terbesar di Kabupaten Gunungkidul adalah Sungai Oyo dengan lokasi mata air di Kabupaten Wonogiri (Propinsi Jawa Tengah) dan bermuara di Samudera Hindia.

Jumlah mata air di wilayah Kabupaten Gunungkidul ada 215 buah, sedangkan jumlah telaga ada 252 buah. Di wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian tengah dan sebagian kecil wilayah selatan terdapat sumur bor (*deep well*) sebanyak

77 buah dengan fungsi untuk irigasi pertanian dan untuk air minum

penduduk setempat. Untuk kepentingan irigasi, satu sumur bor mempunyai kemampuan oncoran antara 15–50 ha. Kemampuan masing-masing sumur tergantung pada debit airnya.

Beberapa sungai bawah tanah dimanfaatkan airnya untuk memenuhi kebutuhan air baku/air bersih bagi rumah tangga antara lain, di Bribin, Ngobaran, Seropan, dan Baron. Air sungai bawah tanah juga dirintis untuk kepentingan irigasi pertanian seperti Seropan untuk wilayah Kecamatan Semanu.

Lingkungan Hidup di Kabupaten Gunungkidul dibedakan menjadi 4 kategori satuan ekosistem yaitu:

- a. Satuan Ekosistem Perbukitan Baturagung
- b. Satuan Ekosistem Dataran Wonosari
- c. Satuan Ekosistem Perbukitan Karst Gunungsewu
- d. Satuan Ekosistem Wilayah Kepesisiran.

Gambaran singkat untuk satuan ekosistem Baturagung, Dataran Wonosari dan Perbukitan Karst Gunungsewu sebagaimana diuraikan dalam pembagian tiga daerah pengembangan. Untuk wilayah pesisir di Kabupaten Gunungkidul, secara umum dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tipologi pesisir primer, yaitu:

- a. Pesisir erosi lahan-lahan daratan (*land erosion coast*) terbentuk akibat bekerjanya proses erosi dan solusional yang intensif pada topografi karst akibat air hujan dan aliran permukaan, yang menyebabkan sebagian permukaan lahan terkikis membentuk alur-alur atau lembah-lembah sempit dan igir-igir sisa yang menjorok atau membentuk pola menjari ke arah laut. Tipologi ini hampir dijumpai pada seluruh wilayah pesisir di Kabupaten Gunungkidul, yang secara khusus tampak di wilayah pesisir Ngerenehan, Baron, Kukup, Sepanjang, Drini, Krakal, dan Sundak.
- b. Pesisir akibat aktivitas gunungapi purba (*volcanic coast*), yang ditandai oleh adanya bantukan-bentukan morfologi sisa (*residual*) yang tersusun atas batuan beku vulkan tua berumur Oligosen, yang berada pada tebing dan pelataran pantainya. Tipologi ini dijumpai di pesisir Siung dan Wediombo.

- c. Pesisir akibat struktural (*structurally shape coast*), merupakan pesisir yang ditandai oleh adanya tebing-tebing *cliff* yang curam, pola garis pantai lurus, dengan gua-gua abrasi (*sea cave*) yang langsung berbatasan dengan Samudera Hindia. Tipologi ini meliputi pesisir Ngobaran, Ngungap, dan Sadeng.

Selanjutnya wilayah pesisir Kabupaten Gunungkidul dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) zona akuifer dan potensi airtanahnya, yaitu: akuifer produksi sedang dengan persebaran lokal, akuifer produksi rendah dengan persebaran lokal, dan non akuifer atau daerah langka airtanah.

Potensi sumberdaya hayati yang ada di Ekosistem Wilayah Kepesisiran meliputi keanekaragaman hayati alami, potensi hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, maupun kelautan. Sementara itu, sumberdaya mineral yang umum terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Gunungkidul terbatas pada Bahan Galian Golongan C, yaitu: batugamping, lempung, dan pasir marin. Mineral batugamping menempati satuan perbukitan karst yang merupakan batugamping terumbu, dan berlanjut menjadi pelataran pantai (*shore platform*) pada dasar pantai dekat (*near shore*).

Kawasan pesisir di Kabupaten Gunungkidul terletak di:

1. Desa Girijati, Giricahyo dan Giripurwo, Kecamatan Purwosari
2. Desa Giriwungu dan Girikarto, Kecamatan Panggang
3. Desa Krambilsawit, Kanigoro dan Planjan, Kecamatan Saptosari
4. Desa Kemadang dan Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari
5. Desa Sidoharjo, Tepus dan Purwodadi, Kecamatan Tepus
6. Desa Balong, Jepitu, Tileng, Pucung dan Songbanyu, Kecamatan Girisubo

F. Klimatologi

Jumlah rata-rata bulan basah di Kabupaten Gunungkidul tiap tahunnya berkisar 4-5 bulan, sedangkan bulan kering berkisar antara 7-8 bulan. Musim hujan dimulai pada bulan Oktober–Nopember dan berakhir pada bulan Maret–April setiap tahunnya. Puncak curah hujan terjadi pada bulan Desember – Pebruari dengan wilayah bagian utara mengalami curah hujan lebih tinggi dibandingkan wilayah tengah dan selatan.

Suhu udara Kabupaten Gunungkidul untuk suhu rata-rata harian 27,7° C, suhu minimum 23,2°C dan suhu maksimum 32,4° C. Kelembaban nisbi di Kabupaten Gunungkidul berkisar antara 80% – 85%. Kelembaban nisbi ini bagi wilayah Kabupaten Gunungkidul tidak terlalu dipengaruhi oleh tinggi tempat, tetapi lebih dipengaruhi oleh musim. Kelembaban tertinggi terjadi pada bulan Januari– Maret, sedangkan terendah pada bulan September.

G. Penggunaan Lahan

Luas Hutan rakyat tahun 2016 adalah 44.110,87 Ha (29,67% dari luas total Kabupaten Gunungkidul), meningkat dibandingkan tahun 2015 seluas 43.726,13 Ha, dan luas kawasan Hutan Negara 13.221,5 ha (8,9% luas total Kabupaten Gunungkidul). Sedangkan luas lahan potensial kritis di tahun 2016 yang perlu ditangani seluas 28.928 ha. Secara kuantitatif pada tahun 2015 di Kabupaten Gunungkidul terdapat lahan kritis seluas 11.235 Ha dan telah berhasil diturunkan dengan program-program penghijauan yang dilakukan di Kabupaten Gunungkidul hingga mencapai luas 6.570 Ha. Lahan kritis di Kabupaten Gunungkidul berada di kawasan Pegunungan Batur Agung maupun Pegunungan seribu. Lahan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan beririgasi seluas kurang lebih 7.865 Ha meliputi:

- a. Sawah beririgasi teknis berada di Kecamatan Ponjong dan Kecamatan Karangmojo.
- b. Sawah beririgasi non teknis (setengah teknis, sederhana dan/atau air permukaan tadah hujan) meliputi :
 1. Kecamatan Ponjong;
 2. Kecamatan Karangmojo;
 3. Kecamatan Semin;
 4. Kecamatan Ngawen;
 5. Kecamatan Gedangsari;
 6. Kecamatan Nglipar;
 7. Kecamatan Patuk;
 8. Kecamatan Purwosari;
 9. Kecamatan Semanu;
 10. Kecamatan Panggang;

11. Kecamatan Paliyan;
12. Kecamatan Wonosari; dan
13. Kecamatan Playen.

Lahan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan tidak beririgasi seluas kurang lebih 36.065 Ha terletak pada lahan kering di semua kecamatan.

II.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030, potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Gunungkidul meliputi beberapa kawasan antara lain :

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi
Rencana penetapan kawasan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 12.810,100 Ha yang berada di 10 kecamatan.
- b. Kawasan hutan rakyat;
Kawasan hutan rakyat meliputi 18 kecamatan seluas kurang lebih 38.444 Ha
- c. Kawasan peruntukan pertanian:
 1. Kawasan tanaman pangan:
 - a) Lahan pertanian pangan pada lahan beririgasi seluas kurang lebih 7.865 Ha meliputi:
 - 1) Sawah beririgasi teknis seluas 2.355 (dua ribu tiga ratus lima puluh lima) hektar meliputi : Kecamatan Ponjong; dan Kecamatan Karangmojo.
 - 2) Sawah beririgasi non teknis (setengah teknis, sederhana dan/atau air permukaan tadah hujan) seluas kurang lebih 5.510 Ha meliputi : Kecamatan Ponjong, Karangmojo, Semin, Ngawen, Gedangsari, Nglipar, Patuk, Purwosari, Semanu, Panggang, Paliyan, Wonosari dan Kecamatan Playen.
 - b) Lahan pertanian pangan pada lahan tidak beririgasi seluas kurang lebih 36.065 Ha terletak pada lahan kering di semua kecamatan.
 - c) Lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 5.500 Ha

berada pada lahan pertanian pangan beririgasi dan lahan pertanian pangan tidak beririgasi.

2. Kawasan hortikultura meliputi kawasan pengembangan buah-buahan dengan komoditas utama sawo, mangga, rambutan, srikaya, pisang dan durian serta pengembangan kawasan sayuran.
3. Kawasan perkebunan seluas kurang lebih 189 Ha meliputi: Kecamatan Patuk, Gedangsari, Ponjong, Karangmojo, Panggang, Purwosari, Paliyan Wonosari, Nglipar, Ngawen, Semin, dan Kecamatan Semanu.
4. Kawasan peternakan meliputi:
 - a) Kawasan pengembangan pembibitan ternak sapi potong meliputi: Kecamatan Ponjong, Semanu, Semin, Nglipar, Ngawen, Patuk, Playen, Wonosari, Karangmojo dan Kecamatan Gedangsari.
 - b) Kawasan pengembangan penggemukan ternak sapi potong dan kambing meliputi seluruh kecamatan;
 - c) Kawasan pengembangan kambing bligon meliputi : Kecamatan Girisubo, Rongkop, Tepus, Tanjungsari, Saptosari, Paliyan, Panggang, dan Kecamatan Purwosari.
 - d) Kawasan pengembangan ternak unggas meliputi : Kecamatan Ponjong, Karangmojo, Semanu, Wonosari, Patuk, Semin dan Kecamatan Playen.
- d. Kawasan peruntukan perikanan
 1. kawasan budidaya air tawar meliputi seluruh kecamatan;
 2. kawasan budidaya perikanan laut di kawasan pesisir selatan, dan
 3. kawasan perikanan tangkap di sepanjang kawasan pesisir selatan meliputi Kecamatan Purwosari, Panggang, Saptosari, Tanjungsari, Tepus dan Kecamatan Girisubo.
- e. Kawasan yang memiliki potensi bahan galian :
 1. Kawasan Playen dan sekitarnya dengan potensi kalkarenit dan batupasir gampingan;
 2. Kawasan Gedangsari dan sekitarnya dengan potensi batupasir, zeolit, breksi andesit, batupasir tufan, breksi pumis dan andesit;
 3. Kawasan Patuk-Nglipar dan sekitarnya dengan potensi breksi andesit,

tanah urug, batupasir tufan, breksi pumis dan andesit

4. Kawasan Karangmojo-Nglipar-Wonosari dan sekitarnya dengan potensi kalkarenit dan batupasir gampingan dan mangaan;
 5. Kawasan Semin-Ngawen dan sekitarnya dengan potensi kalkarenit dan breksi pumis, kaolin, felspar, zeolit, mangaan, tras, dan tanah urug;
 6. Kawasan Panggang dan sekitarnya dengan potensi batugamping, phospat dan kalsedon;
 7. Kawasan Tepus dan sekitarnya dengan potensi batugamping;
 8. Kawasan Semanu dan sekitarnya dengan potensi batugamping dan pasir kwarsa; dan
 9. Kawasan Ponjong – Semanu Selatan – Paliyan dan sekitarnya dengan potensi batugamping, kalsedon dan mangaan
- f. Kawasan potensi industri
1. Kawasan potensi industri kecil terletak di seluruh kecamatan
 2. Kawasan potensi agroindustri meliputi :
 - a) Agroindustri Mangga Malam di Kecamatan Gedangsari;
 - b) Agroindustri Patilo di Kecamatan Tepus dan Tanjungsari;
 - c) Agroindustri Mete di Kecamatan Karangmojo dan Semin;
 - d) Agroindustri Kakao di Kecamatan Patuk dan Ponjong;
 - e) Agroindustri Tepung Cassava di Kecamatan Paliyan, Panggang dan Rongkop;
 - f) Agroindustri Srikoyo di Kecamatan Gedangsari, Tepus dan Tanjungsari;
 - g) Agroindustri Sawo di Kecamatan Gedangsari;
 - h) Agroindustri Pisang di Kecamatan Patuk, Gedangsari dan Giriubobo;
 - i) Agroindustri Garut di Kecamatan Gedangsari; dan
 - j) Agroindustri Jagung di Kecamatan Semin.
 3. Wilayah potensial dikembangkan sebagai kawasan peruntukan industri menengah:
 - a) Kawasan Mijahan di Kecamatan Semanu.

b) Kawasan Mulo di Kecamatan Wonosari.

c) Kawasan Candirejo di Kecamatan Semin.

g. Kawasan Pengembangan Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025, Strategi pembangunan daya tarik wisata diwujudkan dalam 6 (enam) Kawasan Strategis Pariwisata, yaitu:

1. Kawasan Strategis Pariwisata I (KSP I) berupa Pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan alam pantai dengan pendukung Wisata budaya meliputi pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Parangendog, Pantai Watu Gupit, Pantai Bekah, Pantai Grigak, Pantai Gesing, Pantai Ngungguh, Pantai Ngedan, Pantai Nguyahan, Pantai Ngobaran, Pantai Ngrehnan, Pantai Torohudan, Goa Langse, Goa Cerme, Pesanggrahan Gembirawati, Wonongobaran, Pertapaan Kembang Lampir, Sendang Beji, Cupu Panjolo, Hutan Wisata Turunan, kesenian tradisional dan pelestarian adat budaya setempat, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya;
2. Kawasan Strategis Pariwisata II (KSP II) berupa pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan alam pantai dengan pendukung Wisata kuliner olahan hasil laut meliputi pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Baron, Pantai Kukup, Pantai Sepanjang, Pantai Sanglen, Pantai Watu Kodok, Pantai Drini, Pantai Sarangan, Pantai Krakal, Pantai Slili, Pantai Sadranan, Pantai Watu Lawang, Pantai Ngandong, Pantai Sundak, Pantai Somandeng, Pantai Pulang Sawal, Pantai Potunggal, Baron Agro Forestry Technopark, Goa Maria Tritis, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya;
3. Kawasan Strategis Pariwisata III (KSP III) berupa pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan alam pantai dengan pendukung Wisata pendidikan, konservasi, dan petualangan meliputi Pantai Timang, Pantai Jogan, Pantai Siung, Pantai Wediombo, Pantai Jungwok, Pantai Sadeng, Pantai Pulau Kalong, Bengawan Solo Purba, Taman Keanekaragaman Hayati Bajo, Taman Keanekaragaman Hayati Koesnadi Hardjasoemantri, Goa Senen, Gunung Batur, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya;

4. Kawasan Strategis Pariwisata IV (KSP IV) berupa pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan alam pegunungan dengan pendukung Wisata pendidikan, konservasi dan petualangan meliputi Gunung Api Purba Nglanggeran, Kebun Buah Durian dan Kakao (Patuk), Pasar buah (Patuk), Gunung Butak, Taman Hutan Raya Bunder, Telaga Kemuning, Hutan Wanagama, Lokasi Out Bond Jelok, Air Terjun Sri Getuk, Air Terjun Banyunibo, Goa Ngrancang Kencana, Kerajinan Batik Kayu Bobung, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya;
5. Kawasan Strategis Pariwisata V (KSP V) berupa pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan alam bentang alam karst dengan pendukung Wisata petualangan meliputi Goa Pari, Goa Ngingrong, Kali Suci, Goa Gelatik, Goa Buri Omah, Goa Grubug, Goa Jomblang, Goa Bribin, Goa Seropan (Gombang- Ngeposari), Goa Braholo, Goa Nglengket, Goa Jlamprong, Bendungan Simo/Dam Beton, Water Byur, Telaga Jonge, Telaga Mliwis Putih, Goa Song Gilap, Goa Paesan, Goa Gremeng, Goa Cokro, Goa Pindul, Goa Sriti, Goa Si Oyot, Gunung Kendil, Wayang Beber, Situs Megalitikum Sokoliman, Upacara Adat Cing-cing Goling, Kerajinan Batu Alam, Susur Sungai Oyo, Makam Ki Ageng Giring, Taman Kota Wonosari, Suaka Marga Satwa, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya; dan
6. Kawasan Strategis Pariwisata VI (KSP VI) berupa pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan alam pegunungan dengan pendukung wisata budaya meliputi Petilasan Gunung Gambar, Taman Keanekaragaman Hayati Hutan Wonosadi, Candi Risan, Gunung Gede, Air Terjun Jurug, Kebun Buah Mangga Malam (Gedangsari dan Ngawen) Upacara Sadranan, Kesenian Tayub, Rinding Gumbeng, Jathilan, Reog, Kerajinan Akar Wangi, Kerajinan Lampu Hias, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya.

h. Kawasan Geopark Gunung Sewu

Geopark Gunung Sewu terletak antara Yogyakarta dan Pacitan. Kawasan ini memanjang arah barat-timur ini melintasi 3 wilayah kabupaten (Gunungkidul, Wonogiri, Pacitan) dan sekaligus 3 wilayah provinsi (Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur). Luasnya 1.802 km²; dibatasi oleh koordinat 07⁰50'-07⁰15' Lintang Selatan dan 110⁰20'-111⁰00' Bujur

Timur. Geopark Gunung Sewu telah ditetapkan sebagai Geopark Nasional oleh Komite Nasional Geopark Indonesia pada tanggal 13 Mei 2013 dan ditetapkan menjadi Geopark Global yang didukung oleh UNESCO pada 19 September 2015 di Tottori, Jepang. Pada bulan Nopember 2015 Geopark Gunung Sewu menjadi Gunung Sewu UNESCO *Global Geopark*. Geopark Gunung Sewu terdiri dari 33 situs, yang tersebar di tiga Geo Area, yaitu Geo Area Gunungkidul sebanyak 13 geo tapak, Geo Area Wonogiri sebanyak 7 geo tapak, dan Geo Area Pacitan sebanyak 13 geo tapak. Situs-situs yang terletak di Kabupaten Gunungkidul adalah :

1. Geosite Gunungapi Purba Nglanggeran, terletak di Desa Nglanggeran Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan kegunungapian yang berlangsung sekitar 20 juta tahun lalu menghasilkan runtuhuan batuan gunungapi seperti breksi gunungapi, aglomerat dan lava. Batuan selanjutnya terkekarkan dan tersesarkan, serta membentuk morfologi kubah. Situs geologi menjadi tipe Formasi Nglanggeran.
2. Geosite Endapan Laut Tua dan Fosil, terletak di Desa Ngalang Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul. Fasa sedimentasi setelah letusan gunungapi Nglanggeran menghasilkan endapan laut yang terbentuk sekitar 16 Juta tahun lalu. Longsoran bawah laut yang dialami oleh sedimen pasir, lempung, dan serpih menghasilkan struktur sedimen yang unik seperti lapisan terpelintir, perlapisan bersusun, dan perariran sejajar. Situs Geologi ini merupakan lokasi tipe Formasi Sambipitu.
3. Geosite Gua Pindul, terletak di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul. Gua yang mulajadinya dipengaruhi oleh sesar, yang berkembang pada batugamping berumur antara 12-5 juta tahun
4. Geosite Kali Suci, terletak di Desa Pacarejo Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul. Kali Suci dari Plato Wonosari masuk ke dalam tanah di Kawasan Gunung Sewu. Setelah memperoleh imbuhan air dari percabangan sungai bawah tanah disekitarnya, sungai keluar di pantai selatan sebagai muara sungai bawah tanah di Pantai Baron. Deretan sumur tegak Glatik- Gelung-mBuriomah adalah dolina runtuh, yang mulajadinya dipengaruhi oleh peruntuhan dan pelarutan disepanjang sesar. Bentang alam karst bawah permukaan ini

- berkembang pada batu gamping Formasi Wonosari yang berumur 15-2 juta tahun.
5. Geosite Luweng Jomblang, terletak di Desa Pacarejo Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul, Fenomena dolina-runtuh yang dasarnya terhubung dengan Luweng Grubug, yang terbentuk sejak 1,2 juta tahun lalu. Terbentuk pada batugamping Formasi Wonosari.
 6. Geosite Pantai Siung-Wedimbo, terletak di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus dan Desa Balong, Desa Jepitu Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunungkidul. Pantai yang mulajadinya dipengaruhi oleh sesar, yang menyingkapkan sentuhan stratigrafi antara batugamping dan batuan gunungapi tua yang mengalasinya.
 7. Geosite Lembah Kering Purba Sadeng, terletak di Desa Pucung Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunungkidul. Lembah-kering yang pembentukannya dipengaruhi oleh struktur geologi (sesar, kekar), dan fenomena undak-sungai yang disebabkan oleh pengangkatan. Di masa lalu, gua dan ceruk di sepanjang lembah pernah dihuni oleh manusia prasejarah.
 8. Geosite Air Terjun Sri Getuk, terletak di Desa Bleberan Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul. Sungai yang berasal dari ketinggian pematang batu gamping memotong tebing batuan membentuk air terjun sebelum akhirnya bermuara di Sungai Oyo. Air terjun ini terbentuk pada batu gamping berlapis Formasi Oyo terbentuk dilaut dangkal antara 15-2 juta tahun lalu.
 9. Geosite Pantai Baron-Kukup-Krakal, terletak di Desa Kemadang, Desa Banjarejo, Desa Ngestirejo Kecamatan Tanjungsari dan Desa Sidoharjo Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul. Bentangalam pantai yang dipengaruhi oleh struktur geologi (sesar), proses pengangkatan aktif yang disebabkan oleh tektonik, yang membentuk endapan gisik (*beach-rocks*), dan abrasi.
 10. Geosite Luweng Cokro, terletak di Desa Umbulrejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul. Sistem perguaan tegak yang speleogenesisnya dipengaruhi oleh struktur geologi.
 11. Geosite Gua Ngingrong, terletak di Desa Mulo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Sistem perguaan yang berkembang di ujung

lembah-kering yang buntu (*blind-valley*), yang speleogenesisnya dipengaruhi oleh sesar.

12. *Biosite Geoforest* Wanagama, terletak di Desa Banaran Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul. Hutan di kawasan karst yang dimanfaatkan untuk keperluan konservasi, pendidikan dan pembibitan tanaman langka.
13. *Biosite Geoforest* Turunan, terletak di Desa Girisuko Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul. Hutan konservasi yang dikelola oleh masyarakat setempat, dengan pemandangan alamnya yang indah.

II.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030, penetapan kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut :

- a. Kawasan rawan gempa bumi di seluruh wilayah Kabupaten dengan tingkat resiko paling tinggi berada pada jalur sesar patahan aktif;
- b. kawasan rawan gerakan tanah dan longsor meliputi :
 1. Kecamatan Patuk meliputi Desa Patuk, Desa Semoyo, Desa Ngoro-oro, Desa Terbah, Desa Nglanggeran, Desa Nglegi;
 2. Kecamatan Gedangsari meliputi Desa Watugajah, Desa Ngalang, Desa Mertelu, Desa Tegalrejo, Desa Sampang, Desa Serut, Desa Hargomulyo;
 3. Kecamatan Nglipar meliputi Desa Natah, Desa Pilangrejo, Desa Kedungpoh, Desa Pengkol, Desa Katongan;
 4. Kecamatan Ngawen meliputi Desa Jurangjero, Desa Tancep, Desa Sambirejo;
 5. Kecamatan Semin meliputi Desa Pundungsari, Desa Karangsari, Desa Rejosari, Desa Candirejo;
 6. Kecamatan Ponjong meliputi Desa Sawahan dan Desa Tambakromo; dan
 7. Wilayah lain dengan kemiringan lereng lebih dari atau sama dengan 40%.

Adapun hasil Penyusunan Peta dan Kajian Risiko Bencana Longsor Kabupaten Gunungkidul yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Gunungkidul bekejasama dengan Pusat Studi Bencana Universitas Gadjah

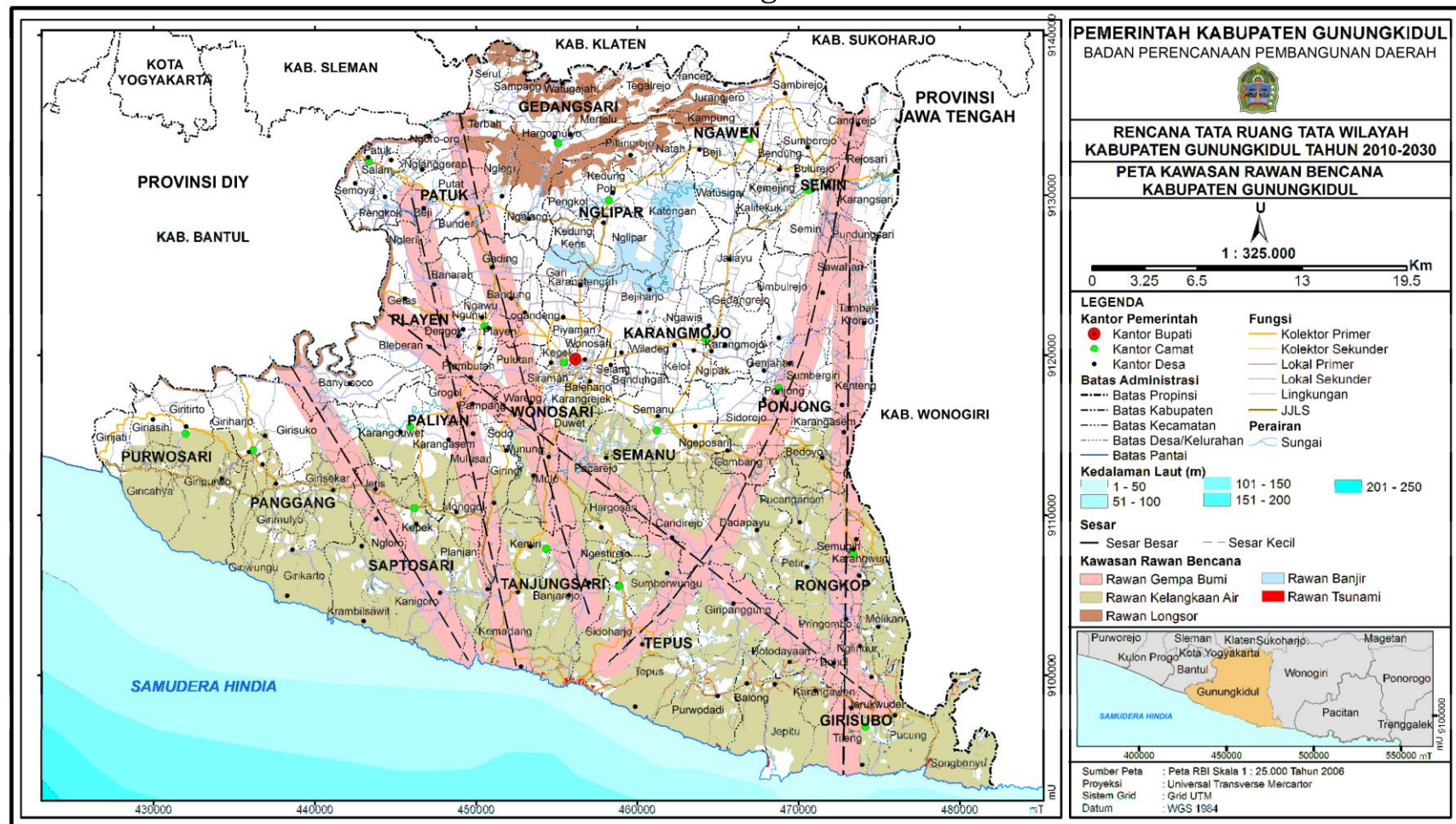
Mada Tahun 2016 menyebutkan:

1. Tingkat Risiko Tanah Longsor Sangat Tinggi, meliputi :
 - a) Kecamatan Gedangsari , meliputi : Desa Sampang, Serut dan Desa Tegalrejo
 - b) Kecamatan Karangmojo : Desa Jatiayu
 - c) Kecamatan Ngawen, meliputi : Desa Beji, Kampung, Sambirejo dan Desa Tancep
 - d) Kecamatan Nglipar, meliputi : Desa Kedungpoh, Natah dan Desa Pengkol
 - e) Kecamatan Panggang, meliputi : Desa Giriharjo, Girisuko dan Desa Giriwungu
 - f) Kecamatan Patuk, meliputi : seluruh desa di Kecamatan Patuk
 - g) Kecamatan Playen, meliputi : Desa Banyusoco, dan Desa Getas
 - h) Kecamatan Ponjong, meliputi : Desa Tambakromo dan Desa Umbulrejo
 - i) Kecamatan Purwosari, meliputi : Desa Giricahyo, dan Girijati
 - j) Kecamatan Semanu : Desa Candirejo
 - k) Kecamatan Semin, meliputi : Desa Candirejo, Kalitekuk, Karangsari, dan Desa Rejosari
 - l) Kecamatan Tepus : Desa Sumberwungu
2. Tingkat Risiko Tanah Longsor Tinggi, meliputi
 - a) Kecamatan Gedangsari, meliputi : Desa Hargomulyo, Mertelu, Ngalang dan Desa Watugajah
 - b) Kecamatan Ngawen : Desa Jurangjero
 - c) Kecamatan Nglipar : Desa Pilangrejo
 - d) Kecamatan Ponjong : Desa Sawahan
 - e) Kecamatan Semin : Desa Pundungsari dan Desa Semin
- c. Kawasan rawan banjir di Sungai Oyo meliputi:
 1. Kecamatan Semin meliputi Desa Karangsari, Desa Semin, Desa Kemejing dan Desa Kalitekuk;
 2. Kecamatan Ngawen meliputi Desa Watusigar;
 3. Kecamatan Nglipar meliputi Desa Kedungkeris, Desa Nglipar, dan Desa Katongan;
 4. Kecamatan Karangmojo meliputi Desa Bejiharjo;

5. Kecamatan Wonosari meliputi Desa Gari, dan Desa Karangtengah;
 6. Kecamatan Playen meliputi Desa Banyusoco; dan
 7. Kecamatan Gedangsari meliputi Desa Ngalang
- d. Kawasan rawan angin topan di seluruh wilayah kecamatan;
 - e. Kawasan rawan kekeringan meliputi di 11 wilayah kecamatan, meliputi : Kecamatan Rongkop, Girisubo, Tepus, Tanjungsari, Panggang, Purwosari, Paliyan, Patuk, Gedangsari, sebagian Wonosari dan Kecamatan Semanu;
 - f. Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami meliputi kawasan pantai di Kecamatan Purwosari, Kecamatan Panggang, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus, dan Kecamatan Girisubo.



Gambar 2.2.
Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten
Gunungkidul



Sumber : RTRW Kabupaten Gunungkidul 2010-2030

II.1.4. Demografi

A. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk secara alami dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk.

Data pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul Periode 2016-2021 menjelaskan bahwa pada umumnya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Gunungkidul dari 1961 sampai dengan 2010 terus melambat dari 0,81% per tahun pada periode 1961– 1971 menjadi 0,68% per tahun pada periode tahun 1971 – 1980. Bahkan pada periode tahun 1980-1990 terjadi pertumbuhan sebesar 0,13% per tahun. Sedangkan pada periode tahun 1990 – 2000 pertumbuhan penduduk naik kembali menjadi 0,30% per tahun dan pada periode 2000 – 2010 melambat menjadi 0,07% per tahun.

Jumlah penduduk menurut Kecamatan di Daerah Kabupaten Gunungkidul di Tahun 2017 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3.
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2017 (Jiwa)

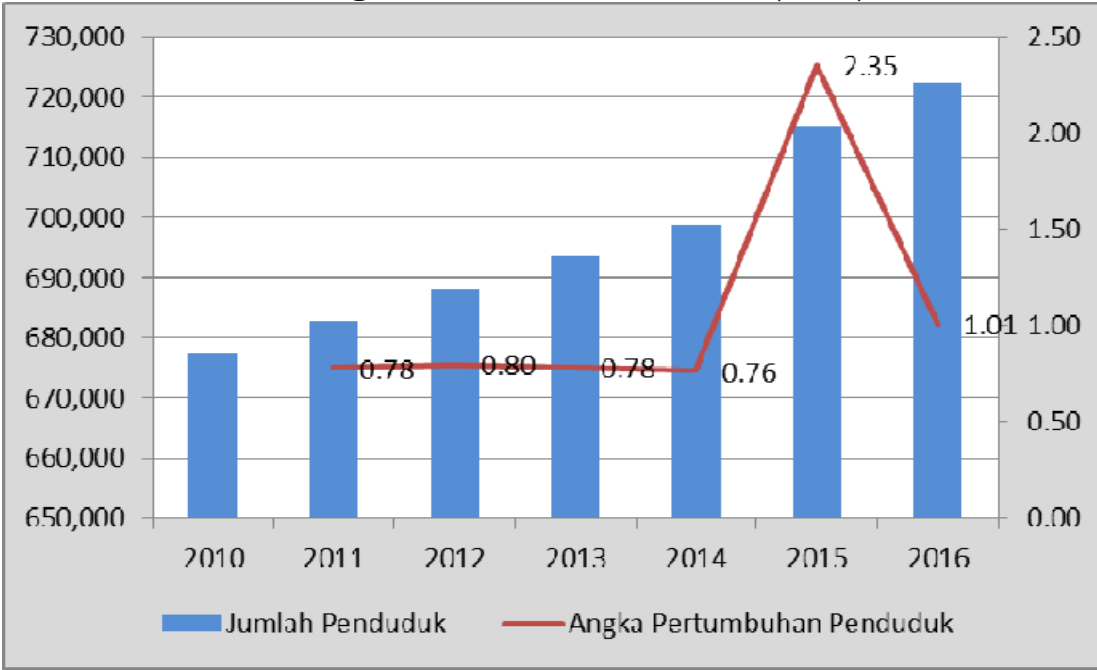
NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK					
		L	%	P	%	L+P	%
1	WONOSARI	42.77	49,87	42.9	50,1	85.7	11,35
2	NGLIPAR	16.69	49,90	16.7	50,1	33.4	4,43
3	PLAYEN	29.73	49,38	30.4	50,6	60.2	7,97
4	PATUK	16.82	49,35	17.2	50,6	34.0	4,51
5	PALIYAN	16.25	49,53	16.5	50,4	32.8	4,34
6	PANGGANG	14.43	49,33	14.8	50,6	29.2	3,87
7	TEPUS	18.19	49,59	18.4	50,4	36.6	4,85
8	SEMANU	28.77	50,08	28.6	49,9	57.4	7,60
9	KARANGMOJO	27.56	49,73	27.8	50,2	55.4	7,33
10	PONJONG	28.00	49,74	28.3	50,2	56.3	7,45
11	RONGKOP	15.00	49,85	15.0	50,1	30.1	3,98
12	SEMIN	28.43	50,24	28.1	49,7	56.5	7,49
13	NGAWEN	17.22	49,89	17.3	50,1	34.5	4,57
14	GEDANGSARI	19.62	50,00	19.6	50,0	39.2	5,19
15	SAPTOSARI	19.32	50,18	19.1	49,8	38.5	5,09
16	GIRISUBO	12.77	49,52	13.0	50,4	25.7	3,41
17	TANJUNGS	14.29	49,34	14.6	50,6	28.9	3,83
18	PURWOSARI	10.13	48,94	10.5	51,0	20.7	2,74
JUMLAH		376.09	49,75	379.8	50,2	755.9	100,00

Sumber: Ditjend Dukcapil (2017) Data Hasil Konsolidasi & Pembersihan Semester I tahun 2017, Kementrian Dalam Negeri, 30 Juni 2017.

Penurunan laju pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul lebih dipengaruhi oleh migrasi keluar (*out migration*). Kondisi geografis dan sosial ekonomi yang tidak menguntungkan menjadi salah satu faktor pendorong penduduk untuk mencari nafkah keluar daerah.

Kondisi terkini terkait jumlah dan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Gunungkidul adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.3.
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2016 (Jiwa)

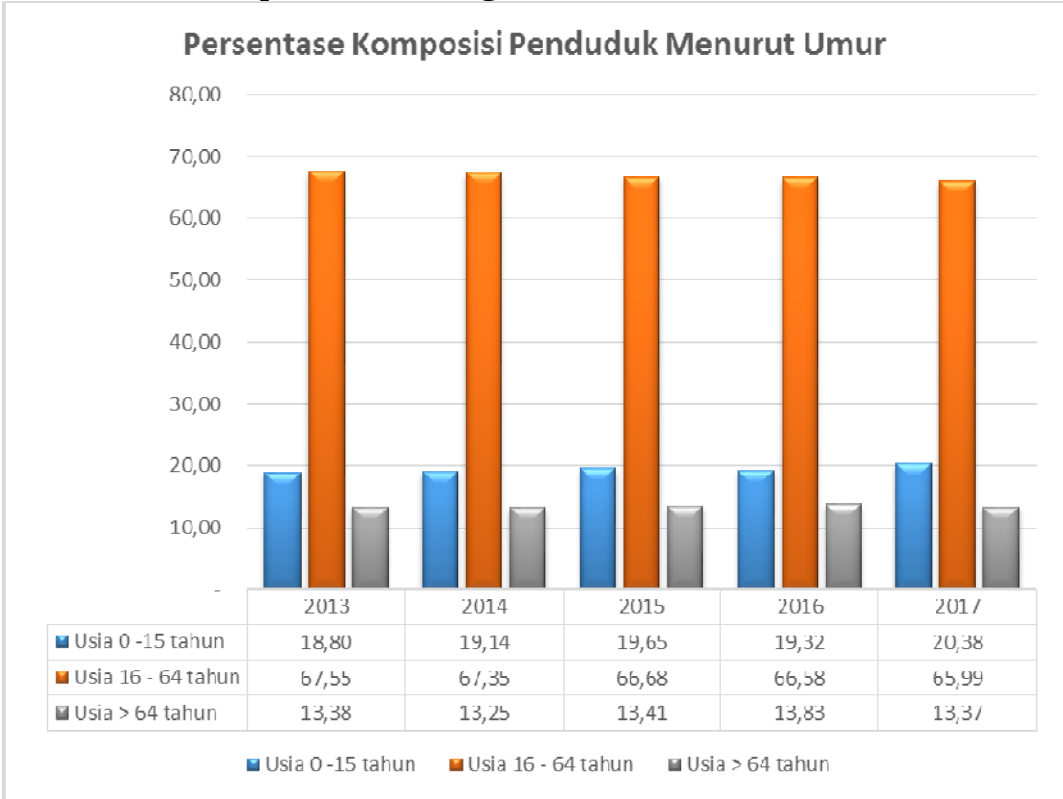


Sumber: BPS, Kabupaten Gunungkidul dalam Angka, 2017 (Diolah)

B. Struktur Umur

Komposisi kelompok umur penduduk Gunungkidul selama kurun waktu 2013-2017 di dominasi oleh penduduk usia dewasa/produktif. Penduduk kelompok umur 0-15 tahun selama kurun waktu tersebut cenderung tidak mengalami perubahan. Struktur umur penduduk Gunungkidul dikatakan sebagai “penduduk usia tua” karena penduduk umur 0-15 tahun kurang dari 30% dan penduduk usia 64 tahun ke atas mengalami kenaikan. Semakin meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut mengindikasikan tingginya usia harapan hidup penduduk Gunungkidul. Berikut gambaran persentase komposisi penduduk menurut umur Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017.

Gambar 2.4.
Persentase Komposisi Penduduk Menurut Umur
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017



Sumber: BPS, Kabupaten Gunungkidul dalam Angka, 2017 (Diolah)

C. Jenis Kelamin

Jika dilihat dari komposisinya, jumlah penduduk perempuan dari tahun 2002 sampai 2008 selalu lebih tinggi dari pada jumlah penduduk laki-laki. Komposisi tersebut ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin yang pada periode tersebut berkisar antara 95 sampai 97. Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2007 adalah 461 jiwa/km² dan tahun 2008 sebesar 462 jiwa/km² yang tersebar di 18 kecamatan dan 144 desa dengan kepadatan tertinggi di kecamatan Wonosari sebesar 996 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Girisubo yaitu sebesar 254 jiwa/km².

Pada tahun 2016, jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per
Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017

No.	Kecamatan	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin (%)
1	Panggang	14.474	14.921	29.395	97,00
2	Purwosari	10.201	10.628	20.829	95,98
3	Paliyan	16.170	16.616	32.786	97,32
4	Saptosari	19.409	19.340	38.749	100,36
5	Tepus	18.233	18.665	36.898	97,69
6	Tanjungsari	14.335	14.731	29.066	97,31
7	Rongkop	14.943	15.057	30.000	99,24
8	Girisubo	12.668	12.992	25.660	97,51
9	Semanu	28.877	28.936	57.813	99,80
10	Ponjong	27.903	28.432	56.335	98,14
11	Karangmojo	27.555	27.940	55.495	98,62
12	Wonosari	42.801	43.208	86.009	99,06
13	Playen	29.713	30.546	60.259	97,27
14	Patuk	16.728	17.265	33.993	96,89
15	Gedangsari	19.631	19.663	39.294	99,84
16	Nglipar	16.677	16.808	33.485	99,22
17	Ngawen	17.190	17.364	34.554	99,00
18	Semin	28.305	28.244	56.549	100,22
Jumlah		375.813	381.356	757.169	98,55

Sumber: Profil Perkembangan Penduduk Kab. Gunungkidul, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat di hitung bahwa *sex ratio* penduduk Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2017 sebesar 98,55 yang dapat diartikan bahwa jumlah penduduk laki-laki 1,44% lebih sedikit dibanding jumlah penduduk perempuan atau dari setiap 100 orang perempuan terdapat 98,55 laki-laki. Kecamatan dengan *sex ratio* paling tinggi adalah Kecamatan Semin dengan nilai 100,22% sedangkan Kecamatan dengan *sex ratio* paling rendah adalah Kecamatan Purwosari dengan nilai 95,98%.

Untuk mengetahui gambaran kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.5.
Kepadatan Penduduk per Kecamatan
di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017

No.	Kecamatan	Luas Areal (Km ²)	Total (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Panggang	99,8	29.395	295
2	Purwosari	71,76	20.829	290
3	Paliyan	58,07	32.786	565
4	Saptosari	87,83	38.749	441
5	Tepus	104,91	36.898	352
6	Tanjungsari	71,63	29.066	406
7	Rongkop	83,46	30.000	359
8	Girisubo	94,57	25.660	271
9	Semanu	108,39	57.813	533
10	Ponjong	104,49	56.335	539
11	Karangmojo	80,12	55.495	693
12	Wonosari	75,51	86.009	1.139
13	Playen	105,26	60.259	572
14	Patuk	72,04	33.993	472
15	Gedangsari	68,14	39.294	577
16	Nglipar	73,87	33.485	453
17	Ngawen	46,59	34.554	742
18	Semin	78,92	56.549	717
Kab. Gunungkidul		1.485,36	757.169	510

Sumber: Profil Perkembangan Penduduk Kab. Gunungkidul, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Gunungkidul adalah 510 jiwa/km², dengan angka kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Wonosari sebesar 1.139 jiwa/km² dan angka kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Girisubo sebesar 271 jiwa/km².

II.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

II.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dicerminkan dari beberapa indikator makro. Salah satu indikator makro yang sering dipakai untuk melihat keberhasilan pembangunan adalah PDRB. Besarnya nilai PDRB yang berhasil dicapai merupakan refleksi dari kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Dengan membandingkan nilai PDRB yang berhasil dicapai dari tahun ke tahun maka akan terlihat bagaimana perkembangan tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah.

A. Nilai dan Kontribusi PDRB

Angka PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2017 Kabupaten Gunungkidul tercatat sebesar Rp.16,207 triliun atau mengalami peningkatan 8,17 persen dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan berdasarkan atas dasar harga konstan PDRB Kabupaten Gunungkidul tahun 2017 sebesar Rp.16,207 triliun dan tahun 2016 sebesar Rp.14,982 triliun yang berarti pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2017 tumbuh 5%.

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Pada tahun 2017 kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 24,48%. Sub kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan jasa pertanian penyumbang terbesar terhadap kategori ini yaitu tercatat sebesar 81,55% dari seluruh nilai tambah kategori ini. Pertumbuhan golongan ini mengalami penurunan dari 2,18% pada tahun 2016 menjadi 1,98% pada tahun 2017.

Walaupun pertumbuhan golongan pada sub kategori ini tahun 2017 ada yang mengalami minus, namun semua sub kategori masih tumbuh positif dengan pertumbuhan terbesar adalah pada subkategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian yaitu sebesar 2,29% yang diikuti oleh subkategori perikanan mencetak laju pertumbuhan ekonomi sebesar 1,98%.

2. Pertambangan dan Penggalian

Pada kategori Pertambangan dan Penggalian, yang berkegiatan ekonomi secara aktif hanyalah subkategori Pertambangan dan Penggalian Lainnya, hal ini karena kategori ini sangat berkaitan dengan ketersediaan sumber daya alam. Secara umum, peranan subkategori ini cenderung tidak banyak mengalami perubahan selama tahun 2010-2017, dengan kontribusi sebesar 1,58%, 1,61%, 1,52%, 1,48%, 1,42%, 1,37%, 1,31%, dan 1,25%.

Secara keseluruhan pada tahun 2017, kategori Pertambangan dan Penggalian menunjukkan laju pertumbuhan sebesar 1,25%. Selama lima tahun terakhir, laju pertumbuhan kategori ini sangat dipengaruhi oleh regulasi yang mengatur tentang izin dan larangan kawasan penambangan.

3. Industri Pengolahan

Diantara 16 sub kategori pada Kategori Industri Pengolahan, tiga sub kategori tidak ada kegiatan ekonomi secara aktif di Gunungkidul yakni sub kategori industri batubara dan pengilangan migas, sub kategori industri logam dasar dan sub kategori industri alat angkutan.

Subkategori yang menyumbang peranan terbesar adalah sub kategori industri makanan dan minuman yaitu sebesar 65,36% pada tahun 2017, kemudian diikuti oleh sub kategori Industri furnitur sebesar 10,23% dan sub kategori industri barang galian bukan logam sebesar 7,66%. Sedangkan peranan subkategori yang lain berturut-turut mulai dari yang terbesar hingga terkecil adalah subkategori Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik 3,94%, subkategori Industri Lainnya; Jasa Reparasi; Pemasangan Mesin dan Peralatan 3,3%, sub kategori Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya 3,39%, sub kategori Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional 1,85%, sub kategori Industri Mesin dan Perlengkapan 1,54%, sub kategori Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 1,56%.

Masih terdapat empat kategori lain yang mempuyai peranan di bawah 1% yakni subkategori Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman 0,47%, diikuti sub kategori Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik 0,25%, dan sub kategori Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki 0,26% serta sub ketegori Industri Pengolahan Tembakau 0,06%.

Secara keseluruhan, laju pertumbuhan kategori Industri Pengolahan pada tahun 2017 adalah sebesar 9,47%, sedangkan subkategori yang mencatatkan laju pertumbuhan terbesar adalah sub kategori Industri kimia, farmasi dan obat tradisional yaitu sebesar 7,54% pada tahun 2017, kemudian diikuti oleh sub kategori Industri makanan dan minuman jadi 6,75% dan sub kategori Industri Industri tekstil dan pakaian yaitu sebesar 6,18%.

4. Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori Pengadaan Listrik dan Gas hanya berkontribusi sebesar 0,10% terhadap perekonomian Kabupaten Gunungkidul pada tahun

2017. Dari kontribusi tersebut, hampir seluruhnya disumbangkan oleh subkategori Ketenagalistrikan sebesar 98,7%, dan hanya 1,3% oleh subkategori Pengadaan Gas dan Produksi Es. Sedangkan laju pertumbuhan kategori ini pada tahun 2017 adalah 5,12%, turun dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,33%. Masing-masing subkategori juga mencatatkan pertumbuhan yang cukup tinggi, di mana subkategori Ketenagalistrikan sebesar 14,47% dan Pengadaan Gas dan Produksi Es sebesar 2,33%.

5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan dll. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kabupaten Gunungkidul hampir konstan selama tahun 2011-2017 sebesar 0,18%, 0,17%, 0,17%, 0,18%, 0,17%, 0,16%, dan 0,16%. Sedangkan laju pertumbuhannya secara berturut turut dari tahun 2011 – 2017 sebesar 0,81%, 2,53%, 1,45%, 3,88%, 2,88%, 2,29%, dan 3,72%.

Berkaitan dengan pengelolaan sampah, limbah dan proses daur ulangnya. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul perlu melakukan penguatan kebijakan terkait persampahan. Penguatan dimaksud dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada. Jakstrada Kabupaten Gunungkidul diadaptasi serta berpedoman kepada Jakstranas dan Jakstrada Provinsi. Jakstrada menjadi arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah kabupaten Gunungkidul yang terpadu dan berkelanjutan. Poin penting Jakstrada Kabupaten Gunungkidul juga memuat strategi, program, target pengurangan dan penanganan sampah rumah dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang akan dilaksanakan pada kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025, serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

6. Konstruksi

Pada tahun 2017 kategori konstruksi menyumbang sebesar 9,65% terhadap total perekonomian Kabupaten Gunungkidul, peranan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 9,40%.

Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, pertumbuhan kategori konstruksi di Kabupaten Gunungkidul selalu bernilai positif walaupun dalam perjalanannya diwarnai turun naik laju. Berikut berturut-turut angka laju pertumbuhan kategori ini dari tahun 2011-2017 : 4,9%, 5,87%, 4,52%, 5,06%, 4,36%, 5,34%, dan 7,71%.

7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang di atas 8,5%. Pada tahun 2017, kontribusi kategori ini sebesar 9,38%, dengan sumbangan terbesar dari sub kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 94,5%. Sedangkan sub kategori Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya hanya berkontribusi sebesar 5,5% terhadap kategori.

Kategori ini merupakan bagian dari kategori yang mengalami laju pertumbuhan menggembirakan selama tahun 2017, sebesar 6,12%. Laju pertumbuhan mengalami penurunan sedikit dibanding tahun 2016 sebesar 6,96%.

8. Transportasi dan Pergudangan

Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 subkategori, yaitu subkategori Angkutan Rel, subkategori Angkutan Darat, subkategori Angkutan Laut, subkategori Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, subkategori Angkutan Udara, serta subkategori Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan. Namun di Gunungkidul hanya ada dua sub kategori yang ada kegiatan ekonominya yakni Subkategori Angkutan Darat dan subkategori Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan.

Kategori ini memberikan kontribusi sebesar 4,97% tahun 2017. Persentase kontribusinya cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Tercatat berturut turut dari tahun 2010-2017 kontribusi sektor ini

terhadap PDRB sebesar 5,59%, 5,37%, 5,23%, 5,25%, 5,13%, 5,04%, dan 4,97%.

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Pada tahun 2017, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Gunungkidul sebesar 5,92%, kontribusi terbesar pada kategori ini disumbang oleh subkategori penyediaan makan minum sebesar 97,99% dan sisanya disumbangkan oleh subkategori Penyediaan Akomodasi. Tercatat berturut turut dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 kontribusi sektor ini terhadap PDRB sebesar 5,22%, 5,25%, 5,16%, 5,45%, 5,78%, 5,90%, 5,90%, dan 5,92%. Secara keseluruhan, kategori ini mencatatkan laju pertumbuhan positif sebesar 5,60% pada tahun 2017, meningkat sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar 5,55%.

10. Informasi dan Komunikasi

Dalam era globalisasi, peranan kategori informasi dan komunikasi menjadi sangat strategis dalam menunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Hampir di setiap kategori industri mulai pertanian hingga jasa kehadiran kategori ini memiliki peran dalam produksi hingga pemasaran. Kontribusi kategori ini terhadap PDRB Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2011-2017 sebesar 7,72%, 7,66%, 7,42%, 7,30%, 6,98%, 7,02%, dan 7,14%.

Sedangkan laju pertumbuhannya selama 7 tahun ini berturut turut 13,3%, 10,6%, 6,23%, 7,90%, 5,65%, 8,78%, dan 6,74% pada tahun 2017.

11. Jasa Keuangan dan Asuransi

Kontribusi kategori ini terhadap PDRB Kabupaten Gunungkidul hanya 2,23% tahun 2017. Kegiatan ekonomi pada subkategori jasa perantara keuangan menjadi penyumbang terbesar pada kategori jasa keuangan dan asuransi ini. Selama tahun 2010-2017, kontribusinya adalah 1,69%, 1,92%, 2,01%, 2,11%, 2,27%, 2,34%, 2,34% 2,32%, 2,23% terhadap PDRB kategori jasa keuangan dan asuransi. Penyumbang terbesar berikutnya adalah Jasa keuangan lainnya dengan sumbangan sekitar 7,1%, subkategori Asuransi dan Dana Pensiun 4,2%, dan terakhir adalah Jasa Penunjang

Keuangan dengan nilai kontribusi terhadap kategori ini sekitar 0,03%. Sedangkan laju pertumbuhan kategori ini tahun 2017 mencapai 0,84% yang artinya mengalami tren perlambatan pertumbuhan dalam 7 tahun terakhir.

12. Real Estate

Kategori real estate memberikan kontribusi yang relatif stabil bagi PDRB Kabupaten Gunungkidul, Selama tahun 2010-2017, secara berturut-turut sumbangan kategori real estate terhadap PDRB sebesar 3,26%, 3,28%, 3,34%, 3,35%, 3,43%, 3,44%, 3,53%, dan 3,57%. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi kategori ini dari tahun 2011-2017 secara berturut turut sebagai berikut 7,18%, 5,53%, 4,44%, 8,09%, 6,65%, 6,83%, dan 5,37%.

13. Jasa Perusahaan

Kontribusi sektor Jasa Perusahaan terhadap PDRB Kabupaten Gunungkidul menunjukkan angka yang stagnan dibawah 0,5%, secara berturut turut dari tahun 2010–2017 adalah sebagai berikut : 0,46%, 0,49%, 0,47%, 0,43%, 0,44%, 0,44%, 0,43%, dan 0,44%. Sedangkan laju pertumbuhannya secara berturut turut dari tahun 2011–2017 adalah sebagai berikut : 8,97%, 8,75%, 3,53%, 6,37%, 7,04%, 5,06%, dan 6,08%.

14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

APBD masih menjadi mesin penggerak ekonomi Gunungkidul, hal ini terlihat dari peranan kategori ini terhadap perekonomian secara umum. Kontribusinya hanya kalah dari tiga kategori utama yakni pertanian, industri manufaktur dan konstruksi dan setara dengan kontribusi kategori perdagangan. Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundangundangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya.

Selama tahun 2010-2017 peranannya relatif stabil dengan menunjukkan sedikit peningkatan, yaitu dengan nilai kontribusi secara berturut turut sebesar 8,49%, 8,43%, 8,82%, 9,10%, 9,29%, 9,34%, 9,38%, dan 9,65%. Sedangkan laju pertumbuhannya selalu positif dengan

pola yang naik turun, yaitu mencapai 4,95% di tahun 2011, dan laju pertumbuhan berikutnya diangka 7,77%, 4,54%, 5,79%, 5,26%, 5,26% dan 2017 laju pertumbuhannya mencapai 4,62%

15. Jasa Pendidikan

Kontribusi jasa pendidikan terhadap perekonomian Gunungkidul memang tidaklah besar namun diantara kategori jasa nilainya menempati urutan kedua setelah jasa pemerintahan. Pada tahun 2017 jasa pendidikan menyumbang sebesar 6,16% terhadap PDRB Kabupaten Gunungkidul, mengalami sedikit penurunan dibandingkan pada tahun 2016 yang sebesar 6,20%.

Sedangkan laju pertumbuhan jasa pendidikan dari tahun 2011-2017 adalah 7,81%, 5,64%, 4,92%, 8,13%, 7,61%, 3,42%, dan 6,07%, mengalami kenaikan cukup pesat dari laju pertumbuhan tahun sebelumnya.

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Pada tahun 2017, kontribusinya terhadap perekonomian Kabupaten Gunungkidul sebesar 2,00% dengan laju pertumbuhan sebesar 6,13%. Selama tahun 2011-2017 peranannya relatif stabil dengan menunjukkan sedikit peningkatan, yaitu dengan nilai kontribusi sebesar 1,84%, 1,92%, 1,97%, 1,97%, 2,01%, 2,00% dan 2,00%. Sedangkan laju pertumbuhannya pada tahun 2017 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 4,48% menjadi 6,13% di tahun ini.

17. Jasa lainnya

Kontribusi Jasa Lainnya terhadap PDRB Kabupaten Gunungkidul relatif stabil dari tahun ke tahun, secara berturut turut kontribusinya dari tahun 2011-2017 adalah 3,28%, 3,25%, 3,21%, 3,18%, 3,26%, 3,28%, 3,35%, dan 3,43. Sedangkan laju pertumbuhannya selalu positif yaitu 7,81%, 5,64%, 5,17%, 6,42%, 8,65%, 7,47%, dan 6,50% selama tahun 2011-2017.

Tabel 2.6.
PDRB Kabupaten Gunungkidul Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun
2010-2017 (Juta Rupiah)

Sektor PDRB [seri 2010]		Tahun							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.383.563,79	2.553.058,74	2.838.937,21	3.046.994,52	3.150.564,98	3.535.656,69	3.787.293,28	3.968.199,99
B	Pertambangan dan Penggalian	139.834,60	157.131,02	160.265,01	170.194,54	178.643,42	188.772,46	195.599,82	201.918,48
C	Industri Pengolahan	879.184,81	980.901,57	956.960,43	1.086.106,30	1.204.712,40	1.284.288,37	1.405.322,39	1.535.319,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.999,91	7.898,52	8.037,10	7.563,44	8.991,03	10.404,22	12.444,08	15.436,38
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16.006,27	17.154,87	17.940,93	19.538,62	22.134,69	23.520,71	24.681,98	26.247,69
F	Konstruksi	814.716,03	907.213,68	1.004.221,49	1.109.379,30	1.198.556,40	1.298.853,07	1.407.758,01	1.563.746,84
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	765.998,93	853.292,64	935.267,19	1.002.567,08	1.126.233,72	1.218.309,87	1.381.432,02	1.519.918,39
H	Transportasi dan Pergudangan	494.268,34	522.613,54	551.034,78	603.119,36	659.675,51	707.694,97	755.286,65	805.655,12
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	461.445,30	511.066,06	544.434,62	628.770,21	726.389,40	813.608,14	883.856,84	958.922,02
J	Informasi dan Komunikasi	666.527,10	752.243,42	808.024,71	855.560,31	916.149,74	963.597,56	1.051.970,41	1.156.954,92
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	149.872,00	186.581,39	211.943,40	243.579,49	284.852,29	322.775,27	346.867,92	361.953,96
L	Real Estat	288.776,45	319.618,35	351.999,08	385.700,52	430.299,21	474.733,53	528.958,90	578.583,44
M,N	Jasa Perusahaan	40.563,81	47.475,87	49.077,82	49.472,54	55.035,70	60.222,32	64.966,44	70.298,36
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	750.919,52	821.091,33	930.486,99	1.048.848,14	1.166.153,77	1.289.112,25	1.405.268,47	1.564.517,25
P	Jasa Pendidikan	535.696,57	598.781,79	629.714,19	678.669,50	772.874,04	876.367,33	928.758,62	997.908,63

Sektor PDRB [seri 2010]		Tahun							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	162.625,22	186.776,45	208.238,36	227.171,61	247.287,84	277.851,25	299.358,70	324.943,00
R,S,T,U	Jasa lainnya	290.039,29	316.195,18	338.771,23	367.105,33	408.817,11	452.888,89	502.230,56	556.517,97
	Produk Domestik Regional Bruto	8.848.037,94	9.739.094,42	10.545.354,54	11.530.340,81	12.557.371,25	13.798.656,90	14.982.055,09	16.207.041,79

Sumber : BPS, Kab. Gunungkidul. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunungkidul menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2017

Selain PDRB ADHB tahun dasar 2010, untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan perekonomian juga bisa melihat PDRB ADHK dengan tahun dasar 2010 seperti table dibawah :

Tabel 2.7.
PDRB Kabupaten Gunungkidul Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2010-2017 (Juta Rupiah)

Sektor PDRB [seri 2010]		Tahun							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.383.563,79	2.354.431,52	2.452.276,53	2.508.677,39	2.493.155,78	2.557.403,25	2.613.141,84	2.664.845,05
B	Pertambangan dan Penggalian	139.834,60	149.799,96	151.107,59	158.455,68	160.985,17	161.383,43	162.657,35	167.046,12
C	Industri Pengolahan	879.184,81	926.817,87	895.217,63	968.727,95	1.008.531,41	1.035.163,27	1.089.755,45	1.163.512,34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.999,91	8.428,91	9.377,86	10.025,51	10.775,37	11.030,48	12.610,79	13.256,18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16.006,27	16.135,77	16.544,63	16.785,07	17.436,98	17.939,99	18.351,02	19.033,94
F	Konstruksi	814.716,03	854.604,54	904.779,74	945.650,52	993.510,44	1.036.792,65	1.092.138,30	1.176.314,72

Sektor PDRB [seri 2010]		Tahun							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	765.998,93	809.291,18	866.000,13	910.271,67	971.903,71	1.038.835,29	1.111.128,28	1.179.089,82
H	Transportasi dan Pergudangan	494.268,34	510.643,55	523.854,79	548.633,40	561.987,39	582.657,79	603.242,25	626.705,07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	461.445,30	484.415,33	507.494,20	549.675,62	596.989,23	635.346,40	670.616,18	708.164,63
J	Informasi dan Komunikasi	666.527,10	755.195,48	834.950,97	886.937,70	957.028,23	1.011.119,75	1.099.899,71	1.174.024,54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	149.872,00	172.858,77	177.683,76	198.811,94	220.770,99	239.629,47	250.943,14	253.056,45
L	Real Estat	288.776,45	309.495,79	326.602,04	341.097,06	368.705,18	393.209,26	420.060,38	442.615,38
M,N	Jasa Perusahaan	40.563,81	44.203,58	48.071,35	49.766,52	52.936,83	56.662,57	59.527,85	63.147,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	750.919,52	788.096,52	849.357,37	887.944,90	939.394,99	988.811,65	1.040.788,37	1.088.902,18
P	Jasa Pendidikan	535.696,57	577.556,19	610.113,94	640.146,59	692.197,50	744.844,78	770.301,12	817.091,59
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	162.625,22	173.332,84	192.216,63	208.405,40	223.760,52	239.841,10	250.576,04	265.932,12
R,S,T,U	Jasa lainnya	290.039,29	312.703,11	330.330,68	347.419,59	369.722,60	401.691,99	431.708,87	459.756,46
	Produk Domestik Regional Bruto	8.848.037,94	9.248.010,91	9.695.979,84	10.177.432,51	10.639.792,32	11.152.363,12	11.697.446,94	12.282.493,62

Sumber : BPS Kab Gunungkidul. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunungkidul menurut Lapangan Usaha 2010-2017

B. Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing lapangan usaha dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Dilihat dari struktur ekonomi, terlihat bahwa penyumbang utama perekonomian Kabupaten Gunungkidul selama kurun waktu 2010–2017 masih didominasi oleh sektor pertanian, diikuti sektor jasa, sektor perdagangan, dan sektor industri pengolahan. Berdasarkan data di atas, jika ekonomi tumbuh secara wajar maka sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor jasa akan tumbuh pesat dibandingkan dengan sektor pertanian yang merupakan *resourced-based economic*. Dengan demikian secara alami andil sektor pertanian akan menurun secara gradual seiring berkembangnya dinamika perekonomian.

Tabel 2.8.
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Gunungkidul Atas
Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2010-2017 (%)

Sektor		Tahun							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,94	26,21	26,92	26,43	25,09	25,62	25,28	24,48
B	Pertambangan dan Penggalian	1,58	1,61	1,52	1,48	1,42	1,37	1,31	1,25
C	Industri Pengolahan	9,94	10,07	9,07	9,42	9,59	9,31	9,38	9,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,08	0,08	0,1
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,18	0,18	0,17	0,17	0,18	0,17	0,16	0,16
F	Konstruksi	9,21	9,32	9,52	9,62	9,54	9,41	9,4	9,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,66	8,76	8,87	8,7	8,97	8,83	9,22	9,38
H	Transportasi dan Pergudangan	5,59	5,37	5,23	5,23	5,25	5,13	5,04	4,97
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,22	5,25	5,16	5,45	5,78	5,9	5,9	5,92
J	Informasi dan Komunikasi	7,53	7,72	7,66	7,42	7,3	6,98	7,02	7,14

Sektor		Tahun							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,69	1,92	2,01	2,11	2,27	2,34	2,32	2,23
L	Real Estat	3,26	3,28	3,34	3,35	3,43	3,44	3,53	3,57
M,N	Jasa Perusahaan	0,46	0,49	0,47	0,43	0,44	0,44	0,43	0,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,49	8,43	8,82	9,1	9,29	9,34	9,38	9,65
P	Jasa Pendidikan	6,05	6,15	5,97	5,89	6,15	6,35	6,2	6,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,84	1,92	1,97	1,97	1,97	2,01	2,00	2,00
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,28	3,25	3,21	3,18	3,26	3,28	3,35	3,43
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS 2018, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunungkidul menurut Lapangan Usaha 2010-2017

Data di tahun 2017 menunjukkan bahwa struktur perekonomian sebagian besar masyarakat Gunungkidul masih didominasi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sumbangan kategori ini masih mencapai kurang lebih seperempat dari nilai PDRB. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sumbangan kategori ini semakin kecil. Sumbangan masing-masing kategori pada 2016 masih didominasi oleh kategori tersebut. Diikuti oleh kategori konstruksi; kategori industri pengolahan; kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Kategori lain yang menyumbang lebih dari 5% adalah kategori transportasi dan pergudangan; kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, kategori informasi komunikasi, serta kategori jasa pendidikan. Sementara peranan kategori lainnya di bawah 5%.

Tabel 2.9.
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Gunungkidul Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2017 (%)

Sektor		Tahun							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,94	25,46	25,29	24,65	23,43	22,93	22,34	21,70
B	Pertambangan dan Penggalian	1,58	1,62	1,56	1,56	1,51	1,45	1,39	1,36
C	Industri Pengolahan	9,94	10,02	9,23	9,52	9,48	9,28	9,32	9,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,18	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15
F	Konstruksi	9,21	9,24	9,33	9,29	9,34	9,30	9,34	9,58
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,66	8,75	8,93	8,94	9,13	9,31	9,50	9,60

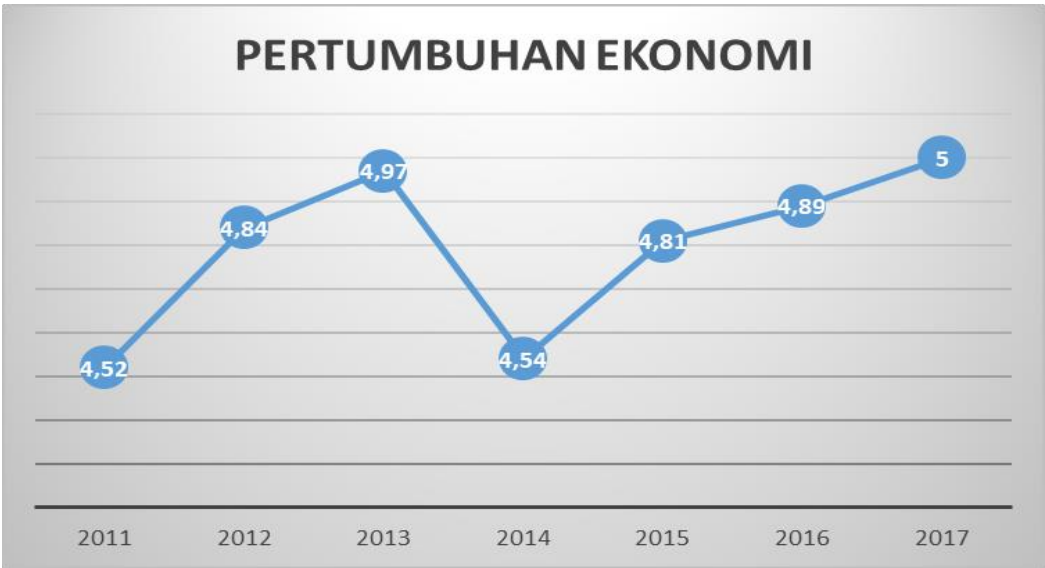
Sektor		Tahun							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
H	Transportasi dan Pergudangan	5,59	5,52	5,40	5,39	5,28	5,22	5,16	5,10
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,22	5,24	5,23	5,40	5,61	5,70	5,73	5,77
J	Informasi dan Komunikasi	7,53	8,17	8,61	8,71	8,99	9,07	9,40	9,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,69	1,87	1,83	1,95	2,07	2,15	2,15	2,06
L	Real Estat	3,26	3,35	3,37	3,35	3,47	3,53	3,59	3,60
M,N	Jasa Perusahaan	0,46	0,48	0,50	0,49	0,50	0,51	0,51	0,51
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,49	8,52	8,76	8,72	8,83	8,87	8,90	8,87
P	Jasa Pendidikan	6,05	6,25	6,29	6,29	6,51	6,68	6,59	6,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,84	1,87	1,98	2,05	2,10	2,15	2,14	2,17
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,28	3,38	3,41	3,41	3,47	3,60	3,69	3,74
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS 2018, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunungkidul menurut Lapangan Usaha 2010-2017

C. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja nyata ekonomi di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat sebagai peningkatan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua bidang usaha kegiatan ekonomi di suatu daerah selama jangka waktu satu tahun.

Gambar 2.5.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul (%)
Tahun 2011-2017



Sumber : BPS Kab. Gunungkidul, 2018

Perekonomian Gunungkidul pada tahun 2017 mengalami percepatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Gunungkidul tahun 2017 mencapai 5,00%, sedangkan tahun 2016 hanya sebesar 4,89%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori konstruksi sebesar 7,71%. Seluruh kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2017 mencatat pertumbuhan yang positif.

Tabel 2.10.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Riil
Kabupaten Gunungkidul Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2011-2017(%)

Sektor		Tahun						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,22	4,16	2,3	-0,62	2,58	2,18	1,98
B	Pertambangan dan Penggalian	7,13	0,87	4,86	1,6	0,25	0,79	2,7
C	Industri Pengolahan	5,42	-3,41	8,21	4,11	2,64	5,27	6,77
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,36	11,3	6,91	7,47	2,37	14,3	5,12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,81	2,53	1,45	3,88	2,88	2,29	3,72
F	Konstruksi	4,9	5,87	4,52	5,06	4,36	5,34	7,71
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,65	7,01	5,11	6,77	6,89	6,96	6,12
H	Transportasi dan Pergudangan	3,31	2,59	4,73	2,43	3,68	3,53	3,89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,98	4,76	8,31	8,61	6,43	5,55	5,6
J	Informasi dan Komunikasi	13,3	10,6	6,23	7,9	5,65	8,78	6,74
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	15,3	2,79	11,9	11,1	8,54	4,72	0,84
L	Real Estat	7,18	5,53	4,44	8,09	6,65	6,83	5,37
M,N	Jasa Perusahaan	8,97	8,75	3,53	6,37	7,04	5,06	6,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,95	7,77	4,54	5,79	5,26	5,26	4,62
P	Jasa Pendidikan	7,81	5,64	4,92	8,13	7,61	3,42	6,07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,58	10,9	8,42	7,37	7,19	4,48	6,13
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,81	5,64	5,17	6,42	8,65	7,47	6,5
Produk Domestik Regional Bruto		4,52	4,84	4,97	4,54	4,82	4,89	5

Sumber : BPS Kab. Gunungkidul, 2018

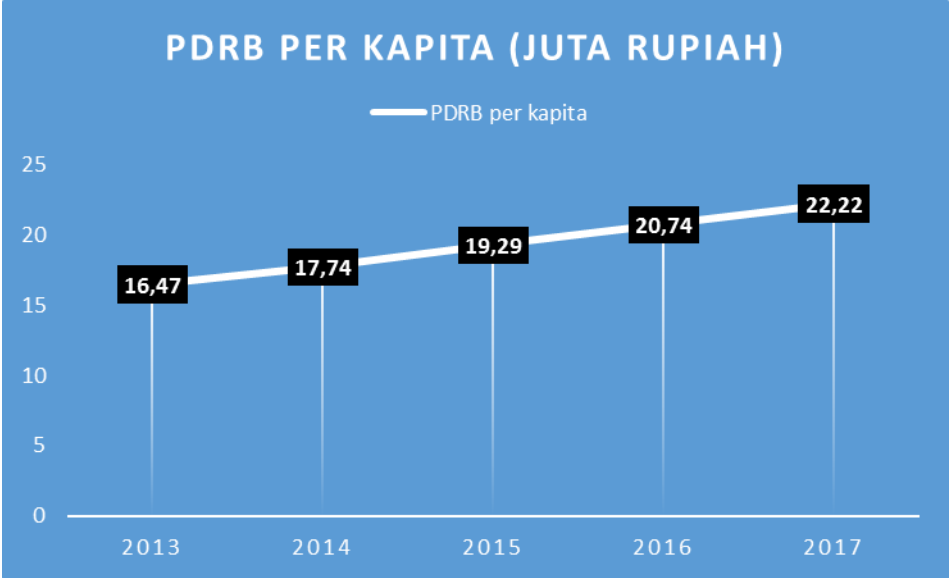
D. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi

dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Pada tahun 2017, PDRB per kapita Gunungkidul mencapai 22,22 juta Rupiah dengan pertumbuhan sebesar 5,00%. Laju pertumbuhan ini mengalami kenaikan dari sebelumnya 0,07% menjadi 0,11%.

Gambar 2.6.
PDRB Per Kapita Kabupaten Gunungkidul (Juta Rupiah),
Tahun 2013- 2017



Sumber : BPS Kab. Gunungkidul, 2018.

E. PDRB Menurut Pengeluaran

Kondisi perekonomian Gunungkidul terus menunjukkan peningkatan, terutama sejak banyak dibukanya tempat-tempat wisata baru yang menjadi alternatif tujuan baik untuk wisatawan domestik maupun mancanegara. Hal ini terlihat dari nilai PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif.

Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB.

Tabel 2.11.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Pengeluaran, Kabupaten Gunungkidul Tahun
2010-2017 (Juta Rp)

Pengeluaran PDRB	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	5.493.384,78	6.252.179,63	6.979.973,01	8.162.455,33	8.990.880,88	9.894.797,22	10.677.860,13	11.549.372,00
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	90.975,18	110.848,17	122.948,86	143.690,03	171.379,30	187.765,67	189.006,03	213.112,07
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.363.112,90	1.531.397,99	1.671.152,47	1.894.994,91	2.124.945,26	2.374.594,74	2.563.472,96	2.776.379,99
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	2.166.729,93	2.414.732,84	2.626.616,84	2.989.107,95	3.387.063,98	3.683.453,20	4.034.561,32	4.504.014,44
Perubahan Inventori	123.544,98	120.905,08	125.270,69	127.646,17	129.549,85	154.799,99	172.355,05	181.057,08
Ekspor Barang dan Jasa	5.138.958,74	5.465.392,42	6.016.882,65	6.223.575,73	6.625.928,08	7.183.640,35	7.668.782,44	8.160.438,49
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	5.528.668,57	6.156.361,71	6.997.489,98	8.011.129,31	8.872.376,10	9.680.394,27	10.323.982,84	11.177.332,28
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	8.848.037,94	9.739.094,42	10.545.354,54	11.530.340,81	12.557.371,25	13.798.656,90	14.982.055,09	16.207.041,79

Sumber: BPS 2018 , Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunungkidul Menurut Pengeluaran 2010-2017

Nilai PDRB Gunungkidul (ADHB) selama periode tahun 2010-2017 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

Selain dinilai atas dasar harga (ADHB), PDRB menurut pengeluaran juga dinilai berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010. Melalui pendekatan penghitungan ADHK, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga).

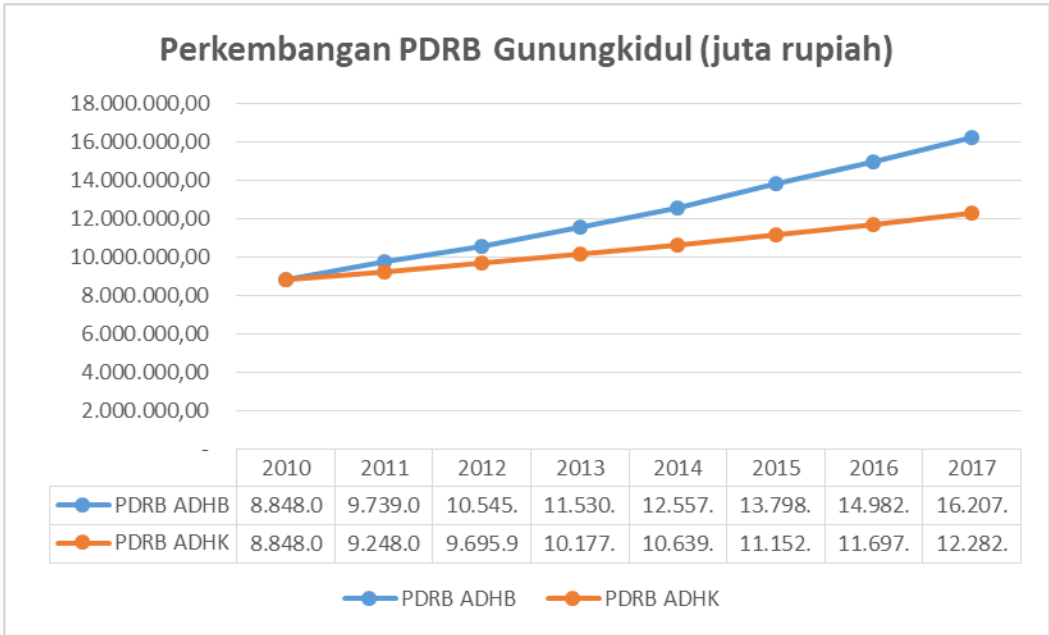
Selama kurun waktu 2010-2017, gambaran tentang perkembangan ekonomi Gunungkidul berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Sama halnya dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB Atas Dasar Harga Konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 2.12.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut
Pengeluaran, Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2010-2017 (Juta Rp)

Pengeluaran PDRB	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	5.493.384,78	5.782.782,32	6.108.242,95	6.394.905,63	6.693.690,72	6.992.867,31	7.294.493,11	7.655.428,67
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	90.975,18	102.697,22	111.690,80	122.976,11	135.961,65	141.442,03	137.481,70	147.132,97
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.363.112,90	1.422.900,59	1.512.266,52	1.591.531,89	1.656.231,37	1.740.453,89	1.778.398,29	1.833.070,48
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	2.166.729,93	2.267.005,29	2.366.573,49	2.474.180,98	2.590.677,31	2.706.368,13	2.861.809,89	3.019.909,48
Perubahan Inventori	123.544,98	105.144,37	104.079,77	108.139,48	120.381,40	127.799,32	135.592,33	139.375,62
Ekspor Barang dan Jasa	5.138.958,74	5.282.095,41	5.615.728,10	5.815.626,86	5.983.394,60	6.195.822,86	6.434.616,12	6.658.021,47
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	5.528.668,57	5.714.614,29	6.122.601,79	6.329.928,44	6.540.544,73	6.752.390,42	6.944.944,50	7.170.445,07
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	8.848.037,94	9.248.010,91	9.695.979,84	10.177.432,51	10.639.792,32	11.152.363,12	11.697.446,94	12.282.493,62

Sumber: BPS, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunungkidul Menurut Pengeluaran 2010-2017*

Gambar 2.7.
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut
Pengeluaran Kabupaten Gunungkidul,
Tahun 2010-2017



Sumber : BPS 2018, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunungkidul Menurut Pengeluaran 2010-2017*

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PKRT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

Tabel 2.13.
Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2010 - 2017 (%)

Pengeluaran PDRB	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	62.08	64.19	66.19	70.79	71.59	71.70	71.27	71.26
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.02	1.13	1.16	1.24	1.36	1.36	1.26	1.31
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	15.40	15.72	15.84	16.43	16.92	17.21	17.11	17.13
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	24.48	24.79	24.90	25.92	26.97	26.69	26.92	27.79
Perubahan Inventori	1.39	1.24	1.18	1.10	1.03	1.12	1.15	1.12
Ekspor Barang dan Jasa	58.08	56.11	57.05	53.97	52.76	52.06	51.18	50.35
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	62.48	63.21	66.35	69.47	70.65	70.15	68.90	68.96
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS 2018, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunungkidul Menurut Pengeluaran 2010-2017

Berdasarkan tabel 2.13 di atas terlihat bahwa selama periode 2010-2017, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 65%). Ekspor juga mempunyai peran yang relatif besar, karena sekitar 51 s.d 57% produk Gunungkidul bisa terjual ke daerah lain; demikian halnya impor masih mempunyai peran yang relatif besar, karena sekitar 66 s.d 70% permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk dari impor. Di sisi lain, pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 24 s.d 26%. Proporsi konsumsi akhir pemerintah masih cukup tinggi, berada pada rentang 15,85–17,11%. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik masih cukup besar.

Tabel 2.14.
Distribusi PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2010 - 2017 (%)

Pengeluaran PDRB	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	62,09	62,53	63,00	62,83	62,91	62,70	62,36	62,33
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,03	1,11	1,15	1,21	1,28	1,27	1,18	1,20
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	15,41	15,39	15,60	15,64	15,57	15,61	15,20	14,92
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	24,49	24,51	24,41	24,31	24,35	24,27	24,47	24,59
Perubahan Inventori	1,40	1,14	1,07	1,06	1,13	1,15	1,16	1,13
Ekspor Barang dan Jasa	58,08	57,12	57,92	57,14	56,24	55,56	55,01	54,21
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	62,48	61,79	63,15	62,20	61,47	60,55	59,37	58,38
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS 2018. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunungkidul Menurut Pengeluaran 2010-2017

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Gunungkidul dari tahun 2010 s.d 2017 secara rata-rata mencapai 4,84 %, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 4,97% (2013); 4,54 % (2014); 4,82 % (2015); 4,89 % (2016) dan 5,00 % pada tahun 2017. Tren pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka yang positif dengan meningkat terus sejak tahun 2014.

F. Laju Inflasi

Pada tahun 2017, laju inflasi tahun ke tahun (*year on year*) kota Wonosari sebesar 3,77 % tercatat lebih rendah bila dibanding dengan kota Yogyakarta yang tercatat mengalami laju inflasi tahun ke tahun sebesar 4,2 %, namun masih lebih tinggi bila dibanding dengan nasional yang tercatat mengalami laju inflasi sebesar 3,61 %. Dibandingkan tahun 2016 laju inflasi Kabupaten Gunungkidul tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 1,19% dari sebelumnya sebesar 2,58%. Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar menunjukkan angka inflasi tertinggi di kota Wonosari. Kelompok sandang mengalami laju inflasi tertinggi untuk kota Yogyakarta, sedangkan pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau mengalami laju inflasi tertinggi untuk nasional.

G. Rasio Gini

Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang sering dipakai adalah Rasio Gini. Ide dasar perhitungan Rasio Gini sebenarnya berasal dari upaya pengukuran luas suatu kurva (yang kemudian dinamakan Kurva Lorenz) yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pengeluaran.

Tabel 2.15
Rasio Gini Menurut Tipe Daerah di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2012-2016

No	Tipe Daerah	Tahun									
		2012		2013		2014		2015		2016	
		Rasio Gini	Kriteria Oshima	Rasio Gini	Kriteria Oshima	Rasio Gini	Kriteria Oshima	Rasio Gini	Kriteria Oshima	Rasio Gini	Kriteria Oshima
1	Perkotaan	0,3668	Moderat	0,3624	Moderat	0,3393	Moderat	0,3810	Moderat	0,4066	Moderat
2	Perdesaan	0,3422	Moderat	0,3132	Moderat	0,2825	Rendah	0,3070	Moderat	0,3204	Moderat
3	Kota + Desa	0,3579	Moderat	0,3213	Moderat	0,2897	Rendah	0,3190	Moderat	0,3337	Moderat

Sumber : Susenas, 2015'(revisi) - 2016

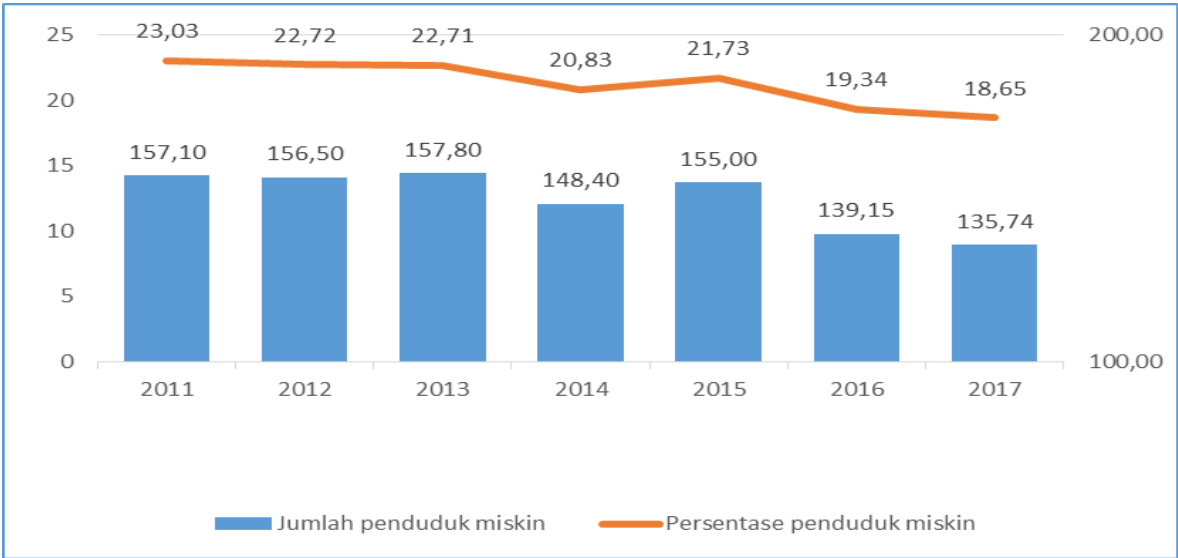
Pada Tahun 2016, Rasio Gini Kabupaten Gunungkidul tercatat 0,3337, lebih tinggi 0,0147 poin dibandingkan dengan Rasio Gini pada 2015. Hal ini berarti distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Gunungkidul pada 2016 lebih timpang dibanding 2015. Dengan kata lain, pendapatan penduduk Kabupaten Gunungkidul pada 2015 lebih merata dibanding tahun 2016. Ketimpangan distribusi pendapatan ini terjadi di semua wilayah baik perkotaan maupun pedesaan, dengan peningkatan derajat ketimpangan yang berbeda.

Jika kita bandingkan dengan kabupaten/kota lain di DIY, tingkat ketimpangan di Kabupaten Gunungkidul masih belum mengkhawatirkan seperti halnya kabupaten lain. Distribusi pendapatan Kabupaten Gunungkidul masih lebih merata dibandingkan dengan kabupaten/kota lain walaupun masih berada dalam kategori moderat.

H. Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung garis kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dengan data SUSENAS-nya. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan, yang terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan, sehingga garis kemiskinan merupakan penjumlahan garis kemiskinan makanan dengan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari, sedangkan garis kemiskinan non-makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Gambar 2.8.
Angka Kemiskinan Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2011-2017 (%)



Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul, 2018

Secara absolut maupun persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul sejak tahun 2011 hingga 2017 mengalami penurunan, meskipun sempat terjadi kenaikan angka kemiskinan di tahun 2015. Penurunan angka kemiskinan didukung oleh berkembangnya sektor pariwisata yang dapat membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sehingga perekonomian masyarakat di Kabupaten Gunungkidul meningkat.

Garis kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul merupakan yang terendah dibanding kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika dilihat dari garis kemiskinan Kabupaten Gunungkidul pada 2016 sebesar Rp.264.637,00 per kapita per bulan, menjadi Rp.277.261,00 per kapita per bulan pada 2017, angka ini masih jauh dari angka garis kemiskinan DIY yang pada 2017 sebesar Rp.374.009,00. Garis kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2011-2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.16
Garis Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2017

No	Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah)
1	2011	220.479
2	2012	228.745
3	2013	238.256
4	2014	243.847
5	2015	250.630
6	2016	264.637
7	2017	277.261

Sumber: BPS Kab. Gunungkidul, 2018

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2017 garis kemiskinan yang ditetapkan sebesar Rp.277.261,00 dengan persentase penduduk miskin Kabupaten Gunungkidul sebesar 18,65% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 135.700 orang. Dari data tersebut berarti terjadi penurunan angka kemiskinan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,69% dan untuk Gunungkidul ditarget menurunkan angka kemiskinan menjadi 14,30%, akan tetapi oleh Pemerintah DIY diharuskan mengikuti target penurunan angka kemiskinan dengan target 7%-8% di tahun 2019. Sedangkan target di RPJMD Gunungkidul penurunan angka kemiskinan dengan angka tersebut masih jauh dari target penurunan kemiskinan di tahun 2021 sebesar 15,6%, padahal kalau Gunungkidul diwajibkan mengikuti Pemerintah DIY target penurunan menjadi 7% pada tahun 2022.

Menurut data Basis Data Terpadu (BDT) 2015 yang diterima dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), jumlah rumah tangga dengan status kesejahteraan 40% terendah di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 97.217 RT dengan jumlah individu sebanyak 328.207 jiwa. Kcamatan denga tingkat kemiskinan paling tinggi adalah kecamatan Saptosari diikuti dengan tanjungsari dan Gedangsari. Sedangkan Kecamatan dengan persentase penduduk miskin paling rendah ada di Kecamatan Wonosari.

Tabel 2.17.
 Status kesejahteraan individu per
 Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul
 Tahun 2015

Kecamatan	Jumlah Individu					Jml Penduduk (BPS 2015)	Presentase	Rangking Kemiskinan
	Desil 1 *)	Desil 2 *)	Desil 3 *)	Desil 4 *)	TOTAL			
Saptosari	5.464	5.414	7.989	5.231	24.098	35.722	67,46	1
Tanjungsari	3.599	4.098	5.610	3.787	17.094	26.786	63,82	2
Gedangsari	3.910	4.502	8.316	5.979	22.707	36.757	61,78	3
Nglipar	3.450	4.380	5.405	4.335	17.570	30.945	56,78	4
Panggang	3.243	2.968	5.462	3.441	15.114	27.635	54,69	5
Tepus	4.055	3.875	5.857	4.354	18.141	33.240	54,58	6
Rongkop	2.290	2.714	5.724	4.221	14.949	28.039	53,32	7
Girisubo	2.473	2.691	4.100	3.051	12.315	23.126	53,25	8
Semanu	4.687	5.246	9.285	7.654	26.872	53.930	49,83	9
Paliyan	2.627	3.181	4.961	3.809	14.578	30.315	48,09	10
Semin	3.951	4.370	8.819	7.240	24.380	51.101	47,71	11
Ponjong	4.652	4.572	8.862	6.617	24.703	51.912	47,59	12
Purwosari	1.469	1.695	3.380	2.869	9.413	20.183	46,64	13
Ngawen	2.062	2.592	5.088	4.161	13.903	32.964	42,18	14
Karangmojo	2.367	3.588	6.816	5.855	18.626	50.830	36,64	15

Kecamatan	Jumlah Individu					Jml Penduduk (BPS 2015)	Presentase	Rangking Kemiskinan
	Desil 1 *)	Desil 2 *)	Desil 3 *)	Desil 4 *)	TOTAL			
Playen	2.203	3.889	7.164	6.735	19.991	56.808	35,19	16
Patuk	996	1.630	4.294	4.029	10.949	31.630	34,62	17
Wonosari	3.038	3.754	8.530	7.482	22.804	82.103	27,77	18
JUMLAH	12.013	18.043	35.703	31.458	97.217	704.026		

Sumber : Bappeda Kabupaten Gunungkidul, 2016

Tabel 2.18
Jumlah Penerima Raskin dan Jenis Kloset per Kecamatan
Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016

Kecamatan	Jml Penduduk (BPS 2015)	Penerima Rastra	% Penerima Raskin	Jenis closet	
				Cemplung cubluk	Tidak pakai
Saptosari	35.722	5.409	15,14	2.043	22
Gedangsari	36.757	6.105	16,61	3.05	23
Tanjungsari	26.786	3.869	14,44	824	31
Nglipar	30.945	5.04	16,29	1.478	4
Panggang	27.635	4.096	14,82	640	19
Tepus	33.24	4.214	12,68	1.471	11
Rongkop	28.039	3.613	12,89	1.064	36
Girisubo	23.126	2.812	12,16	1.007	20
Semanu	53.93	5.312	9,85	1.713	5
Paliyan	30.315	4.534	14,96	2.472	5
Semin	51.101	5.838	11,42	2.736	24
Ponjong	51.912	5.66	10,90	1.851	19
Purwosari	20.183	1.713	8,49	284	6
Ngawen	32.964	3.775	11,45	1.621	6
Karangmojo	50.83	5.074	9,98	1.244	12
Playen	56.808	6.764	11,91	1.745	21
Patuk	31.63	2.817	8,91	984	13
Wonosari	82.103	3.967	4,83	754	12

Sumber : Bappeda Kab. Gunungkidul, 2016 (Sikab.gunungkidulkab.go.id)

Dari tabel 2.18 dapat diketahui bahwa persentase penerima raskin di Kecamatan Gedangsari merupakan yang terbesar se Kabupaten Gunungkidul, yakni 16,61%. Kecamatan Saptosari juga mempunyai persentase penerima raskin yang cukup tinggi (tertinggi ke-3) yakni sebesar 15,14%. Besarnya penerima raskin di kedua kecamatan tersebut menjadi indikator tingkat kesejahteraan masyarakatnya cukup rendah. Demikian pula dengan kondisi jamban yang kurang layak, yakni jamban cemplung cubluk yang masih sangat banyak di Kecamatan Gedangsari dan Kecamatan Saptosari, yakni masing-masing 3.050 rumah tangga dan 2.043 rumah tangga. Bahkan di kedua kecamatan tersebut masih terdapat rumah tangga yang tidak memakai jamban. Dengan masih banyaknya rumah tangga dengan kondisi jamban yang tidak layak, maka diperlukan program-program untuk dapat mengatasi masalah

tersebut.

Tabel 2.19
Jumlah Penerima Raskin dan Jenis Kloset per
Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016

Kecamatan	Jumlah Penduduk (BPS 2015)	Penerima Raskin	% Penerima Raskin	Jenis Kloset	
				Cemplung cubluk	Tidak pakai
Saptosari	35.722	5.409	15,14	2.043	22
Gedangsari	36.757	6.105	16,61	3.050	23
Tanjungsari	26.786	3.869	14,44	824	31
Nglipar	30.945	5.040	16,29	1.478	4
Panggang	27.635	4.096	14,82	640	19
Tepus	33.240	4.214	12,68	1.471	11
Rongkop	28.039	3.613	12,89	1.064	36
Girisubo	23.126	2.812	12,16	1.007	20
Semanu	53.930	5.312	9,85	1.713	5
Paliyan	30.315	4.534	14,96	2.472	5
Semin	51.101	5.838	11,42	2.736	24
Ponjong	51.912	5.660	10,90	1.851	19
Purwosari	20.183	1.713	8,49	284	6
Ngawen	32.964	3.775	11,45	1.621	6
Karangmojo	50.830	5.074	9,98	1.244	12
Playen	56.808	6.764	11,91	1.745	21
Patuk	31.630	2.817	8,91	984	13
Wonosari	82.103	3.967	4,83	754	12

Sumber : Bappeda Kab. Gunungkidul, 2016 (Sikab.gunungkidulkab.go.id)

Di Kecamatan Saptosari dan Kecamatan Gedangsari terdapat pula Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Adapun jumlah RTLH Di Kecamatan Saptosari sebesar 107 RT, sedangkan di Kecamatan Gedangsari sebanyak 54 RT. Tabel 2.20 di bawah ini menyajikan data jumlah RTLH per desa di Kecamatan Saptosari dan Kecamatan Gedangsari.

Tabel 2.20
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan WC cemplung
Di Kecamatan Saptosari dan Kecamatan Gedangsari Tahun 2016

Kecamatan	Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah RTLH	Jumlah WC ceplung
Gedangsari	Ngalang	7.8	232	556
	Hargomulyo	6.565	196	655
	Mertelu	3.647	164	494
	Tegalrejo	7.092	385	468
	Watugajah	3.82	172	141
	Sampang	2.801	7	312

Kecamatan	Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah RTLH	Jumlah WC cemplung
	Serut	5.032	70	424
	JUMLAH	36.757	1.226	3.05
Saptosari	Planjan	5.654	321	476
	Kanigoro	6.064	127	216
	Kepek	5.875	36	401
	Monggol	4.376	171	460
	Krambilsawit	5.68	56	183
	Jetis	4.822	13	154
	Ngloro	3.251	22	153
	JUMLAH	35.722	746	2.043

Sumber: Bappeda Kab. Gunungkidul, 2016

II.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis Kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator- indikator : angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka konsumsi riel per kapita, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kematian bayi, angka kematian ibu, angka usia harapan hidup dan status gizi balita.

A. Angka Melek Huruf

Proses pendidikan akan melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan sehingga bekal untuk berperan dan berinteraksi dalam masyarakat. Kemampuan dasar yang diperoleh dalam proses belajar adalah kemampuan baca-tulis. Salah satu indikator untuk mengukur kemampuan baca-tulis penduduk adalah angka melek huruf. Indikator ini merepresentasikan kemampuan dasar penduduk dalam memahami basis ilmu pengetahuan secara umum. Angka Melek Huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.

Tabel 2.21
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2012 - 2016
Kabupaten Gunungkidul

No.	Uraian	2012 *	2013 *	2014	2015	2016
1	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Dapat Membaca dan Menulis	N/A	N/A	596.087	599.557	607.410
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas	N/A	N/A	605.647	606.409	609.488
3	Angka Melek Huruf	84,97	85,22	98,42	98,87	99,66

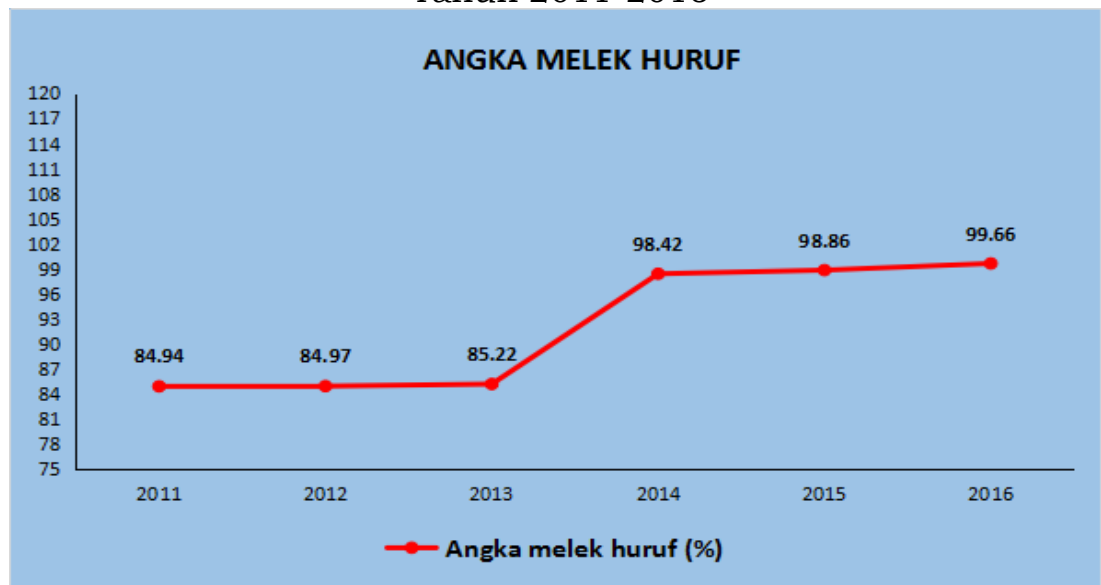
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016

* Metode penghitungan oleh BPS

Angka melek huruf Kabupaten Gunungkidul yang mencapai 99,66 % di

tahun 2016 menunjukkan bahwa proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis sebanyak 99,66% dari jumlah total penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.

Gambar 2.9.
Angka Melek Huruf Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2011-2016



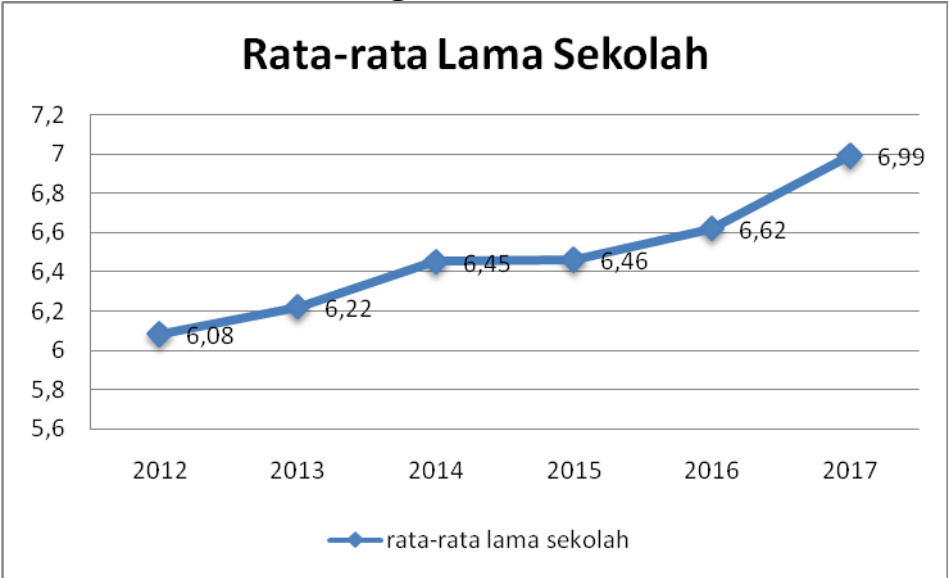
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul, 2017

Angka melek huruf Kabupaten Gunungkidul yang mencapai 99,66% di tahun 2016 menunjukkan bahwa proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis sebanyak 99,66% dari jumlah total penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.

B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Kemampuan dasar baca tulis dalam bangku sekolah juga diperlukan keterampilan lain bagi siswa, diperlukan suatu indikator yang dapat mewakili tingkat ketrampilan bagi mereka yang telah memperoleh pendidikan. Semakin lama/dari penjangangan mereka mengenyam bangku sekolah dalam penjenjangan diharapkan memiliki ketrampilan yang lebih baik. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan hal itu adalah rata-rata lama sekolah yang dijalani oleh penduduk berusia lima belas tahun ke atas. Ukuran ini memberikan informasi sejauh mana tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk.

Gambar 2.10.
Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2012-2017



Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gunungkidul 2017

Pada tahun 2017, rata-rata lama sekolah penduduk Gunungkidul mencapai 6,99 tahun. Rata-rata lamanya penduduk berusia 15 tahun ke atas ini setara dengan kelas tujuh SLTP. Perkembangan angka rata-rata lama sekolah menunjukkan perkembangan yang cukup lambat. Dibandingkan dengan daerah lain di DIY, relatif lebih rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan prioritas meningkatkan akses penduduk untuk memperoleh pendidikan masih perlu perhatian serius. Lebih lanjut, jika dicermati ada perbedaan yang cukup signifikan angka partisipasi sekolah pada level SLTP dan SMA penduduk Kabupaten Gunungkidul dengan lainnya memberi petunjuk perlunya kesempatan yang lebih luas bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan SLTP dan SMA.

C. Partisipasi Sekolah

Ada beberapa indikator yang berguna untuk menjelaskan situasi partisipasi sekolah penduduk. Beberapa indikator tersebut adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

APS merupakan indikator daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Sebagai indikator dasar, APS dapat digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS, maka semakin besar jumlah penduduk

yangberkesempatan mengenyam pendidikan. Akan tetapi meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Tabel 2.22.

Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Usia Sekolah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017 (%)

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	SD /MI					
	Jumlah siswa SD/MI	51.869	51.216	51.543	56.637	56.907
	Jumlah Penduduk usia 7 – 12 tahun	60.697	58.594	62.210	62.291	61.651
	APS SD/MI	94,31	90,60	92,08	100,20	102,58
2.	SMP / MTS					
	Jumlah siswa SMP/MTS	25.203	25.119	25.025	30.761	29.209
	Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun	31.228	30.494	32.107	30.536	30.012
	APS SMP/MTS	99,00	92,52	95,61	119,58	115,67

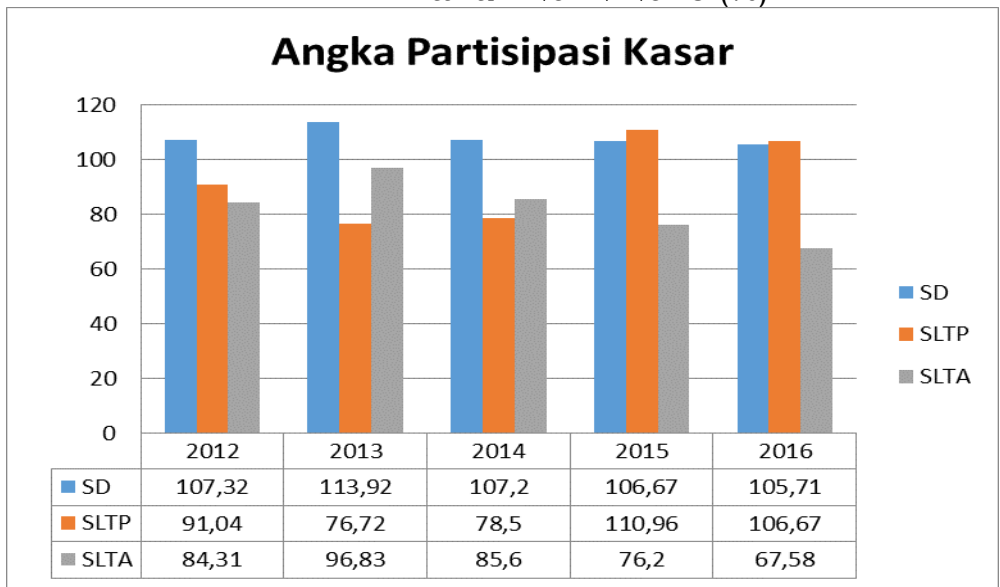
Berdasarkan tabel 2.22 terlihat bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) tertinggi terdapat pada kelompok usia 7-12 tahun, yaitu sebesar 100,00%. Hal ini berarti sudah tidak ada penduduk berusia 7-12 tahun yang tidak bersekolah. Demikian juga untuk APS penduduk berusia 13 – 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai angka APS absolut yaitu 100%, hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi penduduk berusia 13-15 tahun yang tidak bersekolah. Jika dilihat menurut jenis kelamin, terlihat APS penduduk usia 16-18 tahun perempuan lebih besar daripada laki-laki. Perlu dikaji lebih jauh untuk melihat penyebab fenomena ini namun diduga berkaitan dengan kultur mencari kerja atau sekedar membantu orang tua mencari nafkah bagi kaum laki-laki di Gunungkidul.

D. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) berguna untuk melihat partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan Persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan program

pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK suatu jenjang pendidikan bisa lebih dari 100% karena masih terdapat siswa yang berusia di luar batasan usia sekolah baik yang lebih tua maupun yang lebih muda.

Gambar 2.11.
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2012-2016 (%)



Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016

Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Gunungkidul tahun 2012-2016 untuk tingkat SD dari tahun ke tahun mencapai lebih dari 100%, untuk SMP mulai tahun 2015 juga mencapai lebih dari 100%, dimana pada tahun-tahun sebelumnya di bawah 100%. Perbedaan angka-angka di atas lebih disebabkan oleh banyaknya anak sekolah yang masuk suatu tingkatan sekolah namun diluar umur umumnya untuk tingkatan tersebut semisal anak yang berumur kurang dari tujuh tahun namun sudah masuk SD.

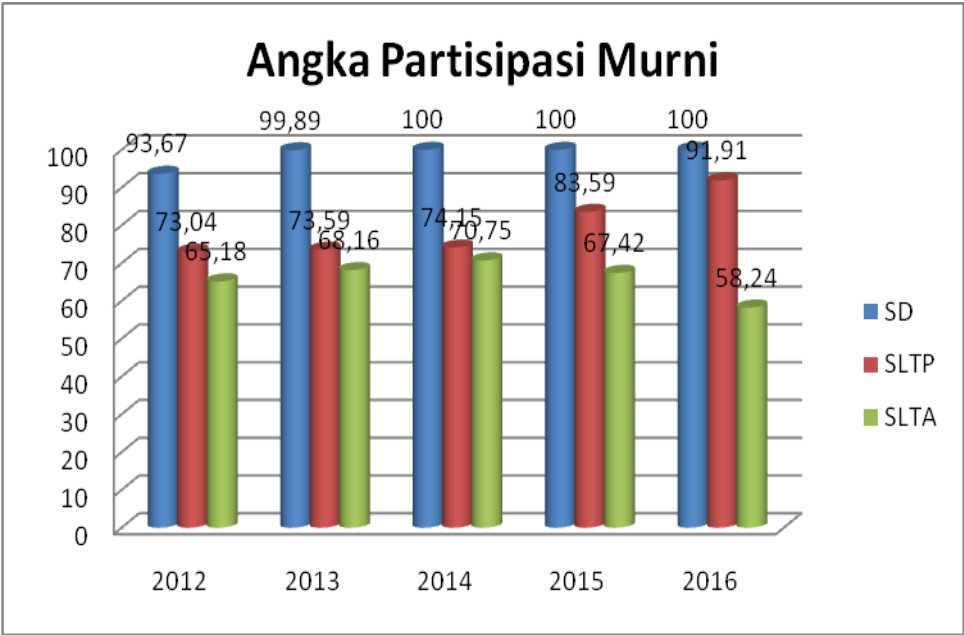
E. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan Persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu

tanpa melihat berapa usianya, maka APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Gambar 2.12.
Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 – 2016



Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016

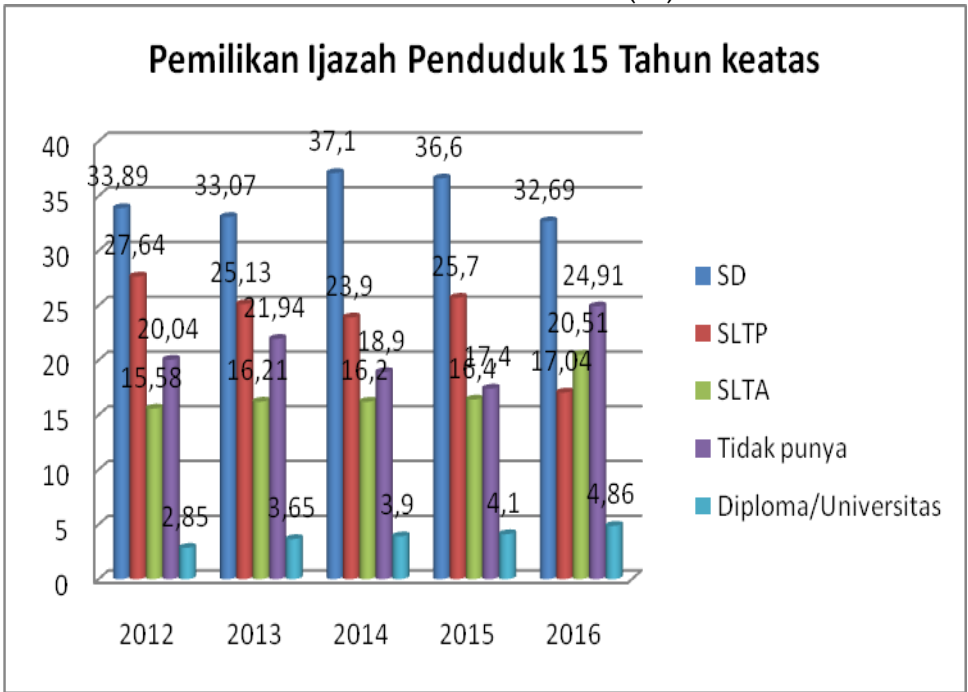
Pada 2016 di Kabupaten Gunungkidul, APM pada jenjang SD sebesar 100% yang berarti bahwa seluruh anak usia 7-12 tahun telah bersekolah di SD tepat waktu. Untuk jenjang SLTP dan SLTA belum 100% anak usia sekolah SLTP dan SLTA yang bersekolah karena bisa disebabkan beberapa hal seperti putus sekolah atau setelah lulus SD atau SLTP langsung bekerja.

F. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin tinggi kualitas SDM nya dan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Berdasarkan Susenas 2016 yang berbeda dengan Susenas 2015 dimana usia penduduk yang menamatkan pendidikan dari sebelumnya usia 10 tahun menjadi 15 tahun, dari susenas

2016 diketahui jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Gunungkidul terbesar adalah tamatan SD sederajat yaitu sebesar 32,69%. Namun yang tidak memiliki ijazah masih tergolong tinggi yaitu 24,91%, hal ini mencerminkan kualitas SDM dari aspek pendidikan masih rendah, hanya 4,68% penduduk 15 tahun keatas yang memiliki ijazah Diploma dan Sarjana. Antara laki-laki dan perempuan tidak ada kesenjangan penerima manfaat layanan pendidikan, prosentase keduanya berimbang di setiap jenjang pendidikan.

Gambar 2.13.
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 – 2016 (%)

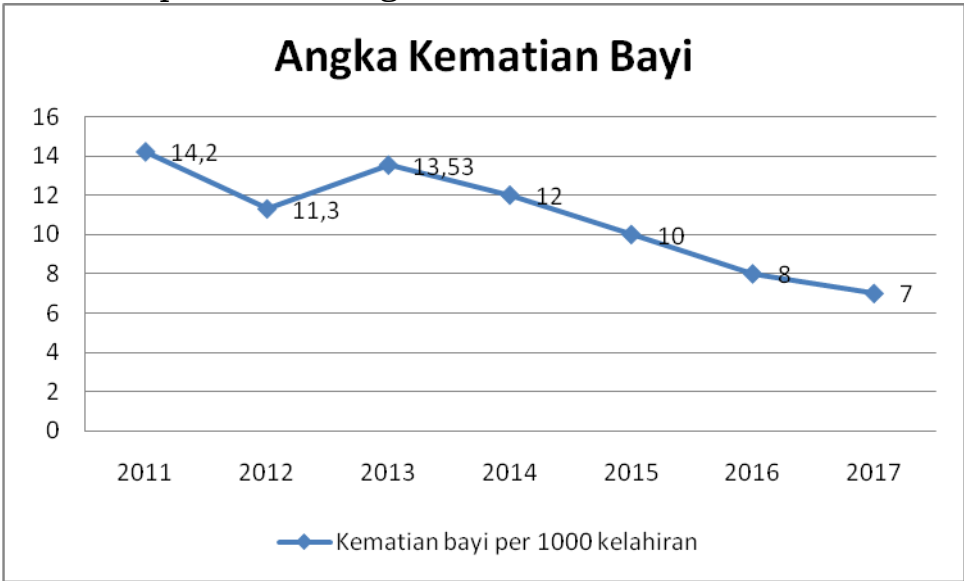


Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Kab. Gunungkidul 2016

G. Angka Kematian Bayi

Indikator ini dapat menunjukkan dimensi sosial dan kesehatan masyarakat dengan bertitik tolak pada pandangan bahwa penduduk yang rentan terhadap perubahan sosial ekonomi dan kualitas lingkungan adalah mereka yang berumur kurang dari satu tahun. Kualitas kehidupan bayi sangat tergantung dari kondisi sosial ekonomi orang tua atau orang yang mengasuh, dengan kecenderungan bahwa semakin baik kondisi sosial dan ekonomi orang tua, makin besar pula peluang seorang bayi memperoleh kualitas hidup lebih baik serta berumur panjang.

Gambar 2.14.
 Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup
 Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 – 2017



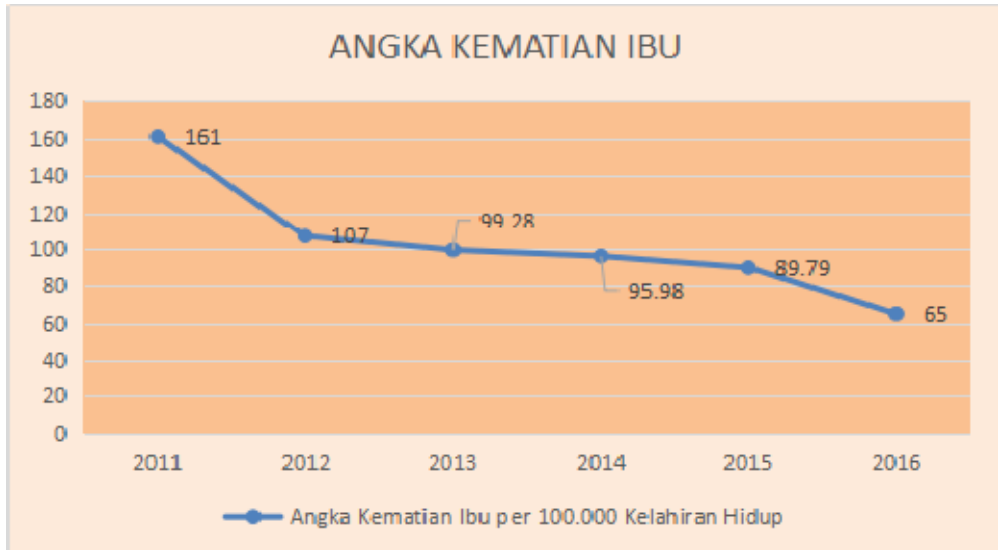
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, 2017

Angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2017 menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul diperkirakan sebesar 7 bayi untuk setiap 1000 kelahiran hidup. Artinya bahwa dari 1000 anak yang terlahir dengan menunjukkan tanda-tanda kehidupan, 8 diantaranya meninggal sebelum genap berumur setahun. Angka Kematian Bayi masih tergolong tinggi bila dibanding dengan Kabupaten lain di DIY. Penyebab utama kematian bayi adalah BBLR, premature, dan asfiksia. Di Kabupaten Gunungkidul angka kematian bayi selama beberapa tahun terakhir diperkirakan relatif menurun dengan jumlah kasus kematian bayi kurang dari 20 untuk setiap 1000 kelahiran hidup. Yang perlu dicatat bahwa upaya menurunkan angka kematian bayi memerlukan waktu yang relatif panjang serta kebijakan yang konsisten dengan keberpihakan terhadap kesehatan ibu dan anak. Dalam kondisi ini, posisi Pemerintah dibutuhkan untuk menyusun skema pembiayaan kesehatan yang tidak hanya berorientasi pada mereka yang memiliki uang cukup, namun mereka yang tidak mampu juga memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan. Disamping itu, upaya untuk meningkatkan usia perkawinan pertama penduduk terutama wanita dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan persalinan dari tenaga medis/paramedis juga perlu dilakukan oleh pemerintah untuk memperkecil angka kematian bayi.

- H. Angka Kematian Ibu
 Angka kematian ibu yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul tahun

2016 sebesar 65 per 100.000 kelahiran hidup, turun dibandingkan tahun 2015, dan angka tersebut masih dibawah target angka kematian ibu tingkat nasional 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2016. Kasus kematian ibu tersaji pada Gambar berikut ini :

Gambar 2.15.
Angka Kematian Ibu Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2011 – 2016

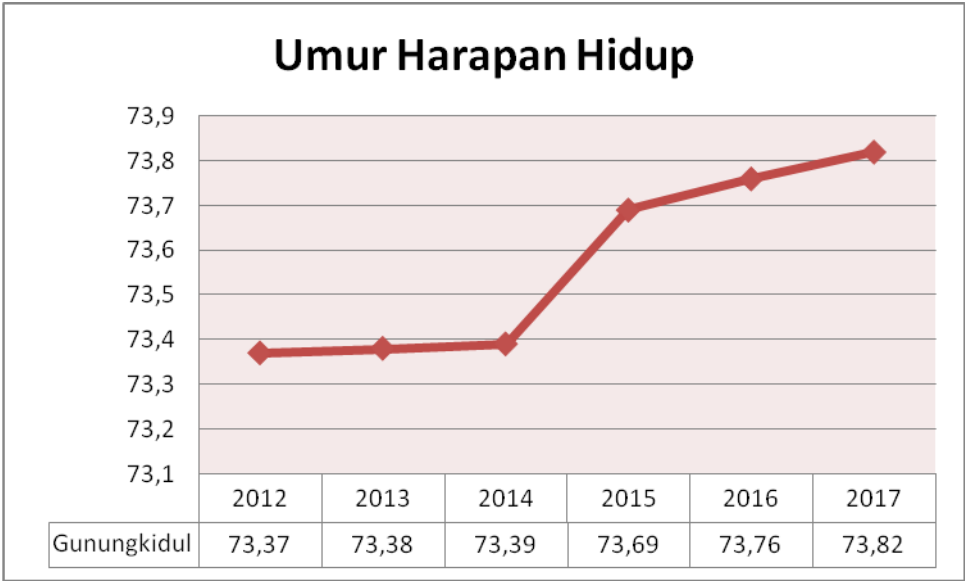


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, 2016

I. Umur Harapan Hidup

Indikator ini menunjukkan kondisi dan sistem pelayanan kesehatan masyarakat, karena mampu merepresentasikan *output* dari upaya pelayanan kesehatan secara komprehensif. Angka harapan hidup merupakan indikator yang cukup efektif untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada khususnya. Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan di suatu wilayah akan disertai oleh peningkatan usia harapan hidup penduduknya, namun sebaliknya semakin rendah usia harapan hidup di suatu wilayah mencerminkan buruknya kualitas pembangunan kesehatan. Angka harapan hidup menggambarkan perkiraan rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.

Gambar 2.16.
Umur Harapan Hidup Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2012- 2017



Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul.
2012- 2017

Berdasarkan Gambar 2.17 dari tahun ke tahun Angka Harapan Hidup Kabupaten Gunungkidul semakin meningkat, artinya derajat kesehatan penduduk Kabupaten Gunungkidul memiliki kecenderungan terus meningkat. Peningkatan usia harapan hidup juga dapat dijadikan sebagai gambaran keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi. Pada 2012 Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Gunungkidul mencapai 73,37 tahun dan pada 2017 meningkat menjadi 73,82 tahun. Angka ini bermakna bahwa anak yang lahir pada tahun 2017 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur 73,82 tahun.

J. Status Gizi Balita

Status gizi balita dapat merupakan status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dan asupan. Penilaian status gizi merupakan pengukuran yang dapat berdasarkan pada data antropometri atau serta biokimia. Dalam menentukan status gizi balita harus ada ukuran baku yang sering disebut *reference*. Pengukuran baku antropomentri yang sekarang digunakan di Indonesia adalah WHO-NCHS. Klasifikasi Status Gizi Balita dibagi menjadi empat yaitu : Gizi Buruk, Gizi Kurang, Gizi Baik dan Gizi Lebih. Untuk mengetahui status gizi balita di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel 2.22 berikut ini :

Tabel. 2.23.
Status Gizi Balita Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2016

Status Gizi Balita	Target (%)	2014		2015		2016	
		Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
1. Buruk	< 1 %	162	0,48	170	0,52	189	0,58
2. Kurang	< 20 %	2.292	6,76	2.017	6,19	2.429	7,46
3. Baik	> 80 %	30.692	90,51	29.609	90,91	29.607	90,9
4. Lebih	< 3 %	765	2,26	775	2,38	853	2,62

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, 2017

Berdasar tabel di atas terlihat bahwa balita gizi buruk dan gizi kurang di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 mengalami peningkatan, namun untuk kasus gizi kurang menunjukkan angka yang lebih baik. Masalah gizi di Kabupaten Gunungkidul perlu diwaspadai untuk gizi lebih dan masalah gizi lain diantaranya masalah gizi mikro.

II.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Budaya menjadi modal utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Gunungkidul memiliki karakter budaya khas sehingga dengan karakter tersebut ke depan Kabupaten Gunungkidul diharapkan lebih maju, mantap, dan mampu menjalankan roda pembangunan. Dinamisasi budaya juga harus diimbangi dengan mental yang sehat serta fisik yang kuat, sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan tersebut. Setidaknya terdapat keanekaragaman seni budaya dan olah raga baik modern maupun tradisional di Kabupaten Gunungkidul yang perkembangannya tergambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.24.
Jumlah Grup Kesenian dan Klub Olahraga Tahun 2013 – 2018

No	Capaian pembangunan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah organisasi kesenian	2.151	2.151	2.151	2.337	2.607	2.645
2	Jumlah gedung kesenian	1	1	9	9	9	9
3	Jumlah organisasi Olahraga	25	30	30	32	23	23
4	Jumlah gedung olahraga	1	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Gunungkidul, 2018

II.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul secara keseluruhan. Salah satu indikator aspek pelayanan umum adalah pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah ditetapkan sebanyak 15 bidang, yaitu :

1. Bidang Lingkungan Hidup
2. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
3. Bidang Kesehatan
4. Bidang Perumahan Rakyat
5. Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
6. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
7. Bidang Pendidikan Dasar
8. Bidang Ketenagakerjaan
9. Bidang Sosial
10. Bidang Komunikasi dan Informatika
11. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12. Bidang Kesenian
13. Bidang Ketahanan Pangan
14. Bidang Perhubungan
15. Bidang Penanaman Modal

Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, terdapat perubahan kebijakan dan konsep SPM. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut diatur tentang urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang merupakan pelayanan dasar tersebut. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat. Namun demikian, Standar Pelayanan Minimal serta petunjuk teknis lebih lanjut terkait penerapan SPM pada keenam bidang tersebut belum terbit. Mensikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tetap menerapkan dan melaporkan penyelenggaraan pelayanan dasar dengan mendasarkan pada 15 bidang Standar Pelayanan Minimal sebagaimana ketentuan sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terbit.

Dalam mempercepat pencapaian target SPM di daerah memerlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. Kecenderungan daerah mengedepankan pendekatan politis terkadang mengesampingkan kewajiban untuk memprioritaskan pemenuhan SPM. Keterbatasan anggaran di daerah menuntut untuk mensinergikan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif *top down, bottom up* dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Keterlambatan pemerintah pusat dalam menetapkan Standar Pelayanan Minimal berikut pedoman teknisnya pada urusan wajib yang berkaitan dengan 6 (enam) bidang pelayanan dasar yang mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menjadi salah satu hambatan untuk merencanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian SPM. Namun demikian, dalam perencanaan tetap diupayakan pemenuhan terhadap 15 bidang SPM, meskipun nantinya tidak lagi menjadi bidang SPM ataupun terdapat perubahan indikator dan targetnya, SPM yang selama ini telah diterapkan tetap harus diupayakan pencapaiannya melalui strategi dan kebijakan daerah setiap tahunnya dalam mencapai target terutama pada dukungan anggaran.

II.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

A. Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu pembangunan di bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan minimal kesempatan untuk mengenyam pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun. Pemerataan tersebut juga harus diimbangi dengan usaha peningkatan mutu pendidik maupun sarana dan prasarana yang relevan dengan kondisi dan dinamika yang ada, untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan.

a) Jenjang SD/MI

Tabel 2.25.
Aspek Pelayanan Umum Urusan Pendidikan Jenjang
SD/MI Kabupaten Gunungkidul 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah SD Negeri/ Swasta	485	485	485	474	473
2	Jumlah MI Negeri/Swasta	78	78	79	79	79
3	Jumlah Siswa SD Negeri/Swasta	51.869	51.197	51.543	56.637	56.907
4	Jumlah Siswa MI Negeri/Swasta	5.372	5.426	5.742	5.777	6.335
5	Lulusan SD/MI	10.417	10.23	10.23	8.76	9.408
7	Ruang Kelas SD Negeri/Swasta	3.593	3.071	3.070	2.965	2.965
8	Ruang Kelas MI Negeri/ Swasta	461	461	461	461	461
9	Jumlah Guru SD Negeri	4.318	4.318	4.220	4.051	3.638
10	Jumlah Guru SD Swasta	545	545	554	482	1.027
11	Jumlah Guru MI Negeri	176	193	134	155	157
12	Jumlah Guru MI Swasta	690	720	655	667	1.098
13	Rasio siswa dengan guru	9,99	9,80	10,30	11,66	10,68
14	Rasio siswa dengan sekolah	101,67	100,57	101,57	112,86	114,57

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul 2017

b) Jenjang SLTP

Tabel 2.26.
Aspek Pelayanan Umum Urusan Pendidikan Jenjang SLTP
Kabupaten Gunungkidul 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah SMP Negeri/Swasta	108	109	113	111	113
2	Jumlah MTs Negeri/Swasta	30	30	31	31	31
3	Jumlah Siswa SMP Negeri/Swasta	25.203	25.119	25.025	30.761	29.209
4	Jumlah Siswa MTs Negeri/Swasta	5.713	5.565	5.673	5.753	5.506
5	Lulusan SMP/MTs	10.131	10.04	9.545	10.262	10.192
7	Ruang Kelas SMP Negeri/Swasta	908	915	957	1.009	1.161
8	Ruang Kelas MTs Negeri/Swasta	175	219	219	219	219
9	Jumlah Guru SMP Negeri	1.509	1.509	1.437	1.729	1.666
10	Jumlah Guru SMP Swasta	644	844	827	1.090	959
11	Jumlah Guru MTs Negeri	245	250	224	219	237
12	Jumlah Guru MTs Swasta	377	347	373	289	249
13	Rasio siswa dengan guru	11,14	10,40	10,73	10,98	11,16
14	Rasio siswa dengan sekolah	224,03	220,75	213,18	257,14	241,08

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul 2017

c) Jenjang SLTA

Tabel 2.27
Aspek Pelayanan Umum Urusan Pendidikan
Jenjang SLTA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah SMA Negeri/ Swasta	23	23	24	24	22
2	Jumlah SMK Negeri/ Swasta	44	46	46	46	46
3	Jumlah MA Negeri/Swasta	8	9	9	9	9
4	Jumlah Siswa SMA Negeri/Swasta	6.541	5.729	5.907	5.971	6.064
5	Jumlah Siswa SMK Negeri/Swasta	16.531	16.117	17.295	17.623	19.100
6	Jumlah Siswa MA Negeri/Swasta	1.192	1.257	1.365	1.529	1.832
7	Lulusan SMA Negeri/Swasta	2	1.924	1.751	7.441	1.837
8	Lulusan SMK Negeri/Swasta	4.843	5.016	3.666		5.293
9	Lulusan MA Negeri/Swasta	164	297	180		338
10	Ruang Kelas SMA Negeri/Swasta	218	236	266	241	258
11	Ruang Kelas SMK Negeri/Swasta	461	596	523	633	506
12	Jumlah Guru SMA Negeri	497	502	486	537	513
13	Jumlah GuruSMA Swasta	335	323	326	295	282
14	Jumlah Guru SMK Negeri	633	684	634	755	766
15	Jumlah Guru SMK Swasta	983	1.021	1.031	1.009	1.001
16	Jumlah Guru MA Negeri	40	46	44	37	48
17	Jumlah Guru MA Swasta	116	151	168	108	142

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul, 2017

Pada bidang pendidikan, SPM dari 27 indikator, baru tercapai 6 indikator. Keberhasilan penerapan dan pencapaian target SPM bidang pendidikan dasar tidak hanya ditentukan oleh pemerintah kabupaten saja namun juga Kementerian Agama. Capaian indikator terpenuhinya kebutuhan ruang kelas, meja/kursi, dan papan tulis untuk setiap rombongan belajar masih di bawah target nasional. Pada 139 sekolah belum memenuhi sub indikator ini, masih terdapat kursi siswa tanpa sandaran (tidak sesuai SPM) dan kursi yang rusak masih dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Capaian indikator setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA masih rendah yaitu masing-masing 32,91% dan 7,59% dari target nasional 100%. Beberapa SD/MI memiliki alat peraga dan bahan IPA tetapi jenisnya tidak lengkap dan beberapa kondisinya rusak sehingga perlu pemeliharaan/penggantian alat praktik IPA.

Sebagian SMP/MTs belum memiliki laboratorium IPA lengkap dengan meja kursi untuk 36 peserta didik beserta 1 set alat praktik IPA untuk demonstrasi dan eksperimen yang terdiri dari 41 item alat peraga. Terdapat 92 sekolah yang belum memiliki ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk 36 peserta didik. Sebanyak 125 sekolah belum memiliki set peraga IPA secara lengkap. Belum terpenuhinya kebutuhan ruang kelas, meja/kursi dan papan tulis setiap rombongan belajar pada sebagian SMP/MTs disebabkan masih ada sekolah yang menggunakan kursi tanpa sandaran dan meja kursi yang rusak digunakan untuk proses KBM. Masih terdapat SMP/MTs yang belum memiliki ruang guru, ruang Kepala Sekolah yang terpisah dengan ruang guru berikut meja dan kursinya (beberapa sekolah yang disekat dengan tirai dan almari). Belum tercapainya indikator di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D- IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn karena ketidaksesuaian ijazah guru dengan mata pelajaran yang dibutuhkan. Selain terkendala dengan distribusi, kebijakan pemerintah terkait moratorium PNS juga menjadi hambatan. Data capaian tersebut secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.28
Capaian SPM Bidang Pendidikan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator			Target Nasional		% Capaian Tahun		
					Nilai	Waktu	2015	2016	2017
I.	Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kab/Kota	1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;	SD	100%	2014	100	100.00	100.00
				MI			100	100.00	100.00
				SMP			100	100.00	100.00
				MTs			100		
								100.00	100.00
		2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;	SD	100%	2014	90.02	92.41	92.60
				MI			98.73	98.73	98.73
				SD			63.91	74.89	74.89
				MI			56.96	69.62	69.62
				SMP			90.09	96.40	96.40
				MTS			100	100.00	100.00
				SMP			83.78	85.59	85.59
				MTS			31.03		
								82.76	82.76
		3	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang	SMP	100%	2014	23.42	34.23	34.23
				MTS			24.14	20.69	20.69

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Nasional		% Capaian Tahun		
			Nilai	Waktu	2015	2016	2017
		laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	SMP		7.21	10.81	10.81
			MTs		6.90	3.45	3.45
4	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;	SD	100%	2014	59.45	77.00	77.00
		MI			59.49	70.89	70.89
		SMP			86.49	58.56	58.56
		MTs			62.07	86.21	86.66
		SMP			38.74	95.50	95.50
		MTs			31.03	100.00	100.00
5	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	SD	100%	2014	99.58	99.79	100.00
		MI			98.73	98.73	98.73
		SD			98.09	98.52	98.52
		MI			98.73	98.73	98.73
6	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;		100%	2014			
		SMP			100	41.44	41.44
		MTs			100	100.00	100.00
7	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	SD	100%	2014	99.15	99.37	99.37
		MI			25.32	98.73	98.73
		SD			94.27	94.09	94.29
		MI			91.14	91.14	91.14
8	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	SMP	100%	2014	76.58	94.59	94.59
		MTs			75.86	100.00	100.00
		SMP			56.76	74.77	73.87
		MTs			51.72	86.21	86.66
9	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik		100%	2014			
		SMP			80.18	38.74	38.74

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator		Target Nasional		% Capaian Tahun		
				Nilai	Waktu	2015	2016	2017
		S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn	MTs			55.17	24.14	24.14
		10 Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	SD	100%	2014	79.4	93.46	93.65
			MI			22.78	87.34	88.60
		11 Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;		100%	2014			
			SMP			76.58	83.78	83.78
			MTs			75.86	75.86	80.00
		12 Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik	SD	100%	2014	100	100.00	100.00
			MI			100	100.00	100.00
		13 Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;	SD	100%	2014	100	100	100
			MI			100	100	100
			SMP			100	100	100
			MTs			100	100	100
		100 bila kab/ kota memiliki rencana dan telah melaksanakan kegiatan untuk membantu sekolah mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif						
		50 bila memiliki rencana tetapi belum melaksanakan						
		0 bila tidak memiliki rencana untuk membantu sekolah dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.						
		14 Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;	SD	100%	2014	43.95	87.55	87.55
			MI			77.63	94.94	94.94
			SMP			78.38	88.29	88.29
			MTs			75.86	100.00	100.00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator			Target Nasional		% Capaian Tahun		
					Nilai	Waktu	2015	2016	2017
II	Pendidikan dasar oleh satuan pendidikan	15	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	SD	100%	2014	24.20	90.29	90.29
				MI			23.53	15.19	15.19
				SD			24.20	45.57	45.57
				MI			23.53		
		16	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;	SMP	100%	2014	30.84	87.68	87.68
				MTs			28.85	0.00	0.00
				SMP			16.22	18.02	18.02
				MTs			13.79	0.00	0.00
		17	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;	SD	100%	2014	11.25	32.91	32.91
				MI			0.00	7.59	7.59
		18	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;	SD	100%	2014	53.08	79.54	79.54
				MI			18.99	51.90	51.90
				SMP			46.85	61.26	61.26
				MTs			6.90		
		19	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;	guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan	100%	2014	61.83	97.88	97.88
				SD			66.67	91.35	91.35
				MI			43.04	89.87	89.87
				SMP			46.85	53.15	53.15
				MTs			31.03	100.00	100.00
		20	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :	Jumlah rombongan belajar yang memenuhi standar	100%	2014	68.82	100.00	100.00
				Kelas I - II : 18 jam per minggu			37.15	94.94	95.13
				Kelas III : 24 jam per minggu			54.43	22.78	22.78
				Kelas IV – VI : 27 jam			69.37	94.59	94.59

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator		Target Nasional		% Capaian Tahun		
				Nilai	Waktu	2015	2016	2017
		per minggu						
		Kelas VII – IX : 27 jam per minggu	MTs			62.07	89.66	89.66
	21	Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku	SD	100%	2014	37.15	100.00	100.00
			MI			54.43	100.00	100.00
			SMP			69.37	100.00	100.00
			MTs			62.07	100.00	100.00
	22	Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	SD	100%	2014	93.42	95.36	95.36
			MI			94.94	97.47	97.47
			SMP			93.69	100.00	100.00
			MTs			89.66	100.00	100.00
	23	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	Jumlah guru yang mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	100%	2014	90.99	100.00	100.00
			SD			94.48	100.00	100.00
			MI			89.87	98.73	98.73
			SMP			80.56	100.00	100.00
			MTs			31.03	100.00	100.00
	24	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	SD	100%	2014	89.38	95.57	95.57
			MI			79.75	98.73	98.73
			SMP			58.56	83.78	83.78
			MTs			31.03	100.00	100.00
	25	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi belajar peserta didik	SD	100%	2014	95.54	100.00	100.00
			MI			88.61	100.00	100.00
			SMP			77.48	100.00	100.00
			MTs			51.72	100.00	100.00

Tabel 2.29.
 Jenis dan Jumlah Fasilitas Penunjang
 Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun
 2013 – 2017

No.	Sarana Kesehatan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Posyandu	1.464	1465	1.465	1.465	1.466
2	PosKesDes	20	21	21	21	21
3	Puskesmas					
	- Induk	30	30	30	30	30
	- Pembantu	110	110	110	110	110
	- Keliling	42	30	30	30	30
4	Rumah Sakit Umum					
	Tipe C	1	1	1	1	1
5	Laboratorium pemerintah	1	1	1	1	1
6	Rumah Sakit Umum Swasta					
	Tipe D	2	2	4	4	4
7	Rumah Sakit Umum	3	3	3	5	5
8	Klinik/Praktek Dokter	156	156	156	154	187
9	Apotek	21	21	25	24	42

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul 2017

Tabel 2.30.
 Jumlah Tenaga Medis Kabupaten Gunungkidul 2013-2017

No	TENAGA KESEHATAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dokter Umum	76	78	56	90	90
2.	Dokter Gigi	35	35	28	32	34
3.	Perawat	298	223	223	457	487
4.	Bidan	148	148	135	171	238
5.	Ahli Penyehatan Lingkungan	25	25	24	24	24
6.	Sarjana Farmasi	2	2	2	7	13
7.	Ahli Gizi	31	31	28	34	26
8.	Analisis Laboratorium	30	30	29	55	31
9.	Ahli Rontgen	2	2	1	1	1
10.	Asisten Apoteker	7	22	26	46	29
11.	Sanitarian	35	35	24	30	26
12.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	28	28	28	30	6

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul 2018

Tabel 2.31.
 Jumlah Tenaga Kesehatan di RSUD Wonosari
 Kabupaten Gunungkidul 2017

No	TENAGA KESEHATAN	TAHUN				
		PNS	Tenaga Kontrak BLUD	WKDS	THL	Jumlah
1.	Dokter spesialis	20	2	5	0	27
2.	Dokter Umum	6	5	0	0	11
3.	Dokter Gigi	1	0	0	0	1
4.	Perawat Gigi	1	1	0	0	2
5.	Perawat	130	56	0	0	186
6.	Bidan	25	8	0	0	33
7.	Sarjana Farmasi/Apoteker	2	6	0	0	8
8.	Ahli Gizi	8	2	0	0	10
9.	Analisis Laboratrium	16	0	0	0	16
10.	Ahli Rongten	5	1	0	1	7

No	TENAGA KESEHATAN	TAHUN				
		PNS	Tenaga Kontrak BLUD	WKDS	THL	Jumlah
11.	Asisten Apoteker	10	8	0	0	18
12.	Sanitarian	2	1	0	0	3
	Jumlah	226	90	5	1	322

Sumber : RSUD Wonosari, 2018

Tabel 2.32.
Indikator Kinerja Bidang Kesehatan
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017

NO	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif	1.890	1.502	914	1.313	1.270
2	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan	1.913	1.790	1.169	1.693	1.739
3	Jumlah sasaran ibu bersalin	8.414	8.543	7.813	7.654	7.340
4	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	8.390	8.056	8.158	7.803	6.131
5	Jumlah desa/kelurahan dengan Universal Child Immunization (UCI)	144	144	144	144	144
6	Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan di sarana Yankes	242	44	23	17	27
7	Jumlah seluruh balita gizi buruk	242	44	23	17	27
8	Jumlah penderita TBC BTA + yang ditemukan dan diobati	291	146	173	163	472
9	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP	78	310	486	1.131	224
10	Jumlah penderita DBD yang ditemukan	78	310	379		1.073
12	Jumlah kunjungan bayi memperoleh yankes sesuai standar	8.363	7.469	7.338	7.493	7.386
13	Jumlah seluruh bayi lahir hidup	8.374	8.141	7.796	7.649	7.339

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, 2018

Penyakit menular masih merupakan ancaman potensial dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Penyakit deman berdarah *dengue* (DBD) merupakan salah satu penyakit menular yang secara kontinyu diwaspadai mengingat *Case Fatality Rate* (CFR) dan insidensi DBD masih tinggi. Kasus penyakit ini selalu muncul dalam setiap tahun terutama pada musim penghujan dan puncaknya periode bulan Februari hingga April. Berdasar pemantauan selama pada tahun 2016 kasus DBD di Kabupaten Gunungkidul terjadi 1.073 kasus. Upaya pencegahan dan pemberantasan DBD telah dilakukan secara rutin setiap tahunnya melalui pengasapan (*fogging*) dan gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN).

Tabel 2.33.

Capaian SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Nasional		% Capaian (tahun)		
			Nilai	Waktu	2015	2016	2017
I	Pelayanan Kesehatan Dasar	1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4.	95%	2015	89.83	57.55	80.60
		2 Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani.	80%	2015	80.74	54.39	0.00
		3 Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.	90%	2015	99.88	64.39	0.00
		4 Cakupan pelayanan Ibu Nifas	90%	2015	92.61	57.58	0.00
		5 Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	80%	2010	78.19	46.25	0.00
		6 Cakupan kunjungan bayi.	90%	2010	97.79	59.05	0.00
		7 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI).	100%	2010	100	100	0
		8 Cakupan pelayanan anak balita.	90%	2010	88.39	57.24	0.00
		9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.	100%	2010	100.00	60.31	0.00
		10 Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	2010	100	100	0.00
		11 Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	2010	99.68	99.96	0.00
		12 Cakupan peserta KB Aktif	70%	2010	77.31	9.30	0.00
		13 Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit					
		A. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	100%	2010	98.16	96.93	66.67
		B. Penemuan Penderita Pneumonia Balita	100%	2010	60.45	21.44	51.52
		C. Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	100%	2010	45.41	26.02	65.67
		D. Penderita DBD yang Ditangani	100%	2010	100	100	100
		E. Penemuan Penderita Diare	100%	2010	82.52	57.62	92.58
		14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	2015	100.00	83.68	65.91
II	Pelayanan Kesehatan Rujukan	15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.	100%	2015	49.24	5.12	0.00
		16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota.	100%	2015	100	100	100
III	Penyelidikan	17 Cakupan Desa/Kelurahan	100%	2015	100	100	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Nasional		% Capaian (tahun)		
			Nilai	Waktu	2015	2016	2017
		mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam				100	
IV	Promosi	18 Cakupan Desa Siaga Aktif	80%	2015	100	100	100

Sumber : Bagian Organisasi Setda Gunungkidul, 2018

Pada Bidang Kesehatan, dari 18 indikator yang belum terpenuhi antara lain cakupan kunjungan ibu hamil (K4), cakupan ibu hamil dengan komplikasi ditangani, cakupan pelayanan ibu nifas, dan cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani. Indikator tersebut belum tercapai karena: adanya pindah domisili untuk keperluan melahirkan dan mendekatkan pelayanan; masih kurangnya jejaring pencatatan dengan lintas batas kabupaten/provinsi; kurang lengkapnya pencatatan pelayanan yang diberikan di buku KIA; sasaran yang digunakan bukan jumlah riil, namun proyeksi yang lebih tinggi dari angka sebenarnya (ketentuan perhitungan proyeksi tidak tepat diterapkan pada semua daerah); mobilitas penduduk tinggi; kematian neonatus cukup tinggi sehingga tidak bisa ke KN (Kunjungan Neonatus) 3 dan terbatasnya fasilitas kesehatan yang mampu PONEK dan PONEK. Cakupan Pelayanan Anak balita belum tercapai karena masih belum 8 bulan pelayanan sesuai dengan definisi operasional sehingga hasilnya belum sesuai target.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit yang tidak tercapai ada 3 yaitu: penemuan penderita pnemonia balita, penemuan pasien baru TB BTA positif, dan penemuan penderita diare. Penemuan tersebut rendah karena: pendekatan pasif bukan aktif *case finding*; belum optimalnya pelaporan penyakit berjejaring dengan swasta, lintas faskes, dan lintas kewilayahan; *respon time* pelaporan rendah (pelaporan tidak tepat waktu); lemahnya monitoring dan evaluasi yang disertai *feedback* yang menyebabkan *under reporting*. Perlu dilakukan evaluasi terhadap rumusan idikator ini sehingga bisa diterapkan pada semua daerah. Khususnya untuk angka kesakitan diare di tingkat nasional menunjukkan adanya peningkatan 214/1000 menjadi 240/1000, sedangkan berdasarkan penemuan kasus di kabupaten didapatkan penurunan angka kesakitan diare di kabupaten dari 176/1000 penduduk di tahun 2015 menjadi 155/1000 penduduk di tahun

2016. Hal ini dapat dikaitkan dengan keberhasilan STBM di kabupaten Gunungkidul, dan juga program PHBS.

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penanganan urusan pekerjaan umum meliputi pembangunan di bidang keciptakaryaan dan tata ruang, kebinamargaan dan pengairan.

a) Jalan dan jembatan

Rincian panjang jalan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2017 menurut kewenangannya adalah jalan negara 61,08 km, jalan provinsi sepanjang 212,39 km, jalan kabupaten 1.136,66 km.

Kabupaten Gunungkidul dilalui oleh Jaringan Jalan Kolektor Primer sebagai Jalan Strategis dengan nama Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang direncanakan mencapai panjang 81,092 km, pembangunan jalan ini merupakan *sharing* anggaran antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dengan prosentase 90:10 untuk pengadaan tanah sedangkan fisik pembangunan konstruksi jalan dibangun oleh Pemerintah Pusat.

Jaringan jalan kabupaten di Kabupaten Gunungkidul sudah mampu menjangkau seluruh wilayah, hanya saja tidak semua ruas jalan dalam kondisi baik. Bila terjadi cuaca ekstrim hujan terus menerus juga mempercepat proses kerusakan jalan tersebut. Panjang ruas jalan sekitar 1.136,66 km, dengan kondisi baik sekitar 726,21 km atau 63,9%, kondisi rusak ringan sepanjang 137,96 km atau sekitar 12,14%, dan kondisi rusak berat sepanjang 272,49 atau sekitar 23,98%. Jumlah jembatan di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 172 buah dengan panjang keseluruhan 2.260 meter. Sebanyak 144 buah atau 83,72% diantaranya dalam kondisi baik, selebihnya mengalami kerusakan baik rusak ringan maupun sedang, Adapun data jalan berdasarkan tingkat kondisinya sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.34.
Panjang Jalan menurut Statusnya
di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017 (Km)

No.	Status Jalan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Nasional	61,24	61,24	61,24	61,08	61,08
2.	Provinsi	260,33	212,39	212,39	212,39	212,395
3.	Kabupaten	686,00	686,00	686,00	686,00	1.136,66

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul, 2017

Jaringan jalan kabupaten di Kabupaten Gunungkidul sudah mampu menjangkau seluruh wilayah, hanya saja tidak semua ruas jalan dalam kondisi baik. Bila terjadi cuaca ekstrim hujan terus menerus juga mempercepat proses kerusakan jalan tersebut. Panjang ruas jalan 1.136,6 km, dengan kondisi baik sekitar 515,46 km atau 45,35%, kondisi sedang sekitar 126,38 km atau 11,11%, kondisi rusak ringan dan berat sepanjang 489,02 km atau sekitar 43,02%.

Tabel 2.35.
Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2013-2017 (Km)

No.	Kondisi	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Baik	431,81	462,57	479,15	492,62	726,21
2	Sedang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Rusak ringan	46,12	119,11	114,67	112,39	137,96
4	Rusak berat	208,07	104,32	92,18	80,99	272,49
	Jumlah	686,00	686,00	686,00	686,00	1.136,66

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul, 2017

Tabel 2.36.
Jenis Perkerasan Jalan Kabupaten di Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2012-2016 (Km)

Jenis Perkerasan	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
ATB/Penetrasi/ Macadam	632,92	634,40	634,40	645,20	902,26
Telford/kerikil	53,08	51,60	51,60	40,80	222,01
Tanah	-	-	-	-	12,39
Jumlah	686,00	686,00	686,00	686,00	1.136,66

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul, 2017

Jumlah jembatan di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 172 buah dengan panjang keseluruhan 2.260 meter. Sebanyak 109 buah atau 83,72% diantaranya dalam kondisi baik, selebihnya mengalami kerusakan baik rusak ringan maupun sedang.

Tabel 2.37.
Kondisi Jembatan di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2013-2017 (Buah)

Kondisi	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Baik	138	144	144	109	n/a
Rusak ringan	25	25	25	41	n/a
Rusak sedang	6	3	3	19	n/a
Rusak berat	3	0	0	3	n/a
Jumlah	172	172	172	172	174

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul, 2017

b) Air bersih

Kondisi Umum Air Tanah Dangkal, Air Tanah Sedang, dan Air Tanah Dalam di Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

- (1) Terdapat 1 (satu) daerah perkotaan yang kondisi air tanah dangkal dan air tanah sedang relatif baik (kualitas dan kuantitas), yaitu: Wonosari.
- (2) Dari jumlah IKK yang ada, 2 (dua) IKK yang kondisi umum air tanah dangkal dan air sedang relatif baik dan 10 (sepuluh) IKK yang kondisi umum air tanah dangkal dan air tanahnya sedangnya relatif tidak baik. Pada wilayah pelayanan perdesaan, ada 25 desa yang kondisi umum air tanah dangkal dan air sedang relatif baik dan 25 desa yang kondisi umum air tanah dangkal dan air tanah sedangnya relatif tidak baik.
- (3) Secara umum di Kabupaten Gunungkidul kondisi air tanah dalam relatif baik kecuali pada musim penghujan.

Sumber air bersih di Kabupaten Gunungkidul berasal dari air permukaan dan air bawah tanah. Khusus untuk sistem perpipaan, pasokan air bersih belum dapat menjangkau seluruh wilayah guna mencukupi kebutuhan air bersih dilakukan dengan beberapa hal di antaranya:

- (a) Pengembangan peningkatan pelayanan sistem perpipaan.

Bentuk pengembangan dan peningkatan sistem perpipaan ini dilakukan melalui pengembangan sistem Bribin dan Seropan serta pengembangan sistem interkoneksi Baron-Ngobaran. Guna meningkatkan cakupan pelayanan air bersih sejak tahun 2004 telah dilakukan kerjasama

pengembangan teknologi pengelolaan air sungai bawah tanah dengan Universitas Karlsruhe, Jerman menggunakan sistem mikrohidro pada proyek Bribin II dan Seropan II. Pada tahun 2010 telah dioperasikan proyek Bribin II dengan kapasitas 80 liter/detik, sementara Seropan II dalam tahap perencanaan. Dengan sistem ini diharapkan akan terpenuhi air baku untuk air bersih yang mampu mencukupi kebutuhan air lima kecamatan, meliputi Kecamatan Semanu, Tepus, Ponjong, Rongkop dan Girisubo. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga bekerjasama dengan *Japan International Corporation Agency (JICA)*, Jepang untuk mengembangkan pengelolaan sungai bawah tanah Baron. Sistem ini nantinya merupakan interkoneksi Baron-Ngobaran, dan direncanakan mampu memasok kebutuhan air bersih guna mencukupi kebutuhan air bersih terutama untuk wilayah- wilayah di Kecamatan Tanjungsari, Saptosari, Panggang, dan Paliyan.

- (b) Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Mandiri
Guna peningkatan cakupan pelayanan air bersih di Kabupaten Gunungkidul maka dilakukan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Mandiri. Diarahkan pada 58 kawasan perkotaan/ibukota kecamatan/perdesaan, khususnya masyarakat perkotaan rawan air minum, ibukota kecamatan rawan air minum/desa rawan air minum.

- (c) Pengembangan PAH (Penampungan Air Hujan)

- (d) Dropping air

Dropping air dilakukan dalam kondisi darurat yang biasanya meliputi wilayah-wilayah kecamatan yang rawan air seperti Kecamatan Panggang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Patuk, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Tepus, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Semanu, Kecamatan Paliyan, dan Kecamatan Saptosari.

- (e) Konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk daerah resapan dan daerah tangkapan air.

c) Drainase

Sistem drainase masih terpusat di Wonosari dan ibukota-ibukota kecamatan di Kabupaten Gunungkidul. Jaringan drainase yang ada terdiri atas saluran-saluran alami dan buatan, baik yang masih terbuka maupun tertutup, baik yang belum diberi pasangan maupun yang sudah terbuat dari pasangan batu/beton. Sebagian besar saluran drainase yang ada, baik saluran terbuka maupun tertutup mempunyai sedimentasi berupa sampah/kotoran dan pasir/tanah yang cukup tinggi. Khusus untuk perkotaan Wonosari terdapat 3 (tiga) saluran terbuka berupa sungai yang cukup besar yaitu Sungai Kepek, Sungai Bansari, dan Sungai Besole.

d) Pengairan/Irigasi

Pengelolaan irigasi juga melibatkan masyarakat melalui Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) ataupun Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan jaringan irigasi khususnya di jaringan tersier. Jumlah jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Gunungkidul adalah jaringan primer 11.933,20 m, jaringan sekunder 390.827,70 m dan jaringan tersier 46,25 m.

e) Sanitasi

Buruknya kondisi air minum dan sanitasi masih menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, kualitas air tercatat: kualitas baik 44,64% dan kurang baik sebesar 55,35% dari jumlah 112 sampel. Sedangkan pemenuhan air yang berasal dari Sumur Gali yang baik 26,15% sedangkan sumur gali dengan kualitas jelek 73,84%. Kondisi sanitasi untuk masyarakat juga belum optimal karena tingkat/cakupan pelayanan air limbah masuk kategori rendah dan tingkat/cakupan pelayanan persampahan masuk kategori cukup.

f) Penataan Ruang

Amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang seperti tertuang pada pasal 3 disebutkan bahwa bahwa

penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Penyelenggaraan penataan ruang tersebut meliputi aspek-aspek pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan, dimana untuk masing-masing aspek tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten, kota atau kawasan lainnya.

Terkait dengan penataan ruang, Kabupaten Gunungkidul telah menyusun Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa tujuan penataan ruang Kabupaten Gunungkidul adalah mewujudkan wilayah Kabupaten Gunungkidul sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan dan sumberdaya lokal untuk mendukung destinasi wisata menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri dan sejahtera.

Dalam peraturan daerah tersebut dikemukakan bahwa kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah dilakukan melalui: (1) kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, (2) kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang; dan (3) kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis. Terkait dengan berbagai aktivitas pembangunan di Kabupaten Gunungkidul pada beberapa aspek penataan ruang yang perlu mendapatkan perhatian pada masa mendatang, yaitu kawasan lindung, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan rawan bencana alam, kawasan budidaya, kawasan pariwisata. Pengaturan tersebut perlu dilakukan untuk mengendalikan kebutuhan masing-masing kawasan agar tetap sinkron dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.

Beberapa indikator SPM yang capaiannya masih jauh dari target nasional pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi: tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan tidak lebih dari 2 x setahun dan terlayani masyarakat dalam pengurusan izin

pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya. Dalam pelaksanaan percepatan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang, masih banyak permasalahan yang ada, di antaranya belum adanya Rencana Induk Drainase, ketersediaan data serta kurangnya koordinasi antar perangkat daerah yang terkait dengan indikator SPM. Terkait indikator terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya, dari target nasional 100% baru tercapai 34,09%. Jumlah kumulatif Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota sampai akhir tahun pencapaian SPM baru 15 dari 44 jumlah kumulatif Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota yang seharusnya ada sampai akhir tahun pencapaian SPM. Selain itu dengan adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat perubahan indikator serta perubahan waktu target pencapaian, akan tetapi perubahan peraturan tersebut belum diikuti dengan perubahan *template* Petunjuk Teknis dari Kementrian Dalam Negeri.

Tabel 2.38

Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar			Indikator	Target Nasional		% Capaian (Tahun)		
					Nilai	Waktu	2015	2016	2017
I	Sumber Daya Air	Prioritas Utama penyediaan Air untuk kebutuhan masyarakat		1 Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.	100%	2014	83.46	83.63	83.21
				2 Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	70%	2014	67.00	70.45	70.45
II	Jalan	Jaringan	Aksesibilitas	3 Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.	100%	2014	100	100	100
			Mobilitas	4 Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.	100%	2014	163.31	162.49	267.90
			Keselamatan	5 Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	60%	2014	77.30	79.31	47.86
		Ruas	Kondisi Jalan	6 Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.	60%	2014	77.30	79.31	47.86
			Kecepatan	7 Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	60%	2014	77.30	79.31	47.86
III	Air Minum	Cluster Pelayanan		8 Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan			88.96	89.47	89.02
		Sangat buruk			40%	2014			
		Buruk			50%				
		Sedang			70%				
		Baik			80%				

No	Jenis Pelayanan Dasar			Indikator	Target Nasional		% Capaian (Tahun)		
					Nilai	Waktu	2015	2016	2017
		Sangat Baik		bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari	100%				
IV	Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan	Air Limbah Permukiman	9	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.	60%	2014	53.85	61.91	61.91
			10	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	5%	2014	5.66	6.19	6.19
		Pengelolaan Sampah	11	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.	20%	2014	12.00	12.79	12.79
			12	Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.	70%	2014	68.77	69.09	69.09
		Drainase	13.1	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	50%	2014	81.46	81.46	81.46
			13.2	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	50%	2014	3.33	3.33	3.33
V	Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan		14	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.	10%	2014	10.09	10.09	10.09
VI	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Izin Mendirikan Bangunan	15	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota.	100%	2014	89.5	107.6	107.6
		Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	16	Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten/Kota	100%	2014	100	100	100

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator	Target Nasional		% Capaian (Tahun)		
				Nilai	Waktu	2015	2016	2017
VII	Jasa Konstruksi	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	17 Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.	100%	2014	100	100	100
		Sistem Informasi Jasa Konstruksi	18 Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	100%	2014	85.71	85.71	85.71
VIII	Penataan Ruang	Informasi Penataan Ruang	19.1 Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog	100%	2014 Kab. /Kota	100	100	100
				100%	2014 Kecamatan	100	100	100
				100%	2014 (Kelurahan)	100	100	100
			19.2 Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog	100%	2014 Kab. /Kota	100	100	100
				100%	2014 Kecamatan	100	100	100
				100%	2014 (Kelurahan)	100	100	100
		Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR	20.1 Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.	100%	2014	90	90	90
			20.1 Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.	100%	2014	100	100	100

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator	Target Nasional		% Capaian (Tahun)		
				Nilai	Waktu	2015	2016	2017
		Izin Pemanfaatan Ruang	21 Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya	100%	2014 (Kabupaten /Kota)	34.09	34.09	34.09
		Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang	22 Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja	100%	2014 (Kab. /Kota dan Kecamatan	-	-	-
		Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	23 Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.	25%	2014	70.69	70.69	70.69

Sumber: Bagian Organisasi, Setda Gunungkidul 2018

D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyediaan perumahan di Kabupaten Gunungkidul masih didominasi oleh rumah milik sendiri karena masih luasnya areal permukiman yang ada di seluruh wilayah. Penyediaan jaringan /instalasi listrik maupun air PDAM dari tahun ke tahunpun terus meningkat. Untuk mengetahui indikator perumahan tahun 2013 - 2017 pada tabel berikut:

Tabel 2.39.
Indikator Perumahan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 –2017

No.	URAIAN	TAHUN					SATUAN
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Status Kepemilikan						
	a. Rumah Milik Sendiri	204.561	206.606	206.606	207.332	211.103	unit
	b. Rumah Dinas/Bebas sewa	138	151	151	151	151	unit
2	Jumlah sambungan Rumah Tangga(PLN)	140.031	147.190	154.336	166.618	193.344	Pelanggan
3	Jumlah sambungan Rumah Tangga (PDAM)	34.890	38.081	40.878	43.348	43.495	Sambungan
4	Luas Permukiman	28.665,96	28.665,96	n/a		66.384,32	Ha
5	Luas Permukiman Kumuh	1.174,64	1.168,46	n/a	164,94	164,84	Ha
6	Jumlah rumah tinggal layak huni	188.778	190.822	n/a		191.734	Unit
7	Jumlah bangunan berIMB	1.786	2.073	2.274	2,799	13.955	Unit

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, PT. PLN dan PDAM Kabupaten Gunungkidul, 2017

Tabel 2.40.
SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Nasional		% Capaian (tahun)		
			Nilai	Waktu	2015	2016	2017
I	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	1 Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%	2009 - 2025	93.78	93.78	93.90
		2 Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	70 %	2009 - 2025	29.47	29.47	29.47
II	Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	3 Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100%	2009 - 2025	100	100	100

Sumber : Bagian Organisasi Setda Gunungkidul, 2018

Pada bidang perumahan rakyat, indikator yang belum terpenuhi adalah cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau. Target nasional 70% di tahun 2025, baru tercapai 29,47% di tahun 2016. Belum tercapainya indikator tersebut antara lain disebabkan belum optimalnya koordinasi, validasi data, dan kegiatan yang secara nyata mendukung pencapaian indikator tersebut.

E. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kondisi stabilitas keamanan daerah salah satunya ditunjukkan adanya gangguan keamanan baik oleh masyarakat maupun oleh sekelompok orang. Selama ini kondisi stabilitas keamanan Kabupaten Gunungkidul cukup baik, meskipun jumlah tindak kriminal tahun 2017 menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga kondisi Kabupaten Gunungkidul relatif aman dan terkendali.

Berikut adalah tabel Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gunungkidul tahun 2012-2016.

Tabel 2.41.
Jumlah Aparat, Sarana Keamanan dan Jumlah Pelanggaran K3
Kabupaten Gunungkidul 2013-2017

No	Uraian	TAHUN					Satuan
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Aparat dan Sarana Keamanan						
	Jumlah Aparat Keamanan (Polisi)	932	1.183	1.011	1.068	1.084	Orang
	Jumlah Aparat Pamong Praja	50	51	49	48	52	Orang
	Jumlah Aparat Linmas	5.868	5.868	5.868	6.780	5.735	Orang
	Jumlah Pos Keamanan (Polisi)	1	1	1	15	15	Unit
	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	3	4	4	4	4	Unit
	Jumlah Pos Pemadam Kebakaran	1	1	1	1	1	Unit
	Jumlah Pos Siskamling	3.729	3.729	3.740	3.676	3.677	Unit
	Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam	12	12	12	12	4	Orang
	Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	38	38	36	38	36	Orang
2	Jumlah Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	285	6.793	7.884	1.406	790	Kasus
3	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	275	6.783	7.855	1.406	790	Kasus

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD Kabupaten Gunungkidul 2017

Pada Bidang Pemerintahan Dalam Negeri jenis pelayanan dasar pelayanan dokumen kependudukan, indikator yang belum tercapai cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk yaitu 94, 71% (target nasional 100%). Belum tercapainya indikator tersebut karena banyaknya warga wajib KTP

yang belum ber KTP merupakan masyarakat berkebutuhan khusus. Selain itu juga disebabkan karena keterbatasan blangko yang disediakan pemerintah pusat. Untuk pemenuhan perekaman KTP bagi warga berkebutuhan khusus telah dilakukan pelayanan *bed to bed* (petugas datang ke lokasi/tempat tinggal warga berkebutuhan khusus). Namun demikian, pelayanan tersebut kurang ditunjang dengan sarana prasarana dan jumlah SDM yang mencukupi.

Pada jenis layanan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, indikator yang belum terpenuhi adalah cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten/kota. Dari target nasional 100% baru tercapai 85,89%. Untuk mencapai adanya petugas linmas pada setiap RT memang sulit mengingat daerah belum mampu memberikan kompensasi kepada petugas linmas untuk menarik animo masyarakat. Pada jenis layanan cakupan Penanggulangan Bencana Kebakaran di kabupaten/kota masih jauh dari target nasional yaitu 6,73% dari target nasional 80% pada tahun 2015. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan anggaran. Luas potensi kebakaran di Gunungkidul sangat besar, sehingga perlu anggaran yang mencukupi untuk menambah luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dengan menambah pos pembantu. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi juga belum sesuai target nasional. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran untuk meningkatkan kuantitas dan kompetensi petugas yang ada.

Tabel 2.42
SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Nasional		% Capaian (tahun)		
			Nilai	Waktu	2015	2016	2017
I	Pelayanan Dokumen Kependudukan	1 Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100%	2015	88.47	86.26	100.00
		2 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	100%	2015	85.36	94.71	96.87
		3 Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	90%	2020	34.32	37.40	92.82
		4 Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	70%	2020	64.20	100	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Nasional		% Capaian (tahun)		
			Nilai	Waktu	2015	2016	2017
II	Pemeliharaan Ketentraman & Ketertiban Masyarakat	5 Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota	100%	2015	100	100	100
		6 Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3 x patrol dlm sehari	2014	100	100	100
		7 Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten / kota	1 org setiap RT atau sebutan lainnya	2014	85.89	85.89	85.89
III	Penanggulangan Bencana Kebakaran	8 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota	80%	2015	6.73	6.73	6.73
		9 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	75%	2015	100	100	100
		10 Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85%	2015	20.83	17.24	20.83
		11 Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	90%	2015	100	100	100

Sumber : Bagian Organisasi, 2018

F. Sosial

Usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi berbagai bidang. Di bidang sosial, pemerintah dan lembaga swasta melakukan aktifitas-aktifitas sosial di antaranya dengan mendirikan panti asuhan bagi anak- anak telantar, memberikan santunan kepada korban bencana alam, dan memberikan kursus keterampilan bagi penduduk usia produktif yang masih menganggur maupun kepada kelompok disabilitas agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Permasalahan sosial di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2013 – 2017 masih menunjukkan angka yang tinggi, khususnya pada masalah sosial penyandang cacat, lanjut usia terlantar, anak terlantar dan wanita rawan sosial ekonomi, dari data permasalahan yang ditangani oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul diperlukan fokus dan prioritas dalam penanganan masalah sosial serta prioritas penganggaran.

Tabel 2.43.
 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Gunungkidul
 Tahun 2013 – 2017

Uraian	Tahun					Satuan
	2013	2014	2015	2016	2017	
1. Anak Balita Terlantar	735	842	816	583	481	Anak
2. Anak Terlantar	7.979	7.838	6.777	4.211	3.319	Anak
3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	0	0	14	21	65	Anak
4. Anak Jalanan	57	52	47	50	62	Anak
5. Anak Dengan Kedisabilitasan	826	1.110	1.028	938	889	Anak
6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	304	270	133	7	2	Anak
7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus	0	17	2	0	0	Anak
8. Lanjut Usia Terlantar	14.851	15.485	13.249	18.366	16.244	Orang
9. Penyandang Disabilitas	8.881	7.833	7.860	7.297	6.158	Orang
10. Tuna Susila	13	11	9	150	48	Orang
11. Gelandangan	8	9	7	41	33	Orang
12. Pengemis	34	32	27	36	31	Orang
13. Pemulung	79	81	69	106	107	Orang
14. Kelompok Minoritas	0	0	0	0	0	Orang
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	433	445	455	10	5	Orang
16. Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	105	131	346	243	301	Orang
17. Korban Penyalahgunaan NAPZA	178	197	162	57	0	Orang
18. Korban Trafficking	2	0	0	0	0	Orang
19. Korban Tindak Kekerasan	2.033	1.910	1.657	254	201	Orang
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial	44	115	103	75	96	Orang
21. Korban Bencana Alam	452	454	14	120		Keluarga
22. Korban Bencana Sosial	21	22	24	52		Keluarga
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	3.354	3.952	3.900	4.048	4.055	Orang
24. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	900	932	745	1.380	1.046	Keluarga
25. Fakir Miskin	99.277	99.277	99.277	112.300	102.000	Keluarga

Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gunungkidul, 2017

Pada Bidang Sosial, dari 7 (tujuh) indikator pada 4 (empat) jenis pelayanan dasar, indikator yang belum tercapai anatara lain Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya dan Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial. Hal tersebut disebabkan banyaknya jumlah PMKS serta penyandang cacat fisik dan mental di Kabupaten Gunungkidul, sementara anggaran terbatas. Capaian SPM bidang sosial dapat dilihat pada tabel 2.44 berikut:

Tabel 2.44.
Capaian SPM Bidang
Sosial 2017

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Nasional		% Capaian (tahun)		
			Nilai	Waktu	2015	2016	2017
I	Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial:						
	a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/ Kota	1 Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	80%	2008-2015	67.84	77.92	17.75
	b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota	2 Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	80%	2008-2015	73.83	4.30	4.30
II	Penyediaan sarana dan prasarana sosial:						
	a. Penyediaan sarana prasarana pantai sosial skala kabupaten/kota	3 Presentase (%) pantai sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	80%	2008-2015	100	100	100
	b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten/Kota	4 Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	60%	2008-2015	100	100	100
III	Penanggulangan korban Bencana:						
	a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota	5 Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80%	2008-2015	100	100	100
	b. Evaluasi korban bencana skala Kabupaten/kota	6 Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80%	2008-2015	-	100	100
IV	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial:						

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Nasional		% Capaian (tahun)		
			Nilai	Waktu	2015	2016	2017
	- Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota	7 Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40%	2008-2015	37.56	3.56	3.06

Sumber : Bagian Organisasi setda Gunungkidul, 2018

II.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran di suatu daerah. Pengangguran di Kabupaten Gunungkidul masih menjadi menjadi masalah yang perlu diselesaikan. Dalam pembahasan ini penduduk usia kerja (tenaga kerja) didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk Usia Kerja terdiri dari Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Mereka yang termasuk dalam Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, sedangkan Bukan Angkatan Kerja adalah mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan lainnya.

Tabel 2.45
Indikator Ketenagakerjaan
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017

No.	Ketenagakerjaan	Tahun					Satuan
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Penduduk 15 Tahun keatas	587.092	441.242	613.931	566.258	576.508	Orang
2	Angkatan Kerja	441.242	475.293	451.355	440.324	429.476	Orang
3	Kesempatan Kerja (dalam %)	98,62	98,31	98,39	97,10	97,70	%
4	Pengangguran Terbuka	7.326	7.285	4.731	10.106	7.085	Orang
5	Penempatan TKI	85	35	67	52	79	Orang
6	a. PHK pada tahun yang bersangkutan	4	4	3	3	2	Kasus
	b. Jumlah TK PHK	4	4	3	3	7	Orang
7	Rata2 Kebutuhan Hdp Min/Keb.Hdp Layak(KHL)	802.000	890.000	920.000	951.449	n/a	Rupiah
8	Rata2 Upah Min.Reg./Upah Min Kab(UMK)	947.114	988.580	1.235.700	1.337.650	1.337.650	Rupiah
9	Pencari Kerja (yang ditempatkan)	1.423	820	741	663	873	Orang
10	Setengah Pengangguran	31.286	31.286	37.368	30.073	126.984	Orang

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Gunungkidul, 2017

Pada bidang ketenagakerjaan, indikator SPM yang masih sulit terpenuhi antara lain besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek. Masih banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja/buruhnya untuk mengikuti Jamsostek. Indikator besaran pengujian peralatan di perusahaan juga belum terpenuhi karena kurangnya tenaga pengawas tenaga kerja, khususnya dalam uji peralatan di perusahaan serta kurangnya pemahaman dan kesediaan perusahaan melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Capaian SPM bidang ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.46.
Capaian SPM Bidang
Ketenagakerjaan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Nasional		% Capaian (tahun)		
			Nilai	Waktu	2015	2016	2017
I	Pelayanan Pelatihan Kerja	1 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75%	2016	91.43	63.60	78.41
		2 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60%	2016	56.47	64.29	0.00
		3 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60%	2016	0	0	83.33
II	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	70%	2016	31.21	84.02	44.31
III	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%	2016	100	100	100
IV	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	50%	2016	18.24	0	0.00
V	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	1 Besaran pemeriksaan perusahaan	45%	2016	10.71	10.49	-
		2 Besaran pengujian peralatan di perusahaan	50%	2016	1.72	0.34	0.00

Sumber : Bagian Organisasi, 2018

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sesuai dengan amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka pembangunan di Kabupaten Gunungkidul juga harus memperhatikan kebijakan pengarusutamaan gender.

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perspektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Gunungkidul, baik perempuan maupun laki-laki.

Sesuai dengan kebijakan nasional, maka upaya penting yang menjadi fokus pengarusutamaan gender adalah :

- a) peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan;
- b) perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; dan
- c) peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan.

Pelaksanaan PUG harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan yang menjadi acuan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin program dan kegiatan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah menjadi responsif gender. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian perencanaan dan penganggaran harus mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunan maupun dalam pelaksanaan kegiatan.

a) Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dapat ditunjukkan dengan data Pegawai Negeri Sipil menurut golongan dan jenis

kelamin, serta data pejabat struktural di pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 2.47.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017

No.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Golongan I	447	362	282	208	134
	Laki-laki	392	319	250	180	119
	Perempuan	55	43	32	28	15
2	Golongan II	2.116	1.840	1.739	1.620	1.468
	Laki-laki	1.145	1.096	1.099	1.104	1.000
	Perempuan	971	744	640	516	468
3	Golongan III	4.280	4.539	4.642	4.688	4.013
	Laki-laki	2.237	2.274	2.28	2.227	1.805
	Perempuan	2.043	2.265	2.362	2.461	2.208
4	Golongan IV	3.834	3.863	3.695	3.602	3.068
	Laki-laki	2.260	2.265	2.154	2.092	1.752
	Perempuan	1.574	1.598	1.541	1.510	1.316

Sumber : Badan Kepepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul 2017

Tabel 2.47
Jumlah Pejabat Struktural Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017

No	Jabatan	TAHUN					
		L/P	2013	2014	2015	2016	2017
1	Eselon II	L+P	24	26	24	24	33
	-IIA	L	1	1	0	0	1
		P	0	0	0	0	0
	-IIB	L	21	23	22	22	28
		P	2	2	2	2	4
2	Eselon III	L+P	146	147	148	140	164
	-IIIA	L	51	51	52	51	52
		P	7	9	9	8	9
	-IIIB	L	66	66	65	60	78
		P	22	21	22	21	25
3	Eselon IV	L+P	508	519	524	498	517
	-IVA	L	291	293	300	286	308
		P	112	112	110	106	134
	-IVB	L	72	74	73	68	45
		P	33	40	41	38	30
4	Eselon V	L+P	51	61	65	60	0
	-VA	L	37	45	48	45	0
		P	14	16	17	15	0
	Jumlah	L+P	729	753	761	722	714

Sumber : Badan Kepepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul 2017

b) Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif

Tabel 2.49.
Jumlah Anggota DPRD Gunungkidul
Menurut Komisi dan Jenis Kelamin Tahun 2013-2017

No	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Komisi A	10	9	9	9	10
	Laki-laki	8	7	7	8	6
	Perempuan	2	2	2	1	4
2	Komisi B	9	10	10	10	10
	Laki-laki	7	9	9	9	10
	Perempuan	2	1	1	1	0
3	Komisi C	12	11	11	11	11
	Laki-laki	11	9	9	10	10
	Perempuan	1	2	2	1	1
4	Komisi D	10	11	11	10	10
	Laki-laki	9	9	9	8	8
	Perempuan	1	1	1	2	2
5	Unsur Pimpinan	4	4	4	4	4
	Laki-laki	4	4	4	4	4
	Perempuan	-	-	-	-	-

Sumber : Sekretariat DPRD Gunungkidul, 2017

c) Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan bukanlah hal yang baru. Timbulnya berbagai macam bentuk kekerasan terhadap perempuan disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Bentuk-bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap perempuan antara lain adalah perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan domestik dan pelecehan seksual.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPMPKP Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus bertambah jumlahnya yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.50.
Kekerasan Terhadap Perempuan
dan Anak Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2012-2017

No	Jenis Kekerasan	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Fisik :						
	- Perempuan	10	5	7	6	8	3
	- Anak	6	-	2	5	2	n/a
2	- Laki-laki	-	-	1	6	-	n/a
	Psikis :						
	- Perempuan	4	7	6	11	10	4
3	- Anak	3	4	2	-	7	3
	- Laki-laki	-	1	-	2	-	n/a
	Seksual :						
4	- Perempuan	4	4	3	5	4	5
	- Anak	17	15	18	13	36	17
	- Laki-laki	-	-	-	-	-	n/a
5	Penelantaran :						
	- Perempuan	11	-	1	2	-	n/a
	- Anak	4	-	-	-	-	8
6	- Laki-laki	-	-	-	-	-	1

Sumber : DP3AKBPMD, 2017

SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, indikator yang belum terpenuhi adalah cakupan petugas bimbingan rohani terlatih dalam melakukan bimbingan rohani (tercapai 33,3%) dan cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian (tercapai 37,3%). Kendala pencapaian SPM pada bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan antara lain keberhasilan pelaksanaan SPM pada bidang ini ditentukan oleh berbagai pihak yang di antaranya di luar kewenangan Pemerintah Kabupaten dan belum tersedianya sarana dan prasarana memadai pada Unit Pelayanan Terpadu untuk korban kekerasan perempuan dan anak serta keterbatasan jumlah SDM pelayanan/petugas terlatih. Capaian SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan dapat dilihat pada tabel 2.50.

Tabel 2.51.
SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan
Anak Korban Kekerasan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Nasional		% Capaian (tahun)		
			Nilai	Waktu	2015	2016	2017
1	Penanganan Pengaduan/ Laporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	1 a. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%	2014	100	100	100
		1 b. Cakupan ketersediaan petugas di Unit Pelayanan Terpadu yg memiliki kemampuan utk menindaklanjuti pengaduan/laporan masyarakat			100	100	100
II	Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	2 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS	100%	2014	100	100	100
		2 a. Cakupan Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A)			300	300	300
		2 b. Cakupan RSU Vertikal/RSUD/RS Swasta/RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan			100	100	100
		2 c. Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) di Puskesmas			150	150	150
		2 d. Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Rumah Sakit			388.9	388.9	388.9
III	Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	3 Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	75%	2014	-	100	100
		3 a. Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih			100	100	100
		4 Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	75%	2014	100	100	100
		4 a. Cakupan petugas bimbingan rohani terlatih dalam melakukan bimbingan rohani			100.00	33.33	78.70

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Nasional		% Capaian (tahun)		
			Nilai	Waktu	2015	2016	2017
IV	Penegakan dan Bantuan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	5 Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	80%	2014	100	100	100
		5 a. Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian			40.91	37.29	39.50
		5 b. Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian			100	100	100
		5 c. Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di UPPA			100	100	100
		5 d. Cakupan ketersediaan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang sensitif gender			100	100	100
		5 e. Cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak			100	100	100
		5 f. Cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam menangani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak			100	100	50
		6 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	50%	2014	100	100	100
		6 a. Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak			100	100	100
V	Pemulangan dan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	7 Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	50%	2014	0	2.99	1.30
		8 Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	100%	2014	-	-	1
		8 a. Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial			-	-	1

Sumber : Bagian Organisasi Setda Gunungkidul, 2018

C. Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia.

Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan.

Kerawanan pangan dapat dilihat dari aspek produksi, distribusi dan konsumsi. Dari aspek produksi, rawan pangan terjadi akibat kemampuan produksi yang tidak seimbang dengan kebutuhan, sehingga kekurangan pasokan dibandingkan permintaan. Dari aspek distribusi adalah ketidakseimbangan pasokan untuk memenuhi permintaan pangan sehingga terjadi kelangkaan pangan di suatu tempat, waktu, pada jumlah dan harga yang tidak memadai atau ketidakmampuan membeli pangan karena tidak ada daya beli atau karena kemiskinan. Sedangkan dari aspek konsumsi adalah ketidakmampuan dalam memenuhi konsumsi pangan yang sesuai dengan standar kecukupan kalori dan protein, yaitu energi 2.150 kkal/kapita/hari serta protein 57 gr/kapita/hari (WNPG X tahun 2012). Penilaian kondisi kerawanan pangan memperhatikan 3 indikator, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan.

a) Ketersediaan Pangan

Indikator Ketersediaan Pangan dihitung menggunakan data produksi pangan sereal (beras, jagung, ubi kayu dan ubi jalar) yang diperbandingkan dengan populasi penduduk dan jumlah konsumsi normatif pangan sereal. Produksi pangan sereal yang digunakan adalah produksi netto yang berasal dari konversi produksi bruto yang telah dikurangi dengan susut untuk kebutuhan benih (s), pakan (f) dan tercecer (w).

Pada tahun 2015, kondisi pangan dan gizi Kabupaten Gunungkidul dilihat dari indikator ketersediaan pangan berada dalam kategori aman atau masuk skor 1. Hal ini dapat dilihat dari data ketersediaan pangan pokok sumber karbohidrat yang jika dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi kalori telah menunjukkan kondisi yang surplus (aman).

Ketersediaan pangan sereal per kapita per hari sebesar 2.513

gram, sedangkan kebutuhan konsumsi kalori sebesar 300 gram. Dari angka tersebut maka rasio ketersediaan pangan sebesar 8,38 sehingga dikategorikan surplus atau masuk skor 1.

b) Akses Pangan

Indikator Akses Pangan dinilai dengan pendekatan jumlah Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I alasan ekonomi berdasarkan data setahun terakhir.

Berdasarkan indikator akses pangan pada tahun 2015, dari 243.002 keluarga di Kabupaten Gunungkidul terdapat 13.131 keluarga pra sejahtera alasan ekonomi dan 7.766 keluarga sejahtera I alasan ekonomi atau total terdapat 20.897 keluarga miskin (8,60%) sehingga masuk skor 1.

c) Pemanfaatan Pangan

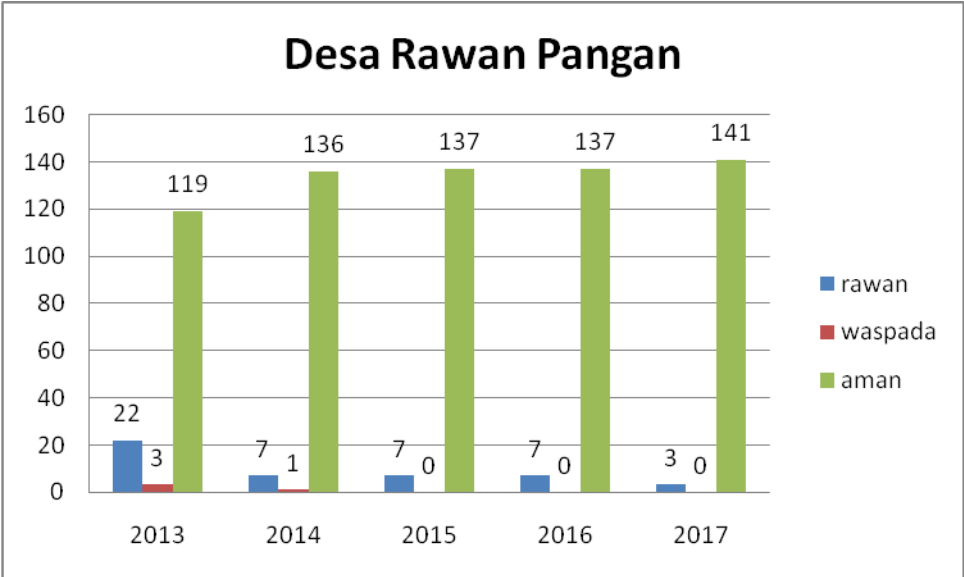
Indikator Pemanfaatan Pangan dihitung menggunakan data status gizi balita yang dinilai dari prevalensi KEP (kekurangan energi protein) yang terdiri dari data balita gizi kurang dan gizi buruk. Data ini disusun satu tahun sekali melalui kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG). Dari indikator pemanfaatan pangan, dilihat dari pemantauan status gizi terhadap 33.741 balita yang ditimbang, terdapat balita yang termasuk kategori gizi buruk sebanyak 161 balita (0,48%) dan gizi kurang sejumlah 2.352 balita (6,97%), sehingga total KEP sebanyak 2.513 balita (7,45%) atau masuk skor 1 Berdasarkan penilaian ketiga indikator di atas maka Kabupaten Gunungkidul memiliki skor total sebesar 3 dan masuk dalam kategori Aman. Berdasarkan kondisi kerawanan pangan dan gizi sesuai dengan hasil penskoran tersebut, dapat dilakukan pemetaan wilayah (Kecamatan) sebagai berikut :

- 1) Daerah Hijau (Aman) : 18 Kecamatan Panggang, Purwosari, Paliyan, Saptosari, Tanjungsari, Girisubo, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Playen, Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Tepus, Rongkop, Wonosari.
- 2) Daerah Kuning (Waspada) : 0 Kecamatan
- 3) Daerah Merah (Rawan) : 0 Kecamatan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 tidak terdapat Kecamatan potensi rawan pangan di Kabupaten

Gunungkidul. Namun demikian masih ada desa yang berstatus rawan pangan, jumlah desa rawan pangan semakin menurun dari 22 desa rawan pangan dan 3 desa waspada pangan pada tahun 2013, saat ini hanya tinggal 3 desa rawan pangan sedangkan 141 desa lainnya berstatus aman pangan.

Gambar 2.18.
Jumlah Desa Rawan Pangan dan Gizi Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2013-2017



Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan, 2017

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 hanya tinggal 3 desa rawan pangan di Kabupaten Gunungkidul. Perkembangan potensi kerawanan pangan dan gizi Kabupaten Gunungkidul.

SPM bidang Ketahanan Pangan sebagian besar indikator telah melebihi target nasional. Data capaian SPM Bidang Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.52.
SPM Bidang Ketahanan Pangan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Nasional		% Capaian (tahun)		
			Nilai	Waktu	2015	2016	2017
I	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1 Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	90%	2015	150.33	145.86	132.69
		2 Penguatan Cadangan Pangan	60%	2015	279.71	284.42	258.85
II	Distribusi dan Akses Pangan	3 Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	90%	2015	97.98	97.08	94.37

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Nasional		% Capaian (tahun)		
			Nilai	Waktu	2015	2016	2017
		4 Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	90%	2015	112.44	127.72	123.99
III	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	5 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90%	2015	81.68	0	81.68
		6 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80%	2015	82.35	82.61	85.71
III	Penanganan Kerawanan Pangan	7 Penanganan Daerah Rawan Pangan	60%	2015	100	100	100.00

Sumber : Bagian Organisasi Setda Gunungkidul, 2018

Tabel diatas memperlihatkan bahwa dari 7 (tujuh) indikator SPM bidang ketahanan pangan, dalam kurun waktu 2015-2017, 6 (enam) diantaranya sudah melebihi target nasional yang ditetapkan pada tahun 2015. Hanya 1 (satu) indikator yakni skor pola pangan harapan (PHH) yang belum mampu memenuhi target nasional terhitung sejak tahun dicanangkannya pada 2015.

D. Pertanahan

Urusan pertanahan dilaksanakan untuk meningkatkan penataan dan tercapainya perumusan kebijakan dalam urusan pertanahan. Jumlah tanah bersertifikat di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel 2.52 di bawah ini :

Tabel 2.53.
Jumlah Tanah Yang Bersertifikat
di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun					Satuan
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Jumlah Tanah yang bersertipikat(bangunan/gudang) per tahun						
	a. Hak Milik	176.421	199.022	208.162	312.018	341.855	Buah
	b. Hak Guna Bangunan	815	1.058	1.146	1.281	1.625	Buah
	c. Hak Pakai	4.794	4.876	4.906	4.922	5.009	Buah

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul, 2017

E. Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran para pemangku kepentingan, melalui berbagai metode dan media yang efektif perlu terus dilaksanakan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran para pemangku kepentingan, melalui berbagai metode dan media yang efektif perlu terus dilaksanakan.

Kondisi lingkungan Kabupaten Gunungkidul secara umum masih dalam kondisi cukup baik, artinya untuk kualitas air, udara, laut dan tanah belum mengalami pencemaran yang berat. Indikatornya adalah sebagian besar hasil pemeriksaan komponen lingkungan tersebut belum melebihi baku mutu. Tetapi kuantitas sumberdaya alam yang dimiliki seperti lahan, hutan dan air sudah mengalami kerusakan, seperti kerusakan sumberdaya air, kerusakan lahan akibat pertambangan dan lahan kritis sudah cukup mengkhawatirkan, karena kecenderungan meningkat terus seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian upaya pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup harus terus dilakukan guna mencegah kerusakan lingkungan yang lebih besar atau bencana lingkungan.

1. Kondisi air sungai dalam Kota Wonosari

Dari hasil pemantauan kualitas air sungai yang melewati kota Wonosari selama lima tahun terakhir pada musim penghujan yang dilakukan kualitas air di alur sungai bagian hulu memiliki status

mutu air memenuhi baku mutu bila digunakan sebagai prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut (mutu air kelas 2) menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 20 tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan alur sungai bagian hilir memiliki status mutu air tercemar ringan bila digunakan untuk peruntukan yang sama. Pada pemantauan musim kemarau, di alur sungai bagian hulu sampai hilir, status mutu air sungai termasuk dalam kategori memenuhi baku mutu, kecuali di alur bagian tengah status mutu airnya termasuk dalam kategori tercemar ringan. Parameter yang dominan menyebabkan sungai bagian hilir memiliki status mutu air tercemar ringan pada pemantauan bulan Maret adalah parameter *Biological Oxygen Demand* (BOD), sedangkan parameter yang dominan menyebabkan sungai bagian tengah pada pemantauan pada musim kemarau memiliki status mutu air tercemar ringan adalah kandungan nitrit. Status mutu air sungai yang melewati kota Wonosari sebagai sampel pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.54.
Indeks Pencemaran Air Sungai
Yang Melewati Kota Wonosari Tahun 2016

Sungai	Bulan Maret		Bulan SEPTEMBER	
	IP	Kategori	IP	Kategori
Besole	7,664	Tercemar Sedang	3,696	Tercemar Ringan
Kepek	7,907	Tercemar Sedang	17,571	Tercemar Berat
Krappyak	0,751	Memenuhi Baku Mutu	25,269	Tercemar Berat
Blimbing	2,300	Tercemar Ringan	4,493	Tercemar Ringan
Wareng	1,841	Tercemar Ringan	3,580	Tercemar Ringan

Sumber : Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten
Gunungkidul 2016

b) Kondisi Kualitas Udara Ambien

Kualitas udara di Kabupaten Gunungkidul bisa dikatakan masih cukup baik, karena dari hasil pemantauan yang dilakukan di 7 titik lokasi (simpang tiga Sambipitu, simpang empat Kantor Pos Wonosari, taman parkir Pasar Argosari Wonosari, Kawasan Industri Mijahan, simpang tiga Bedoyo, simpang empat Karangmojo dan Pasar Semin) pada bulan Maret maupun Oktober, hasil pengujian parameter-parameter kualitas udara ambiennya masih berada di bawah ambang

batas yang diperkenankan berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 153 Tahun 2002 tentang Baku Mutu Udara Ambien Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, namun untuk parameter kebisingan, di beberapa titik sudah melebihi ambang batas yang diperkenankan berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 176 Tahun 2003 tentang Baku Tingkat Getaran, Kebisingan dan Kebauan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kandungan gas ozon (O₃) dan partikel (debu) di udara pada pemantauan bulan Oktober di sebagian besar lokasi mengalami peningkatan dibandingkan pada pemantauan bulan Maret.

c) Kondisi Kualitas Tanah

Hasil pemantauan kualitas tanah secara umum selama lima tahun terakhir mewakili 3 zona. Pada pemeriksaan kualitas tanah tahun 2016 di zone Utara, yang meliputi kecamatan Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Ponjong dan Semin dapat dilihat bahwa sampel tanah dari Ngawen melebihi ambang kritis untuk 2 parameter dibandingkan dengan Kriteria Baku Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (di lahan kering) menurut Peraturan Pemerintah RI No. 150 tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa, yaitu parameter daya hantar listrik (DHL) dan potensial redoks. Sampel tanah dari Patuk (Widoro Kulon) melebihi ambang kritis untuk 3 parameter, yaitu parameter berat isi, daya hantar listrik (DHL) dan potensial redoks. Sampel tanah dari Patuk (Kemuning), Ponjong dan Semin melebihi ambang kritis untuk 4 parameter, yaitu untuk parameter berat isi (Ponjong dan Semin), porositas total (Patuk dan Semin), derajat pelulusan air (Patuk dan Ponjong), daya hantar listrik (Patuk, Ponjong dan Semin) serta potensial redoks (Patuk, Ponjong dan Semin). Sampel dari Gedangsari dan Nglipar melebihi ambang batas untuk 5 parameter, yaitu komponen koloid, berat isi, derajat pelulusan air, daya hantar listrik dan potensial redoks untuk sampel tanah di Gedangsari, sedangkan untuk sampel tanah dari Nglipar melebihi ambang batas untuk parameter berat isi, porositas total, derajat pelulusan air, daya hantar listrik dan potensial redoks.

Dari pemantauan kualitas tanah di zone Tengah, yang meliputi kecamatan Playen, Wonosari, Karangmojo dan Semanu dapat dilihat bahwa sampel tanah dari Playen dan Karangmojo melebihi ambang kritis untuk 2 parameter, yaitu daya hantar listrik dan potensial redoks. Sampel tanah dari Wonosari, baik dari desa Pulutan maupun Karangrejek serta dari Semanu melebihi ambang kritis untuk 3 parameter, yaitu untuk parameter ketebalan solum, derajat pelulusan air (permeabilitas), daya hantar listrik (DHL) dan potensial redoks.

Dari pemantauan kualitas tanah di zone Selatan, yang meliputi kecamatan Purwosari, Panggang, Saptosari, Paliyan, Tanjungsari, Tepus, Rongkop dan Girisubo dapat dilihat bahwa sampel tanah dari Saptosari, Paliyan dan Tepus melebihi ambang kritis untuk 2 parameter, yaitu untuk parameter daya hantar listrik (DHL) dan potensial redoks, sampel tanah dari Tanjungsari, Rongkop dan Girisubo melebihi ambang kritis untuk 3 parameter, yaitu untuk kebatuan permukaan, DHL dan potensial redoks untuk sampel tanah dari Tanjungsari, sedangkan sampel tanah dari Rongkop dan Girisubo melebihi ambang kritis untuk parameter derajat pelulusan air (permeabilitas), DHL dan potensial redoks. Sampel tanah dari Purwosari melebihi ambang kritis untuk 4 parameter, yaitu porositas total, derajat pelulusan air (permeabilitas), daya hantar listrik dan potensial redoks, sedangkan sampel tanah dari Panggang melebihi ambang kritis untuk 5 parameter, yaitu berat isi, porositas total, derajat pelulusan air (permeabilitas), daya hantar listrik dan potensial redoks.

Tabel 2.55.
Capaian SPM bidang Lingkungan Hidup

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Nasional		% Capaian (tahun)		
			Nilai	Waktu	2015	2016	2017
I	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air	1 Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	100%	2013	50	83.33	66.67

II	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak	2	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	100%	2013	100	100	100
III	Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau tanah untuk produksi Biomassa	3	Persentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	100%	2013	100	100	100
IV	Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	4	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	2013	100	100.00	100

Sumber : Bagian Organisasi Setda Gunungkidul, 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa SPM bidang Lingkungan Hidup hampir semua indikator telah memenuhi target nasional. Satu-satunya indikator yang belum sesuai target nasional adalah pencegahan pencemaran air yang terealisasi menurun dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 66,67%. Dari 6 usaha dan/atau kegiatan yang dipantau, 5 usaha dan/atau kegiatan sudah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, sedangkan 1 usaha dan/atau kegiatan sudah memenuhi persyaratan administrasi namun belum memenuhi persyaratan teknis. Kendala utama dalam penerapan SPM bidang lingkungan hidup meliputi keterbatasan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran.

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil menjadi salah satu sasaran utama dalam pembangunan. Keberadaan penduduk yang merupakan salah satu modal utama pembangunan perlu mendapatkan perhatian agar penerapan administrasi kependudukan berjalan sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku.

Penerapan sistem informasi administrasi kependudukan seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional, memerlukan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang kependudukan dan catatan sipil yang baik antara Pemerintah Pusat, Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Implementasi sistem informasi administrasi

kependudukan (SIAK) *on line* perlu mendapatkan dukungan dengan peningkatan kapasitas SDM dalam rangka pengoperasiannya termasuk pelatihan pemeliharaan peralatan jaringan SIAK *on line*.

Menurut catatan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 2016 mencapai angka 762.452 orang dengan komposisi penduduk perempuan sebanyak 380.527 orang dan 375.217 orang penduduk laki-laki.

Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Gunungkidul yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain pelayanan KTP, KK, Akta kelahiran, akta perkawinan dan perceraian. Pelayanan ini harus diberikan kepada semua masyarakat dan juga ada beberapa jenis pelayanan yang telah mempunyai standar pelayanan minimal (SPM) yang harus dicapai.

Tabel 2.56.
Jumlah Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun					Satuan
	2013*)	2014	2015	2016	2017	
Laki-Laki						
- Jumlah	381.159	375.168	375.217	379.875	376.091	Orang
- Persentase (%)	49,91	50,06	49,6487	49,82	49,75	%
Perempuan						
- Jumlah	382.606	374.279	380.527	382.577	379.886	Orang
- Persentase (%)	50,09	49,94	50,3513	50,17	50,25	%
Jumlah	763.765	749.447	755.744	762.452	755.977	Orang

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2018*) Adanya Integrasi eKTP dan SIAK serta penghapusan data ganda dan anomaly

Tabel 2.57.
Perkembangan Kepemilikan Dokumen
Kependudukan di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2013-2017

No	Dokumen	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Kartu Keluarga	163.289	179.363	196.217	206.884	241.184
	KTP	484.154	484.985	508.300	534.018	584.172
	Akta Kelahiran	142.486	193.690	215.786	289.335	305.171
	Akta Kematian	498	1.707	8.901	17.813	10.328
	Akta Perkawinan	148.960	188.547	203.114	214.097	221.799
	Akta Perceraian	5.484	7.214	10.263	12.973	1.279

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2018

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat lebih di titik beratkan pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas pengembangan lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.

a) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat di bidang pemerintahan. Jumlah LPM menggambarkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat agar berperan aktif dalam pembangunan daerah. Seluruh desa (144 desa) di Kabupaten Gunungkidul telah membentuk LPM dan juga telah terbentuk asosiasi LPMD.

b) Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Desa

Keberadaan lembaga pemberdayaan ekonomi desa sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan melalui pembinaan dan pendampingan agar dapat menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), yang dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Desa. Jumlah lembaga pemberdayaan ekonomi desa yang ada di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 diantaranya adalah: 38 unit Badan Usaha Milik Desa, 59 unit Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), 48 unit Lumbung Pangan Desa, 77 unit Pasar Desa, 15 unit Badan Kredit Desa dan 24 unit Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM/P2KP)

Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Klasifikasi Desa tersebut untuk menunjukkan keragaman karakter setiap Desa dalam rentang skor 0,27 – 0,92 Indeks Desa Membangun. Klasifikasi dalam 5 status Desa

tersebut juga untuk menajamkan penetapan status perkembangan Desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan. Status Desa Tertinggal, misalnya, dijelaskan dalam dua status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal di mana situasi dan kondisi setiap Desa yang ada di dalamnya membutuhkan pendekatan dan intervensi kebijakan yang berbeda. Menangani Desa Sangat Tertinggal akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya di banding dengan Desa Tertinggal.

Dengan nilai rata-rata nasional Indeks Desa Membangun 0,566 klasifikasi status Desa ditetapkan dengan *ambang batas* sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Desa Sangat Tertinggal | : $\leq 0,491$ |
| 2. Desa Tertinggal | : $> 0,491$ dan $\leq 0,599$ |
| 3. Desa Berkembang | : $> 0,599$ dan $\leq 0,707$ |
| 4. Desa Maju | : $> 0,707$ dan $\leq 0,815$ |
| 5. Desa Mandiri | : $> 0,815$ |

Desa Berkembang terkait dengan situasi dan kondisi dalam status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dapat dijelaskan dengan faktor kerentanan. Apabila ada tekanan faktor kerentanan, seperti terjadinya goncangan ekonomi, bencana alam, ataupun konflik sosial maka akan membuat status Desa Berkembang jatuh turun menjadi Desa Tertinggal. Dan biasanya, jika faktor bencana alam tanpa penanganan yang cepat dan tepat, atau terjadinya konflik sosial terus terjadi berkepanjangan maka sangat potensial berdampak menjadikan Desa Tertinggal turun menjadi Desa Sangat Tertinggal. Sementara itu, kemampuan Desa Berkembang mengelola daya, terutama terkait dengan potensi, informasi / nilai, inovasi / prakarsa, dan kewirausahaan akan mendukung gerak kemajuan Desa Berkembang menjadi Desa Maju.

Klasifikasi status Desa berdasar Indeks Desa Membangun ini juga diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan Desa menuju Desa Mandiri. Desa Berkembang, dan terutama Desa Maju, kemampuan mengelola Daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan akan membawanya menjadi Desa Mandiri.

Indeks Desa Membangun merupakan komposit dari ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. IDM didasarkan pada 3 (tiga) dimensi tersebut dan dikembangkan lebih lanjut dalam 22 Variabel dan 52 indikator. Penghitungan IDM Kabupaten Gunungkidul pada 144 Desa berdasar data

Podes 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.58.
Data Desa menurut Indeks Desa
Membangun Tahun 2016

No.	Status Desa	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat Tertinggal	0	0
2	Tertinggal	26	18,05
3	Berkembang	86	59,72
4	Maju	31	21,53
5	Mandiri	1	0,69

Sumber :DP3AKBPMD, 2017

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera antara lain adalah sulitnya regenerasi kader dan keterbatasan petugas penyuluh Keluarga Berencana serta berbagai masalah terkait kesehatan reproduksi. Program Keluarga Berencana dikatakan berhasil apabila angka kepesertaan KB Mandiri tinggi, kepesertaan KB Pria tinggi, dan *unmet need* yang rendah.

Tabel 2.58
Indikator Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun					Satuan
	2013	2014	2015	2016	2017	
A. Jumlah Peserta Program KB Aktif	109.519	108.979	100.645	91.224	99.823	Jiwa
1). Laki - Laki	3.555	3.690	3.706	4.230	4.226	Jiwa
2). Perempuan	105.964	105.289	96.939	87.584	95.597	Jiwa
B. Jumlah Akseptor KB				101.570	99.823	
1). Laki - Laki	1.081	1.830	509	3.831	4.226	Jiwa
2). Perempuan	13.826	12.473	9.803	97.739	95.597	Jiwa
C. Jumlah Pasangan Usia Subur	132.780	131.966	124.622	126.254	124.892	Pasang
D. Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB	109.519	108.979	100.645	101.570	99.823	Pasang
E. Metode Kontrasepsi Peserta KB Baru	14.907	14.303	10.312	10.312		
1). IUD	3.196	2.805	2.466	2.370	n/a	Orang
2). MOP	34	40	22	11	n/a	Orang
3). MOW	245	222	151	441	n/a	Orang
4). Implant	2.255	2.302	1.970	2157	n/a	Orang
5). Suntikan	7.070	6.956	5.632	5180	n/a	Orang
6). PIL	1.060	1.188	1.349	890	n/a	Orang
7). Kondom	1.047	790	559	441	n/a	Orang
F. Jumlah Kegagalan Menurut Metode					n/a	
1). IUD	4	11	7	21	n/a	Orang
2). MOP	1	8	-	0	n/a	Orang
3). MOW	2	0	-	0	n/a	Orang

Uraian	Tahun					Satuan
	2013	2014	2015	2016	2017	
4). Implant	-	3	3	4	n/a	Orang
5). Suntikan	-	-	-	0	n/a	Orang
6). PIL	-	-	-	0	n/a	Orang
7). Kondom	-	-	-	0	n/a	Orang

Sumber Data : DP3AKBPMD, 2018

Pada bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dari 9 (sembilan) indikator yang belum terpenuhi adalah indikator cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*Unmet Need*) 5% yang baru tercapai 61,34 dari target nasional 100. Hal tersebut dikarenakan tidak semua pasangan usia subur menghendaki atau berkebutuhan ber-KB. Kendala lain dalam pencapaian SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera antara lain sulitnya meningkatkan kesertaan KB pria. Berikut capaian SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera :

Tabel 2.60.
Capaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator		Target Nasional		% capaian (tahun)		
				Nilai	Waktu	2015	2016	2017
I	Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)	1	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%)	100	2014	163	170	216
		2	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (65%)	100	2014	124	124	124
		3	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 5%	100	2014	61	61	62
		4	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (70%)	100	2014	117	123	121
		5	Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%)	100	2014	107	105	103
		6	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/ kelurahan	100	2014	97	96	90
		7	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan	100	2014	100	100	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator		Target Nasional		% capaian (tahun)		
				Nilai	Waktu	2015	2016	2017
II	Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi	8	Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	100	2014	274	325	325
III	Penyediaan Informasi Data Mikro	9	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun	100	2014	100	100	100

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kab. Gunungkidul, 2018

I. Perhubungan

Kondisi perhubungan dan transportasi secara umum masih kurang. Hal ini dapat dilihat masih terbatasnya pelayanan transportasi umum baik yang dilakukan oleh swasta maupun pemerintah (perintis). Lesunya industri transportasi penumpang di Kabupaten Gunungkidul juga disebabkan semakin beralihnya calon penumpang ke moda transportasi sepeda motor yang lebih fleksibel dalam jangkauan maupun kemudahan dalam kepemilikan. Masih banyak wilayah di Kabupaten Gunungkidul yang belum terlayani angkutan umum terutama wilayah utara yaitu Kecamatan Gedangsari dikarenakan kendala sarana jalan dan kondisi geografis. Oleh karena itu sejak Tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah mengoperasikan mobil bus perintis di Kecamatan Gedangsari.

Tabel 2.61.
Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2013-2017

No	Jenis Data	Tahun					Satuan
		2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Kendaraan wajib uji	6.716	7.331	8.057	9.622	10.171	Kendaraan
2.	Kendaraan yang diuji	7.048	7.528	7.884	8.092	7.676	Kendaraan
3.	Kendaraan yang numpang uji	279	226	224	520	77	Kendaraan
4.	Kendaraan mutasi masuk	258	301	373	401	441	Kendaraan
5.	Kendaraan tidak lulus uji	370	355	581	655	967	Kendaraan
6.	Pelanggaran PERDA Perhubungan (sidang PN)	51	65	198	227	481	Kasus
7.	Terminal						
	Kelas A	1	1	1	1	1	Unit
	Kelas B	-	-	-	-		Unit
	Kelas C	-	-	1	1	1	Unit
8.	Sarana Transportasi	-	-	-			Unit

No	Jenis Data	Tahun					Satuan
		2013	2014	2015	2016	2017	
	Bus (AKAP)	323	323	323	323	271	Unit
	Bus (AKDP)	74	74	74	74	74	Unit
	Bus Perkotaan	40	40	40	40	40	Unit
	Angkutan perintis perdesaan	1	2	2	2	2	Unit
9	Sarana dan Prasarana Lau- lintas						
	Rambu-rambu lalu lintas	1.430	1.540	1.947	2.042	2.179	Unit
	Trafic light	17	17	17	17	18	Unit
	Warning lamp	29	29	29	29	33	Unit
	Zebra cross	11	11	11	11	11	Unit
	Pagar pengaman/Guardrail	7.855	8.015	7.979	8.079	8.319	Meter
	Marka jalan	44.059	45.759	47.639	49.239	52.239	Meter
	Deliniator	656	956	1.526	1.726	2.526	Buah
	Halte	43	43	38	47	53	Buah

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, 2018

Pada Bidang Perhubungan, seluruh indikator pada jenis pelayanan dasar angkutan sungai dan danau, angkutan penyeberangan, dan angkutan laut tidak terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tidak memungkinkan menyelenggarakan pelayanan tersebut. Pada jenis pelayanan dasar angkutan jalan, indikator tersedianya angkutan jalan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten tidak terpenuhi karena mulai tahun 2013 Gunungkidul dinyatakan bukan daerah terpencil lagi.

Pada indikator tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota baru tercapai 61,22 dari target nasional 75% tahun 2014, sementara indikator terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota baru tercapai 78,38%. Kondisi tersebut disebabkan rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum sehingga menimbulkan lesunya industri transportasi saat ini. Banyak kendaraan angkutan umum yang tidak diujikan oleh pemiliknya dikarenakan tidak dioperasikan untuk angkutan umum lagi. Untuk lebih jelasnya capaian SPM Bidang Perhubungan dapat

dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.62
Capaian SPM Bidang Perhubungan

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator	Target Nasional		% capaian (tahun)		
				Nilai	Waktu	2015	2016	2017
I	Angkutan Jalan	1 Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	1 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	75%	2014	61.224	61.224	61.22
			2 Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.	60%	2014	-	-	-
		2 Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	3 Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	100%	2014	86.000	90	90
			4 Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	40%	2014	50	100	50
		3 Fasilitas Perlengkapan Jalan	5 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	60%	2014	95.248	95.94	96.46
			a. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) pada jalan Kabupaten/Kota.			93.371	94.39	96.46

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator	Target Nasional		% capaian (tahun)		
				Nilai	Waktu	2015	2016	2017
			b. Tersedianya fasilitas penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.			97.125	97.50	96.46
	4	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	6 Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	60%	2014	100	100	100
	5	Sumber Daya Manusia (SDM)	7 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.	50%	2014	-	-	-
			8 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	100%	2014	-	-	-
			9 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.	40%	2014	-	-	-
			10 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100%	2014	-	-	-
	6	Keselamatan	11 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam	100%	2014	57.47	78.38	34.83

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator	Target Nasional		% capaian (tahun)		
				Nilai	Waktu	2015	2016	2017
			Kabupaten/Kota.					
II	Angkutan Sungai dan Danau.	1 Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau	12 Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	75%	2014	-	-	-
			13 Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten/Kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	40%	2014	-	-	-
		2 Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau	14 Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau.	60%	2014	-	-	-
		3 Keselamatan	15 Terpenuhi standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten/Kota.	100%	2014	-	-	-
		4 Sumber Daya Manusia (SDM)	16 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan	50%	2014	-	-	-

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator	Target Nasional		% capaian (tahun)		
				Nilai	Waktu	2015	2016	2017
			sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau.					
III	Angkutan Penyeberangan	1 Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan	17 Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.	60%	2014	-	-	-
			18 Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/Kota.	100%	2014	-	-	-
		2 Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan	19 Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.	60%	2014	-	-	-
		3 Keselamatan	20 Terpenuhi standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas	100%	2014	-	-	-

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator	Target Nasional		% capaian (tahun)		
				Nilai	Waktu	2015	2016	2017
			penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota					
		4 Sumber Daya Manusia (SDM)	21 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota	50%	2014	-	-	-
IV	Angkutan Laut	1 Jaringan Pelayanan Angkutan Laut	22 Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	90%	2014	-	-	-
			23 Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	100%	2014	-	-	-
		2 Jaringan Prasarana Angkutan Laut	24 Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif	60%	2014	-	-	-

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator	Target Nasional		% capaian (tahun)		
				Nilai	Waktu	2015	2016	2017
			angkutan jalan.					
	3	Keselamatan	25 Terpenuhiya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota.	100%	2014	-	-	-
	4	Sumber Daya Manusia (SDM)	26 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT	100%	2014	-	-	-

Sumber: Bagian Organisasi Setda Gunungkidul, 2018

J. Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sadar informasi dan terjaminnya hak masyarakat terhadap informasi yang luas dan transparan, melalui peningkatan kesadaran terhadap kebutuhan informasi, pelayanan informasi multi media, serta perluasan jaringan sarana dan prasarana informasi seluruh kecamatan. Pencapaian kinerja penyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika adalah operasi dan pemeliharaan website Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yakni *gunungkidulkab.go.id* sebagai media untuk terjalannya komunikasi yang harmonis antar pelaku pembangunan, dan dalam mendukung globalisasi informasi di berbagai bidang,

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus berupaya membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mencakup Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota, pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Fasilitas telekomunikasi sangat diperlukan untuk memperlancar arus informasi dalam rangka memacu kegiatan ekonomi yang semakin menuntut pelayanan yang efisien, efektif dan cepat. Pemanfaatan sarana telekomunikasi khususnya telepon dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan, namun untuk telepon kabel terjadi penurunan yang cukup tajam dari 4.187 sambungan di tahun 2016 menjadi hanya 2.448 sambungan di tahun 2017 di lain pihak kapasitas tersedia adalah 5,179 SST. Penurunan sambungan telepon kabel dikarenakan semakin praktis dan murah nya penggunaan telepon selular, sehingga penurunan sambungan telepon kabel tidak mengurangi kualitas komunikasi masyarakat.

Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (*e-government*) mengamanatkan tentang pentingnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Melalui pengembangan *e-government*, pemerintah mengharapkan dapat melakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk menindaklanjuti Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berupaya untuk melakukan pembangunan infrastruktur jaringan komputer (LAN, WAN dan internet/*global area network*) di lingkungan pemerintah. Pembangunan jaringan komputer tersebut memungkinkan terkoneksi nya tiap-tiap SKPD dalam jaringan internet/intranet, sehingga tranformasi data/informasi antara masing-masing unit kerja dapat berjalan semakin lancar.

Diharapkan dengan konsep penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik tersebut, informasi dan layanan kepada masyarakat dapat lebih mudah diakses dan digunakan. Selain itu, hal yang terpenting masyarakat dapat berinteraksi dan ikut berperan aktif dalam mendukung

dan memberikan partisipasi di setiap kegiatan pembangunan.

Tabel. 2.63.
Capaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Nasional		% Capaian (tahun)		
			Nilai	Waktu	2015	2016	2017
I	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	1 Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui:					
		a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi;	12 x /tahun	2014	3167	2808	2617
		b. Media baru seperti website (media online);	Setiap hari	2014	100	100	100
		c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;	12 x /tahun	2014	25	17	25
		d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi dan lokakarya;	12 x /tahun setiap kecamatan	2014	208	217	467
		e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho	12 x /tahun	2014	442	583	158
II	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	2 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	50%	2014	67	67	67

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Gunungkidul 2018

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian SPM pada Bidang Komunikasi dan Informatika, seluruh indikator dari jenis pelayanan dasar diseminasi informasi nasional serta pengembangan dan pemberdayaan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) telah tercapai bahkan melebihi target nasional.

K. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Sampai dengan tahun 2017, koperasi yang terdaftar di Gunungkidul berjumlah 259 koperasi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.64.
Data Koperasi yang Melaksanakan RAT
Tahun 2013- 2017

Jenis Koperasi	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
1. KUD	16	16	16	16	16
2. KPRI	51	51	52	52	52
3. KSP	27	34	38	47	51

Jenis Koperasi	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
4. PENSIUNAN	6	6	0	1	0
5. ABRI	2	2	1	2	1
6. Wanita	11	11	11	11	8
7. KSU	55	55	58	57	40
8. Kerajinan	6	6	6	6	2
9. PONTREN	11	11	11	11	8
10. KOPTAN	46	46	48	49	36
11. KOPKAR	12	12	12	12	8
12. KSPPS	21	22	24	24	28
13. KOPNAK	6	6	7	7	4
14. WISATA	0	0	1	1	1
15. POLISI	0	0	0	1	1
16. Kop. Wredetama	0	0	4	4	2
17. Nelayan	1	1	1	1	1
18. Koperasi Pasar	3	3	3	0	0
19. Koperasi Pemuda	1	1	1	0	0
20. Kop. Angkutan Pedesaan	1	1	2	0	0
21. Koperasi Sekunder	2	2	2	0	0
Jumlah	278	286	298	302	259

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab. Gunungkidul, 2018

L. Penanaman Modal

Dalam rangka mengoptimalkan potensi perekonomian daerah, maka Kabupaten Gunungkidul masih memerlukan penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Dengan keanekaragaman sumber daya yang ada di Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menawarkan kepada para investor untuk menanamkan modalnya di Gunungkidul. Dalam hal ini untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat dan pemilik modal.

Tabel 2.65.
Perkembangan Investasi di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2016

SEKTOR	TAHUN			
	2013	2014	2015	2016
Industri	8.673.650.000	10.691.000.000	124.145.521.008	573.683.038.981
Jasa	42.505.800.000	37.799.750.000	160.948.056.885	140.512.883.000
Kesehatan	14.098.000.000	14.584.600.000	7.834.074.031	12.545.442.000
Pariwisata	2.788.500.000	1.807.000.000	249.497.350.000	126.117.650.000
Keuangan	50.632.539.000	162.515.290.000	14.550.000.000	5.246.250.000
Perdagangan	22.856.630.000	192.531.161.000	25.187.160.000	15.827.700.000
Perhubungan	24.714.000.000	9.408.000.000	20.041.160.000	24.921.400.000
Peternakan	1.580.000.000	12.495.000.000	13.203.010.000	731.400.000
Total (Rp.)	167.849.119.000	441.831.801.000	615.406.331.924	899.585.763.981

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul

Jumlah izin yang dilayani oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu selama tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.66
Jumlah Izin yang Dilayani Oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Izin Yang Dikeluarkan	Unit	3.232	3.201	3.105	2.898	
2	Jumlah IMB Yang Dikeluarkan	Unit	236	205	365	385	313
3	Jumlah Izin Prinsip Penanaman Modal dalam negeri	Unit	-	1	3	4	10
4	Jumlah Izin Usaha Yang Di Keluarkan (SIUP)	Unit	333	306	230	227	330
5	Jumlah Izin Untuk Hak Pengusahaan Perkebunan	Unit	-	-	-	-	
6	Jumlah Izin Untuk Hak Pengusahaan Kehutanan	Unit	-	-	-	-	
7	Jumlah izin Untuk Hak Pengusahaan Pertambangan	Unit	-	-	-	-	
8	Jumlah Perizinan Investasi PMA Yang Dikeluarkan/Setujui	Unit	-	-	-	-	
9	Jumlah Perizinan Investasi PMDN Yang Dikeluarkan/Setujui	Unit	18	9	11	1	1
10	Jumlah izin lokasi	Unit	4	4	5	4	n/a
11	Jumlah pemohon izin lokasi	Orang	4	9	4	4	n/a

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul, 2017

Tabel 2.67
Capaian SPM Bidang Penanaman Modal

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator		Target Nasional		% Capaian (tahun)			
				Nilai	Waktu	2015	2016	2017	
1	Kebijakan Penanaman Modal adalah serangkaian peraturan perundang-undangan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan Penanaman modal di sektor/bidang usaha unggulan daerah	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan sampai dengan 2014 sekurang-kurangnya 1 (satu) sektor/bidang usaha pertahun :		1 (satu) sektor/ bidang usaha/ tahun	2014	1 Sektor	4 sektor	4 Sektor	
			-	Nama Bidang Usaha (Jenis Bidang Usaha yang dilakukan)			1. Sektor pariwisata	1. sektor pertanian 2. sektor Pariwisata 3. Sektor Industri 4.Sektor Perikanan	1. Sektor Pertanian dalam arti luas 2. sektor Industri 3. Sektor Bahan Galian 4. Sektor Pariwisata
			-	Lokasi Peluang Usaha (Tempatnya pelaksanaan Kegiatan Bidang Usaha)			Kabupaten Gunungkidul	semua kecamatan di kabupaten Gunungkidul	Wisata Pantai (Kec. Girisubo, Tepus, Tanjungsari, Saptosari, Panggang, Purwosari.) Wisata Terpadu (Kec. Karangmojo, Nglipar, Ponjong) Pertanian (Semua Kecamatan) Perkebunan (Patuk, Ponjong, Karangmojo, Playen, Saptosari, Panggang, Girisubo, Tepus, Ged
			-	Ketersediaan Lahan (Ha)			belum terpetakan (sepanjang kawasan Pantai di Kab. Gunungkidul)	semua kecamatan di kabupaten Gunungkidul	0

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator			Target Nasional		% Capaian (tahun)		
					Nilai	Waktu	2015	2016	2017
	Sektor bidang usaha unggulan adalah sektor/bidang usaha yang memiliki keunggulan komparatif (<i>comparative advantage</i>) di daerahnya.			Kesesuaian dengan Tata Ruang Daerah (sudah sesuai atau belum dan alasannya)			RTRW Kab. Gunungkidul	RTRW Kab. Gunungkidul	RTRW Kab. Gunungkidul
				Bentuk Dukungan pemerintah Daerah (Keuangan, Perijinan dll)			Pelatihan dan Perizinan	Pelatihan dan Perizinan	0
	Informasi Peluang Usaha Mencakup : Lokasi, Ketersediaan lahan, Kesesuaian dengan tata ruang, daerah, bentuk dukungan pemerintah daerah, Potensi Pasar, Perkiraan Investasi			Potensi Pasar			Lokal, Dalam Negeri, dan Luar negeri	Lokal, Dalam Negeri, dan Luar negeri	0
				Perkiraan Investasi (Perkiraan nilai (Rp) investasinya)			15 milyar	871 milyar	Target RPJMD / RKPD
II	Kerjasama Penanaman Modal Oleh PDPKM fasilitasi pemerintah	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam rangka kerjasama kemitraan:							

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator			Target Nasional		% Capaian (tahun)		
					Nilai	Waktu	2015	2016	2017
	daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kabupaten/Kota dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional		a	Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM K) tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi /nasional	1 (satu) kali/tahun	2014	5 kali pameran : 1. Ina Craft Jakarta Bulan April 2. HUT Gunungkidul Juni 3. Produk Unggulan Koperasi UMKMK4 PK3L Expo bulan Juni di Mataram NTB 4. PPED/JTE di JEC Yogyakarta bln Oktober. 5. Gelar Produk Daerah/ GPD Expo 2015 bulan November 2015 di Batam	5 kali pameran : 1. Ina Craft Jakarta Bulan April 2. HUT Gunungkidul Juni 3. Apkasi Internasional trade and investmen t summit 2016/ AITIS JIE 4. TTI EXPO Palembang Agustus 2016 5. Jogja Trade Expo Oktober 2016	5 kali pameran : 1. INACRAF 2017 The 19th Jakarta International Handicraft Trade Fair bulan april 2. Pameran Hari Jadi Ke 186 Kabupaten Gunungkidul (Gunungkidul Ekspo 2017) bulan mei 3. Gelar Pesona Budaya Nusantara bulan juni 4. PPED/Jogja Trade Expo di JEC bulan oktober 5. Pameran di Manado Sulsel Bulan Oktober 2017
			b	Jumlah UMKMK potensial yang akan dimitrakan di Kab/Kota	1 (satu) kali/tahun	2014	25	105	34
			c	Jumlah Potensi Pengusaha Provinsi /Nasional yang berminat melakukan kemitraan dengan UMKMK tingkat Kabupaten/Kota			-	15	0

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator			Target Nasional		% Capaian (tahun)		
					Nilai	Waktu	2015	2016	2017
III	Promosi Penanaman Modal PDKPM adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan citra Indonesia dan Citra Kabupaten Kota secara khusus sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan meningkatnya minat akan peluang penanaman modal yang prospektif di Kabupaten/kota tersebut		a	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal provinsi .	1 (satu) kali/tahun	2014	1 kalipameran potensi Gunungkidul Bulan Mei 2015	1 kali pameran potensi Gunungkidul Bulan Mei 2015	1 kali pameran potensi Gunungkidul Bulan Mei 2017 (kegiatan disatukan di dinas Perindag)
			b	Tindak Lanjut Kegiatan Hasil Promosi Penanaman Modal tingkat Kabupaten (Jenis kegiatan Promosi)	1 (satu) kali/tahun	2014	3 Kali Pameran : 1. TTI expo di Banjarmasin Bulan September 2015; 2. TTI Expo di Yogyakarta bulan November 2015 3. Gelar Produk Daerah/ GPD Expo 2015 bulan November 2015 di Batam	3 Kali Pameran : 1. TTI expo di Balikpapan Bulan April 2016; 2. PRJ Kemayoran Jakarta bulan Juni 2016 3.EATOF EXPO JEC bulan oktober 2016	3 Kali Pameran : 1. GPKN Expo 2017 di Jogja City Mall tanggal 14 Mei 2017 2. Medan TTI Expo Agustus 2017 3. Manado TTI expo Nopember 2017
IV	Pelayanan Penanaman Modal adalah Pemberian segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan			Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PDKPM di tingkat Kabupaten Rumus: Jumlah jenis perizinan dan non perizinan	100%	2014	91%	91%	91%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator		Target Nasional		% Capaian (tahun)		
				Nilai	Waktu	2015	2016	2017
				n yang dilayani PTSP PDPKM / 6 X 100%				
				Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani PTSP PDPKM / 6 X 100%		10	10	10
		1	Pendaftaran Penanaman Modal			sudah di hapus di perkara yang baru	0	0
		2	Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri			1	1	1
		3	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri			1	1	1
		4	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri			1	1	1
		5	Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal Dalam Negeri			1	1	1
		6	Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri			1	1	1

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator			Target Nasional		% Capaian (tahun)		
					Nilai	Waktu	2015	2016	2017
			7	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri			1	1	1
			8	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri			1	1	1
			9	Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal Dalam Negeri			1	1	1
			10	TDP (Tanda Daftar Perusahaan)			1	1	1
			11	SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)			1	1	1
			12	Perpanjangan IMTA yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota			0	0	0
V	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah melaksanakan pemantauan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan			Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha.	1 (satu) kali/ tahun	2014	1 kali	1 kali	1 kali bulan Agustus sosialisasi izin usaha reklame

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator			Target Nasional		% Capaian (tahun)		
					Nilai	Waktu	2015	2016	2017
VI	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal			Terimplimentasi sistannya a Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPIS E): Rumus : Jumlah Jenis Pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE / 4 x 100%	100%	2014	100	100	100
				Jumlah Jenis Pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE			4	4	4
				Jumlah Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri.			1	1	1
				Jumlah Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri.			1	1	1
				Jumlah Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri.			1	1	1
				Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).			1	1	1

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator			Target Nasional		% Capaian (tahun)		
					Nilai	Waktu	2015	2016	2017
VII	Penyebarluasan , Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.			Terselenggara sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/ tahun	2014	1 kali	1 kali	1 kali (temu bisnin bulan september)

Sumber : Bagian Organisasi Setda Gunungkidul, 2018

M. Kepemudaan dan Olahraga

Pelaksanaan urusan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Gunungkidul didukung oleh beberapa program yaitu pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda, peningkatan peran serta kepemudaan, peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga serta program peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Pembinaan terhadap generasi muda dilakukan dengan melakukan fasilitasi/pembinaan organisasi kepemudaan, pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan, pengembangan jiwa kewirausahaan dan kemandirian bagi pemuda.

Tabel 2.68.
Jumlah Organisasi Kepemudaan, Klub dan Organisasi Olahraga dan Jumlah Gedung Olahraga di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017

No	Elemen Data	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Organisasi Kepemudaan	30	30	30	30	34
2.	Jumlah Klub Olahraga	30				54
3.	Jumlah organisasi Olahraga	25	30	30	32	23
4.	Jumlah gedung olahraga	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Gunungkidul.2017

Untuk bidang olahraga pembinaan dilakukan dengan mengidentifikasi potensi dan bakat bidang olahraga baik bagi pelajar maupun masyarakat luas melalui proses seleksi,

pembinaan dan kompetisi-kompetisi olahraga di tingkat kabupaten yang akan dipersiapkan untuk menghadapi kompetisi tingkat provinsi, regional maupun nasional. Pembangunan dan pembinaan olahraga harus didukung dengan kesiapan tenaga pelatih, sarana dan prasarana, serta fasilitas lain yang mengikuti perkembangan teknologi informasi.

N. Statistik

Penyediaan data/informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dan menentukan kualitas kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Kelengkapan data statistik dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang permasalahan dan tantangan pembangunan daerah. Statistik diselenggarakan untuk mendukung pembangunan daerah, mengembangkan sistem statistik nasional yang handal, efektif dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik, mendukung pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik itu pula, BPS menangani urusan statistik dasar dan statistik khusus, sedangkan statistik sektoral menjadi tanggungjawab instansi pemerintah di daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya secara mandiri atau bersama dengan badan. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kewenangan daerah kabupaten/kota dalam pembagian urusan pemerintahan bidang statistik adalah Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota.

O. Persandian

Urusan persandian merupakan salah satu kewenangan untuk melakukan komunikasi secara vertikal yaitu dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Kabupaten Gunungkidul sudah memiliki pelayanan persandian yang merupakan bagian dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul. Subbagian persandian ini belum optimal dalam mengelola persandian karena belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan sehingga persandian masih sebatas

sarana komunikasi antar pemerintah, baik secara vertikal dan antar SKPD di Kabupaten Gunungkidul.

P. Kebudayaan

Masyarakat Kabupaten Gunungkidul secara umum menggunakan bahasa lokal (bahasa jawa) dalam berkomunikasi, sementara bahasa nasional (bahasa Indonesia) secara resmi dipakai dalam lingkungan formal (kantor, pendidikan, fasilitas umum, dan lain-lain).

Di pedesaan wilayah Kabupaten Gunungkidul masih memegang teguh adat istiadat dan tradisi yang mewarnai kehidupan masyarakat. Pada proses kehidupan pada saat kelahiran, kematian, pernikahan, perpindahan tempat tinggal, hari-hari besar agama dan peringatan terbentuknya suatu kawasan masih dilakukan upacara-upacara adat dan tradisi. Perayaan bersih dusun atau dalam istilah setempat disebut “Rasulan” merupakan salah satu tradisi masyarakat Gunungkidul yang sampai saat ini masih dilestarikan dan turut berpengaruh pada pelestarian kesenian tradisional. Kesenian tradisional yang berkembang di Gunungkidul antara lain adalah: Wayang Orang/Kulit, Kethoprak, Reog (Jathilan Topeng), Campursari, dan Tayub banyak dipentaskan oleh masyarakat Gunungkidul pada perayaan bersih dusun tersebut.

Untuk mengetahui perkembangan indikator kebudayaan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.69.
Indikator Kebudayaan Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2013-2017

No.	Jenis Data	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Suku/Etnis	1	1	1	1	1
2	Jumlah Bahasa Lokal	1	1	1	1	1
3	Jumlah Kawasan Cagar Budaya	4	4	4	4	4
4	Jumlah Organisasi Kesenian	2.151	2.151	2.151	2.337	2.607
5	Jumlah Desa Budaya	10	10	12	12	
6	Jumlah Benda Cagar Budaya	363	381	496	499	499

Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul, 2017

Pada bidang kesenian, 7 indikator SPM sudah memenuhi target nasional, terlihat pada tabel 2.70 di bawah ini :

Tabel 2.70.
Capaian SPM Bidang Kesenian

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Nasional		% capaian (tahun)		
			Nilai	Waktu	2015	2016	2017
I	Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	1 Cakupan Kajian Seni (50%)	100	2014	173	173	173
		2 Cakupan Fasilitas Seni (30%)	100	2014	286	286	286
		3 Cakupan Gelar Seni (75%)	100	2014	133	133	133
		4 Misi Kesenian	100	2014	100	100	500
II	Sarana dan Prasaran	5 Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian (25%)	100	2014	250	200	300
		6 Cakupan Tempat (100%)	100	2014	100	100	100
		7 Cakupan Organisasi	100	2014	196.08	196.08	196.08

Sumber : Bagian Organisasi Setda Gunungkidul, 2018

Q. Perpustakaan

Urusan perpustakaan di Kabupaten Gunungkidul sejak tahun 2006 ditangani oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2006 dan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 39/KPTS/2007 tentang Uraian Tugas Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Gunungkidul. Perkembangan jumlah koleksi buku, SDM pengelola dan sarana prasarana penunjang perpustakaan Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.71.
Jumlah Koleksi, Pustakawan, Pengunjung, Anggota dan Sarana Prasarana Perpustakaan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017

No.	Jenis Data	Tahun					Satuan
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Jumlah koleksi yang dimiliki						
	- Koleksi buku	56.517	59.475	60.473	62.577	34.611	Eksemplar
	- Koleksi kriya	75	102	102	102	102	Jenis
	- Multimedia	250	270	293	293	326	Buah
2	Jumlah pustakawan	4	6	9	13	11	Orang
3	Jumlah pengunjung						Orang
	- Perpustakaan umum	30.219	30.388	19.950	47.301	45.081	Orang
	- Perpustakaan keliling	2.336	2.598	6.764	17.698	13.287	Orang
4	Perpustakaan kolektif (silang layan)	90	92	114	121	174	Kelompok
5	Jumlah anggota						Orang
	- Umum	14.439	16.311	14.506	15.837	16.450	Orang
	- Keliling	6.323	6.657	3.175	6.168	5.442	Orang

No.	Jenis Data	Tahun					Satuan
		2013	2014	2015	2016	2017	
6	Jumlah mobil perpustakaan keliling	3	3	3	3	4	Unit
7	Jumlah lokasi layanan keliling	31	34	37	43	41	Lokasi
8	Jumlah warintek	10	10	11	19	18	Unit
9	Jumlah komputer layanan	6	6	10	6	9	Unit
10	Layanan home theatre	1	1	1	1	1	Unit
11	Jumlah perpustakaan bentukan / binaan						
	- Perpustakaan desa	104	148	148	148	148	Lokasi
	- Perpust komunitas	15	15	15	15	43	Lokasi
	- Perpustakaan rumah / tempat ibadah	138	523	523	523	501	Lokasi

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2018

R. Kearsipan

Pelaksanaan urusan kearsipan di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah dengan jumlah SDM dan sarana prasarana masih terbatas. Untuk mengetahui volume, SDM dan sarana prasarana kearsipan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.72.
Volume, Jumlah SDM dan Sarana
Kearsipan Kabupaten Gunungkidul Tahun
2013-2017

NO	Jenis Data	Tahun					Satuan
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Volume Arsip Inaktif dikelola LKD	2.044	1.622	1.205	313	177	meter lari
2	Jumlah lembaga pencipta arsip yang telah menyerahkan arsip inaktif ke LKD	3	6	19	4	7	Instansi
3	Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan SKPB	50	51	11	48	47	Instansi
4	Jumlah pengunjung yang memanfaatkan layanan arsip (informasi, jasa, rujukan)	5	50	56	11	124	Orang
5	Jumlah SDM pengelola arsip di LKD	7	7	5	8	13	Orang
	LKD						

NO	Jenis Data	Tahun					Satuan
		2013	2014	2015	2016	2017	
6	Jumlah Arsiparis di LKD	4	4	4	4	4	Orang
7	Jumlah arsiparis se Kabupaten Gunungkidul	10	10	10	16	18	Orang
8	Box Arsip	1.52	1.622	1.341	2.01	1.535	Unit
9	Jumlah sasaran pembinaan kearsipan						
	- Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan	48	44	49	49	47	Instansi
	- Desa	40	10	10	10	18	Desa
	- Sekolah	10	0	2	2	0	Sekolah

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2018

II.3.2. Urusan Pemerintahan Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Gunungkidul memiliki panjang pantai sekitar 70 km, dengan jumlah kecamatan pesisir sebanyak 6 kecamatan, yaitu kecamatan Purwosari, Panggang, Saptosari, Tanjungsari, Tepus, dan Girisubo, dengan 19 desa pesisir (Girijati, Giricahya, Giripurwa, Giriwungu, Girikarto, Krambil Sawit, Kanigoro, Planjan, Kemadang, Banjarejo, Ngestirejo, Sidoharjo, Tepus, Purwodadi, Balong, Jepitu, Tileng, Pucung, Songbanyu). Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebanyak 7 unit, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) 1 unit, dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI dan sub TPI) sebanyak 9 unit (TPI Sadeng, TPI Nampu, TPI Siung, TPI Ngandong, TPI Drini, TPI Baron, TPI Ngrenahan, TPI Gesing, dan sub TPI Bekah Purwosari).

Kewenangan daerah kabupaten/kota bidang kelautan dan perikanan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah meliputi kewenangan pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, adapun dengan rincian kewenangan sebagai berikut:

- a) Perikanan Tangkap :
 - 1) Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota.
 - 2) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- b) Perikanan Budidaya :
 - 1) Penerbitan IUP (Izin Usaha Perikanan) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

- 2) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.
- 3) Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Potensi lahan untuk perikanan budidaya darat 37,76 Ha dan penangkapan ikan perairan umum (rawa, danau, sungai dan lain-lain) sebesar 99,82 ha.

Sebagian besar pantai di Kabupaten Gunungkidul merupakan pantai karang yang curam. Pantai yang telah dikembangkan menjadi objek wisata meliputi Pantai Sadeng, Pantai Sundak, Pantai Krakal, Pantai Drini, Pantai Kukup, Pantai Baron, Pantai Ngrenahan, Pantai Ngobaran, Pantai Siung, Pantai Sepanjang, dan Pantai Wediombo. Disamping potensi wisata, laut juga memiliki potensi perikanan yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu Kabupaten untuk pengembangan kawasan minapolitan juga telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. Kep. 32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan.

Pada Tahun 2011 berdasarkan SK Direktur Jenderal Perikanan Budidaya No:70/DJ-PB/2010 tentang Penetapan 24 Lokasi Sentra Produksi Perikanan Budidaya sebagai Percontohan Tahun 2011, Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai salah satu kawasan Percontohan Minapolitan. Kecamatan Playen memiliki 13 desa, sebagai Minapolis adalah Desa Bleberan, Plembutan, Banyusoco, Playen, Ngawu, Gading Sedangkan hinterland/penyangganya adalah: Desa Getas, Bandung, Logandeng, Banaran, Ngleri, Dengok dan Ngunut. Program yang dilaksanakan adalah Pengembangan Budidaya LELAKI (Lele Lahan Kering).

Tabel 2.73.
Perkembangan Produksi Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017

No.	Komoditas	Produksi				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Perikanan laut (ton)	2.400,26	4.678,50	3.103,32	2.700	3.900,93
2	Perikanan budidaya (ton)	6.509,44	4.577,79	7.200,36	9.611,34	n/a
3	Jumlah unit pembenihan rakyat (UPR)	62	64	66	66	30
4	Benih ikan UPR (juta ekor)	9,36	9,12	14,26	12,7	9,28
5	Jumlah Balai Benih Ikan	2	2	2	2	2
6	Benih ikan BBI (juta ekor)	0,94	0,92	0,87	0,81	0,62

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, 2018

Hasil produksi perikanan (tangkap laut maupun budidaya perikanan darat) mengalami fluktuasi setiap tahun. Adapun penyebab penurunan produksi untuk perikanan laut adalah kondisi iklim laut yang ekstrim sehingga lokasi penangkapan ikan menjadi lebih jauh ke tengah samudera yang tidak bisa dijangkau oleh nelayan lokal, sedangkan penyebab fluktuasi produksi perikanan budidaya dikarenakan banyak kelompok pembudidaya di kabupaten Gunungkidul yang masih bersifat pemula sehingga faktor teknis dan pasar belum dikuasai secara baik.

B. Pariwisata

Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi wisata yang cukup potensial dan beragam, mulai dari kekayaan alam berupa pantai, goa, bukit dan pegunungan, tempat bersejarah serta desa wisata budaya maupun wisata religi.

Obyek wisata pantai merupakan obyek wisata unggulan Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah ± 46 pantai yang terbentang ± 70 km di wilayah selatan mulai dari ujung barat ke ujung timur dan salah satunya adalah kawasan yang terdiri tujuh pantai yang letaknya saling berdekatan. Ketujuh pantai itu adalah pantai Baron, pantai Kukup, Sepanjang, Drini, Krakal, Slili, Sundak dan Pantai Ngandong.

Selain wisata alam pantai, Kabupaten Gunungkidul juga memiliki wisata alam yang sangat unik berupa kawasan karst yang meliputi 10 wilayah kecamatan. Keunikan tersebut bercirikan fenomena di permukaan (ekokarst) dan bawah permukaan (endokarst). Fenomena permukaan meliputi bentukan positif berwujud perbukitan karst dengan jumlah ± 40.000 bukit yang berbentuk kerucut, sedangkan bentukan negatifnya berupa lembah-lembah karst dan telaga karst. Fenomena bawah permukaan meliputi goa-goa karst (119 goa) dengan hiasan stalaktit dan stalakmit serta semua aliran sungai bawah tanah. Beberapa tempat wisata di kawasan karst Kabupaten Gunungkidul yang banyak dikunjungi wisatawan antara lain: goa Ngingrong dan lembah Karst Mulo kecamatan Wonosari, goa Jlamprong, goa Kali Suci, goa Jomblang dan goa Grubug Kecamatan Semanu, goa Seropan perbatasan Kecamatan Semanu dan Kecamatan Ponjong, goa Cokro Kecamatan Ponjong dan goa Pindul Kecamatan Karangmojo.

Untuk mengetahui jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Gunungkidul tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.74.
Jumlah Wisatawan Yang Berkunjung ke Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017

WISATAWAN	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Asing (Mancanegara)	5.772	4.228	4.125	3.891	21.082
Domestik (Nasional)	1.766.208	2.026.026	2.638.634	2.989.006	3.236.931
Jumlah	1.771.980	2.030.257	2.642.759	2.992.897	3.258.013

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, 2018

Tabel 2.75.
Pendapatan Sektor Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017

Elemen Data	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pajak Hotel	42.987.911	56.512.620	236.626.223	377.692.366	716.245.584
Pajak Restoran	1.339.666.031	2.014.769.578	2.837.757.051	4.504.005.100	5.204.844.586
Pajak Hiburan	23.178.000	27.041.000	53.146.850	64.432.200	118.663.050
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	20.300.000	12.712.500	23.593.750	43.543.750	44.987.500
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	5.760.742.500	14.989.421.527	16.264.048.485	24.020.468.803	26.168.954.233
Jumlah	7.186.874.442	17.100.457.225	19.415.172.359	29.010.142.219	32.253.694.953

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul 2018

C. Pertanian

Sektor pertanian masih merupakan sektor yang penting bagi Kabupaten Gunungkidul karena sebagai penyedia lapangan kerja bagi penduduk, penyediaan bahan pangan dan sebagai bahan baku sektor industri. Sektor pertanian sampai dengan tahun 2015 masih memberikan sumbangan terbesar pada PDRB Kabupaten Gunungkidul yaitu 25,77%.

a) Tanaman Pangan

Peran sektor pertanian sebagai penyedia bahan pangan dapat terlihat dari peningkatan produksi tanaman pangan terutama padi gogo dan jagung dari tahun ke tahun yang tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2.76.
 Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Padi
 dan Palawija Kabupaten Gunungkidul
 Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun					Satuan
		2013	2014	2015	2016	2017	
	Padi Sawah						
1	Luas Areal Produksi (Panen)	15.563	14.886	14.936	15.223	15.347	Ha
2	Jumlah Produksi Gabah Kering Giling	93.957	92.602	94.245	92.808	92.788	Ton
3	Produksi Beras Giling	59.381	58.524	59.563	58.654,6	58.215	Ton
4	Rata-rata Produktivitas	60	62,21	63,10	60,9	60.46	Kw/Ha
	Padi Ladang						
1	Luas Areal Produksi (Panen)	43.361	42.315	42.078	41.318	43.850	Ha
2	Jumlah Produksi Gabah Kering Giling	195.563	197.185	195.326	168.157	200.570	Ton
3	Produksi Beras Giling	123.596	124.621	123.446	106.275	125.838	Ton
4	Rata-rata Produktivitas	45	46,60	46,42	40,70	45,74	Kw/Ha
	Total Padi						
1	Luas Areal Produksi (Panen)	58.924	57.201	57.014	56.541	59.197	Ha
2	Jumlah Produksi Gabah Kering Giling	289.520	289.787	289.571	260.965	293.358	Ton
3	Produksi Beras Giling	178.222	183.145	183.009	164.929,6	184.053	Ton
4	Rata-rata Produktivitas	49	50	50	50,8		Kw/Ha
	Jagung						
1	Luas Areal Produksi (Panen)	57.867	54.592	51.595	53.242,2	48.927	Ha
2	Jumlah Produksi	207.623	227.013	201.396	309,745	206.526	Ton
3	Rata-rata Produktivitas	36	41,58	39,03	42,32	42,15	Kw/Ha
	Kedelai						
1	Luas Areal Produksi (Panen)	19.142	12.306	10.432	9.132,8	3.318	Ha
2	Jumlah Produksi	25.540	13.465	13.551	10,732	3.946	Ton
3	Rata-rata Produktivitas	13	10,94	12,99	11,75	11,90	Kw/Ha
	Kacang Tanah						
1	Luas Areal Produksi (Panen)	56.189	57.385	61.705	59.336,30	61.577	Ha
2	Jumlah Produksi	59.563	59.251	69.532	62,918	71.497	Ton
3	Rata-rata Produktivitas	11	10,32	11,268	10,6	11,61	Kw/Ha
	Kacang Hijau						
1	Luas Areal Produksi (Panen)	329	290	271	292,1	169	Ha
2	Jumlah Produksi	189	173	158	191	109	Ton
3	Rata-rata Produktivitas	6	5,97	5,83	6,45	6,45	Kw/Ha
	Ubi Kayu						
1	Luas Areal Produksi (Panen)	55.231	50.999	50.415	48.448,0	49.487	Ha
2	Jumlah Produksi	933.414	790.739	781.610	830,248	924.751	Ton
3	Rata-rata Produktivitas	169	155,05	155,04	171,37	186,87	Kw/Ha
	Ubi Jalar						
1	Luas Areal Produksi (Panen)	55	74	76	44	85	Ha
2	Jumlah Produksi	479	708	699	511	683	Ton
3	Rata-rata Produktivitas	87	87	95,68	91,97	116,14	Kw/Ha

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, 2018

b) Peternakan

Populasi ternak Kabupaten Gunungkidul dari tahun-ketahun

mengalami peningkatan dengan jumlah yang hampir separo dari populasi ternak di Daerah Istimewa Yogyakarta maka tidak salah kalau Kabupaten Gunungkidul menyandang predikat sebagai gudang ternak bagi Daerah Istimewa Yogyakarta. Predikat sebagai gudang ternak membawa konsekuensi bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan populasi ternak yang ada. Usaha yang telah dilakukan untuk peningkatan populasi ternak, antara lain meningkatkan pelayanan inseminasi buatan, meningkatkan pelayanan kesehatan hewan, meningkatkan bantuan modal pemeliharaan ternak bagi masyarakat dan meningkatkan pembimbingan manajemen pemeliharaan ternak.

Untuk mengetahui perkembangan indikator di bidang peternakan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.77.
Perkembangan Indikator Peternakan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017

No	Jenis Data	Tahun					Satuan
		2013	2014	2015	2016	2017	
A	Ternak Sapi Potong						
	• Jumlah Populasi	140.928	146.503	148.586	151.500	151.573	ekor
	• Jumlah Pemotongan per tahun	6.779	6.503	6.160	6.000	6.242	ekor
B	Ternak Kecil						
	1. Kambing						
	• Jumlah Populasi	171.530	174.286	176.120	182,498	182.479	ekor
	2. Domba						
	• Jumlah Populasi	10.918	11.758	11.930	12020	11.989	Ekor
	3 . Babi						
	• Jumlah Populasi	114	92	73	54	62	Ekor
C	Unggas						
	1. Jumlah populasi Ayam Buras	870.785	940.988	1.113.152	1.169.540	1.169.676	Ekor
	2. Ayam Petelur						
	• Jumlah Populasi	93.275	235.889	241.443	254.101	299.452	Ekor
	• Jumlah Produksi Telur	331	1.449	19.553	3.232	1.956	Ton/Thn
	• Jumlah Peternak	54	58	58	47	98	Peternak
	• Rata-rata kepemilikan per peternak	1.727	4.067	1.900	1.800	2.000	ekor/kk
	3. Ayam Pedaging						
	• Jumlah Populasi	890.626	1.283.645	1.498.857	1.503.889	1.562.700	Ekor
	• Jumlah Produksi Telur	1.016	446	1.506	438	1.341	Ton/Thn

No	Jenis Data	Tahun					Satuan
		2013	2014	2015	2016	2017	
	• Jumlah Peternak	297	268	447	438	446	Peternak
	• Rata-rata kepemilikan per peternak	3.000	3.000	3.300	3.300	3.500	ekor/pet
	4. Itik						
	• Jumlah Populasi	7.147	5.984	6.716	5.832	6.461	Ekor
	• Jumlah Peternak	22	20	25	25	29	Peternak
	• Rata-rata kepemilikan per peternak	357	290	268	200	220	ekor/k k
	5. Jumlah Populasi Burung Puyuh	315.924	350.759	340.100	340.389	N/A	Ekor
D	Industri Peternakan						
	1. Jumlah Perusahaan Pembibitan Ayam	2	2	2	2	3	Buah
	2. Jumlah Pabrik pakan Ternak	1	-	-	-	-	Buah
E	Jumlah Pos Kesehatan Hewan	11	11	11	11	11	Buah
F	Jumlah Rumah Potong Unggas	1	1	1	1		Buah
G	Jumlah Laboratorium kesehatan Hewan	1	1	1	1	1	Buah
H	Jumlah Tempat Pemotongan Hewan	50	-	-	-		Buah

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, 2018

c) Perkebunan

Pada tahun 2015 Sektor perkebunan berperan sebesar 0,25% pada pembentukan PDRB Kabupaten Gunungkidul dengan perincian 0,07% untuk tanaman perkebunan semusim dan perebunan tahunan sebesar 0,18%. Selama kurun waktu tahun 2013-2017 produksi komoditas perkebunan mengalami fluktuasi yang beragam. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.78
Luas Areal, Luas Panen, Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017

No.	Komoditas/ Uraian	TAHUN					Satuan
		2013	2014	2015	2016	2017	
A	Tembakau						
1	Luas Areal	198,90	190	600	462,6	321,50	Ha
2	Luas Panen	45,00	109,70	599	337,5	321,63	Ha
3	Jumlah Produksi	6,63	97,52	696	222,9	337,187	Ton
B	Kakao						
1	Luas Areal	1.337,50	546,96	1.403	1.420,00	1.432,50	Ha
2	Luas Panen	507	160	370	708	718,42	Ha
3	Jumlah Produksi	69,97	5.786,31	476,48	430,31	706.534	Ton
C	Lada						
1	Luas Areal	135	130	20	3,8	2,20	Ha
2	Luas Panen	0,20	1,4	1,0	2,6	3,20	Ha
3	Jumlah Produksi	0,24	0,5	0,30	2,39	1,92	Ton
D	Tebu						

No.	Komoditas/ Uraian	TAHUN					Satuan
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Luas Areal	285,48	488,25	352,02	321,64	317,41	Ha
2	Luas Panen	49,00	488,25	352,02	321,64	145,79	Ha
3	Jumlah Produksi	2,45	2.599	1.346,49	8.947.542	2.694.733	Ton
E	Cengkeh						
1	Luas Areal	42,70	58,2	42	38,5	37,45	Ha
2	Luas Panen	5,10	5,6	4,4	17,53	23,80	Ha
3	Jumlah Produksi	0,90	1,12	1,8	5.173	5.773	Ton
F	Kelapa						
1	Luas Areal	9.607,01	9.642,31	9.600	8.767,38	8.552,33	Ha
2	Luas Panen	5.527,45	9.288	8.764	8.636,14	5.651,47	Ha
3	Jumlah Produksi	4.703,99	6.053,05	5.137,94	8.712,69	16.203.890	Ton
G	Jambu Mete						
1	Luas Areal	15.847,94	14.858,99	13.300,00	9.006,50	8.152,75	Ha
2	Luas Panen	3.000,89	13.778,35	11.114,25	252,50	4.520,41	Ton
3	Jumlah Produksi	241,21	789,83	986,59	262,91	525,72	Ton
H	Kapuk Randu						
1	Luas Areal	504,90	97,8	86	86	N/A	Ha
2	Luas Panen	113,000	7,4	6,2	5,7	N/A	Ha
3	Jumlah Produksi	11,480	3,7	1,5	0,45	N/A	Ton

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, 2018

Kondisi ketersediaan air, jenis dan kontur tanah di wilayah Gunungkidul menyebabkan luas lahan tanam untuk kegiatan pertanian semusim sangat terbatas, sehingga beberapa wilayah di Gunungkidul berusaha untuk mengembangkan tanaman budidaya perkebunan, sebagai contoh sebagian wilayah Patuk yang dulunya banyak dibudidayakan tanaman cengkeh maupun lada, namun dari tahun ketahun luas tanamnya semakin berkurang dan trend saat ini lahan yang tadinya ditanami cengkeh ataupun lada, beralih menjadi tanaman kakao atau pohon buah-buahan berharga jual cukup tinggi seperti durian varietas lokal dan petai, yang hasilnya sangat diminati oleh konsumen pada saat panen raya. Walaupun memiliki harga jual cukup tinggi, tanaman lada maupun cengkeh semakin tidak diminati oleh petani karena beberapa hal, seperti pengolahan pasca panen relatif lama, perawatan sulit dan produktifitas yang rendah. Oleh sebab itu petani lebih memilih varietas tanaman perkebunan yang memiliki hasil jual produk tinggi serta mudah dalam perawatannya seperti halnya durian dan petai. Atau ada juga yang mengalihkan lahannya untuk ditanami tanaman keras seperti jati, mahoni, dan akasia. Sehingga dari tabel diatas terlihat sekali bahwa luas areal tanam untuk komoditas cengkeh dan lada semakin mengecil, berkebalikan dengan luas areal tanam kakao.

D. Kehutanan

Pengelolaan hutan negara diarahkan lebih pada fungsi konservasi

sehingga memiliki peran sangat strategis untuk mendukung ekonomi wilayah, ekowisata, pusat pendidikan, dan ekonomi masyarakat. Selain itu, keberadaan hutan negara di Kabupaten Gunungkidul memiliki peranan dan kedudukan yang penting dan unik. Di satu sisi, hutan negara itu sejak lama merupakan hutan produksi yang menghasilkan komoditas kehutanan, yang memiliki arti penting bagi perolehan pendapatan asli daerah. Di sisi yang lain, keberadaan hutan negara di Kabupaten Gunungkidul berkaitan dengan upaya pemerintah untuk menghidupkan kembali lahan kritis yang ada di wilayah ini.

Hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul pada umumnya adalah hutan produksi dan berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus lapangan pekerjaan bagi masyarakat pedesaan. Dari hutan rakyat ini berbagai potensi kehutanan dan perkebunan dapat dikembangkan, dengan beberapa hasil komoditas kehutanan seperti kayu jati, mahoni, sonokeling, bambu, akasia, dan sebagainya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang kehutanan untuk daerah kabupaten/kota hanya sebatas pelaksanaan pengelolaan TAHURA kabupaten/kota.

Tabel 2.79.
Luas dan Produksi Komoditas Kehutanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun					Satuan
	2012	2013	2014	2015	2016	
Hasil Hutan Non HPH						
1. Kayu Bulat	65.390,435	13.025,06	55.285,97	54.337,13	57.656,74	m ³
2. Kayu Olahan	29.848,604	1.239,10	6.502,89	1.156,21	1.780,23	m ³
Hasil Hutan Ikutan						
1. Kemiri	12,6	-	5,68	2,00	0,61	Ton
2. Bambu	541.855	183.087	725.520	923.383	746.815	Batang
3. Madu	n/a	421,75	1.165,00	1.621,05	1.793,17	Liter
Hasil Hutan Non HPH						
1. Jati	24.708,58	25.172,36	25.279,18	25.668,80	26.466,52	Ha
	59.315,29	14.709,84	28.457,40	32.573,12	33.033,11	m ³
2. Akasia	8.236,19	8.390,79	8.426,39	8.556,27	8.822,17	Ha
	4.053,53	2.751,27	8.713,36	3.406,07	8.853,06	m ³
3. Mahoni	4.118,10	4.195,39	4.213,19	4.278,13	4.411,09	Ha
	5.403,01	2.505,08	7.373,61	8.337,27	5.027,98	m ³
4. Sonokeling	2.882,67	2.936,78	2.106,59	2.139,07	2.205,54	Ha
	3.103,69	930,1	345,35	4.023,86	3.198,54	m ³

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunungkidul 2017

E. Energi dan Sumber Daya Mineral

Penyediaan pasokan energi listrik di Kabupaten Gunungkidul disediakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang sebagian besar

digunakan oleh konsumen rumahtangga. Hingga tahun 2016 kondisi kelistrikan di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan rasio dusun maupun rasio desa berlistrik sudah 100%. Kapasitas tenaga listrik yang terpasang sebesar 246.560.032 kwh sedangkan yang terjual sebesar 223.063.458 kwh. Pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2016 didistribusikan melalui 12 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sedangkan penyaluran bahan bakar gas bersubsidi didistribusikan melalui 1 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji yang disalurkan oleh pengecer sampai ke tingkat konsumen rumah tangga di seluruh pelosok wilayah.

F. Perdagangan

Kebijakan pembangunan di bidang perdagangan diarahkan pada upaya optimalisasi perdagangan melalui peningkatan sarana prasarana perdagangan, sistem distribusi dan informasi pasar untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau dan penguatan akses jaringan perdagangan ekspor.

Pada tahun 2015 sektor perdagangan merupakan sektor sebagai penyumbang terbesar ketiga dalam pembentukan PDRB setelah sektor pertanian dan konstruksi. Sebagai sektor strategis, sektor perdagangan memegang peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi di Gunungkidul karena sangat terkait dengan sektor-sektor lain seperti sektor pertanian, industri, pariwisata dan lainnya.

Kondisi Politik dan keamanan di Kabupaten Gunungkidul relatif kondusif sehingga masalah politik dan kemananan bukan lagi menjadi faktor utama dalam perdagangan dan perekonomian baik lokal, nasional, maupun mancanegara. Kecenderungan lesunya perdagangan lokal maupun ekspor terutama komoditas industri kecil/menengah di Gunungkidul saat ini belum mampu bersaing dengan produk impor.

Tabel 2.80
Sarana Perdagangan di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2013-2017

No.	Sarana Perdagangan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pasar Rakyat	39	36	36	36	36
	Tipe A	3	3	3	3	5

No.	Sarana Perdagangan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Tipe B	8	8	10	10	13
	Tipe C	5	5	5	5	6
	Tipe D	23	20	18	18	12
2	Pasar Swalayan/Supermarket	50	67	69	75	78
3	Jumlah kios	595	595	627	675	792
4	Jumlah Los	535	535	531	517	509

Sumber : Dinas Perindag Kabupaten Gunungkidul, 2017

G. Perindustrian

Sektor industri pengolahan memberikan sumbangan 9,28% pada PDRB Kabupaten Gunungkidul tahun 2015. Walaupun sumbangan sektor industri pengolahan masih di bawah 15% terhadap struktur perekonomian, sektor industri pengolahan di Kabupaten Gunungkidul memegang peranan yang penting karena sebagian besar merupakan industri kecil dan mikro yang berbasis pertanian, kehutanan dan pertambangan. Keberadaan industri ini hampir merata di semua kecamatan di Gunungkidul.

Tabel 2.81.
Data Industri di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2014-2017

No	Elemen Data	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Industri Kecil				
	1. Jumlah Industri Kecil	20.899	20.778	21.003	21.026
	2. Jumlah Pengusaha	20.921	21.025	21.025	21.048
	3. Jumlah Tenaga Kerja	67.035	67.619	66.764	66.839
	4. Nilai Produksi	187.331.969.610	192.127.924.881	193.638.998.704	193.912.537.983
	5. Nilai Investasi	n/a	n/a	n/a	n/a
2.	Industri Menengah				
	1. Jumlah Industri Kecil	14	14	14	14
	2. Jumlah Pengusaha	14	14	14	14
	3. Jumlah Tenaga Kerja	423	423	430	430
	4. Nilai Produksi	2.125.393.062	2.061.300.443	2.077.468.181	2.080.407.300
	5. Nilai Investasi	1.053.365.936	1.024.323.666	1.032.226.760	1.033.667.943
3.	Industri Besar				
	1. Jumlah Industri Kecil	8	8	8	8
	2. Jumlah Pengusaha	8	8	8	8
	3. Jumlah Tenaga Kerja	226	226	226	226
	4. Nilai Produksi	644.812.812	665.505.572	670.781.175	671.730.090
	5. Nilai Investasi	340.086.717	330.710.212	333.261.783	333.727.079

Sumber : Dinas Perindag Kab. Gunungkidul, 2018

H. Transmigrasi

Pemerintah Gunungkidul sebagai daerah pengirim calon transmigran

telah bekerjasama dengan provinsi daerah penempatan dalam penyelenggaraan transmigrasi. Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan dapat memudahkan penyelenggaraan transmigrasi sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat diminimalisir sedini mungkin.

Menurut Undang-undang No 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- undang No 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian menyebutkan ada 3 (tiga) jenis transmigrasi, yaitu :

- a) Transmigrasi Umum (TU) adalah transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha.
- b) Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB) adalah transmigrasi yang dirancang oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan mengikut sertakan badan usaha sebagai mitra usaha transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju
- c) Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) adalah transmigrasi yang merupakan prakarsa transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan.

Tabel 2.82.
Jumlah Pemberangkatan Transmigran Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2013-2017

No.	Jenis Transmigrasi	Tahun					Satuan
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Transmigrasi Umum	25	12	15	37	2	KK
2	TSM (Transmigrasi Swakarsa Mandiri)	-	1	-	-	-	KK
3	TSB (Transmigrasi Swakarsa Berbantuan)	-	-	-	-	-	KK

Sumber : Disnakertrans Kabupaten Gunungkidul, 2018

II.3.2. Fungsi Penunjang Urusan

Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah terdapat beberapa urusan yang tidak diatur pengelompokannya dalam urusan pemerintahan konkuren. Disamping itu terdapat urusan yang sebenarnya termasuk dalam urusan pemerintahan umum, namun dalam pelaksanaannya masih tetap dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

A. Perencanaan

Perencanaan menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan secara umum diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh sebuah institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan disebuah wilayah baik negara maupun di daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Dalam sebuah proses perencanaan, lembaga perencana wajib memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, keamanan, kondisi fisik, segi pembiayaan serta kualitas sumber daya yang ada.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom up* dan *top down process*. Penyusunan ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel dan konsisten dengan rencana lain yang relevan, kepemilikan rencana (*sense of ownership*) juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Penyelarasan secara terpadu dokumen perencanaan pembangunan nasional yaitu RPJM Nasional Tahun 2010–2014, RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta 2012- 2017 dengan RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2010-2015 untuk menyelesaikan permasalahan dan isu strategis sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu semakin ditingkatkan.

Pelaksanaan perencanaan tahunan RPJMD dijabarkan dalam RKPD yang merupakan implementasi target tahunan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap tahunnya. Ketersediaan dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.83.
Dokumen Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 – 2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Bappeda Gunungkidul, 2017

B. Keuangan

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), unsur- unsur di dalamnya adalah pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Unsur pendapatan daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber pendapatan asli daerah, serta tetap berupaya menggali sumber-sumber pendapatan baru dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

a) Pendapatan Daerah

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir selalu mengalami kenaikan, akan tetapi porsi terbesar dalam pendapatan daerah masih bersumber pada dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat, baik DAU maupun DAK.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2017 mencapai 1,847 trilyun rupiah atau naik sebesar 11,65% dibanding tahun anggaran 2016 yang sebesar 1,654 trilyun. Pendapatan terbesar berasal dari bagian Dana Perimbangan yaitu sebesar 67,71%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 271,370 milyar atau 14,69% dari total pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang besarnya tercatat 208,440 milyar rupiah.

Berikut data realisasi pendapatan Kabupaten Gunungkidul pada kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir :

Tabel 2.84.
Data Realisasi Pendapatan Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2015-2017

NO	Uraian	JUMLAH		
		2015	2016	2017
A	PENDAPATAN	1.599.017.672.985,45	1.654.344.836.987,14	1.847.105.418.583,10
1	Pendapatan Asli Daerah	196.099.244.204,02	206.278.865.615,67	271.370.043.388,71
2	Dana Perimbangan	978.310.012.465,00	1.239.624.998.868,00	1.250.742.434.026,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	3.500.000.000,00	3.498.000.000,00	57.054.808.350,00

Sumber: BKAD Kabupaten Gunungkidul, 2018.

b) Belanja

Belanja Daerah sebagaimana ketentuan dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 tahun 2007 terakhir sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari:

- (1)Belanja Tidak Langsung, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, serta Belanja Tidak Terduga.
- (2)Belanja Langsung, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Berikut realisasi dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

Tabel 2.85.
Data Realisasi Belanja Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2015 - 2017

NO	Uraian	Jumlah		
		2015	2016	2017
	BELANJA DAERAH	1.586.001.084.202,94	1.651.553.580.385,95	1.947.737.780.909,76
1	Belanja Tidak Langsung	1.061.767.453.368,30	1.204.285.055.219,95	1.167.117.995.672,25
	Belanja Pegawai	907.980.813.442,30	939.038.345.309,00	845.856.903.059,50
	Biaya Bunga	10.318.156,00	1.352.596,70	
	Belanja Hibah	66.632.890.578,00	15.779.259.523,00	22.234.698.095,00
	Belanja Bantuan Sosial	7.116.800.000,00	-	-
	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah	7.950.845.510,00	8.824.866.275,00	9.497.596.225,00

NO	Uraian	Jumlah		
		2015	2016	2017
	Desa			
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	151.874.063.630,00	202.517.540.200,00	235.850.041.400,00
	Belanja Tidak Terduga	125.452.000,00	-	2.636.676.819,00
2	Belanja Langsung	524.233.630.834,64	512.893.422.037,25	780.619.785.237,51
	Belanja Pegawai	40.151.223.350,00	26.842.131.032,00	
	Belanja Barang dan Jasa	205.205.589.461,70	248.140.717.691,25	
	Belanja Modal	238.175.034.444,94	234.690.533.691,00	396.845.243.914,63

Sumber : BKAD Kabupaten Gunungkidul, 2018

c) Pembiayaan

Pembiayaan daerah yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran sebelumnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi maupun untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal. Berikut tabel realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2014-2016 sebagai berikut:

Tabel 2.86.
 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Gunungkidul
 Tahun 2014 s.d. 2016

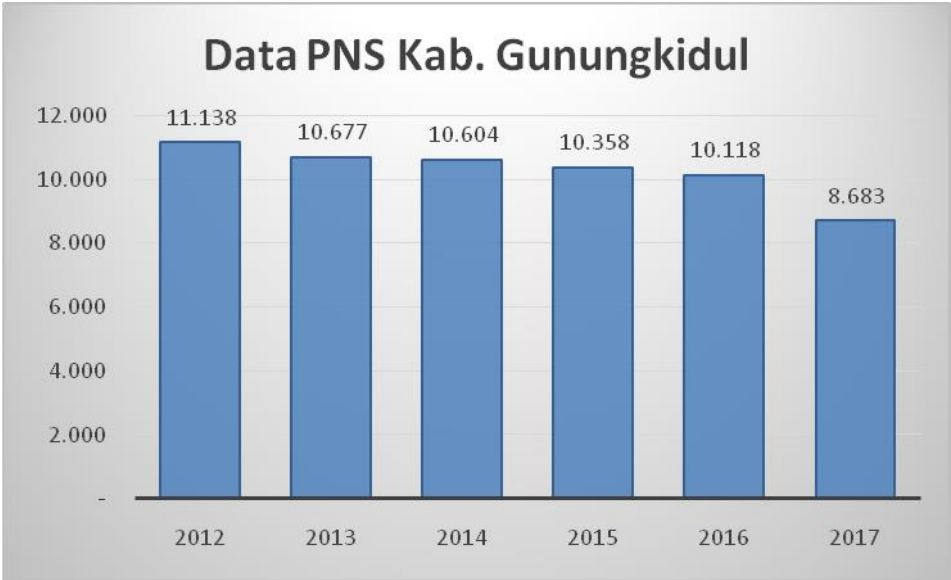
NO	Uraian	Jumlah		
		2014	2015	2016
	Pembiayaan Daerah	97,635,685,050.97	213.795.164.656,70	198.261.972.831,80
1.	Penerimaan Pembiayaan	112,105,011,960.97	242.366.516.374,70	226.770.869.058,23
	SiLPA	110,770,296,731.97	242.366.516.374,70	226.770.869.058,23
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	1,334,715,229.00	0,00	7.490.644,00
2.	Pengeluaran Pembiayaan	14,469,326,910.00	28.571.351.718,00	28.516.386.870,43
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.	13,000,000,000.00	28.500.000.000,00	28.462.000.000,00
	Pembayaran Pokok Hutang	69,326,910.00	71.351.718,00	54.386.870,43
	Pemberian Pinjaman Daerah	1,400,000,000.00	0,00	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto		65.536.526.011	213.795.164.656,70	198.261.972.831,80

Sumber : DPPKAD Kabupaten Gunungkidul, per 31 Desember 2017

C. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Gunungkidul didukung oleh pegawai sebanyak 10.118 orang PNS pada Tahun 2016, yang tersebar pada seluruh instansi/SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Gambar 2.19
 Jumlah PNS Kabupaten Gunungkidul
 Tahun 2012-2017



Sumber : BKPPD Kabupaten Gunungkidul, 2018

Tabel 2.87.
Komposisi PNS Kabupaten Gunungkidul Menurut
Golongan Tahun 2013-2017

URAIAN	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Golongan I	447	362	282	208	134
Golongan II	2,116	1,840	1,739	1,620	1.468
Golongan III	4,280	4,539	4,642	4,688	4.013
Golongan IV	3,834	3,863	3,695	3,602	3.068
Jumlah	10,677	10,604	10,358	10,118	8.683

Sumber : BKPPD Kabupaten Gunungkidul, 2018

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa jumlah PNS di Kabupaten Gunungkidul selama lima tahun terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun dan kebijakan moratorium PNS. Untuk jumlah pejabat struktural di Kabupaten Gunungkidul mulai tahun 2013 - 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.88.
Jumlah Pejabat Struktural Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2013-2017

No	Jabatan	TAHUN					
		L/P	2013	2014	2015	2016	2017
1	Eselon II	L+P	24	26	24	24	33
	-IIA	L	1	1	0	0	1
		P	0	0	0	0	0
	-IIB	L	21	23	22	22	28
		P	2	2	2	2	4
2	Eselon III	L+P	146	147	148	140	164
	-IIIA	L	51	51	52	51	52
		P	7	9	9	8	9
	-IIIB	L	66	66	65	60	78
		P	22	21	22	21	25
3	Eselon IV	L+P	508	519	524	498	517
	-IVA	L	291	293	300	286	308
		P	112	112	110	106	134
	-IVB	L	72	74	73	68	45
		P	33	40	41	38	30
4	Eselon V	L+P	51	61	65	60	0
	-VA	L	37	45	48	45	0
		P	14	16	17	15	0
	Jumlah	L+P	729	753	761	722	714

Sumber : BKPPD Kabupaten Gunungkidul, 2017

D. Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris Daerah bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

E. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
- b. menyelenggarakan administrasi keuangan;
- c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
- d. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah

F. Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah merupakan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang dipimpin oleh Inspektur, mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan tugas, Inspektur bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati/wali kota;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten/kota; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

G. Penanggulangan Bencana

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan bencana tidak diatur secara eksplisit, namun secara riil urusan ini masih dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penanggulangan bencana diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Dalam Undang-Undang tersebut diatur bahwa tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.

H. Kesatuan Bangsa dan Politik

Secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,

Kesatuan Bangsa termasuk dalam Urusan Pemerintahan Umum. Namun dalam pelaksanaannya masih menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.

I. Kecamatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanahkan kepada daerah kabupaten/kota untuk membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Camat mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

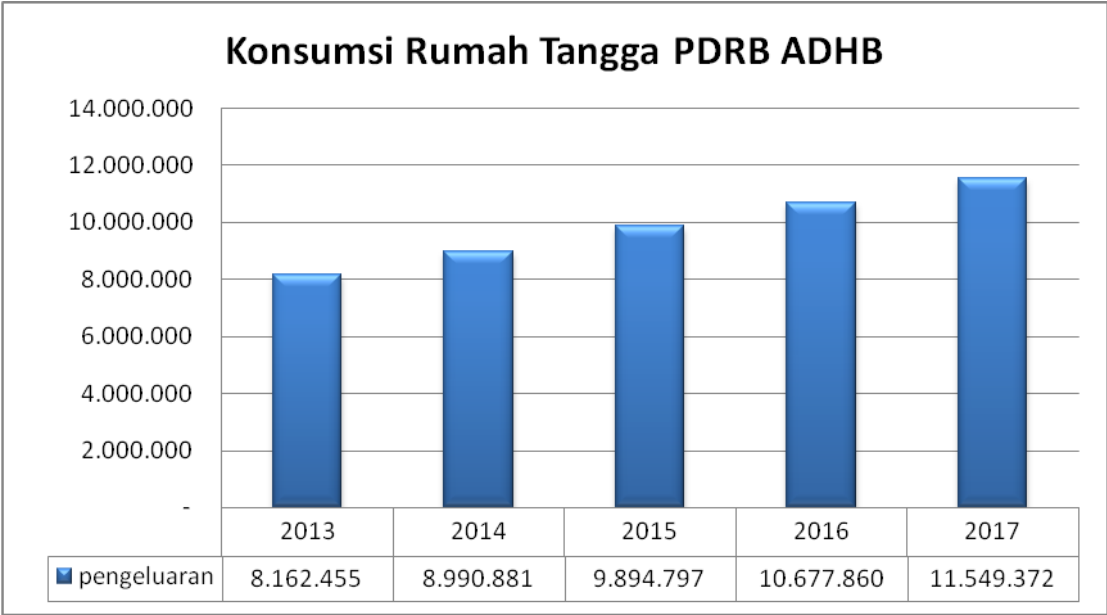
II.4. Aspek Daya Saing Daerah

II.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Selama periode tahun 2013-2017, pengeluaran konsumsi Rumah Tangga (RT) Kabupaten Gunungkidul terus mengalami kenaikan.

Gambar 2.20.
 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dalam
 PDRB menurut ADHB Kabupaten Gunungkidul
 Tahun 2013 – 2017 (Juta Rp)



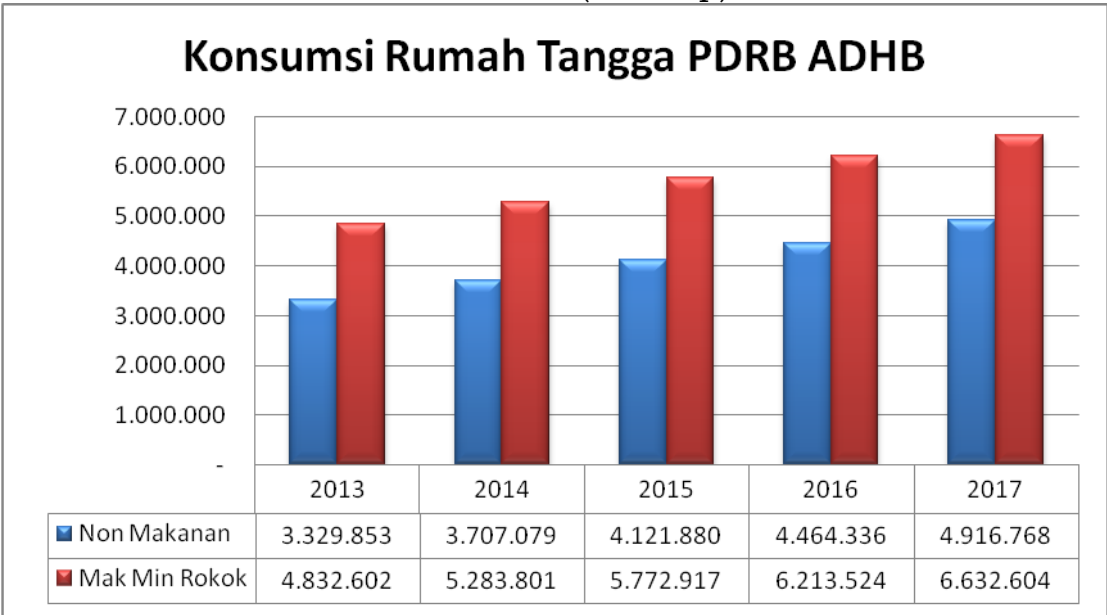
Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul, 2018

Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

B. Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pendapatan untuk pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan.

Gambar 2.21
 Pengeluaran konsumsi Makanan dan bukan makanan
 dalam PDRB menurut penggunaan atas dasar harga
 berlaku Kabupaten Gunungkidul Tahun
 2010– 2014 (Juta Rp)



Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul, 2018

Secara rata-rata dari tahun 2013 s.d 2017, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Gunungkidul, bahwa konsumsi makanan masih lebih tinggi dibandingkan konsumsi non makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran yang sama. Proporsi untuk makanan sejak tahun 2013 secara berturut turut adalah sebagai berikut : 59,20%; 58,76%; 58,34%, 58,19%, dan 57,42%.

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Gunungkidul belum berada pada tingkat kesejahteraan yang baik dengan masih sedikitnya proporsi non makanan. Pengeluaran non makanan di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan,perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

II.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur

A. Kondisi Jalan

Kondisi jalan yang menghubungkan antar wilayah di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.89.
Kondisi Jalan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2016

NO.	Kondisi Jalan	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Baik	431,81	462,57	479,15	492,62	726,21
2	Rusak ringan	46,12	119,11	114,67	112,39	137,96
3	Rusak berat	208,07	104,32	92,18	80,99	272,49
	Jumlah (Km)	686	686	686	686	1.136

Sumber : DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul, 2018

B. Ketersediaan Daya Listrik

PT PLN Persero menjadi pemasok utama kebutuhan tenaga listrik di Kabupaten Gunungkidul. Sebagian besar kebutuhan tenaga listrik untuk melayani pelanggan rumah tangga. Untuk mengetahui jumlah tenaga listrik yang diproduksi, terjual dan jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.90.
Jumlah Tenaga Listrik yang Diproduksi, Terjual dan Jumlah Pelanggan Listrik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2017

No.	Elemen Data	Tahun				Satuan
		2014	2015	2016	2017	
1	Produksi	251.377.369	254.555.687	273.627.036	281.886.890	kwh
2	Susut	23.496.574	24.998.888	25.424.157	25.618.666	kwh
3	Terpasang	204.392.484	253.098.512	269.128.129	279.460.744	kwh
4	Terjual	223.063.458	228.099.624	243.703.972	253.842.078	kwh
	Rumah Tangga	146.720.753	155.024.404	136.931.990	166.439.532	kwh
	Bisnis	21.644.983	23.837.676	21.668.783	27.248.058	kwh
	Industri	34.973.404	30.281.864	27.160.279	37.974.264	kwh
	Umum	11.681.609	10.120.543	8.582.610	10.306.785	kwh
	Sosial	8.042.707	8.835.137	8.571.127	11.817.441	kwh
5	Jumlah Pelanggan					
	Rumah Tangga	154.336	166.681	172.810	180.474	Pelanggan
	Bisnis	2.773	3.265	4.360	4.834	Pelanggan
	Industri	69	74	79	88	Pelanggan
	Umum	1.415	1.466	1.537	1.617	Pelanggan
	Sosial	5.074	5.557	5.941	6.331	Pelanggan

Sumber: PT PLN (Persero) Rayon Wonosari, 2017

C. Ketersediaan Air Minum

PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan air dalam layanan air minum perkotaan. Selama ini produksi air minum oleh PDAM Kabupaten Gunungkidul memanfaatkan beberapa sumber air baku yang berasal dari mata air, sumur bor dan terbanyak berasal dari sungai bawah tanah. Untuk mengetahui kapasitas produksi, kapasitas air yang termanfaatkan, jumlah pelanggan dan sumber mata air yang dikelola oleh PDAM Tirta Handayani dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.91.
Kapasitas Produksi, Kapasitas Air Yang Termanfaatkan, Jumlah Pelanggan Dan Sumber Mata Air Yang Dikelola Oleh PDAM Tirta Handayani Tahun 2012-2016

No	Elemen Data	TAHUN					Satuan
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Kapasitas Produksi Air	725,5	404,43	430,93	507,98	507,98	l/dt
2	Kapasitas Yang Termanfaatkan	469,3	404,43	430,93	507,98	507,98	l/dt
3	Jumlah Pelanggan/Sambungan Rumah Tangga	34.890	38.081	40.878	43.495	45.466	Sambungan
4	Sumber air minum						
	Mata air	3/113	3/113	4/114	4/114	3/55	Unit/(l/dt)
	Sumur Bor	14/254	14/254	15/255	15/255	13/209	Unit/(l/dt)
	Sungai	-	-	1 / 40	2 / 40	2/40	Unit/(l/dt)
	Sungai Bawah Tanah	4/2680	4/2680	4/2680	4/2615	4/2680	Unit/(l/dt)

Sumber data : PDAM Tirta Handayani, 2017

D. Ketaatan terhadap Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Terkait dengan penataan ruang, Kabupaten Gunungkidul telah menyusun Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa tujuan penataan ruang Kabupaten Gunungkidul adalah mewujudkan wilayah Kabupaten Gunungkidul sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan dan sumberdaya lokal untuk mendukung destinasi wisata menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri dan sejahtera.

Tabel 2.91
Data Pengawasan Teknis Ruang Tahun 2016

NO	ASPEK PENILAIAN	Bobot (B)	Nilai(N)	Total (B x N)	Nilai Maksimal	Persentase	Kinerja
I	ASPEK PENGATURAN PENATAAN RUANG	35%	57,02	19,96	35	57,02%	Cukup
A	Penetapan Perda RTRW	10%	100	10	10	100,00%	Memuaskan
B	Penetapan Perda RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	7%	8,89	0,62	7	8,89%	Kurang
C	Penetapan Perda RDTR Kab/Kota	7%	33,33	2,33	7	33,33%	Kurang
D	Penetapan Perda Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota	6%	33,33	2	6	33,33%	Kurang
E	Ketersediaan Perda/Perbup/Perwali terkait Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten/Kota	5%	100	5	5	100,00%	Memuaskan
II	ASPEK PEMBINAAN PENATAAN RUANG	20%	69,59	13,92	20	69,59%	Baik
A	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	5%	91,33	4,57	5	91,33%	Memuaskan
B	Sosialisasi Peraturan Perundangan di bidang Penataan Ruang	5%	79,67	3,98	5	79,67%	Baik
C	Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang	4%	57,78	2,31	4	57,78%	Cukup
D	Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang	1%	30,77	0,31	1	30,77%	Kurang
E	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruang	1%	0	0	1	%	Kurang
F	Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi	1%	0	0	1	%	Kurang
G	Penyebarluasan Informasi berbagai Aspek Penataan Ruang	1%	75	0,75	1	75,00%	Baik
H	Pengembangan Kesadaran dan tanggung Jawab Masyarakat	2%	100	2	2	100,00%	Memuaskan
III	ASPEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	45%	67,26	30,27	45	67,26%	Cukup
A	Perencanaan Tata Ruang	15%	81,77	12,27	15	81,77%	Baik
1	Proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab/Kota	9%	96	8,64	9	96,00%	Memuaskan
2	Proses penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kab/Kota	6%	60,42	3,63	6	60,42%	Cukup
B	Pemanfaatan Ruang	15%	100	15	15	100,00%	Memuaskan
1	Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota	9%	100	9	9	100,00%	Memuaskan
2	Realisasi program pemanfaatan ruang kawasan strategis Kab/Kota	6%	100	6	6	100,00%	Memuaskan
C	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	15%	20	3	15	20,00%	Kurang
1	Ketersediaan dokumen Arahan Peraturan Zonasi	5%	0	0	5	%	Kurang
2	Penerapan Arahan Peraturan Zonasi	3%	0	0	3	%	Kurang
3	Penerapan perizinan pemanfaatan ruang	3%	100	3	3	100,00%	Memuaskan
4	Penerapan pemberian insentif dan disinsentif	1%	0	0	1	%	Kurang
5	Pengenaan sanksi pelanggaran pemanfaatan ruang	3%	0	0	3	%	Kurang
Jumlah				64,14	100	64,14%	Cukup

Tabel 2.92
Data Kinerja Penataan Ruang Tahun 2016

NO	PROVINSI	ASPEK PENILAIAN			PERSENTASE	KINERJA	RANKING
		ASPEK PENGATURAN	ASPEK PEMBINAAN	ASPEK PELAKSANAAN			
		35%	20%	45%			
1	KOTA YOGYAKARTA	100	84,88	98,09	96,12	Memuaskan	1
2	KAB. SLEMAN	63,29	84,26	88,69	78,92	Baik	2
3	KAB. BANTUL	70,62	81,5	80,53	77,26	Baik	3
4	KAB. KULON PROGO	60,45	61,59	82,22	70,48	Baik	4
5	KAB. GUNUNG KIDUL	57,02	69,59	67,26	64,14	Cukup	5

Sumber : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, 2017

II.4.3. Iklim Investasi

A. Angka Kriminalitas

Kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pembangunan. Terkait dengan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Gunungkidul relatif terkendali dibandingkan Kota Yogyakarta, yang ditunjukkan dengan kecilnya angka kejahatan dan kekerasan yang terjadi pada kurun waktu Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015. Berikut ini gambaran keamanan dan ketertiban yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul selama 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 2.93
Jumlah Tindak Kriminal Kabupaten Gunungkidul 2013-2017

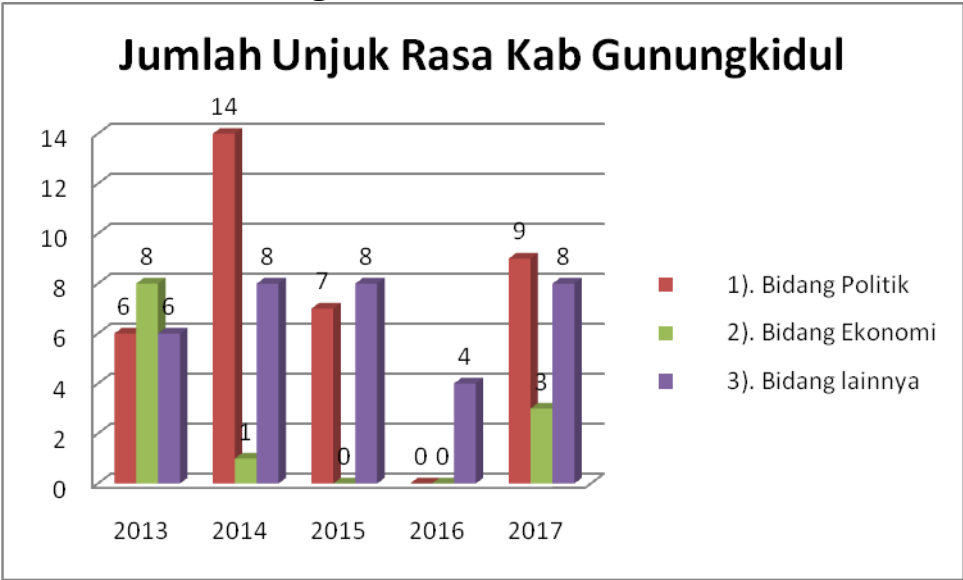
No	Tindak Kriminal	TAHUN					Satuan
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Kasus narkoba	3	7	4	10	42	Kasus
2	Kasus seksual	32	9	18	14	5	Kasus
3	Kasus penganiayaan	16	16	26	11	16	Kasus
4	Kasus pencurian	107	111	118	21	95	Kasus
5	Kasus penipuan	31	36	54	33	40	Kasus
6	Kasus pemalsuan uang	2	1	0	0	1	Kasus

Sumber Data : Kepolisian Resort Gunungkidul 2018

B. Jumlah Demonstrasi

Demontrasi atau unjuk rasa merupakan suatu peristiwa biasa yang merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Gambar 2.22
Jumlah Demonstrasi / Unjuk rasa Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2013 – 2017



Sumber : Polres Gunungkidul, 2018

II.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

A. Kualitas Tenaga Kerja

Jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 2017 mencapai 757.169 jiwa, menduduki peringkat 3 di wilayah Provinsi DIY. Berdasarkan jenis kelamin jumlah penduduk didominasi oleh jumlah penduduk perempuan. Dilihat dari angka pencari kerja, yang tercatat di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2017, mayoritas pencari kerja didominasi oleh lulusan SMK, peringkat berikutnya adalah lulusan SMU, Sarjana (S-1 dan S2),D1/D2/D3, dan SLTP. Dengan demikian untuk dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja, dilaksanakan dengan memberi dukungan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakatnya agar mampu menyekolahkan sampai tingkat pendidikan tinggi (diploma/sarjana). Tentunya hal tersebut tidaklah mudah dan sangat dibutuhkan dukungan pendanaan serta intervensi yang tepat untuk meningkatkan pendapatan penduduknya. Untuk memberikan gambaran riil tentang daya saing ketenagakerjaan yang direpresentasikan oleh tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat Kabupaten Gunungkidul tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.94
 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Tidak / belum sekolah	190.793	183.333	190.605	191.409	190.834
2	Tidak tamat SD	70.504	69.318	70.389	70.118	68.353
3	Tamat SD/Sederajat	226.309	220.614	217.007	215.537	212.484
4	Tamat SMP/Sederajat	143.167	142.210	142.580	143.826	144.332
5	Tamat SMU/SMK/Sederajat	110.186	110.926	111.828	117.016	116.604
6	Tamat Diploma	9.603	9.319	9.088	9.241	22.395
7	Tamat Sarjana S1	12.239	12.781	13.307	14.307	14.592
8	Tamat Sarjana S2	748	771	804	860	875
9	Tamat Sarjana S3	216	175	136	138	126

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Gunungkidul, 2018

B. Tingkat Ketergantungan

Penduduk menurut kelompok umur dapat menggambarkan komposisi penduduk pada suatu wilayah. Indikator komposisiumur merupakan indikator yang sangat berguna dalam perencanaan pembangunan. Dengan indikator ini akan diketahui kelompok penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) dan kelompok penduduk usia tidak produktif (usia dibawah 14 tahun dan usia diatas 65 tahun). Selain itu juga dapat diketahui pula angka ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif.

Untuk mengetahui komposisi penduduk dan angka beban tanggungan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.95
 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Tanggungan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	0 -14	18,85	19,19	19,70	19,37	20,43
2	15 – 64	67,73	67,53	66,86	66,76	66,17
3	> 65	13,42	13,28	13,44	13,87	13,40
Rasio beban ketergantungan		47,64	48,09	49,57	47,79	51,13

Sumber : Disdukcapil, 2018

Berdasarkan Tabel 2.95 terlihat bahwa angka ketergantungan penduduk Gunungkidul tahun 2017 mencapai 51,13 %. Fenomena ini menunjukkan bahwa pada 2017 persentase penduduk usia produktif mengalami peningkatan yang cukup berarti dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Angka ketergantungan sebesar 51,13 mengandung arti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 51 penduduk usia tidak produktif, dengan asumsi bahwa penduduk usia produktif benar-benar produktif. Jika tidak demikian maka penduduk usia produktif akan lebih berat lagi dalam menanggung penduduk usia produktif yang tidak benar-benar produktif secara ekonomi (pengangguran).

II.5. Evaluasi Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2010-2015

Bagian ini merupakan telaah terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah. Telaah dilakukan dengan melakukan tinjauan evaluasi terhadap hasil kinerja RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015. Indikator yang dipakai untuk evaluasi adalah indikator kinerja sasaran dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015, sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015, indikator sasaran di RPJMD meliputi 23 Sasaran, yaitu :

1. Sentra produksi memiliki infrastruktur air dan sanitasi yang handal;
2. Kawasan permukiman memiliki infrastruktur air yang handal;
3. Sentra produksi memiliki infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi yang handal;
4. Kawasan permukiman memiliki infrastruktur dasar transportasi, energi, air, telekomunikasi, dan sanitasi;
5. Peningkatan daya dukung dan produktivitas Pantai Sadeng sebagai kawasan minapolitan untuk memacu pengembangan kawasan pantai selatan;
6. Seluruh potensi sumber daya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat sasaran dengan data yang akurat untuk mendorong investasi;

7. Setiap kecamatan memiliki komoditas unggulan yang dikelola secara lestari dengan menerapkan teknologi produksi dan pengolahan yang tepat guna;
8. Setiap kecamatan memiliki Unit Pelayanan Bisnis dan lembaga pembiayaan yang mampu memfasilitasi pengembangan komoditas unggulan;
9. Setiap kecamatan memiliki pasar yang mampu menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dan sarana produksi serta penjualan komoditas di wilayahnya;
10. Kabupaten Gunungkidul mencapai ketahanan pangan;
11. Kabupaten Gunungkidul menjadi destinasi wisata unggulan dengan infrastruktur yang handal;
12. Pengembangan wisata budaya berbasis pemberdayaan masyarakat;
13. Seluruh potensi sumberdaya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat sasaran dengan data yang akurat untuk mendorong investasi;
14. Anak usia dini terlayani PAUD;
15. Anak usia sekolah lulus SLTA dan memiliki keterampilan bahasa Inggris, komputer, agrobisnis, dan kewirausahaan;
16. Angkatan kerja menjadi pekerja profesional atau wirausaha yang peduli memajukan daerahnya;
17. Rumah Sakit, Puskesmas, dan Jaringannya memenuhi standar mutu serta mampu menjangkau/dijangkau oleh masyarakat di wilayahnya;
18. Keluarga sadar gizi, berperilaku hidup bersih sehat, dan menerapkan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera;
19. Pemuda-pemudi Gunungkidul meraih prestasi regional, nasional, dan internasional;
20. Seluruh SKPD dan pemerintahan desa memiliki aparatur yang kompeten sesuai kebutuhan serta menerapkan akuntabilitas kinerja dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
21. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan dilaksanakan secara tepat waktu dan terintegrasi dengan data yang akurat;
22. Pelayanan publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima serta menciptakan iklim usaha yang kondusif; dan
23. Masyarakat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatannya secara tertib dan damai.

Capaian kinerja sasaran tahun 2012 - 2015 secara ringkas sebagai berikut :

Tabel 2.96.

Skala Pengukuran Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2012-2015

Skala Ordinal	Predikat	Jumlah Sasaran Yang Dicapai			
		Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
$85 \leq X$	Sangat Berhasil	20	22	22	22
$70 \leq X < 85$	Berhasil	2	0	1	1
$55 \leq X < 70$	Cukup Berhasil	0	0	0	0
$X < 55$	Tidak Berhasil	0	0	0	0
Jumlah Seluruh Sasaran		22	22	23	23

Sumber : Evaluasi Hasil RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 Sampai Dengan Tahun 2016

II.5.1 Hasil Evaluasi

Ringkasan capaian kinerja indikator sasaran di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 hampir semua indikator kinerja sasaran yang ada dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015 menunjukkan predikat yang dicapai sangat berhasil. Hanya ada 1 (satu) indikator sasaran di sasaran 3 misi 2 yang masuk kategori berhasil. Sasaran tersebut adalah peningkatan daya dukung dan produktivitas Pantai Sadeng sebagai kawasan minapolitan untuk memacu pengembangan kawasan Pantai Selatan. Secara umum dari 23 sasaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 hampir semua sasaran masuk kategori sangat berhasil dalam pencapaian kinerjanya, sehingga secara umum menunjukkan bahwa target sasaran RPJMD sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD sudah dilaksanakan dengan dukungan program dan kegiatan yang relevan. Secara rinci pencapaian sasaran RPJMD Tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.91.

Tabel 2.97

Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2010-2015

No	Sasaran	Capaian Kinerja (%)			
		2012	2013	2014	2015
1	Sentra produksi memiliki infrastruktur air dan sanitasi yang handal	95,99	98,72	129,44	141,32

No	Sasaran	Capaian Kinerja (%)			
		2012	2013	2014	2015
2	Kawasan permukiman memiliki infrastruktur air yang handal	98,38	117,14	113,9	114,73
3	Sentra produksi memiliki infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi yang handal	108,26	98,24	104,45	102,09
4	Kawasan permukiman memiliki infrastruktur dasar transportasi, energi, air, telekomunikasi, dan sanitasi	88,35	100,42	98,71	98,05
5	Peningkatan daya dukung dan produktifitas Pantai Sadeng sebagai kawasan misapolitan untuk memacu pengembangan kawasan Pantai Selatan	83,53	100,08	79,02	81,97
6	Seluruh potensi sumber daya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat sasaran dengan data yang akurat untuk mendorong investasi	178,06	114,96	115,45	128,28
7	Setiap kecamatan memiliki komoditas unggulan yang dikelola secara lestari dengan menerapkan teknologi produksi dan pengolahan yang tepat guna	92,83	100,32	101,6	99,52
8	Setiap kecamatan memiliki unit pelayanan bisnis dan lembaga pembiayaan yang mampu memfasilitasi pengembangan komoditas unggulan	117,22	118,5	173,85	175,14
9	Setiap kecamatan memiliki pasar yang mampu menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dan sarana produksi serta penjualan komoditas di wilayahnya	88,89	99,44	95,96	87,84
10	Kabupaten Gunungkidul mencapai ketahanan pangan	171,43	111,36	114,78	111,05
11	Kabupaten Gunungkidul menjadi destinasi unggulan dengan infrastruktur yang hadal	124,68	99,96	101,89	118,58
12	Pengembangan wisata budaya berbasis pemberdayaan masyarakat	na.	103,7	100	216,67
13	Seluruh potensi sumberdaya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat sasaran dengan data yang akurat untuk mendorong investasi	86,11	90,48	100	100
14	Anak usia dini terlayani PAUD	92,96	134,71	97,54	96,39
15	Anak usia sekolah lulus SLTA dan memiliki keterampilan bahasa inggris, kompetensi, agrobisnis, dan kewirausahaan	71,7	90,47	103,56	96,37

No	Sasaran	Capaian Kinerja (%)			
		2012	2013	2014	2015
16	Angkatan kerja menjadi pekerja profesional atau wirausaha yang peduli memajukan daerahnya	110,4 9	100,9 2	87,38	151,2 2
17	Rumah sakit, puskesmas, dan jaringannya memnuhi standar mutu serta mampu menjangkau/dijangkau oleh masyarakat di wiayahnya	101,0 9	103,9 5	99,63	104,6 9
18	Keluarga sadar gizi, berperilaku hidup bersih, sehat, dan menerapkan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera	100,3 2	121,4 4	123,7 1	130,9
19	Pemuda pemudi Gunungkidul meraih prestasi regional, nasional, dan internasional	82,47	191,3 7	375,1 2	1075, 8
20	Seluruh SKPD dan pemerintah desa memiliki aparatur yang kompeten sesuai kebutuhan serta menerapkan akuntabilitas kinerja dan bebas KKN	85,47	95,78	85,59	95
21	Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan dilaksanakan secara tepat waktu dan terintegrasi dengan data yang akurat	96,93	96,99	89,27	96,04
22	Pelayanan publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima serta menciptakan iklim usaha yang kondusif	97,16	91,23	96,64	101,0 3
23	Masyarakat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatannya secara tertib dan damai	108,6 5	107,2 7	88,66	100,6 5

Sumber : *Evaluasi Hasil RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 Sampai Dengan Tahun 2015*

Berdasarkan evaluasi kinerja sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015 sampai dengan Desember tahun 2015 dapat dirumuskan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015 dengan kriteria sangat berhasil adalah :
 - 1) Sasaran 1 Misi 1 yaitu sentra produksi memiliki infrastruktur air dan sanitasi yang handal.
 - 2) Sasaran 2 Misi 1 yaitu kawasan permukiman memiliki infrastruktur air yang handal.

- 3) Sasaran 1 Misi 2 yaitu sentra produksi memiliki infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi yang handal.
- 4) Sasaran 2 Misi 2 yaitu kawasan pemukiman memiliki infrastruktur dasar transportasi, energi, air, telekomunikasi dan sanitasi.
- 5) Sasaran 4 Misi 2 yaitu seluruh potensi sumber daya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat sasaran dengan data yang akurat untuk mendorong investasi.
- 6) Sasaran 5 Misi 2 yaitu setiap kecamatan memiliki komoditas unggulan yang dikelola secara lestari dengan menerapkan teknologi produksi dan pengolahan yang tepat guna.
- 7) Sasaran 6 Misi 2 yaitu setiap kecamatan memiliki unit pelayanan bisnis dan lembaga pembiayaan yang mampu memfasilitasi pengembangan komoditas unggulan.
- 8) Sasaran 7 Misi 2 yaitu setiap kecamatan memiliki pasar yang mampu menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dan sarana produksi serta penjualan komoditas di wilayahnya.
- 9) Sasaran 8 Misi 2 yaitu Kabupaten Gunungkidul mencapai ketahanan pangan.
- 10) Sasaran 1 Misi 3 yaitu Gunungkidul menjadi destinasi wisata unggulan dengan infrastruktur yang handal.
- 11) Sasaran 2 Misi 3 pengembangan wisata budaya berbasis pemberdayaan masyarakat.
- 12) Sasaran 3 Misi 3 yaitu seluruh potensi sumber daya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat sasaran dengan data yang akurat untuk mendorong investasi.
- 13) Sasaran 1 Misi 4 yaitu anak usia dini terlayani PAUD.
- 14) Sasaran 2 Misi 4 yaitu anak usia sekolah lulus SLTA dan memiliki keterampilan bahasa Inggris, komputer, agrobisnis dan kewirausahaan.
- 15) Sasaran 3 Misi 4 yaitu angkatan kerja menjadi pekerja profesional atau wirausaha yang peduli memajukan daerahnya
- 16) Sasaran 4 Misi 4 yaitu rumah sakit, puskesmas dan jaringannya memenuhi standar mutu serta mampu menjangkau/dijangkau oleh masyarakat di wilayahnya.

- 17) Sasaran 5 Misi 4 yaitu keluarga sadar gizi, berperilaku hidup bersih sehat, dan menerapkan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
- 18) Sasaran 6 Misi 4 yaitu pemuda-pemudi Gunungkidul meraih prestasi regional, nasional, dan internasional.
- 19) Sasaran 1 Misi 5 yaitu seluruh SKPD dan pemerintahan desa memiliki aparatur yang kompeten sesuai kebutuhan serta menerapkan akuntabilitas kinerja dan bebas KKN.
- 20) Sasaran 2 Misi 5 yaitu seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan secara tepat waktu dan terintegrasi dengan data yang akurat.
- 21) Sasaran 3 Misi 5 yaitu pelayanan publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima serta menciptakan iklim usaha yang kondusif.
- 22) Sasaran 4 Misi 5 yaitu masyarakat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatannya secara tertib dan damai.

- b. Capaian kinerja sasaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015 dengan kriteria berhasil adalah :
Sasaran 3 Misi 2 peningkatan daya dukung dan produktivitas Pantai Sadeng sebagai kawasan minapolitan untuk memacu pengembangan kawasan Pantai Selatan.

II.5.2 Rekomendasi

- a. Proses evaluasi pencapaian target-target RPJMD dapat optimal dan berhasil hanya dimungkinkan dengan ketersediaan data/informasi yang baik, lengkap, konsisten, reliabel dan terpercaya, yang dalam pengamatan selama evaluasi dalam 5 tahun terakhir masih menjadi titik lemah. Oleh karenanya segala upaya untuk pembenahan data/informasi pembangunan mutlak dilakukan. Data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan hendaknya dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia.
- b. Ke depan agar proses evaluasi pencapaian target-target RPJMD dapat dilakukan dengan optimal, efektif dan efisien maka proses

pengumpulan dan kompilasi data capaian target-target RPJMD dari masing-masing SKPD tidak dilakukan secara manual tetapi perlu menggunakan sistem aplikasi secara *on-line*.

- c. Dengan masih adanya indikator yang tidak sesuai atau kurang tepat dengan kemampuan SKPD pemegang mandat untuk penyediaan data karena tidak adanya ketersediaan data pendukung, dan masih adanya sebagian indikator sasaran yang dirumuskan terlalu *rigid* dan lebih bersifat indikator *output*, maka dalam penyusunan RPJMD baru yang akan datang perlu dicermati dan dikaji ulang dan menjadi bahan penyusunan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 – 2020 yang didasarkan pada hasil evaluasi ini sesuai aturan perundang-undangan.
- d. Seluruh SKPD yang ada agar berfokus dan memberi dukungan penuh pada program-program prioritas pencapaian target, tanpa harus menghindarkan sedapat mungkin menciptakan program-program terobosan dan inovasi baru.
- e. Perlu adanya keterpaduan, kesinambungan dan sinkronisasi program kegiatan baik intern maupun antar SKPD dan antar berbagai sumber dana (APBN, APBD Provinsi maupun APBN) untuk merealisasikan target-target RPJMD ke depan. Pencapaian target tidak hanya berasal dari jabaran dokumen RKPD maupun Renja SKPD saja, tetapi secara agregat berasal dari berbagai program kegiatan dan sumber dana sebagai satu kesatuan sistem pembangunan daerah.
- f. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 – 2020 formulasi sasaran daerah agar dijabarkan ke dalam sasaran SKPD. Masing-masing sasaran agar dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Salah satu prinsipnya adalah 1 (satu) program hanya boleh mendukung 1 (satu) sasaran daerah saja. Selanjutnya perlu program yang fokus pada setiap SKPD, di mana 1 (satu) program hanya digunakan oleh 1 (satu) SKPD, kecuali program pada semua urusan.
- g. Dalam penyusunan program dan kegiatan agar mempertimbangkan regulasi yang berkaitan dengan hibah sesuai ketentuan dalam pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan tentang kewenangan desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

III.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan adalah perbedaan antara harapan dengan kenyataan (*gap expectation*), yang dapat berupa perbedaan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan kinerja yang direncanakan, atau perbedaan antara kondisi ideal yang ingin dicapai dengan kondisi riil yang senyatanya. Rumusan masalah merupakan hasil proses analisis terhadap data dan informasi yang tersedia.

Pada bagian ini akan dijelaskan permasalahan pembangunan yang digali berdasarkan data hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan dan menentukan perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah.

III.1.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

III.1.1.1. Permasalahan

1. Kondisi geomorfologi Kabupaten Gunungkidul yang bervariasi, mulai dari datar, berombak, bergelombang, berbukit, dan bergunung dengan hamparan yang sangat luas membuat sebagian besar wilayah mempunyai kondisi yang marginal sehingga pemanfaatan lahan menjadi terbatas.
2. Struktur geologi Kabupaten Gunungkidul berada dekat dengan jalur pertemuan dua lempeng benua Australia dan Asia serta berada dekat dengan jalur patahan aktif sesar Opak-Oyo yang sangat berpotensi menimbulkan bencana gempa bumi dan tsunami.
3. Penataan ruang di Kabupaten Gunungkidul belum terlaksana secara terpadu sehingga menyebabkan pembangunan berbasis kewilayahan dan berkelanjutan belum berjalan dengan optimal.
4. Keberadaan ruang terbuka hijau masih terbatas sebab arah pembangunan belum sepenuhnya berwawasan lingkungan.
5. Adanya kerusakan lingkungan kawasan karst, belum adanya payung hukum operasional dan belum efektifnya penegakan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan pengelolaan

lingkungan hidup menyebabkan semakin menurunnya kualitas daya dukung lingkungan.

III.1.1.2. Capaian Keberhasilan

1. Terlaksananya pembangunan daerah yang lebih optimal dan terpadu dengan mempertimbangkan potensi wilayah dan kondisi geomorfologi dalam setiap satuan wilayah pengembangan.
2. Terlaksananya pembangunan daerah yang optimal dengan mempertimbangkan aspek kebencanaan seperti yang telah dilaksanakan pasca gempa bumi 27 Mei 2006.
3. Terwujudnya Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sebagai penyiap bahan koordinasi penyelenggara penataan ruang di Kabupaten Gunungkidul.
4. Terwujudnya embrio lokasi sebagai hutan kota di Dusun Tawarsari dan lokasi taman kota di Dusun Kepek, Wonosari serta terwujudnya hutan dengan luas 30% dari luas wilayah Kabupaten Gunungkidul yang terdiri dari hutan negara, hutan rakyat, dan hutan kemasyarakatan.
5. Terbentuknya kelompok-kelompok sadar lingkungan dalam komunitas.

III.1.1.3. Proyeksi Peluang

1. Kabupaten Gunungkidul dengan luas 1.485,36 km² merupakan kabupaten terluas di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kondisi geomorfologi yang bervariasi memberikan peluang investasi yang bervariasi pula sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing.
2. Kabupaten Gunungkidul berada pada daerah kerentanan bencana geologi yang cukup tinggi sehingga memberi peluang pembangunan berbasis mitigasi bencana dengan menciptakan masyarakat tangguh bencana.
3. Penerapan peraturan zonasi di kabupaten Gunungkidul guna mewujudkan tertib tata ruang.
4. Perwujudan proporsi luas hutan di Kabupaten Gunungkidul minimal 30% dari luas wilayah dan proporsi ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 30% dari luas wilayah perkotaan.

5. Belum adanya *reward* (penghargaan) dari pihak-pihak lain bahwasanya batuan karst bisa mengurangi kadar CO₂ secara alami yang besar dari tumbuhan.
6. Pemberian *reward* (penghargaan) terhadap pihak-pihak yang berjasa dalam pelestarian Lingkungan Hidup dan pemberian *punishment* (hukuman) secara tegas kepada pihak yang melakukan kerusakan Lingkungan Hidup.

III.1.1.4. Proyeksi Ancaman

1. Kondisi geomorfologi yang bervariasi dan lahan yang marginal disamping menyebabkan aksesibilitas daerah cenderung lebih rendah juga akan memunculkan kawasan kritis jika tidak ada usaha rehabilitasi lebih lanjut.
2. Ancaman bencana geologi gempa bumi berpotensi akan berulang sesuai periodisasinya. Selain itu juga memungkinkan adanya bencana alam yang bervariasi pula, seperti tanah longsor, kekeringan, dan banjir.
3. Terjadinya benturan kepentingan antara kegiatan budidaya maupun antara kegiatan budidaya dengan lindung yang dapat menyebabkan terganggunya fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Gunungkidul sebagai akibat semakin besarnya investasi yang hanya mempertimbangkan aspek ekonomi saja.
4. Semakin sulitnya mencari lokasi Ruang Terbuka Hijau di perkotaan seiring semakin intensifnya lahan perkotaan.
5. Masih rendahnya harga tanah di Gunungkidul dibanding kabupaten/kota tetangga, membuat adanya investasi skala besar yang akan tumbuh.
6. Wilayah Kabupaten Gunungkidul yang sangat luas dan banyaknya warga yang belum sadar lingkungan mempunyai kendala dalam upaya pengendalian fungsi lingkungan hidup yang lebih intensif, akibatnya telah terjadi kerusakan lingkungan.

III.1.1.5. Proyeksi Permasalahan

1. Kondisi geomorfologi yang bervariasi menyebabkan aksesibilitas manusia dan barang cenderung rendah dan kondisi tanah marginal menambah ketergantungan dengan daerah lain yang lebih maju di sekitarnya.

2. Bencana geologi gempa bumi dan tsunami akan semakin luas dampaknya jika tidak ada usaha-usaha penanggulangan bencana melalui mitigasi bencana.
3. Sistem pengawasan dan pengendalian dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup masih relatif lemah jika tidak didasari dengan profesionalisme, keterbukaan, dan akuntabilitas.
4. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau semakin kompleks dan memerlukan penanganan yang serius, hal ini perlu keterlibatan semua pihak baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam perwujudan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Gunungkidul.
5. Banyaknya warga yang belum sadar lingkungan menjadi kendala dalam upaya pengendalian fungsi lingkungan hidup secara intensif.
6. Banyaknya lahan/hamparan kars akan berkurang dan menjadi bagian dari pelaksanaan investasi.
6. Pencemaran air tanah di sistem Bribin – Baron, Seropan dan Ngobaran telah meningkat. Apabila kecenderungan kualitas dan kuantitas air ini terus meningkat, bukan sesuatu yang mustahil air sungai bawah tanah di masa mendatang tidak dapat dikonsumsi lagi.

III.1.1.6. Proyeksi Keberhasilan

1. Pada tahun 2025 mendatang pemanfaatan lahan marginal untuk pengembangan sektor pertanian, pariwisata, dan pertambangan menjadi semakin besar dan berpotensi menjadi sektor andalan daerah dalam mendorong perekonomian daerah.
 2. Kesadaran masyarakat terhadap bahaya bencana geologi gempa bumi dan tsunami semakin meningkat sehingga tumbuh masyarakat tangguh bencana.
 3. Tingkat pelanggaran terhadap tata ruang semakin menurun seiring semakin tegasnya sistem pengawasan dan pengendalian serta semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mewujudkan tertib tata ruang.
- Pengelolaan lingkungan kawasan kepesisiran akan lebih sinergis dan optimal. Kawasan perbukitan karst dan geopark Gunung Sewu dapat dipertahankan kelestariannya dengan

berbagai budaya karst dan terbangunnya laboratorium karst, sehingga sangat mendukung wisata alam dan wisata pendidikan. Kawasan Baturagung bagian barat berkembang menjadi kawasan wisata, sedangkan bagian timur berkembang menjadi kawasan konservasi hutan dan tanaman perkebunan.

4. Terwujudnya taman kota dan hutan kota yang mampu memperindah wajah kota dan memperbaiki kualitas udara di perkotaan serta terwujudnya hutan kota yang hijau dan lestari yang mampu mengendalikan tata air, mencegah polusi udara, dan bahaya longsor sekaligus mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan tetap menjaga fungsi pelestarian lingkungan.
5. Jumlah dan intensitas pencemaran menurun seiring meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas daya dukung lingkungan.

III.1.1.7. Prediksi Kondisi Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

1. Pada tahun 2025 ke depan masyarakat Kabupaten Gunungkidul mampu memanfaatkan lahan-lahan marginal menjadi lahan-lahan produktif dan mampu merehabilitasi lahan kritis yang ada.
2. Kesadaran Masyarakat Kabupaten Gunungkidul terhadap pentingnya tanggap bencana meningkat, sehingga jika terjadi bencana dampaknya bisa diminimalisir.
3. Terwujudnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat yang tinggi dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga terwujud ruang di Kabupaten Gunungkidul yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
4. Terwujudnya Kabupaten Gunungkidul yang hijau dan indah dalam mendukung *city branding* "Gunungkidul Handayani".
5. Terwujudnya kesadaran sikap mental dan perilaku masyarakat yang tinggi dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.

III.1.2. Demografi

III.1.2.1. Permasalahan

1. Perkembangan rasio angkatan kerja dan pengangguran terhadap jumlah penduduk cenderung naik.
2. Struktur penduduk tergolong katagori piramida penduduk usia muda (menggelembung di usia muda dan tengah).
3. Penduduk usia kerja awal (mulai 20 tahun) banyak melakukan migrasi ke luar daerah.
4. Tingkat pendidikan masyarakat secara formal relatif rendah, rata-rata tamat SD.
5. Konsentrasi penduduk berada pada kantong-kantong wilayah yang relatif maju.

III.1.2.2. Capaian Keberhasilan

1. Angka pertumbuhan penduduk relatif kecil dan terkendali namun masih di atas *zero growth population*.
2. Pertumbuhan jumlah Keluarga Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dari tahun ke tahun menunjukkan terjadinya perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat.
3. Kualitas sumberdaya manusia menunjukkan angka kenaikan yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Gunungkidul. Pada Tahun 2010, angka Indeks Pembangunan Manusia yang diukur dengan metode baru adalah sebesar 64.2. Sedangkan di tahun 2017, angka Indeks Pembangunan Manusia adalah sebesar 68.73.

III.1.2.3. Proyeksi Peluang

1. Wilayah Kabupaten Gunungkidul yang luas dengan kepadatan yang rendah serta memiliki potensi alam yang belum optimal tergarap, akan memunculkan peluang antara lain kesempatan perluasan lapangan kerja, peningkatan perekonomian daerah, dan penyediaan lahan yang cukup.
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan ketertarikan masyarakat terhadap dunia pendidikan.

III.1.2.4. Proyeksi Ancaman

1. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin menunjukkan piramida penduduk struktur muda, yaitu

ditandai dengan penggelembungan jumlah penduduk usia muda (20 tahun ke bawah). Piramida dengan struktur umur muda akan beresiko terhadap masalah sosial ekonomi.

2. Komponen penyumbang angka pertumbuhan penduduk terbesar terletak pada besarnya angka kelahiran.
3. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia akan menyebabkan rendahnya pengelolaan sumberdaya alam secara optimal, efisien, dan ekonomis.
4. Kondisi alam yang berbatu dan bergunung-gunung akan semakin kritis dan akan menyebabkan kejenuhan bagi generasi muda, sehingga mendorong migrasi ke luar daerah jika tidak ada atau kurang adanya perhatian terhadap kelestarian ekosistem alamnya.

III.1.2.5. Proyeksi Permasalahan

1. Dibandingkan dengan luas wilayah secara total menunjukkan kepadatan yang rendah, yaitu rata-rata sebesar 461 jiwa/km² pada tahun 2007 dan menjadi 486 jiwa/km² di tahun 2017, dengan angka kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Wonosari sebesar 1.116 jiwa/km² dan angka kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Girisubo sebesar 251 jiwa/km².
2. Besarnya penduduk yang hanya berpendidikan tamat SD dapat menjadi beban untuk peningkatan kemajuan daerah.
3. Komposisi penduduk masih berstruktur muda, akan menjadi beban dalam sosial ekonomi terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja.
4. Ketertarikan terhadap daerah lain yang dipandang lebih menjanjikan dari segi ekonomi, mengakibatkan kehilangan sumberdaya manusia potensial di dalam membangun wilayahnya sendiri.

III.1.2.6. Proyeksi Keberhasilan

1. Pada tahun 2025 mendatang, keberhasilan pembangunan di segala bidang dan merata di seluruh wilayah diikuti dengan persebaran penduduk merata di seluruh kecamatan se-Kabupaten Gunungkidul.
2. Dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang lebih baik akan meningkatkan perekonomian daerah, karena akan

tercipta inovasi dari sumberdaya manusia yang berkualitas dan lapangan kerja yang terbuka lebar.

3. Pengendalian pertumbuhan penduduk secara intensif akan membentuk komposisi demografi yang menua.
4. Terciptanya lapangan kerja yang menjanjikan dari segi ekonomi menarik minat sumber daya potensial daerah untuk membangun wilayahnya sendiri.

III.1.2.7. Prediksi Kondisi Demografi

1. Persebaran penduduk akan semakin merata dengan perbaikan sarana dan prasarana wilayahnya.
2. Struktur penduduk yang semakin menua, yaitu jumlah kelahiran yang kecil dan meningkatnya umur harapan hidup masyarakat.
3. Terciptanya peningkatan lapangan kerja yang berbanding terbalik dengan angka pertumbuhan penduduk.
4. Perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat seiring dengan peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas.

III.1.3. Ekonomi dan Sumberdaya Alam

III.1.3.1. Permasalahan

1. Tingkat ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Gunungkidul terhadap Pemerintah Pusat masih cukup besar sedangkan kemampuan keuangan daerah yang ditunjukkan dengan indeks kemampuan rutin dan derajat desentralisasi masih kecil karena PAD belum mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah secara signifikan. Sebagian besar belanja pembangunan masih didanai oleh penerimaan dari dana perimbangan keuangan.
2. Sebelum krisis ekonomi pada tahun 1997, pembangunan ekonomi Kabupaten Gunungkidul berada pada tahap optimisme yang tinggi yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pertumbuhan cukup tinggi yang berhasil dipertahankan secara umum lebih banyak didorong oleh peningkatan akumulasi modal dan tenaga kerja daripada produktivitasnya. Kemajuan ekonomi yang telah dicapai belum diikuti oleh peningkatan efisiensi dan perbaikan tata kelola kelembagaan ekonomi. Oleh karena itu disamping rentan terhadap gangguan eksternal, perekonomian Kabupaten

Gunungkidul sulit berkembang terutama dalam menghadapi persaingan yang lebih ketat, baik pada pemasaran hasil produksi maupun pada peningkatan investasi dalam era globalisasi.

3. Kondisi perekonomian daerah pada tahun 2006 mengalami penurunan pertumbuhan PDRB akibat dari bencana gempa bumi yang melanda Yogyakarta dan sekitarnya. Pada tahun 2004 pertumbuhan PDRB sebesar 3,43%, 2005 naik 4,33 % dan turun pada tahun 2006 sebesar 3,82% dan pada tahun 2007 sebesar 3,91 %. Selanjutnya kondisi saat ini laju pertumbuhan PDRB Gunungkidul tahun 2017 mencapai 5 %, sedangkan tahun 2016 sebesar 4,89 %. Namun demikian angka ini masih jauh di bawah angka pertumbuhan D.I Yogyakarta yang mencapai 5,05% pada tahun 2016 dan 5,26% pada tahun 2017. Di antara kabupaten/kota yang ada di D.I. Yogyakarta Gunungkidul berada di posisi ke-5, yang mana turun satu peringkat dari tahun 2016.
4. Aktivitas ekonomi Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), saat ini terdapat 51,648 pengusaha kecil yang mampu menyerap tenaga kerja yang cukup signifikan di Kabupaten Gunungkidul. Daya serap tenaga kerja di sektor UMKM ini relatif besar, dan bersama-sama dengan sektor pertanian merupakan basis utama ekonomi masyarakat.
5. Fasilitas perdagangan yang berupa pasar sebagian besar belum memenuhi kualitas yang diharapkan. Sampai dengan tahun 2009 di Kabupaten Gunungkidul terdapat 84 pasar yang merupakan pasar tradisional, sedangkan jumlah pedagang kecil, menengah dan besar tercatat sejumlah 3.842 pedagang. Sedangkan di tahun 2017, jumlah pasar rakyat ada sejumlah 36, Pasar Swalayan/Supermarket ada sebanyak 78, Jumlah kios ada sebanyak 792 dan jumlah Jumlah Los ada sebanyak 509.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh para pedagang adalah rendahnya akses permodalan, kesinambungan pasokan bahan baku, lemahnya posisi tawar sehingga menekan harga jual, akses informasi pasar rendah, dan rendahnya daya saing terhadap produk-produk manufaktur.

6. Kabupaten Gunungkidul kaya akan sumberdaya alam bahan galian golongan C berupa kelompok batu gamping, kelompok blok, kelompok split, kelompok pasir dan kerikil, kelompok tras, kelompok tanah, kelompok kaolin, kelompok pasir kuarsa, kelompok zeolit, dan kelompok kalsedon. Permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya nilai jual bahan galian tersebut, bahkan nilainya masih berada di bawah biaya reklamasi bekas penambangan. Selain itu penambangan bahan galian golongan C sering berbenturan dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.
7. Belum tersusunnya pola atau model investasi yang sesuai karakter masyarakat di Kabupaten Gunungkidul.
8. Air sebagai hal mendasar yang sangat dibutuhkan masyarakat keberadaannya di atas permukaan tanah sangat terbatas. Ketersediaan air banyak berada di bawah permukaan tanah sedang pemanfaatannya membutuhkan dana yang sangat besar.
9. Lahan marginal dengan solum tanah tipis sebagai penghambat dalam budi daya pertanian dalam arti luas.

III.1.3.2. Capaian Keberhasilan

1. Dalam lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul cukup mantap, yaitu tahun 2013 sebesar 4,97%, tahun 2014 sebesar 4,54%, tahun 2015 sebesar 4,82%, tahun 2016 sebesar 4,89%, dan tahun 2017 sebesar 5% .
2. Keberadaan industri kecil dan industri rumah tangga memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Ketangguhan industri kecil dan rumah tangga ini dapat diandalkan, terbukti dengan adanya krisis ekonomi yang telah melanda negara kita namun masih tetap eksis bahkan semakin berkembang. Hal tersebut terutama didukung oleh pemanfaatan potensi sumberdaya lokal seperti produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, pertambangan, dan sebagainya.
Berdasarkan data tahun 2007 sebanyak 12.918 unit usaha, tahun 2008 sebanyak 19.548 unit usaha, dan mengalami peningkatan pada 2009, tercatat jumlah industri kecil menengah di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 19.771 unit

usaha dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 62.387 orang serta nilai produksi Rp. 168.964.434.494,-.

Di tahun 2016, jumlah industri kecil ada sebanyak 21.025 yang menyerap tenaga kerja sebanyak 68.268 jiwa dengan nilai produksi sebesar Rp.194.854.000.000.

Keberadaan industri kecil dan rumah tangga tersebut merata hampir di semua kecamatan, sehingga dapat mengurangi disparitas pembangunan perekonomian di Kabupaten Gunungkidul.

III.1.3.3. Proyeksi Peluang

1. Perkembangan basis-basis perekonomian di kota-kota kecamatan yang sangat pesat dan munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
2. Aglomerasi Perkotaan Wonosari (APW) menjadi pusat kegiatan ekonomi kota- kota kecamatan di sekitarnya, dan merupakan lokasi yang sangat strategis dalam kerjasama ekonomi antar daerah seperti dengan Kabupaten Bantul, Sleman, Klaten, Sukoharjo, dan Wonogiri, terlebih didukung oleh semakin meningkatnya kerjasama pembangunan antar daerah.
3. Diberlakukannya pasar bebas dapat memberikan peluang bagi perekonomian daerah untuk bersaing di pasar regional, nasional, dan internasional, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Terjalinnya kemitraan dengan pihak swasta dalam pengelolaan sumber daya hayati

III.1.3.4. Proyeksi Ancaman

1. Peran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam pembangunan perekonomian adalah mengendalikan pertumbuhan ekonomi. Masalah ini sangat bergantung bagaimana Pemerintah Kabupaten Gunungkidul merencanakan dan mengendalikan perekonomian agar tercipta keserasian antara pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas kabupaten, penumbuhan investasi melalui berbagai penganggaran, baik oleh pemerintah maupun swasta sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang dinamis.

Masalah kesenjangan sosial, kesenjangan pembangunan daerah, dan pengangguran menjadi agenda yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah.

2. Perekonomian Kabupaten Gunungkidul dapat pula mengalami ancaman terkait dengan faktor eksternal seperti persaingan perekonomian regional dan kebijakan pemerintah pusat yang kurang menguntungkan seperti kenaikan harga bahan bakar minyak, tarif dasar listrik, kenaikan suku bunga, instabilitas politik, penurunan nilai tukar, dan sebagainya.
3. Globalisasi dan pasar bebas disamping menjadi peluang jika daerah mampu meningkatkan daya saing, namun sekaligus dapat pula justru menjadi ancaman apabila daerah tidak mempunyai kesiapan menghadapinya.

Jika produk-produk lokal tidak berkualitas maka akan kalah dalam persaingan dengan produk asing, sebagai akibatnya akan menjadikan perekonomian daerah semakin terpuruk.

4. Potensi pertambangan bahan galian golongan C dengan batuan induk batu gamping yang sangat melimpah di Kabupaten Gunungkidul jika tidak dikendalikan akan mengancam pelestarian fungsi lingkungan dan pada akhirnya juga berpengaruh pada penurunan pesona pariwisata, sehingga dapat berpengaruh pada menurunnya jumlah wisatawan.
5. Potensi laut yang tidak dikelola dengan baik serta pengawasan yang lemah merupakan ancaman bagi keberlangsungan pekonomian di Kabupaten Gunungkidul.
6. Keterbatasan pengetahuan pelaku UMKM dalam bertransaksi dengan pihak asing.

III.1.3.5. Proyeksi Permasalahan

1. Sektor ekonomi masih didominasi oleh sektor informal sehingga masih menghadapi berbagai kendala teknis dalam upaya peningkatannya.
2. Persaingan ekonomi regional, nasional, dan internasional akan semakin tajam, sementara itu daya saing produk lokal masih belum memperoleh posisi tawar yang kuat.
3. Sumberdaya alam berupa berbagai ragam bahan galian golongan C akan semakin berkurang. Hal tersebut akan

menurunkan kualitas lingkungan, air, pangan, dan energi yang juga berdampak pada perekonomian daerah.

4. Manajemen UMKM yang masih bersifat konvensional merupakan hambatan yang besar untuk mengembangkan perekonomian rakyat.
5. Kurangnya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Gunungkidul
6. Kelembagaan perekonomian yang belum mantap.

III.1.3.6. Proyeksi Keberhasilan

1. Pada tahun 2025 mendatang, kabupaten memproyeksikan perbaikan kondisi perekonomian daerah, yaitu pertumbuhan ekonomi berkisar antara 4 – 7 persen per tahun secara berkesinambungan sehingga perekonomian daerah akan tumbuh lebih mantap dan dinamis.
2. Meningkatnya nilai investasi di daerah yang ditandai dengan peningkatan kapasitas produksi, banyaknya penciptaan lapangan kerja yang sekaligus mengurangi pengangguran, serta meningkatnya indeks pembangunan manusia.
3. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh yang didukung oleh keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif produk daerah.
4. Terbangunnya sistem, kelembagaan, dan infrastruktur perekonomian yang proporsional, maju, dan unggul.
5. Terwujudnya prinsip demokrasi ekonomi yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan di Kabupaten Gunungkidul yang menjamin adanya keadilan ekonomi masyarakat sehingga terjamin pula kesempatan berusaha dan bekerja.
6. Terwujudnya kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi yang handal sebagai pelaku utama ekonomi daerah yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta mempunyai daya saing tinggi dan berkualitas.
7. Terwujudnya iklim usaha yang kondusif yang mendorong berkembangnya UMKM.

III.1.3.7. Prediksi Kondisi Ekonomi dan Sumberdaya Alam

1. Pada tahun 2025 ke depan Kabupaten mampu mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang kembali berbasis pada

ekonomi kerakyatan, ditandai dengan keberpihakan pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi.

2. Terciptanya keselarasan pembangunan antara kecepatan pertumbuhan penduduk, kecepatan penambahan kapasitas wilayah, dan pertumbuhan ekonomi.
3. Terwujudnya Kabupaten Gunungkidul sebagai kabupaten yang mempunyai keunggulan di bidang lingkungan, pariwisata, dan pertanian yang sekaligus dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.
4. Terciptanya kerjasama ekonomi regional dengan kabupaten sekitarnya yang mantap dan bersinergis.
5. Terciptanya kestabilan dan kemantapan pengelolaan sumberdaya alam sehingga mampu mendukung pembangunan berkelanjutan.
6. Terciptanya UMKM berwawasan modern yang mampu bersaing di pasar global .
7. Terciptanya sektor pertanian dalam arti luas yang mampu berperan dalam perkonomian daerah melalui sumbangannya terhadap PDRB, penerimaan ekspor, penyediaan tenaga kerja, kesempatan kerja, mendukung pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penyediaan pangan daerah.

Selain sumbangan tersebut, sektor pertanian juga memiliki kontribusi dalam memperkuat keterkaitan antar industri, konsumsi dan investasi.

III.1.4. Sosial Budaya

III.1.4.1. Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana

III.1.4.1.1. Permasalahan

1. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Gunungkidul masih cukup tinggi dan sangat bervariasi yaitu mencakup 22 jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sementara jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) lebih sedikit.
2. Kesadaran dan kepedulian sosial masyarakat Gunungkidul cukup tinggi akan tetapi belum ada arah kebijakan kesejahteraan sosial yang jelas termasuk dalam pemberian bantuan sosial.
3. Jumlah rumah tangga miskin masih cukup tinggi sementara kegiatan penanggulangan kemiskinan masih lebih bersifat

upaya penyelamatan (*social safety*) seperti pemberian bantuan, sedangkan yang juga sangat penting yaitu kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin.

III.1.4.1.2.Capaian Keberhasilan

1. Usaha Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan dalam berbagai bidang. Di bidang sosial pemerintah bersama-sama dengan swasta dan organisasi sosial kemasyarakatan telah memberikan pelayanan sosial baik melalui panti-panti sosial maupun non panti serta kursus ketrampilan, khususnya bagi penduduk yang cacat dan penyandang masalah sosial lainnya.
2. Potensi sumber kesejahteraan sosial yang meliputi pekerja sosial masyarakat (PSM), karang taruna, organisasi sosial, dan satgas sosial sudah berkembang hanya saja jumlahnya masih terbatas. Sampai sekarang sudah dilaksanakan berbagai kegiatan pemberdayaan PSKS. Upaya penanggulangan kemiskinan tetap terus dilaksanakan dan secara bertahap kesejahteraan penduduk miskin semakin meningkat. Berdasarkan kriteria garis kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp 117.572,00 per kapita per bulan atau sebesar Rp 1.410.864,00 per kapita per tahun, didapat angka menurun keluarga pra sejahtera alasan ekonomi, kelompok pra sejahtera dan sejahtera I. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan walaupun dari persentase masih relatif tinggi.

III.1.4.1.3.Proyeksi Peluang

1. Kabupaten Gunungkidul dengan nilai-nilai budaya yang positif yaitu gotong royong, kerja keras, dan tidak kenal menyerah adalah modal sosial yang dalam jangka panjang merupakan peluang dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
2. Pada masa yang akan datang akan bermunculan organisasi-organisasi sosial dan organisasi berbasis masyarakat yang mendukung dan berpartisipasi dalam penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

III.1.4.1.4.Proyeksi Ancaman

1. Pada saat ini bermunculan organisasi yang mengatasnamakan organisasi sosial di luar wilayah Kabupaten Gunungkidul, namun justru sering membebani masyarakat kaitannya dengan permohonan sumbangan sosial yang tidak jelas sasarannya.
2. Budaya konsumerisme dan hedonisme ternyata berdampak buruk pada kesejahteraan sosial karena mempengaruhi perilaku masyarakat di dalam kehidupan bermasyarakat sehingga menjadi tidak produktif dan merusak mentalitas.
3. Masalah kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul masih akan menjadi ancaman yang perlu ditangani secara cermat dan serius. Meskipun jumlah kemiskinan sudah dapat ditekan, tetapi masalah kemiskinan masih menjadi perhatian penting dalam pembangunan tahun 2025 mendatang.

Masalah kemiskinan bersifat multidimensi, bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan tetapi juga kerentanan (*vulnerability*) orang untuk menjadi miskin. Selain itu, masalah kemiskinan juga menyangkut kegagalan dalam pemenuhan hak dasar dan adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

III.1.4.1.5.Proyeksi Permasalahan

1. Permasalahan sosial akan semakin kompleks seiring dengan perkembangan sosial masyarakat dan juga kondisi sumber daya alam yang tidak lestari serta berbagai ancaman (*hazards*) seperti bencana alam dan bencana sosial.
2. Potensi konflik sosial selalu akan ada apabila hasil-hasil pembangunan tidak dapat dinikmati secara adil dan merata.
3. Berkaitan dengan penduduk, masalah yang akan dihadapi oleh Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 ke depan adalah struktur penduduk yang semakin menua (*aging society*), disebabkan oleh usia harapan hidup semakin tinggi, sementara pertumbuhan penduduk semakin rendah.

III.1.4.1.6.Proyeksi Keberhasilan

1. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam menanggulangi bencana.

2. Menurunnya jumlah dan jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Gunungkidul.
3. Pembangunan kesejahteraan sosial akan berhasil sepanjang mendapatkan dukungan dari lintas sektor baik dari unsur pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat serta adanya strategi kebijakan yang terarah dalam jangka panjang di antaranya melalui peningkatan kapasitas penduduk usia produktif dan kebijakan asuransi untuk penduduk usia lanjut.

III.1.4.1.7. Prediksi Kondisi Kesejahteraan Sosial

1. Pada tahun 2025 mendatang diharapkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat semakin meningkat. Hal tersebut ditandai dengan menurunnya jumlah PMKS secara drastis.
2. Upaya pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dapat memberikan dampak positif terhadap kelompok masyarakat yang kurang mampu, hal tersebut mengarah terbentuknya *welfare society*.
3. Solidaritas dan relasi sosial masyarakat Gunungkidul semakin menguat merupakan modal sosial dalam memperkuat sistem kesejahteraan sosial di Kabupaten Gunungkidul.
4. Masyarakat Gunungkidul semakin tanggap, tahan, dan tangguh dalam menghadapi ancaman bencana.
5. Tercapainya *window of opportunity* dimana struktur penduduk usia produktif dapat berperan dalam pembangunan ekonomi sementara jumlah penduduk balita dan usia tua dapat terkendali.

III.1.4.2. Kesehatan

III.1.4.2.1. Permasalahan

1. Masalah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu tahun 2025 ke depan terkait dengan kesehatan adalah terjadinya *aging population* yang disebabkan usia harapan hidup semakin tinggi, sementara pertumbuhan penduduk rendah.
2. Perilaku kesehatan yang mempengaruhi derajat kesehatan belum menunjukkan hasil yang optimal. Sebagai contoh masyarakat masih banyak yang membuang sampah

sembarangan, belum optimalnya budaya bersih dan sehat, dan masih rendahnya angka bebas jentik dan perilaku merokok.

3. Belum membudayanya pengetahuan remaja dan perempuan tentang kesehatan reproduksi berpotensi menyebabkan semakin meningkatnya penderita penyakit kanker rahim serta penyakit reproduksi lainnya.
4. Masih tingginya angka kesakitan penduduk yaitu untuk semua umur.
5. Masih adanya gizi buruk pada balita, sehingga apabila tidak diantisipasi sejak dini akan mengakibatkan semakin tingginya gizi buruk pada balita dan menurunnya kualitas hidup generasi mendatang.
6. Semakin banyaknya lansia yang menderita penyakit degeneratif dikarenakan pola hidup yang tidak sehat sejak awal.
7. Keluarga miskin belum mampu mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan secara gratis.

III.1.4.2.2.Capaian Keberhasilan

1. Indikator kesehatan yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2017 berupa peningkatan derajat kesehatan meliputi: Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 7 per 1.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 65 per 100.000 kelahiran hidup (2016), Umur Harapan Hidup (UHH) sebesar 73,82 tahun, status gizi buruk di Kabupaten Gunungkidul sebesar 0,58 % (2016) .
2. Meningkatnya mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut. Jumlah tenaga medis tahun 2007 sebanyak 101 orang, paramedis sebanyak 500 orang, paramedis non keperawatan sebanyak 174 orang, dan tenaga kesehatan masyarakat sebanyak 38 orang.
Di tahun 2017, jumlah tenaga kesehatan adalah sebagai berikut: Dokter Umum sebanyak 90 orang, Dokter Gigi sebanyak 34 orang, Perawat sebanyak 487 orang, Bidan

sebanyak 238 orang, Ahli Penyehatan Lingkungan sebanyak 24 orang, Sarjana Farmasi sebanyak 13 orang, Ahli Gizi sebanyak 26 orang, Analis Laboratorium sebanyak 31 orang, Ahli Rontgen sebanyak 1 orang, Asisten Apoteker sebanyak 29 orang, Sanitarian sebanyak 26 orang, dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat sebanyak 6 orang.

3. Sarana dan prasarana kesehatan sudah mengalami peningkatan baik jumlah maupun kualitasnya. Namun demikian dari sisi kualitas masih perlu ditingkatkan lagi. Jumlah RSUD sebanyak 1 buah, RS Swasta sebanyak 2 buah, Balai Pengobatan 46 buah, rumah bersalin 3 buah dan Puskesmas 29 buah.
4. Sarana upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) merupakan komponen yang diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan menuju derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Jumlah pos usaha kesehatan kerja sebanyak 37 buah, posyandu sebanyak 1.457 buah, poskestren sebanyak 9 buah, polindes sebanyak 31 buah, desa siaga sebanyak 76 desa, batra sebanyak 1.339 buah, kader kesehatan 7.992 orang.

Di tahun 2017, jumlah unit sarana kesehatan adalah sebagai berikut: Posyandu sebanyak 1.466, PosKesDes sebanyak 21, Puskesmas sebanyak 170, Rumah Sakit Umum Pemerintah sebanyak 2, Rumah Sakit Umum Swasta sebanyak 9, Klinik/Praktek Dokter sebanyak 187, dan Apotek sebanyak 42.

III.1.4.2.3. Proyeksi Peluang

1. Semakin terbukanya lembaga pelayanan kesehatan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga pelayanan kesehatan swasta, semakin membuka akses dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
2. Banyaknya lembaga-lembaga sosial dan swasta yang peduli terhadap upaya kesehatan masyarakat sangat membantu dalam pembiayaan pembangunan kesehatan.
3. Semakin terbukanya sistem pelayanan kesehatan yang paripurna dengan pendekatan asuransi kesehatan.

4. Adanya Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang tentang Praktek Kedokteran akan mendorong profesionalisme tenaga kesehatan.

III.1.4.2.4.Proyeksi Ancaman

1. Globalisasi juga berdampak pada bidang kesehatan menyangkut besaran, variasi, dan jumlah penyakit termasuk penyakit menular seksual seperti HIV AIDS, Avian Influenza, dan sebagainya.
2. Liberalisasi ekonomi dunia berdampak pada naiknya biaya kesehatan antara lain pada peralatan, alat medis, alat kedokteran, dan obat-obatan sehingga mempengaruhi pembiayaan kesehatan daerah dan sistem pelayanan kesehatan kepada keluarga miskin.
3. Ancaman masuknya tenaga kesehatan dari luar negeri menuntut kesiapan dan peningkatan daya saing tenaga kesehatan dari dalam negeri.
4. Ancaman masuknya investasi lembaga pelayanan kesehatan dari luar negeri menuntut kesiapan dan peningkatan daya saing lembaga pelayanan kesehatan dari dalam negeri.

III.1.4.2.5.Proyeksi Permasalahan

1. Permasalahan kesehatan akan semakin kompleks seiring dengan perkembangan masyarakat dan juga kondisi sumberdaya alam yang semakin rusak, sehingga permasalahan kesehatan akan berkaitan dengan banyak faktor ditinjau karena sebabnya.

Masalah kesehatan tersebut meliputi: masalah kesehatan karena kemiskinan dan lingkungan, masalah kesehatan yang berkaitan dengan industrialisasi termasuk pariwisata, makanan, dan perilaku, masalah kesehatan yang berkaitan dengan keadaan psikososial keluarga dan individu, dan masalah kesehatan yang berkaitan dengan terjadinya krisis karena bencana alam tanah longsor, tsunami, gempa bumi dan lain-lain.

2. Kecenderungan penyakit degeneratif karena semakin tingginya usia harapan hidup dan perilaku hidup yang tidak bersih dan sehat sejak awal.

III.1.4.2.6. Proyeksi Keberhasilan

1. Meningkatnya proporsi masyarakat yang mempunyai derajat kesehatan tinggi yang ditandai dengan menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan serta membaiknya status gizi masyarakat, serta terciptanya ketangguhan, ketahanan, dan ketanggapan masyarakat terhadap masalah-masalah kesehatan.
2. Tercapainya usia harapan hidup di atas 75 tahun dengan derajat kesehatan yang tinggi baik pada penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan.

III.1.4.2.7. Prediksi Kondisi Kesehatan

1. Struktur penduduk yang semakin menua (*aging population*). Hal ini terlihat dari semakin kecilnya jumlah kelahiran dan meningkatnya angka usia harapan hidup masyarakat.
2. Indeks pembangunan manusia Kabupaten Gunungkidul semakin meningkat yang ditopang oleh keberhasilan di bidang kesehatan ini.
3. Pelayanan kesehatan semakin berkualitas.
4. Adanya jaminan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin secara gratis yang berkualitas dan berkelanjutan.

III.1.4.3. Pendidikan

III.1.4.3.1. Permasalahan

1. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sehingga dalam pasar tenaga kerja banyak terserap pada sektor informal (*unskilled labour*). Hal ini ditunjukkan pada komposisi tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Gunungkidul tahun 2017 hampir 28% tamat SD dan yang tamat SMP sebanyak 18,72% .
Pada tahun 2017, rata-rata lama sekolah penduduk Gunungkidul mencapai 6,99 tahun. Rata-rata lamanya penduduk berusia 15 tahun ke atas ini setara dengan kelas tujuh SLTP. Perkembangan angka rata-rata lama sekolah menunjukkan perkembangan yang cukup lambat.
2. Masih tingginya angka putus sekolah pada semua jenjang pendidikan yang disebabkan oleh biaya pendidikan yang dirasakan masyarakat masih terlalu mahal disamping motivasi masyarakat terhadap dunia kerja lebih besar dari pada harus

menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang yang lebih tinggi.

3. Belum terpenuhinya kualifikasi tenaga pendidik secara keseluruhan, khususnya jenjang pendidikan dasar sehingga kualitas hasil pendidikan belum optimal.
4. Dalam upaya pengentasan Wajib Belajar 12 tahun perlu dipertimbangkan perluasan pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu hasil pendidikan sehingga perlu diperhatikan persebaran jenjang pendidikan sekolah menengah baik negeri maupun swasta pada wilayah kecamatan serta peningkatan mutu kualifikasi tenaga kependidikannya.

Namun perlu dipahami bahwa ke depan, animo masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya pada jenjang sekolah menengah lebih mengarah kepada sekolah kejuruan (SMK) karena lulusan pendidikan sekolah kejuruan lebih siap bekerja bila dibandingkan dengan lulusan pendidikan sekolah umum (SMA), sehingga hal ini perlu menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan program pendidikan menengah.

III.1.4.3.2. Capaian Keberhasilan

1. Jumlah penduduk yang melek huruf terus mengalami peningkatan sejalan dengan upaya pemerintah bekerja sama dengan masyarakat untuk terus melaksanakan pemberantasan buta huruf. Karena pada dasarnya pintu gerbang transfer ilmu pengetahuan berawal dari kemampuan membaca warga masyarakat.
2. Secara bertahap Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk memperoleh pendidikan selalu mengalami peningkatan seiring dengan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan sebagai suatu kebutuhan.
3. Meningkatnya mutu layanan pendidikan baik pada tingkat pendidikan dasar maupun menengah terutama dalam kaitannya dengan ketersediaan kelas sebagai sarana pendidikan dan jumlah guru yang semakin mendukung terwujudnya proses belajar-mengajar yang efektif.

4. Meningkatnya kesadaran dan kemauan untuk terus melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi guna semakin meningkatkan keterampilan pendidikan warga masyarakat sebagaimana ditunjukkan adanya perkembangan rata-rata lama sekolah.

III.1.4.3.3.Proyeksi Peluang

1. Jumlah penduduk usia sekolah cukup tinggi, hal ini perlu perhatian agar potensi SDM masyarakat dapat ditingkatkan melalui dunia pendidikan dengan mendorong semua penduduk usia sekolah dapat tertampung pendidikannya.
2. Potensi sumber daya alam Kabupaten Gunungkidul cukup besar untuk dapat diolah menjadi bahan-bahan produksi. Dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut perlu dipersiapkan sumberdaya manusianya melalui dunia pendidikan antara lain dengan meningkatkan kompetensi siswa pada jenjang pendidikan menengah.
3. Kecukupan ruang kelas dibanding dengan jumlah siswa di Kabupaten Gunungkidul sudah cukup memadai sehingga tidak ada kendala. Semua anak usia sekolah harus mengikuti pendidikan baik melalui pendidikan formal maupun informal.

III.1.4.3.4.Proyeksi Ancaman

1. Semakin menyempitnya lapangan kerja sedangkan hasil pendidikan akan menjadi input dunia kerja. Menyikapi hal ini maka kurikulum pendidikan khususnya pendidikan menengah agar lebih menekankan pada kompetensi siswa, sehingga bagi siswa yang tidak dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan bekal pendidikan menengah diharapkan dapat menciptakan dunia kerja secara mandiri.
2. Jumlah sekolah di Kabupaten Gunungkidul cukup banyak sehingga untuk biaya perawatan sarana prasarana pendidikan cukup tinggi, hal ini perlu adanya keterlibatan semua pihak baik pemerintah, masyarakat, swasta/dunia usaha untuk dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.

III.1.4.3.5. Proyeksi Permasalahan

1. Angka melanjutkan sekolah khususnya ke jenjang Perguruan Tinggi sangat kecil, sehingga jumlah lulusan sekolah menengah setiap tahun akan menambah jumlah angka pengangguran karena tidak dapat tertampung pada dunia kerja.
2. Semakin menurunnya jumlah siswa pada jenjang pendidikan dasar (SD) sebagai dampak keberhasilan program Keluarga Berencana mengakibatkan kurang efisien apabila sekolah-sekolah yang jumlah siswanya sedikit tidak digabung (*regrouping*).

III.1.4.3.6. Proyeksi Keberhasilan

1. Menurunnya angka putus sekolah pada semua jenjang pendidikan.
2. Terpenuhinya kualifikasi tenaga pendidik/guru pada semua jenjang pendidikan sehingga tidak ada guru yang tidak layak/kurang layak mengajar.
3. Meningkatnya jumlah sekolah kejuruan menengah sebagai sarana pengembangan kompetensi/ketrampilan lulusan sekolah sehingga siap memasuki dunia kerja.
4. Meningkatnya jumlah lembaga PAUD yang dikembangkan oleh masyarakat sebagai sarana mempersiapkan anak memasuki dunia pendidikan formal.
5. Meningkatnya proporsi masyarakat yang berpendidikan menengah dan tinggi.

III.1.4.3.7. Prediksi Kondisi Pendidikan

1. Peningkatan kualitas hasil pendidikan dasar serta pementasan Wajar 9 tahun menuju Wajar 12 tahun.
2. Peningkatan angka partisipasi sekolah pada semua jenjang dan jalur pendidikan sehingga kualitas SDM masyarakat meningkat.
3. Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan untuk meningkatkan kualitas hasil pendidikan.
4. Peningkatan kompetensi lulusan sekolah menengah sehingga mampu bersaing dalam pasar tenaga kerja.

5. Peningkatan sarana prasarana pendidikan pada semua jenjang dan jalur pendidikan untuk mendukung peningkatan kualitas hasil pendidikan.
6. Pengembangan pendidikan pra sekolah baik formal maupun non formal (TK dan PAUD) sebagai wahana pengembangan sikap, daya cipta, dan pengetahuan anak dalam mempersiapkan diri memasuki jenjang pendidikan lanjutan.
7. Peningkatan efisiensi pendidikan melalui *School Based Management* serta peningkatan kompetensi dan relevansi pendidikan dengan masuknya muatan lokal dalam kurikulum pendidikan pada semua jenjang pendidikan.

III.1.5. Budaya dan Politik

III.1.5.1. Permasalahan

1. Masalah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu tahun 2025 ke depan terkait dengan kebudayaan adalah degradasi nilai-nilai moral, sosial, dan budaya terus terjadi di masyarakat. Semakin mudarnya budaya Jawa yang memiliki nilai adiluhung terutama di kalangan generasi muda merupakan masalah yang merisaukan sejak beberapa tahun terakhir. Masuknya budaya asing akibat globalisasi, terutama budaya asing yang tidak sejalan dengan nilai budaya sendiri, tidak sepenuhnya dapat dicegah dan dikendalikan.
2. Apresiasi masyarakat yang kurang besar dan cenderung menurun terhadap produk-produk budaya tradisional tertentu, seperti wayang kulit, ketoprak, jathilan, reyog, dan sebagainya. Masyarakat sendiri cenderung lebih memilih budaya modern yang instant.
3. Minat kunjungan wisatawan yang sangat dipengaruhi kondisi geografis wilayah yang rawan terhadap bencana.
4. Kesadaran masyarakat Gunungkidul yang mengedepankan koridor hukum dalam setiap gerak kehidupannya dan budaya patuh serta taat hukum masih belum tinggi termasuk dalam hal penegakan peraturan perundang-undangan. Meski angka kriminalitas dan pelanggaran hukum di Kabupaten Gunungkidul relatif rendah bukan berarti tidak ada kasus-kasus kriminal yang berpotensi berpengaruh negatif terhadap pembangunan ke depan. Perkembangan saat ini menunjukkan

gejala yang semakin mengawatirkan karena jumlah jenis gangguan keamanan di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 29 jenis gangguan.

5. Permasalahan penurunan moral, meningkatnya kriminalitas, semakin tidak diamalkannya norma-norma religius, perubahan budaya yang cenderung negatif, berkembangnya budaya kekerasan dan semakin tingginya persaingan yang cenderung tidak sehat dalam jangka panjang perlu diantisipasi dengan cermat. Salah satu ancaman yang perlu mendapat perhatian yang lebih serius adalah berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dan napza.
6. Upaya membangun kualitas beragama dan spiritualitas masyarakat belum seluruhnya berhasil dengan baik. Ajaran-ajaran agama mengenai etos kerja, disiplin, penghargaan pada prestasi dan dorongan mencapai kemajuan belum bisa diwujudkan sebagai inspirasi yang mampu menggerakkan masyarakat untuk membangun. Demikian pula ajaran dan nilai agama belum sepenuhnya dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
7. Filosofi masyarakat Gunungkidul yaitu Dhaksinarga Bumikarta belum tertanam di jajaran aparatur daerah dan masyarakat, bahkan ada kecenderungan masyarakat bersikap apatis atau acuh tak acuh.

III.1.5.2. Capaian Keberhasilan

1. Pariwisata di Kabupaten Gunungkidul yang mengandalkan potensi wisata budaya dan wisata pantai telah menghasilkan multiplier effect yang sangat besar di masyarakat dalam menggerakkan sektor-sektor lainnya seperti industri kecil. Bidang pariwisata juga telah menyumbangkan pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup besar bagi Kabupaten Gunungkidul.
2. Peningkatan pelestarian nilai-nilai budaya Jawa dalam bentuk kesenian dan kebudayaan adat tradisional yang ada di masyarakat.
3. Kelompok-kelompok kesenian seperti paguyuban seni budaya sudah banyak berkembang di masyarakat dan mampu berkiprah secara nasional dan internasional.

4. Angka kriminalitas dan pelanggaran hukum di Kabupaten Gunungkidul masih cukup rendah dibandingkan dengan Kabupaten lainnya.
5. Pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan ditunjukkan dengan semakin semaraknya kegiatan keagamaan baik yang dilaksanakan di tempat-tempat ibadah maupun di masyarakat dalam bentuk praktek-praktek kehidupan sosial kemasayarakatan yang sesuai dengan nilai-nilai dan moral agama.
6. Stabilitas politik dan pemerintahan daerah yang mantap berkat keterpaduan semua komponen dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

III.1.5.3. Proyeksi Peluang

1. Kabupaten Gunungkidul diharapkan dapat mendukung pengembangan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan dan predikat lainnya yang dapat dikembangkan lebih lanjut dan dapat dijadikan peluang untuk dimanfaatkan dalam proses pembangunan ke depan.
2. Masyarakat Gunungkidul merupakan masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan religius yang dilandasi juga oleh sikap yang toleran antar umat beragama.
3. Posisi Kabupaten Gunungkidul dalam konteks regional sangat potensial untuk pengembangan pariwisata dan budaya dengan dibukanya jalur akses jalan lintas selatan dan pembukaan koridor dari berbagai arah.

III.1.5.4. Proyeksi Ancaman

1. Dalam kurun waktu tahun 2025 ke depan terdapat ancaman berupa perubahan perilaku yang semakin permisif dan perubahan budaya yang semakin meninggalkan nilai-nilai luhur budaya Jawa. Perilaku kita yang ramah, sederhana, berdimensi kerakyatan jika tidak dilestarikan dengan baik akan mengalami degradasi nilai-nilai kebudayaan.
2. Identitas berupa kebanggaan yang melekat pada masyarakat Yogyakarta dapat semakin berkurang dan bahkan mungkin akan hilang.

3. Masuknya arus globalisasi yang membawa arus informasi, modal, tenaga kerja dapat saja mengancam eksistensi budaya lokal.
4. Ketidakstabilan politik nasional yang mungkin terjadi dalam kurun waktu tahun 2025 yang akan datang dapat mengancam instabilitas politik di daerah.

III.1.5.5. Proyeksi Permasalahan

1. Rendahnya dukungan dan semangat masyarakat untuk menjaga, mempertahankan, dan mengembangkan tradisi dan budaya lokal masih akan menjadi masalah yang akan dihadapi oleh Kabupaten Gunungkidul.
2. Masalah degradasi dan dekadensi moral di kalangan masyarakat masih akan menjadi masalah yang akan dihadapi Kabupaten Gunungkidul.
3. Dampak politik yang dirasakan di daerah akibat instabilitas politik nasional apabila tidak segera disiapkan pendidikan politik bagi masyarakat yang matang.

III.1.5.6. Proyeksi Keberhasilan

1. Terwujudnya kultur masyarakat sipil di Kabupaten Gunungkidul, yaitu masyarakat Gunungkidul yang mengedepankan penegakan dan penghormatan hukum legal dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, menjunjung tinggi nilai moral etika, dan toleransi dalam aspek kehidupan bermasyarakat.
2. Terwujudnya stabilitas politik dan pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul yang didukung dengan ketatapemerintahan yang baik.
3. Terciptanya budaya politik masyarakat yang baik yang dititikberatkan pada penanaman nilai-nilai demokratis yang ditandai oleh : (a) terwujudnya kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi melalui berbagai wacana dan media; (b) terwujudnya berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Terwujudnya profesionalisme aparat penegak hukum dalam mendeteksi, melindungi, dan melakukan tindakan pencegahan berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berpengaruh terhadap kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat. Terpeliharanya nilai-nilai budaya Jawa yang luhur di Kabupaten Gunungkidul. Terbentuknya budaya inovatif yang berorientasi iptek dengan tetap memelihara dan mengembangkan budaya lokal. Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata baik domestik maupun mancanegara.

III.1.5.7. Prediksi Kondisi Budaya dan Politik

1. Terjadi pergeseran nilai-nilai sosial, budaya, dan politik seiring dengan arus modernisasi dan globalisasi.
2. Akan terjadi revitalisasi dan modernisasi kebudayaan daerah Jawa.
3. Terwujudnya kultur masyarakat sipil di Kabupaten Gunungkidul yaitu masyarakat Gunungkidul yang mengedepankan penegakan dan penghormatan hukum legal dalam setiap aspek kehidupannya, menjunjung tinggi nilai moral etika dan toleransi dalam aspek kehidupan bermasyarakat.
4. Terjadi orientasi pariwisata di masyarakat, pariwisata minat khusus akan menjadi pilihan wisata yang semakin dicari.
5. Dinamika demokrasi politik lokal akan terus berkembang di Kabupaten Gunungkidul, terutama menyangkut peran masyarakat sipil yang semakin strategis.
6. Dampak kriminalitas dan kejahatan dari daerah sekitar akan mengimbas ke Kabupaten Gunungkidul.

III.1.6. Prasarana dan Sarana Daerah

III.1.6.1. Permasalahan

1. Ketersediaan prasarana transportasi jalan dengan kondisi baik dan mantap relatif sangat sedikit dibanding luas wilayah Kabupaten Gunungkidul, dengan panjang jalan yang ada, baik jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten maupun jalan desa/lingkungan.

Panjang jalan saat ini berdasarkan statusnya terdiri dari :

- | | | |
|----------------------------|---|-----------|
| a. Jalan Nasional, panjang | = | 56,11 km |
| b. Jalan Provinsi, panjang | = | 253,33 km |

- c. Jalan Kabupaten, panjang = 686,00 km
d. Jalan Desa/Lingkungan, panjang = 4.735,12 km

Di tahun 2017, rincian panjang jalan di Kabupaten Gunungkidul menurut kewenangannya adalah jalan negara 61,08 km, jalan provinsi sepanjang 212,39 km, jalan kabupaten 1.136,66 km.

Jaringan jalan kabupaten tahun 2017 di Kabupaten Gunungkidul sudah mampu menjangkau seluruh wilayah, hanya saja tidak semua ruas jalan dalam kondisi baik. Bila terjadi cuaca ekstrim hujan terus menerus juga mempercepat proses kerusakan jalan tersebut. Panjang ruas jalan sekitar 1.136,66 km, dengan kondisi baik sekitar 726,21 km atau 63,9%, kondisi rusak ringan sepanjang 137,96 km atau sekitar 12,14%, dan kondisi rusak berat sepanjang 272,49 km atau sekitar 23,98%.

2. Kondisi topografi wilayah Kabupaten Gunungkidul yang berbukit-bukit merupakan faktor penyebab dan sulitnya dalam pengembangan jaringan jalan di seluruh pelosok pedesaan dan di perbatasan. Selain itu tradisi hidup berkelompok pada permukiman penduduk yang saling berjauhan menimbulkan biaya yang cukup besar untuk penyediaan prasarana jalan yang memadai.
3. Kualitas sarana angkutan AKDP, Angkudes dan Angkutan Kota sangat rendah. Hal ini dipicu dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan mengakibatkan kurang terpeliharanya sarana angkutan dengan baik karena mahalnya harga suku cadang, bahan bakar minyak dan tingginya biaya operasional kendaraan, sehingga dengan kondisi sarana angkutan yang kurang terawat atau sudah tua dan kondisi geometrik jalan akan berdampak pada keselamatan penumpang. Sarana angkutan lain yang tidak terdaftar dalam kategori angkutan umum adalah kendaraan pribadi, seperti station plat hitam, pick up dan ojek yang digunakan melayani angkutan penumpang. Hal ini banyak terjadi di ruas jalan tertentu yang belum atau sudah ada pelayanan angkutan umum. Kondisi ini sering berdampak menimbulkan keributan dikalangan pengemudi yang berizin trayek dan tidak berizin, begitu juga dengan penegak disiplin peraturan lalu lintas.
4. Rendahnya kualitas layanan transportasi publik.

5. Makin turunnya ketersediaan air baku sehingga wilayah kekeringan makin meluas.
6. Jangkauan pelayanan air bersih perdesaan, sistem perpipaan PDAM dan swadaya mandiri yang masih terbatas.
7. Prasarana irigasi di Kabupaten Gunungkidul diharapkan dapat menunjang peningkatan produksi pertanian, mendukung program ketahanan pangan serta peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan petani. Sistem irigasi digunakan sistem irigasi air permukaan tanah dan irigasi dari sumur pompa (sumur bor). Areal pertanian yang berupa sawah/lahan kering yang menggunakan jaringan air irigasi sebesar 5,3% dari luas wilayah Kabupaten Gunungkidul.
Permasalahan dan kendala dalam upaya pengembangan prasarana dan sarana irigasi di Kabupaten Gunungkidul antara lain :
 - a. Kondisi geografis yang sebagian besar berupa perbukitan kapur (*karst*).
 - b. Keterbatasan ketersediaan sumber air permukaan serta jenis tanah yang mempunyai porositas tinggi sehingga tidak dapat menyimpan air terlalu lama (*high porous*).
 - c. Perubahan perilaku dan tatanan kehidupan masyarakat pada era globalisasi.
 - d. Banyaknya kerusakan lahan dan degradasi kualitas lingkungan hidup sehingga pada musim kemarau debit air irigasi kurang.
 - e. Adanya biaya operasional yang tinggi untuk irigasi sumur pompa.
 - f. Adanya kebijakan pengelolaan irigasi partisipatif, sehingga diperlukan sumber dana yang cukup besar untuk pemberdayaan petani dalam pengembangan sistem irigasi dengan sistem air permukaan atau sumur pompa.
8. Prasarana telekomunikasi dalam rangka penyebaran informasi dan komunikasi dari pusat pemerintahan ke wilayah kecamatan dan desa saat ini menggunakan telepon kabel hanya menjangkau 6 kecamatan, selebihnya menggunakan telekomunikasi sistem *repeater* (sandi dan telekomunikasi) untuk menjangkau 5 wilayah kecamatan baru. Kebutuhan sarana telekomunikasi bagi masyarakat dengan dikembangkannya teknologi informasi telepon seluler

(nirkabel) maka sebagian besar wilayah kecamatan sudah terjangkau sarana telekomunikasi tersebut, kecuali di kawasan tertentu (zone selatan) masih belum ada jaringan layanan telepon seluler, mengingat medannya yang sulit dan jarang permukiman penduduk.

Pada tahun 2017, data dari Kantor Cabang Pelayanan PT Telkom Gunungkidul mencatat bahwa sentral telepon yang tersedia sebanyak 5.179 SST sementara sentral telepon yang terpasang sebanyak 2.448 SST.

9. Fasilitas jaringan listrik di Kabupaten Gunungkidul pengelolaannya ditangani oleh PT PLN Persero. Dari data yang tercatat saat ini masih ada beberapa dusun yang belum terjangkau aliran listrik khususnya di daerah perbatasan atau di wilayah dengan topografi perbukitan.
10. Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah terluas di Provinsi DIY dengan luas wilayah 1.481,56 km² atau 46,50% dari wilayah Provinsi DIY, dengan kepadatan penduduk yang relatif rendah dan permukiman yang menyebar sehingga pengembangan sarana dan prasarana permukiman menjadi sangat mahal dan cenderung tidak efisien.
11. Masih rendahnya kualitas prasarana dan sarana umum, baik fasilitas pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pasar, transportasi maupun perumahan/permukiman.

III.1.6.2. Capaian Keberhasilan

1. Kebutuhan akses transportasi jalan ke semua wilayah kecamatan sudah terbuka/terhubung, sehingga distribusi barang dan jasa serta koordinasi bidang pemerintahan cukup baik, begitu juga akses ke semua wilayah perdesaan atau kawasan perbatasan dan wilayah terisolir sudah bisa terjangkau oleh sarana angkutan meskipun dari sisi kualitas dan kuantitas prasarana jalan masih belum memadai.
2. Akses jalan nasional yang makin handal sehingga mampu mendukung aksesibilitas regional dengan normalisasi geometrik sesuai dengan standar minimal dan tersedianya simpul tujuan akhir transportasi berupa Terminal Tipe A yang representatif.
3. Kebutuhan air bersih di wilayah perkotaan Wonosari dan sekitarnya relatif cukup baik yang disediakan dari PDAM dan

dari sumber air sumur gali, sedang kebutuhan air baku di sebagian wilayah zone selatan hanya mengandalkan air baku tadah hujan atau air dari bak penampungan atau telaga, dan sebagian dari distribusi jaringan air sungai bawah tanah. Kebutuhan akan air bersih di wilayah zone selatan pada musim kemarau mengandalkandari air kiriman (tangki) yang diambil dari sumber-sumber mata air (sumur bor) di wilayah zone tengah.

4. Penyediaan prasarana irigasi untuk memenuhi kebutuhan air oncoran di areal persawahan dan tegalan terus meningkat selain mempertahankan kondisi jaringan irigasi yang telah ada dengan selalu memelihara dan merehabilitasi kerusakan bangunan struktur yang ada.
5. Rasio kebutuhan listrik rumah tangga cukup baik. Sebagian besar masyarakat Gunungkidul sudah memanfaatkan sumber energi listrik untuk berbagai kebutuhan rumah tangganya termasuk untuk penerangan rumah tangga. Jumlah pelanggan listrik dari tahun ke tahun terus meningkat.
6. Fasilitas telekomunikasi di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seluler (nirkabel) pada wilayah terisolir sudah dirintis oleh pihak swasta untuk mengakses kebutuhan teknologi informasi telekomunikasi seluler untuk memenuhi permintaan masyarakat di wilayah tersebut.
7. Tersedianya pasar Kota Wonosari yang representatif dan dapat memberi layanan tingkat kabupaten.

III.1.6.3. Proyeksi Peluang

1. Sebagai daerah yang mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah baik hasil tambang, pertanian maupun hasil perikanan kelautan perlu dioptimalkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat dengan membuka akses prasarana transportasi yang baik dan lancar sehingga dapat menarik investor masuk wilayah Kabupaten Gunungkidul.
2. Tingginya mobilitas masyarakat membuka peluang pengembangan sarana prasarana transportasi.
3. Dengan luas wilayah yang dimiliki sekitar 46,63% dari wilayah Provinsi DIY dan pantai yang terbentang sepanjang + 70 km

memberikan keleluasan bagi daerah untuk mengembangkan berbagai usaha di bidang ekonomi, perikanan, perdagangan dan pariwisata.

4. Ketersediaan sumber air bersih bawah tanah atau sungai bawah tanah yang sangat besar memberikan peluang untuk memenuhi kebutuhan air bersih di seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul, termasuk yang sering mengalami bencana kekeringan.
5. Tumbuhnya industri pertanian membuka peluang usaha dan akan mempengaruhi tambahan kebutuhan infrastruktur.
6. Program JJLS akan memicu perkembangan Kabupaten Gunungkidul bagian selatan sehingga mengurangi keterisolasian.

III.1.6.4. Proyeksi Ancaman

1. Kondisi geografis dan topografis wilayah Kabupaten Gunungkidul mengakibatkan biaya yang besar untuk membuka akses transportasi jalan yang representatif dan memenuhi standart minimal geometrik jalan raya.
2. Rasio panjang jalan dan luas wilayah yang sangat kecil yaitu 0,8 km/km² mengakibatkan biaya operasional dan pemeliharaan sarana angkutan menjadi mahal, karena angkutan antar wilayah perkotaan/perdesaan menjadi relatif jauh.
3. Makin banyaknya pengguna kendaraan pribadi dan menurunnya kualitas jasa layanan transportasi. Jika sistem transportasi tidak ditata akan terjadi kesemrawutan lalu lintas.
4. Makin menurunnya debit air di berbagai sumber air dapat mengakibatkan tersendatnya pasokan air bersih terutama ke rumah tangga.
5. Tersedianya sumber air bersih yang besar tetapi letak dan lokasinya jauh dan sulit untuk dieksploitasi secara manual sehingga menjadikan biaya produksi air bersih menjadi mahal, bagi konsumsi di masyarakat.
6. Tumbuhnya industri kecil pada area perumahan mengakibatkan perlunya penanganan limbah yang terpadu sehingga dapat dihindari kawasan permukiman kumuh.

7. Makin terbatasnya area tempat pembuangan akhir (sampah) di kota Wonosari mengakibatkan penumpukan sampah selanjutnya menurunkan higienitas lingkungan.

III.1.6.5. Proyeksi Permasalahan

1. Ketinggian posisi wilayah Kabupaten Gunungkidul dibanding Kabupaten lain di perbatasan sehingga terjadi kemiringan lahan yang sangat curam, hal ini mengakibatkan kesulitan dalam membuat prasarana transportasi jalan yang landai/datar, untuk mencapai landai maksimum diperlukan prasarana jalan layang/terowongan yang memerlukan biaya yang sangat besar.
2. Belum tersedianya sarana transportasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan angkutan perdesaan antar kota/kabupaten dengan jangkauan wilayah yang luas dan kondisi medan yang berbukit-bukit.
3. Kurang layaknya sarana transportasi massal sehingga menyebabkan tingginya penggunaan mobil pribadi dan sepeda motor yang berpotensi pada kemacetan dan kurang prospeknya transportasi massal.
4. Kurangnya kemampuan menyediakan sarana dan peralatan yang cukup praktis untuk mengeksplorasi sumber air, sungai bawah tanah/air bawah tanah dengan sumur bor atau genset untuk kebutuhan air bersih masyarakat.
5. Kurang optimalnya pengelolaan sumberdaya alam baik tambang, pertanian, tanaman pangan, perkebunan maupun hasil perikanan dan kelautan.
6. Makin mahalnya biaya produksi air minum tidak diikuti dengan penyesuaian tarif akan membatasi pengembangan jaringan dan kualitas layanan prasarana air bersih.
7. Masalah perencanaan ruang baik ruang kota dan ruang wilayah yang belum menjadi acuan pokok pengembangan sarana dan prasarana menyebabkan ketidakefisienan pengembangan sarana dan prasarana.

III.1.6.6. Proyeksi Keberhasilan

1. Tersedianya prasarana transportasi jalan yang representatif dan memadai yang menghubungkan pusat ibukota propinsi dengan ibukota kabupaten maupun antar kabupaten/propinsi

di wilayah perbatasan, dan terbukanya akses jalan dari ibukota kabupaten ke semua wilayah kecamatan di Kabupaten Gunungkidul.

2. Terealisasinya program jaringan jalan lintas selatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul, yang diikuti peningkatan jalan lokal yang berfungsi sebagai feeder jalan sehingga dapat menunjang pengembangan perekonomian dan perdagangan di semua wilayah perdesaan/desa tertinggal di Kabupaten Gunungkidul.
3. Terpenuhinya sarana angkutan di semua jalur yang menghubungkan akses ke luar daerah dan ke pelosok wilayah perdesaan dan di perbatasan.
4. Terus tumbuhnya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi antar moda, termasuk tersedianya titik simpul transportasi berupa terminal yang representatif.
5. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dengan biaya terjangkau bagi masyarakat semua wilayah Kabupaten Gunungkidul di sepanjang musim.
6. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik sesuai kebutuhan rumah tangga dan dunia usaha.
7. Tersedianya sarana dan prasarana publik yang handal di sektor transportasi, telekomunikasi, fasilitas umum, perumahan dan permukiman, pendidikan, kesehatan, pengairan, air bersih, dan energi.
8. Tercukupinya kebutuhan prasarana perumahan dan permukiman seperti air bersih, listrik, telepon, sanitasi lingkungan, dan jalan lingkungan bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat.

III.1.6.7. Prediksi Kondisi Prasarana dan Sarana

1. Terbukanya wilayah Kabupaten Gunungkidul ke seluruh wilayah kabupaten dan propinsi lain dari akses transportasi jalan sehingga memberikan kelancaran bagi pengembangan sektor ekonomi, perdagangan, pariwisata, dan investasi.
2. Kebutuhan sarana transportasi massal yang handal, aman dan nyaman menuntut perbaikan sarana dan prasarana bidang transportasi publik, seperti jalan, moda, dan sistem lalu lintas.

3. Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakat, yang berupa air bersih, jalan, listrik, kesehatan, sarana angkutan, dan telekomunikasi, serta fasilitas air limbah.
4. Pengembangan air bersih dan sanitasi yang efektif dan efisien karena terbatasnya sumber daya air.
5. Pembangunan perkotaan dan kawasan (pariwisata, industri) yang dilaksanakan terencana dan terpadu dengan memperhatikan rencana tata ruang, pertumbuhan penduduk, lingkungan perumahan, lingkungan usaha, dan upaya konservasi lahan agar terwujud lingkungan kota dan kawasan yang bersih, sehat dan indah.
6. Terkendalinya peruntukan dan pemanfaatan lahan yang aman terhadap ancaman bencana alam sehingga sesuai dengan RTRW kabupaten dan arahan penggunaan lahan di kawasan budidaya serta terjaganya kawasan lindung.
7. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi melalui pengembangan infrastruktur nirkabel secara memadai.

III.1.7. Pemerintahan

III.1.7.1. Permasalahan

1. Pendayagunaan aparatur belum optimal. Beberapa kekurangan yang masih menghambat kinerja dan efisiensi kinerja aparat terkait antara lain, belum optimalnya koordinasi intern antar instansi sehingga masih sering terjadi duplikasi dan hambatan dalam implementasi kebijakan, serta belum optimalnya perubahan pola pikir dan kultur birokrasi sebagai bagian dari reformasi pelayanan publik.
2. Melemahnya kepercayaan masyarakat kepada birokrasi pemerintah karena isu Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Pelayanan umum kepada masyarakat belum didukung kapasitas dan kualifikasi pendidikan yang memadai, untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka menyikapi perkembangan pembangunan dalam masa tahun 2025 mendatang.
4. Meningkatnya intensitas, kualitas, dan kuantitas penyakit masyarakat dan kriminalitas.

5. Kemampuan keuangan daerah yang masih rendah disebabkan belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi, serta efisiensi pengelolaan pendapatan daerah.

III.1.7.2. Capaian Keberhasilan

1. Meningkatnya peranserta masyarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan dan pengawasan berbagai kebijakan pembangunan. Hal ini didorong oleh perkembangan demokrasi dan transparansi pada sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
2. Pelaksanaan otonomi daerah, termasuk didalamnya otonomi desa sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan demikian bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul semakin leluasa mengapresiasi pembangunan daerah dan desanya, diantaranya dengan (i) penataan kelembagaan daerah yang lebih sesuai dengan kondisi dan potensi daerah, (ii) pengembangan otonomi desa yang ditandai dengan dilaksanakannya perimbangan keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Desa melalui alokasi dana desa (ADD), serta (iii) penguatan kelembagaan kecamatan dan desa dengan beberapa kebijakan yang berorientasi pada pendekatan kewilayahan dan penerapan asas subsidiarity.

III.1.7.3. Proyeksi Peluang

1. Kualitas pelayanan publik, administrasi perijinan yang terus dikembangkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus menjadikan partisipasi masyarakat makin meningkat, iklim investasi akan berkembang lebih dinamis sebagai respon positif dari pelaku dunia usaha.
2. Pembangunan daerah dan desa akan menjadikan Kabupaten Gunungkidul lebih cepat tumbuh, berkembang dan seimbang. Keseimbangan perkembangan perkotaan dan perdesaan ini sangat dimungkinkan oleh adanya implementasi kebijakan “Mewujudkan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan dan Pembangunan” yang kongkrit dan dilaksanakan secara konsisten.

3. Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi akan menjadikan Kabupaten Gunungkidul lebih maju. Oleh karena teknologi telah menjadi salah satu input penting dalam proses pembangunan.

III.1.7.4. Proyeksi Ancaman

1. Kesiapan sumberdaya manusia aparatur pemerintah daerah dalam menghadapi persaingan antar daerah, efek globalisasi dan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat.
2. Tuntutan dari masyarakat terhadap peningkatan kinerja aparatur pemerintah, maka kebijakan pemerintah daerah harus lebih transparan dan akuntabel dalam proses pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan.

III.1.7.5. Proyeksi Permasalahan

1. Profesionalisme, kualifikasi dan kompetensi SDM aparatur birokrasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang belum optimal.
2. Pelayanan umum yang dilaksanakan Aparatur Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang belum efisien. Sebagai salah satu fungsi utama birokrasi pemerintah, maka perlu adanya beberapa kebijakan deregulasi di bidang pelayanan umum dan perizinan.
3. Proses perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Gunungkidul belum sinkron. Hasil perencanaan pembangunan yang dapat diakomodir pada APBD masih relatif rendah.

III.1.7.6. Proyeksi Keberhasilan

1. Terwujudnya akuntabilitas publik penyelenggaraan pemerintahan dengan berbagai kebijakan percepatan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
2. Terwujudnya profesionalisme aparatur pemerintah dengan upaya peningkatan kualitas SDM, pemberian reward dan punishment yang adil, serta menjamin pembinaan karir yang sehat.
3. Tersedianya jumlah dan kualitas aparatur Pemerintah Daerah yang proporsional dan sebanding dengan tugas-tugas

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah seiring dengan dinamika perkembangan otonomi daerah.

4. Terwujudnya konsistensi perencanaan penganggaran dengan penyusunan regulasi perencanaan dan penganggaran.

III.1.7.7. Prediksi dan Kondisi Pemerintahan

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan budaya disiplin, pelayanan administrasi kepegawaian, kualitas kebijakan kepegawaian dan peningkatan kesejahteraan pegawai yang lebih baik.
2. Terwujudnya manajemen pemerintahan yang baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan.
3. Pengembangan potensi daerah secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dan perijinan.
5. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang mendorong bagi pengembangan desa.
6. Peningkatan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan.

III.1.8. Prediksi Kondisi Umum Daerah

Prediksi kondisi umum daerah Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu tahun 2025 ke depan adalah sebagai berikut :

1. Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan secara umum Kabupaten Gunungkidul akan mengalami perubahan geomorfologi dan lingkungan hidup. Penurunan kualitas lingkungan hidup karena terjadinya pencemaran udara, air, dan tanah akibat kemajuan pembangunan dan pola hidup masyarakat perlu diantisipasi
2. Kondisi geomorfologi yang bervariasi di Kabupaten Gunungkidul disamping menyebabkan aksesibilitas daerah yang cenderung rendah, juga terdapat potensi bencana alam yang bervariasi seperti tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan kekeringan, maka diperlukan perencanaan dan antisipasi yang baik sehingga potensi masalah yang akan terjadi dapat diminimalisir.

3. Wilayah Kabupaten Gunungkidul yang cukup luas menghadapi potensi masalah dalam upaya pengendalian fungsi lingkungan hidup akibat cara mengeksploitasi sumber daya alam yang tidak mengindahkan aspek konservasi sehingga akan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Selain itu Kabupaten Gunungkidul juga masih menghadapi kebutuhan air bersih bagi warganya khususnya di zone selatan.
4. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan perumahan bagi warga juga terjadi perubahan sesuai dengan pola hidup masyarakat. Munculnya perumahan-perumahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang perlu harus diantisipasi.
5. Kawasan perbukitan karst Gunungkidul harus dapat dipertahankan kelestariannya dengan berbagai budaya karst dan terbangunnya laboratorium karst sehingga akan mendukung kemajuan sektor pariwisata, baik wisata alam maupun wisata pendidikan, yang pada gilirannya akan dapat mendukung pendapatan masyarakat dan perkembangan perekonomian daerah. Selain itu kawasan Zone Baturagung bagian barat akan berkembang menjadi kawasan wisata, sedangkan bagian timur akan berkembang menjadi kawasan konservasi hutan dan tanaman perkebunan.
6. Jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 adalah sebesar 681.554 jiwa. Prediksi jumlah penduduk tahun 2010 adalah sebesar 717.558 jiwa, tahun 2015 adalah sebesar 773.759 jiwa, tahun 2020 adalah sebesar 788.924 jiwa, dan tahun 2025 penduduk Kabupaten Gunungkidul diprediksi sebesar 820.149 jiwa. Pertumbuhan penduduk diperkirakan masih berada dalam tafsiran kurang dari 1% per tahun.
7. Angka kepadatan penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 2005 adalah sebesar 511 jiwa/km², sedangkan pada tahun 2025 diprediksi sebesar 552 jiwa/km².
Prediksi kepadatan penduduk tahun 2010 sebesar 521 jiwa/km², tahun 2015 sebesar 531 jiwa/km², dan tahun 2020 sebesar 542 jiwa/km².
8. Komposisi penduduk yang pada saat ini menunjukkan piramida penduduk struktur muda, yang ditandai dengan pengembangan jumlah penduduk usia muda yang beresiko

terhadap masalah sosial ekonomi, maka tahun 2025 ke depan diprediksi akan mengalami bentuk piramida terbalik, artinya penduduk usia tua lebih banyak daripada usia muda dan anak-anak dan dengan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan maka akan mendorong meningkatnya umur harapan hidup masyarakat.

9. Dalam kurun waktu 20 tahun mendatang sektor primer khususnya sektor pertanian akan masih menjadi sektor andalan sebagai mata pencaharian utama penduduk, karena itu sektor ini masih memberikan kontribusi yang cukup besar bagi terserapnya tenaga kerja. Dengan adanya peningkatan sumberdaya manusia dan meningkatnya investasi, maka diharapkan terjadinya kemajuan yang cukup berarti bagi kontribusi sektor sekunder sehingga akan memberikan perluasan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang ada dan ini berarti akan menyerap pengangguran.
10. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2025 diprediksi menurun atau menjadi sebesar 10 % karena terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah dan perubahan struktur ekonomi akibat adanya peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta peningkatan investasi dalam pembangunan ekonomi daerah dan perubahan pola hidup masyarakat yang lebih baik.
11. Jumlah penganggur pada tahun 2025 diperkirakan akan terjadi penurunan atau menjadi sebesar 6 % seiring dengan terjadinya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan PDRB perkapita berdasarkan harga konstan.
12. Komposisi penduduk dilihat dari aspek pendidikan akan membaik seiring dengan akan dilaksanakan program wajib belajar 12 tahun.
13. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diprediksi akan berada pada kisaran angka 5 sampai 7 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2010 diprediksi sebesar 4,99%, tahun 2015 sebesar 5,65%, dan tahun 2020 sebesar 6,31%. Pertumbuhan sektor sekunder akan meningkat lebih tinggi dari angka pertumbuhan saat ini.
14. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ditandai dengan peningkatan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan tahun 2000, pada tahun 2025 diperkirakan mencapai

angka Rp 3.775.849,00. Sedangkan prediksi PDRB per kapita pada tahun 2010 sebesar Rp 3.638.431,00, tahun 2015 sebesar Rp 3.684.237,00, dan tahun 2020 sebesar Rp 3.730.043,00.

15. Kontribusi sektor pertanian yang terdiri dari sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, sub sektor perikanan, sub sektor peternakan, sub sektor kehutanan dan perkebunan pada tahun 2025 masih menjadi andalan dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, akan tetapi ekonomi kerakyatan yang berupa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan bergerak maju dan memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan mampu memberikan peluang kerja yang cukup besar bagi angkatan kerja.
16. Struktur ekonomi Kabupaten Gunungkidul akan mulai terjadi perubahan pergeseran kontribusi sektor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sehingga pada tahun 2025 sektor primer kontribusinya akan cenderung menurun, sektor sekunder akan semakin meningkat dan diikuti oleh peningkatan sektor tersier, seiring dengan cukup berhasilnya pembangunan ekonomi daerah.
17. Seiring dengan kemajuan pembangunan, maka Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 perlu menyediakan energi, air bersih, dan sarana komunikasi yang cukup agar proses pembangunan dapat sesuai dengan harapan untuk mewujudkan visi daerah yaitu terwujudnya masyarakat Gunungkidul yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera.
18. Masyarakat Gunungkidul dengan nilai-nilai budaya yang positif yaitu gotong- royong, kerja keras, dan tidak kenal menyerah harus dipertahankan dalam jangka panjang dan merupakan modal sosial sebagai peluang dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial akan berhasil sepanjang mendapatkan dukungan dari semua stakeholders, sehingga pada tahun 2025 kesejahteraan sosial masyarakat semakin meningkat yang ditandai dengan menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

19. Pada tahun 2025 diprediksikan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan semakin menurunnya angka kematian bayi, angka kematian kasar, angka penderita anemia ibu hamil, angka penderita anemia balita, dan angka penderita kurang energi kronis wanita usia subur.
20. Diharapkan pada tahun 2025 pelayanan kesehatan semakin meningkat, adanya jaminan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin secara gratis sehingga akan memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan serta mendukung tercapainya peningkatan umur harapan hidup diatas 75 tahun baik laki-laki maupun perempuan.
21. Pada tahun 2025 diprediksikan adanya peningkatan angka indeks pembangunan manusia (IPM) secara signifikan seiring dengan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia, kesehatan, dan ekonomi. Pada tahun 2010 angka indeks pembangunan manusia diprediksikan sebesar 70,5, tahun 2015 sebesar 72, tahun 2020 sebesar 73,5 dan tahun 2025 sebesar 75.
22. Jumlah sekolah kejuruan menengah pada tahun 2025 diprediksikan akan meningkat, sehingga hasil lulusan sekolah telah siap untuk memasuki pasar kerja. Demikian pula pada saat ini akan terjadi adanya peningkatan angka partisipasi sekolah pada semua jenjang dan jalur pendidikan, menurunnya angka putus sekolah pada semua jenjang pendidikan, adanya peningkatan kualitas hasil pendidikan serta adanya pemerataan wajib belajar 9 tahun menuju wajib belajar 12 tahun.
23. Peningkatan angka partisipasi sekolah pada semua jenjang dan jalur pendidikan sehingga kualitas SDM masyarakat semakin meningkat serta semakin tingginya angka melek huruf di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025.
24. Pada tahun 2025 diprediksikan adanya pergeseran nilai sosial, budaya, dan politik seiring dengan derasnya arus modernisasi dan globalisasi. Alkulturasasi budaya Jawa dengan budaya lain terus berlangsung, namun budaya Jawa akan terus eksis di masyarakat hanya perlu adanya penyesuaian-penyesuaian.

25. Dinamika demokrasi politik lokal akan terus berkembang di Kabupaten Gunungkidul, terutama yang menyangkut peran masyarakat sipil yang semakin strategis.
26. Tersedianya prasarana transportasi yang representatif, serta terbukanya wilayah Kabupaten Gunungkidul ke seluruh wilayah kabupaten dan provinsi baik DIY maupun Jawa Tengah dari akses transportasi jalan termasuk terealisasi dan berfungsinya jaringan jalan lintas selatan sehingga memberikan kelancaran bagi arus barang dan jasa dalam rangka pengembangan perekonomian daerah.
27. Dalam kurun waktu tahun 2025 ke depan, seiring dengan tuntutan kemajuan pembangunan maka kebutuhan prasarana perumahan dan permukiman seperti air bersih, listrik, telepon, sanitasi lingkungan dan jalan lingkungan akan menjadi semakin meningkat.
28. Semakin tingginya tuntutan pembangunan perkotaan, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan budidaya, dan kawasan konservasi maka di masa mendatang penataan ruang perlu sangat harus diperhatikan.
29. Pelayanan publik yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi akan semakin berkembang seiring dengan kemajuan pembangunan. Layanan informasi publik semakin mudah diakses oleh masyarakat dan berbagai media.
30. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sehingga terjadi peningkatan kualitas birokrasi yang profesional, efektif, efisien, bersih sehingga mampu memberikan pelayanan prima untuk kebutuhan masyarakat.

III.2. TANTANGAN DINAMIKA LINGKUNGAN EKSTERNAL

Seiring dengan perkembangan jaman, lingkungan eksternal Kabupaten Gunungkidul akan selalu berubah. Tantangan peningkatan kesejahteraan rakyat dari dinamika lingkungan eksternal Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut.

III.2.1. Peningkatan Kesejahteraan Sosial untuk *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas di Kabupaten Gunungkidul juga merupakan bagian dari *Sustainable Development Goals* (SDG's), yang merupakan kelanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDG's). SDG's adalah sasaran jangka panjang bagi komunitas dunia dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui keseimbangan pembangunan di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam konsep ini, pertumbuhan, stabilitas dan efisiensi ekonomi tetap harus diimbangi dengan kesetaraan sosial, partisipasi masyarakat, serta terjaganya kelestarian lingkungan dalam jangka panjang untuk kembali menunjang pembangunan ekonomi di masa mendatang.

Dalam dokumen *Sustainable Development Goals* ini terdapat 17 (tujuh belas) sasaran dan 169 (seratus enam puluh sembilan) target pembangunan. 17 (tujuh belas) sasaran tersebut terdiri dari:

1. Mengentaskan kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana.
2. Mengatasi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan mengembangkan pertanian berkelanjutan.
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua pada segala usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan.
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan atas air dan sanitasi untuk semua.
7. Menjamin akses ke energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan secara berkelanjutan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif serta meningkatkan secara berkelanjutan pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan menggiatkan inovasi.
10. Mengurangi ketimpangan di dalam suatu dan diantara negara -negara.
11. Membuat kota dan permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
12. Memastikan pola konsumsi dan pola produksi yang berkelanjutan.

13. Mengambil tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Konservasi dan penggunaan berkelanjutan sumberdaya samudera dan kepebisiran untuk pembangunan yang berkelanjutan.
15. Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem darat, pengelolaan hutan secara lestari, memerangi dan menghentikan proses penggurunan, memulihkan degradasi lahan dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Meningkatkan ketenteraman masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberi akses keadilan bagi semua dan dibangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan.

Penguatan pencapaian target *SDGs* di Kabupaten Gunungkidul merupakan bagian dari komitmen internasional yang harus dijabarkan dan dipedomani dalam perencanaan jangka menengah dan tahunan.

III.2.2. Pengembangan Kemandirian dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk integrasi ekonomi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN sehingga pada prakteknya terbentuk sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. MEA ini telah disepakati oleh negara-negara di ASEAN dan mulai diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2015.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan membentuk ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal sehingga ASEAN akan bersifat lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan baru yang menerapkan inisiatif ekonomi; mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas; memfasilitasi pergerakan bisnis, tenaga kerja terampil dan bakat; dan memperkuat kelembagaan mekanisme ASEAN. Peraturan untuk mengantisipasi berlakunya MEA di akhir 2015 telah diterbitkan, salah satunya melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan Protokol untuk Mengubah Perjanjian Ekonomi ASEAN tertentu terkait Perdagangan Barang.

Dalam Masyarakat Ekonomi Asean ini penguatan kemandirian Daerah dalam arti adalah keharusan untuk memastikan seluruh peluang dan tantangan atau ancaman yang muncul dapat direspon secara tepat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah Kabupaten Gunungkidul.

III.2.3. Pemantapan Pencapaian Visi Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005 – 2025 adalah:

“INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”

Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah ditetapkan Visi Pembangunan Nasional adalah :

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan 9 agenda Nawacita dengan sub agenda pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara
 - a. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif
 - b. Penguatan sistem pertahanan
 - c. Memperkuat jatidiri sebagai Negara maritim
 - d. Meningkatkan kualitas perlindungan warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri
 - e. Melindungi hak dan keselamatan pekerja migran
 - f. Memperkuat peran dalam kerjasama global dan regional
 - g. Meminimalisasi dampak globalisasi
 - h. Membangun industri pertahanan nasional
 - i. Membangun Polri yang professional
 - j. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data serta informasi kependudukan
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
 - a. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik
 - b. Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan
 - c. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
 - d. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)
 - e. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan
 - a. Peletakan dasar-dasar dimulainya desentralisasi asimetris
 - b. Pemerataan pembangunan antar wilayah terutama kawasan timur Indonesia
 - c. Penanggulangan kemiskinan
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
 - a. Peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan
 - b. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
 - c. Pemberantasan penyalahgunaan narkoba
 - d. Menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah
 - e. Melindungi anak, perempuan, dan kelompok marginal
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia

- a. Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana
 - b. Pembangunan pendidikan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Pintar
 - c. Pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat
 - d. Peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan Program Indonesia Kerja
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
- a. Membangun konektivitas Nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan
 - b. Membangun transportasi massal perkotaan
 - c. Membangun infrastruktur/prasarana dasar
 - d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur
 - e. Memperkuat peran investasi
 - f. Mendorong BUMN menjadi agen pembangunan
 - g. Meningkatkan kapasitas inovasi dan teknologi
 - h. Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional
 - i. Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional
 - j. Meningkatkan daya saing tenaga kerja
7. Peningkatan kedaulatan pangan
- a. Peningkatan kedaulatan pangan
 - b. Peningkatan ketahanan air
 - c. Melestarikan sumber daya alam lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
 - d. Penguatan sektor keuangan
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
- Pemupukan jiwa revolusi mental di kalangan peserta didik melalui pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
- Meletakkan Pancasila pada fungsi dan peranannya sebagai dasar filsafat Negara

III.2.4. Pemantapan Pencapaian Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Istimewa Yogyakarta

Sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta, visi jangka panjang daerah Kabupaten Gunungkidul harus diintegrasikan dengan visi Daerah

Istimewa Yogyakarta. Permasalahan, peluang serta tantangan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Gunungkidul harus direspon secara bersama-sama dalam kebijakan yang terintegrasi.

Bertitik tolak dari dasar filosofi, kondisi dan aspek-aspek yang potensial yang berkembang selama ini serta mempertimbangkan perkembangan global yang pesat perlu diwujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang adiluhung. Sehubungan dengan hal tersebut maka visi pembangunan DIY yang akan dicapai selama dua puluh tahun mendatang adalah:

Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal.
2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan.
3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.
4. Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

Memperhatikan kondisi saat ini, tantangan yang dihadapi, dan isu strategis serta visi dan misi pembangunan yang telah dirumuskan maka pembangunan daerah diarahkan pada pencapaian sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Terwujudnya DIY sebagai pusat pendidikan terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025
2. Terwujudnya DIY sebagai pusat budaya terkemuka se Asia Tenggara pada tahun 2025
3. Terwujudnya DIY sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025
4. Terwujudnya lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera pada tahun 2025

Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera, sangat tergantung pada peran aktif seluruh lapisan masyarakat serta sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan. Selain itu perlu didukung oleh komitmen dari kepemimpinan daerah yang akuntabel, kapabel, demokratis dan berkualitas, konsistensi kebijakan pemerintahan daerah, ketatapemerintahan yang baik, keberpihakan kepada masyarakat, keterlibatan dan peran serta masyarakat secara langsung dan nyata mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan.

III.3. ISU STRATEGIS DAERAH

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Isu strategis Daerah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah.

Isu Strategis pokok yang harus menjadi basis perumusan kebijakan dalam tiap pembangunan jangka menengah adalah tentang:

- Kemandirian dan Daya Saing Perekonomian untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan
- Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pembangunan Daerah
- Kualitas Sumberdaya Manusia
- Tata Kelola Pemerintahan Daerah
- Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Isu strategis pokok di atas harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

III.3.1.Kemandirian dan Daya Saing Perekonomian untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Ditengah kondisi perekonomian yang semakin terkoneksi dengan perekonomian internasional, kemandirian dan daya saing Daerah harus semakin ditingkatkan. Dengan kemandirian dan daya saing yang semakin kuat, maka dampak gejolak eksternal dapat diminimalisir dan dinamikanya dapat dimanfaatkan untuk percepatan peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

Kemandirian dan daya saing perekonomian menyangkut aspek pembangunan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Sektor pertanian dalam arti luas, usaha mikro, kecil, menengah, dan pariwisata menjadi basis aktivitas ekonomi di Gunungkidul dikelola secara ekonomis dan berkelanjutan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing sehingga mampu menjadi penggerak perekonomian.

Secara makro peningkatan kemandirian dan daya saing perekonomian diupayakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan sehingga terjadi peningkatan pendapatan perkapita yang signifikan, dengan tingkat pengangguran yang rendah dan penurunan jumlah penduduk miskin, peningkatan tingkat pemerataan pendapatan, dan penurunan ketimpangan regional daerah.

III.3.2.Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pembangunan Daerah

Ketersediaan sarana dan prasarana akan menentukan kinerja dan pemerataan hasil pembangunan daerah. Selain itu, seiring dengan dinamika pembangunan daerah, kebutuhan akan ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan itu juga akan semakin tinggi.

Jaringan infrastruktur daerah yang handal dan memadai meliputi sarana transportasi jalan, jembatan, ketenagalistrikan, pos, telepon, dan telematika menuju *smart city*.

Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi alternatif dan listrik, serta air bersih diupayakan guna mendorong pemerataan dan keseimbangan pembangunan antar wilayah, melayani kebutuhan

masyarakat dengan harga terjangkau, serta membuka keterisolasian wilayah perbatasan.

Ketersediaan sarana dan prasarana itu juga sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan perdesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani, peternak, dan nelayan melalui penyediaan prasarana pembangunan sistem agribisnis, industri kecil, dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi, dan pemanfaatan sumber daya alam.

Diharapkan pembangunan sarana prasarana itu akan meningkatkan pembangunan pada wilayah tertinggal dan wilayah perbatasan agar tercipta perkembangan antar wilayah yang serasi dan seimbang.

III.3.3. Kualitas Sumberdaya Manusia

Faktor manusia sangat berpengaruh pada kinerja pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul. Karakter masyarakat yang diharapkan adalah yang maju, mandiri, kompetitif, dan bermoral tinggi yang dicirikan sebagai masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bijaksana, kerja keras, gotong royong, dan mandiri.

Aspek lain dalam kualitas sumberdaya manusia adalah kesetaraan gender yang diupayakan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan.

Fokus pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan membutuhkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dengan akses dan kualitas yang memadai baik di bidang pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan, sektor ekonomi yang akan menjadi tempat masyarakat berkiprah dalam peningkatan kesejahteraannya serta pelayanan pendukung lainnya.

III.3.4. Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Tata kelola pemerintahan Daerah akan menentukan kualitas kebijakan publik untuk percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat. Diharapkan, tata kelola pemerintahan Daerah terselenggara berdasarkan hukum dengan birokrasi yang profesional dan netral, serta masyarakat sipil dan masyarakat politik yang mandiri.

Dalam tata kelola pemerintahan Daerah profesionalisme aparatur harus ditingkatkan sehingga mampu mendukung tugas- tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan sosial kemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi publik; dan kualitas pelayanan publik.

Aspek lain yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan adalah pembiayaan pembangunan daerah. Untuk itu, peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kemandirian keuangan daerah harus dioptimalkan dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

III.3.5. Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sangat perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah. Dengan demikian potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup harus dimanfaatkan dengan tetap menjaga keseimbangan fungsi lingkungan. Pola pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup harus tercermin dalam tetap terjaganya fungsi dan daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

IV.1. LANDASAN FILOSOFIS

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sebelum menguraikan Visi dan Misi Jangka Panjang Kabupaten Gunungkidul, terlebih dahulu akan dijelaskan landasan filosofis dari Visi dan Misi Daerah tersebut.

Mendasarkan pada filosofi para *the founding fathers* atau sesanti yang adiluhung dari leluhur serta sebagai perspektif ke depan, maka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dijiwai filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul yaitu: “DHAKSINARGHA BUMIKARTA” yang memiliki cakrawala yang luas dan mampu menjadi pedoman bagi daerah dalam menentukan visi, misi, dan arah pembangunan.

Filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul tersebut sesuai dengan filosofi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu: “HAMEMAYU HAYUNING BAWANA”. Makna yang terkandung di dalamnya adalah kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat dari pada memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud mencakup seluruh peri kehidupan baik dalam skala kecil (keluarga), ataupun masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan mengutamakan darma bakti untuk kehidupan orang banyak, tidak mementingkan diri sendiri.

Kata “DHAKSINARGA” berasal dari kata “*dhaksina*” dan “*argha*”. Kata “*dhaksina*” berarti “selatan”, dan “*argha*” berarti “gunung”. Dirangkai menjadi satu kata, “*dhaksinarga*” berarti “Gunungkidul”. Sedangkan kata “BUMIKARTA” berasal dari kata “*bhumī*” dan “*karta*”. Kata “*bhumī*” berarti “bumi, tanah, daerah”. Sedangkan kata “*karta*” berarti “subur, makmur, rahayu, damai, sejahtera”.

Hakikat yang dimaksudkan dalam filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul DHAKSINARGHA BUMIKARTA merupakan tekad masyarakat Gunungkidul untuk senantiasa ingin mewujudkan semboyan yang mengandung harapan agar Gunungkidul menjadi Daerah yang subur dan makmur, dalam rangka mencapai HAMEMAYU HAYUNING BAWANA, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang berkelanjutan berdasarkan nilai budaya.

Substansi filosofi tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber segala perikehidupan dan penghidupan serta "*sangkan paraning dumadi*".
2. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan mengawasi serta bertanggungjawab terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan.
3. Masyarakat Gunungkidul bertekad dan giat melaksanakan pembangunan di segala bidang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan dengan dilandasi oleh kesucian lahir dan batin.
4. Masyarakat Gunungkidul selalu bersemangat, bertanggungjawab, siap dan gigih menghadapi hambatan dan tantangan di masa depan dengan dilandasi oleh semangat persatuan dan kesatuan.
5. *Hastha Dharma* merupakan amanah yang harus dilaksanakan oleh setiap pemimpin formal dan non formal serta aparatur daerah yaitu :
 - a. Pengayoman seluruh rakyat tanpa membedakan agama, aliran, dan golongan.
 - b. Pemberi petunjuk dan bimbingan kepada rakyat menuju ketertiban dan keamanan umum.
 - c. Penyuluh di dalam gelap dan penolong di dalam penderitaan bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga tercapai ketenangan dan ketenteraman lahir batin.
 - d. Pembina semangat kehidupan masyarakat sehingga terjelma sifat dan sikap dinamis, konstruktif, dan korektif.
 - e. Pembangkit dan pemupuk daya cipta menuju ke arah kesejahteraan masyarakat.
 - f. Bersifat sabar, tekun, ulet, dan bijaksana agar dapat menampung dan mencari pemecahan segala persoalan hidup dan kehidupan rakyat sehari-hari.
 - g. Penggerak segala kegiatan masyarakat menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa.
 - h. Pemberantas kejahatan dan kemaksiatan dengan jelas bertindak tegas, adil dan jujur tanpa pandang bulu dan harus menjadi teladan didalam kebaikan lahir, batin dan masyarakat.
6. Masyarakat Gunungkidul mempunyai sifat-sifat yaitu: bijaksana, selalu berdoa dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat, setia, teguh, berani, suci, kokoh, giat bekerja, gotong royong dan tanpa pamrih.

Implementasi dari filosofi luhur tersebut di atas menjiwai dan memaknai visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gunungkidul jangka panjang dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan selama 20 (dua puluh) tahun.

IV.2. VISI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005 – 2025 adalah:

“INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 - 2025, Visi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu:

“DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PADA TAHUN 2025 SEBAGAI PUSAT
PENDIDIKAN, BUDAYA DAN DAERAH TUJUAN WISATA TERKEMUKA DI ASIA
TENGGERA DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT YANG MAJU,
MANDIRI DAN SEJAHTERA”

Berdasarkan landasan filosofis pembangunannya, serta integrasi dengan Visi Nasional dan Visi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut, maka Visi Jangka Panjang Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025 adalah sebagai berikut:

“GUNUNGKIDUL YANG BERDAYA SAING, MAJU, MANDIRI, DAN
SEJAHTERA TAHUN 2025”

Secara umum bukti pencapaian visi di atas adalah seperti yang diuraikan dalam penjelasan Visi berikut ini.

1. Gunungkidul yang berdaya saing: adalah perwujudan kondisi masyarakat yang cerdas, sehat, produktif, dan berakhlak mulia serta memiliki daya saing secara bertanggung jawab dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan globalisasi.
2. Gunungkidul yang maju: adalah perwujudan kondisi masyarakat yang tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial, kependudukan, dan politik.

Ditinjau dari aspek ekonomi, masyarakat yang maju diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan rata-rata dan pembagian yang lebih merata. Proses produksi

berkembang dengan keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor-sektor jasa, serta didukung suatu pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan. Lembaga dan pranata ekonomi telah tertata dan berjalan serta berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yang dinamis efisien dengan produktivitas tinggi.

Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat yang maju berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya, yang dicerminkan semakin tinggi tingkat pendidikan penduduknya. Ditinjau dari aspek kependudukan, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang sehat, dengan usia harapan hidup yang tinggi, kualitas pelayanan sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih kecil.

Ditinjau dari aspek politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang telah mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis dan mantap, warganya terjamin hak- haknya, dan adanya peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan

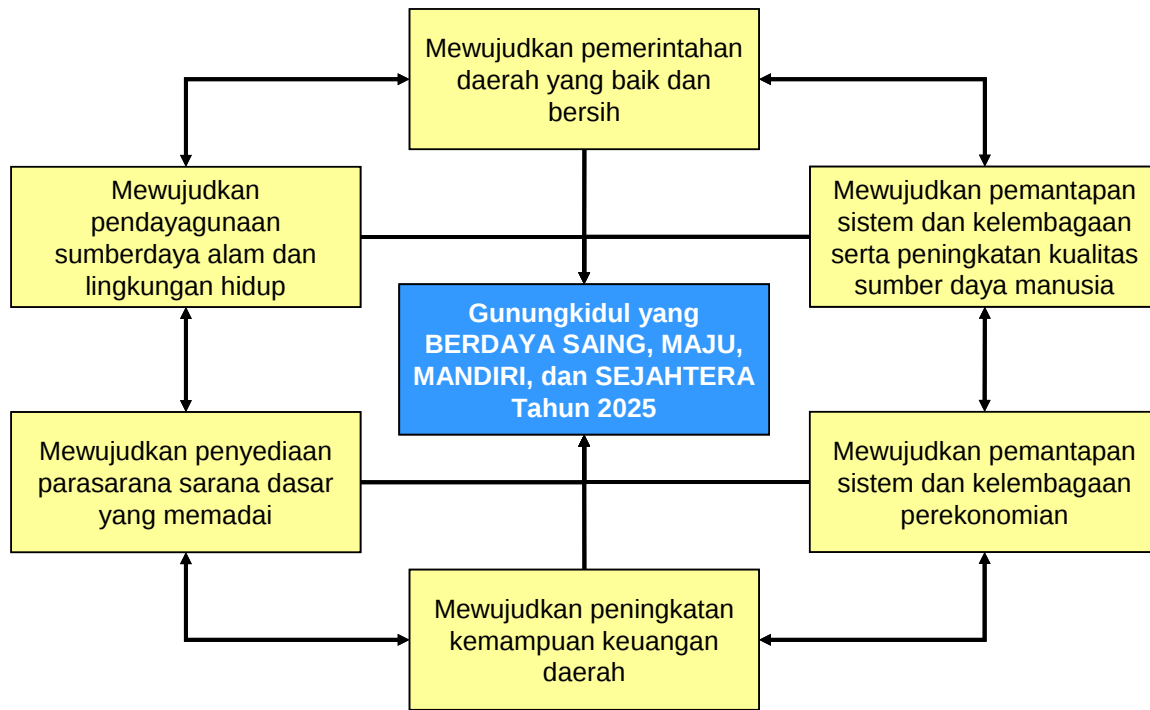
3. Gunungkidul yang mandiri: adalah perwujudan kondisi masyarakat yang berdaya dan merdeka dalam lingkup saling ketergantungan dalam kehidupan bermasyarakat, hidup sejajar dan sederajat dengan masyarakat lainnya, dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri dalam mengembangkan potensinya, sikap masyarakat mengenai dirinya sendiri dan masyarakatnya, semangatnya kuat dalam menghadapi tantangan- tantangan serta menjaga kelangsungan proses dan hasil-hasil pembangunan.
4. Gunungkidul yang sejahtera : adalah perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat taraf hidup dan kualitas hidupnya dari waktu ke waktu.

IV.3. MISI

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
2. Mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan perekonomian;
4. Mewujudkan peningkatan kemampuan keuangan daerah;
5. Mewujudkan penyediaan parasarana sarana dasar yang memadai; dan
6. Mewujudkan pendayagunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;

Gambar 4.1. Keterkaitan Visi Daerah Misi Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul 2005 – 2025



Keterkaitan antara Visi dengan Misi Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul 2005 – 2025 adalah seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.1. di atas. Sedangkan penjelasan masing-masing misi juga diuraikan di bagian bawah.

Misi Kesatu : Mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bersih;

Mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bersih adalah upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pemerintahan yang baik dan bersih. Hal tersebut dilakukan melalui penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi publik, dan peningkatan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan yang dicapai dengan:

1. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkat dan lini pemerintah daerah dan pada semua kegiatan pembangunan;
2. Peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur daerah melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat;
3. Peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja penyelenggara pemerintahan daerah terhadap prinsip-prinsip *good governance*;
4. Penataan fungsi kelembagaan pemerintahan daerah agar dapat berfungsi secara lebih memadai, ramping, luwes, dan responsif;
5. Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat, penataan, dan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur agar sesuai

dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas aparatur agar sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;

6. Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi;
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; dan
8. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mandiri dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Misi Kedua: Mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia

Mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia adalah upaya pemerintah daerah untuk memperkuat sistem dan kelembagaan masyarakat dengan mengedepankan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Misi Ketiga: Mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan perekonomian

Mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan perekonomian adalah upaya pemerintah daerah untuk memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi daerah menuju keunggulan kompetitif daerah untuk membangun struktur perekonomian daerah yang, tangguh, kuat, dan kokoh.

Misi Keempat: Mewujudkan peningkatan kemampuan keuangan daerah

Mewujudkan peningkatan kemampuan keuangan daerah adalah upaya pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah yang makin mandiri.

Misi Kelima: Mewujudkan penyediaan prasarana sarana dasar yang memadai

Mewujudkan penyediaan prasarana dasar yang memadai adalah upaya pemerintah daerah untuk memperkuat jaringan infrastruktur daerah yang handal dan memadai meliputi sarana transportasi jalan, jembatan, air bersih, pengairan, ketenagalistrikan, pelayanan pos, telepon, dan telematika menuju *smart city*.

Misi Keenam: Mewujudkan pendayagunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Mewujudkan pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yaitu upaya pemerintah daerah untuk memperkuat dan meningkatkan kesadaran semua pihak dalam pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian hasil bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi dan daya dukung lingkungan.

Untuk mewujudkan maksud di atas dilaksanakan melalui dengan memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial, dan ekonomi, dan upaya konservasi, pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan masyarakat.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

V.1. ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Visi pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2025 adalah mewujudkan: Gunungkidul yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2025. Rumusan umum untuk pencapaiannya telah dideskripsikan dalam 6 (enam) misi pembangunan jangka panjang daerah.

Adapun Arah Kebijakan Pembangunan Daerah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan di tiap misi pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut.

1. Arah Kebijakan Daerah dari Misi 1 : Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Baik dan Bersih
 - a. Politik, Pemerintahan, dan Hukum
 1. Meningkatkan peran DPRD dalam melaksanakan fungsi, wewenang, dan tanggungjawabnya guna memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab.
 2. Mengembangkan sistem politik yang berkedaulatan rakyat, demokratis, dan terbuka, mengembangkan kehidupan kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi politik, serta melaksanakan sistem dan penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.
 3. Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis, menghormati keberagaman aspirasi, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 4. Memasyarakatkan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 5. Menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip-prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan beradab yang dilaksanakan oleh Komite Pemilihan Umum (KPU).

6. Membangun watak dan karakter masyarakat Gunungkidul menuju masyarakat Gunungkidul yang berdaya saing, maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, mandiri, dan sejahtera.
 7. Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggungjawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat, dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat.
 8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan keterpaduan program-program pembangunan antara propinsi dan pusat.
 9. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan penegakan hukum.
 10. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.
 11. Mengembangkan peraturan daerah yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan publik yang lebih luas.
 12. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.
 13. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan mewujudkan desa sebagai pusat pertumbuhan dan pembangunan.
- b. Aparatur dan Administrasi Publik Daerah
1. Membersihkan penyelenggara pemerintahan dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme dengan memberikan sanksi seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meningkatkan efektivitas pengawasan internal, meningkatkan fungsi pengawasan sebagai pengawasan preventif/pencegahan serta pengawasan masyarakat, dan mengembangkan etika dan moral birokrasi.
 2. Meningkatkan kualitas aparatur daerah dengan memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan serta memberlakukan sistem prestasi kerja dengan prinsip memberikan penghargaan dan sanksi.
 3. Meningkatkan fungsi, kompetensi, dan keprofesionalan birokrasi dalam melayani masyarakat dan akuntabilitasnya dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara transparan, bersih, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.

4. Meningkatkan kapasitas birokrasi, penataan kelembagaan, dan pengawasan.
5. Meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk mendukung kinerja pemerintah.

c. Komunikasi dan Informasi

1. Meningkatkan peran komunikasi melalui media massa modern dan media tradisional untuk mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan, membentuk kepribadian masyarakat, serta mengupayakan keamanan hak pengguna sarana dan prasarana informasi dan komunikasi.
2. Meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang melalui penguasaan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi guna memperkuat daya saing daerah dalam menghadapi tantangan global.
3. Meningkatkan peran pers daerah yang bebas sejalan dengan peningkatan kualitas insan pers agar profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi etika pers, supremasi hukum, serta hak asasi manusia.
4. Membangun jaringan informasi dan komunikasi di daerah serta antar daerah secara timbal balik dalam rangka mendukung pembangunan daerah, regional, dan nasional.

2. Arah Kebijakan Daerah dari Misi 2: Mewujudkan Pemantapan Sistem dan Kelembagaan, Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, serta penguatan iklim pendidikan untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, maju dan mandiri.

a. Agama

1. Memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mengupayakan agar segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral dan ajaran agama.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan memantapkan kerukunan inter dan antar umat beragama.

3. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kemajemukan melalui dialog antar umat beragama dan pelaksanaan pendidikan agama.
4. Meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya dan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan keagamaan.
5. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam ikut mengatasi dampak perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan untuk memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa serta memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Pendidikan

1. Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan pendidikan.
2. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh masyarakat Gunungkidul menuju terciptanya manusia yang berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.
3. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.
4. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
5. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen daerah agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya.

c. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

1. Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan.

2. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut.
3. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumberdaya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
4. Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh penduduk miskin di bidang pelayanan kesehatan.
5. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas hidup anak-anak dan generasi muda.
6. Meningkatkan upaya pengurangan risiko bencana baik pada tahap pra bencana, kejadian bencana, dan pasca bencana dengan meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan bersama masyarakat.
7. Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin, dan anak-anak terlantar, serta kelompok rentan sosial melalui penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8. Meningkatkan upaya penanggulangan penyakit masyarakat (PEKAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
9. Meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian, dan peningkatan kualitas program keluarga berencana.
10. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu, dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil berkualitas.
11. Sistem administrasi kependudukan diarahkan untuk mewujudkan tertib data administrasi kependudukan dan catatan sipil.
12. Memberantas secara sistematis perdagangan dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang.

13. Memberantas secara sistematis perdagangan perempuan dan anak (*trafficking*).
 14. Memberikan aksesibilitas fisik dan non fisik guna meningkatkan peran penyandang cacat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
- d. Kebudayaan dan Pariwisata
1. Mengembangkan dan membina kebudayaan daerah yang bersumber dari warisan budaya leluhur yang mengandung nilai-nilai universal dalam membangun peradaban bangsa.
 2. Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dalam rangka memilah-milah nilai budaya yang kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan pembangunan di masa datang.
 3. Mengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian untuk mencapai sasaran terwujudnya kepekaan rasa terhadap totalitas kehidupan dengan tetap mengacu pada etika, moral, estetika, dan agama serta memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta pelaku seni dan budaya daerah.
 4. Melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional daerah serta menggalakkan dan memberdayakan sentra-sentra kesenian dan desa wisata untuk merangsang berkembangnya kesenian tradisional yang lebih kreatif dan inovatif.
 5. Menjadikan kesenian dan kebudayaan tradisional sebagai wahana bagi pengembangan pariwisata dan mempromosikannya sebagai produk wisata daerah.
 6. Pembangunan pariwisata diarahkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja.
 7. Mengembangkan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat interdisipliner dan partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomis, teknis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam, dan tidak merusak lingkungan.
- f. Kedudukan dan Peranan Perempuan
1. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara melalui kebijakan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.
 2. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan

perempuan, pengarusutamaan gender dalam pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

g. Pemuda dan Olahraga

1. Menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia, sehingga memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup, yang harus dimulai sejak usia dini melalui pendidikan olahraga di sekolah dan masyarakat.
2. Meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi dilakukan secara sistematis dan komprehensif melalui lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan di bawah koordinasi masing-masing organisasi olahraga.
3. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat, dan minat dengan memberikan kesempatan dan kebebasan mengorganisasikan dirinya secara bebas dan merdeka sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman, dan bertaqwa, berakhlak mulia, patriotis, demokratis, mandiri, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.
4. Mengembangkan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda agar semakin berdaya saing, unggul, dan mandiri.
5. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya destruktif terutama bahaya penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya (Narkoba) melalui gerakan pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba.

h. Pembangunan Daerah

1. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan dan keseimbangan pembangunan pembangunan antar wilayah kecamatan dan desa.
3. Arah Kebijakan Daerah dari Misi 3: Mewujudkan Pemantapan Sistem dan Kelembagaan Perekonomian
- a. Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekonomian daerah yang berorientasi dan berdaya saing global berlandaskan

demokrasi ekonomi yang menjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat.

- b. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat.
- c. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang distortif, yang merugikan masyarakat.
- d. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat, terutama warga miskin dan anak-anak terlantar dengan mengembangkan sistem dana jaminan sosial melalui program pemerintah serta menumbuhkembangkan usaha dan kreativitas masyarakat yang pendistribusiannya dilakukan dengan sistem dan prosedur birokrasi yang efektif dan efisien.
- e. Mengembangkan perekonomian daerah yang berorientasi nasional dan global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sesuai kompetensi dan produk unggulan daerah terutama pertanian dalam arti luas yaitu, pertanian tanaman pangan, kehutanan, peternakan, perikanan, serta dari sektor pertambangan, pariwisata, industri kecil dan kerajinan rakyat.
- f. Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dinamika kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik di dalam menyusun kerangka regulasi dan perijinan yang efisien, efektif, dan non diskriminatif menjaga persaingan usaha secara sehat, mengembangkan dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat dan perlindungan konsumen, meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah.
- g. Peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator, sekaligus sebagai katalisator pembangunan ekonomi daerah dalam memacu perkembangan dunia usaha dan koperasi daerah guna efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing.

- h. Meningkatkan sarana dan prasarana publik guna mendorong pemerataan pembangunan, percepatan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
- i. Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing baik di pasar lokal, regional, nasional maupun internasional dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan.
- j. Mengembangkan kebijakan industri kecil, perdagangan, koperasi, dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan sumber daya alam wilayah dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk diskriminasi dan hambatan. Untuk itu maka perlu didukung dengan upaya peningkatan kompetensi perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat yang terintegrasi dengan pengembangan agribisnis dan agroindustri.
- k. Memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing serta menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya diantaranya melalui penataan perijinan yang sederhana, mudah, cepat dan akurat serta pemberian insentif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- l. Investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik, mendorong penanaman modal serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai.
- m. Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta, dan BUMN, serta antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi daerah.
- n. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, distribusi dan keamanan pangan dengan berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan, dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau dengan

memperhatikan peningkatan pendapatan petani dan nelayan yang signifikan serta peningkatan produksi pertanian.

- o. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor primer terutama sektor pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan didorong agar mampu bersaing di pasar lokal, regional, nasional, dan internasional karena merupakan faktor strategis berkenaan dengan pembangunan perdesaan, penanggulangan kemiskinan, keterbelakangan, dan mendukung ketahanan pangan.
 - p. Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja.
 - q. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan memperhatikan kompetensi dan perlindungan secara terpadu.
 - r. Meningkatkan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk penemuan teknologi sendiri oleh masyarakat dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumberdaya lokal.
 - s. Mengembangkan teknologi tepat guna untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah menuju industri yang kokoh dan berwawasan lingkungan sehingga mampu bersaing baik pasar lokal maupun pasar global.
 - t. Mengembangkan sistem perekonomian secara terpadu untuk mempercepat proses penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.
 - u. Menyehatkan dan mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendukung terwujudnya perekonomian daerah yang tangguh.
4. Arah Kebijakan Daerah dari Misi 4: Mewujudkan Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah
- a. Menyehatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui peningkatan disiplin anggaran, peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang adil dan jujur serta penghematan pengeluaran.
 - b. Mengembangkan kebijakan manajemen dan pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada sistem anggaran yang berbasis kinerja dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, dan efektivitas untuk menambah penerimaan daerah.

- c. Pembiayaan pemerintah daerah diarahkan pada penciptaan pembiayaan pembangunan yang dapat menjamin kemampuan peningkatan pelayanan publik baik di dalam penyediaan pelayanan dasar, prasarana sarana fisik serta ekonomi, dan mendukung peningkatan daya saing ekonomi.
 - d. Mengupayakan perimbangan keuangan yang adil antara pusat dan daerah dengan mengutamakan kepentingan daerah yang lebih luas.
5. Arah Kebijakan Daerah dari Misi 5: Mewujudkan Penyediaan Prasarana Sarana Dasar yang Memadai
- a. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi alternatif dan listrik, serta air bersih guna mendorong pemerataan dan keseimbangan pembangunan antar wilayah, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, serta membuka keterisolasian wilayah perbatasan.
 - b. Menjaga dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana air bersih.
 - c. Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik yang relatif murah, ramah lingkungan, dan secara berkelanjutan.
 - d. Meningkatkan pembangunan pada wilayah tertinggal dan wilayah perbatasan agar tercipta perkembangan antar wilayah yang serasi dan seimbang.
 - e. Mempercepat pembangunan perdesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani, peternak, dan nelayan melalui penyediaan prasarana pembangunan sistem agribisnis, industri kecil, dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi, dan pemanfaatan sumber daya alam.
6. Arah Kebijakan Daerah dari Misi 6: Mewujudkan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- a. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.
 - b. Meningkatkan konservasi sumber daya air dengan mengikutsertakan peran masyarakat.
 - c. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.

- d. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi, budaya masyarakat, dan penataan ruang.
- e. Meningkatkan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- f. Meningkatkan konservasi sumber daya air bawah tanah dengan mengikutsertakan peran masyarakat.
- g. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berwawasan pengurangan risiko bencana.

V.1.1. Arah kebijakan Pembangunan Lima Tahun Pertama (2005 – 2010)

Tahap lima tahun pertama ini merupakan tahapan untuk meletakkan dasar atau fundasi sosial ekonomi dan budaya untuk mewujudkan Visi bersama Kabupaten Gunungkidul. Pembangunan daerah dititikberatkan pada bidang pertanian dalam arti luas yang didukung oleh penyediaan berbagai jenis pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dengan akses dan kualitas yang memadai baik di bidang perumahan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung yang merata ke seluruh wilayah, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan yang mampu menciptakan kondisi masyarakat yang cerdas, sehat, produktif, dan berakhlak mulia serta memiliki daya saing secara bertanggung jawab dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan globalisasi.

Pemerintah daerah sebagai motivator dan fasilitator yang melaksanakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi yang dilakukan dengan peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur, peningkatan kapasitas kelembagaan yang berorientasi pada teknologi, kewirausahaan, transparansi, organisasi yang efisien dengan fungsi yang efektif, dan manajemen berdasarkan pada kinerja.

Pembangunan pertanian diarahkan pada peningkatan produksi, produktivitas, mutu produk pertanian dan diversifikasi pada jenis komoditas pertanian yang mempunyai nilai komersial dan menguntungkan termasuk yang terkait dengan industri untuk pengolahan lanjut hasil pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani serta meningkatkan fungsi konservasi dan perlindungan sumberdaya alam melalui optimalisasi fungsi hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumberdaya alam, reboisasi dan lain-lain. Untuk mendukung prioritas tersebut diupayakan peningkatan dan perbaikan infrastruktur di kawasan sentra- sentra produksi pertanian (dalam arti luas) dan

perdesaan, kawasan pesisir, kawasan sentra produksi kehutanan dan perkebunan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana serta fasilitas irigasi di sentra-sentra pertanian lahan basah, perbaikan sistem usaha agribisnis, dan peningkatan peran petani, nelayan, dan peternak dalam mendukung upaya Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai *seed centre*. Beberapa wilayah yang kondisinya masih tertinggal dibandingkan wilayah lain karena jaringan transportasi dan prasarana perhubungan belum mantap diupayakan percepatan pembangunan jaringan transportasi untuk kelancaran distribusi barang dan jasa sebagai sarana pendukung pembangunan wilayah dengan diarahkan pada pembangunan akses yang menghubungkan wilayah satu dengan wilayah lainnya, agar wilayah yang mempunyai potensi dan daya dukung ekonomi tinggi mampu menjadi titik pertumbuhan (*growing point*) bagi wilayah di sekitarnya.

V.1.2. Arah kebijakan Pembangunan Lima Tahun Kedua (2010 – 2015)

Pada tahap ini, pembangunan diarahkan untuk memperkuat dasar-dasar untuk mewujudkan Gunungkidul yang Lebih Maju, Makmur, dan Sejahtera dari kondisi sebelumnya.

Upaya strategis yang akan dilakukan adalah peningkatan pemanfaatan air sebagai sumber kemakmuran, pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, peningkatan iklim usaha yang kondusif, serta peningkatan peluang investasi dan penggalangan sumber-sumber pendanaan sebagai penggerak perekonomian daerah, peningkatan pengelolaan pariwisata, pengembangan sumber daya manusia yang terampil, profesional, dan peduli, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pada aspek sumberdaya air, prioritas arah kebijakan adalah peningkatan pengelolaan sumber-sumber air dan penyediaan air bersih. Dalam konteks ini, hasil yang diharapkan adalah sentra produksi memiliki infrastruktur air dan sanitasi yang handal serta kawasan permukiman memiliki infrastruktur air yang handal.

Pada aspek kelestarian pemanfaatan sumberdaya alam, prioritas arah kebijakan adalah peningkatan pengelolaan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, peningkatan kemudahan dalam memperoleh dan menciptakan lapangan kerja melalui penggalan pemberdayaan usaha kecil, mikro, dan menengah, penggalangan sumber-sumber pendanaan baik dari dalam/luar negeri untuk memacu pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja dan Pendapatan Asli Daerah.

Pada aspek pariwisata, prioritas arah kebijakan adalah peningkatan pengelolaan pariwisata melalui kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat.

Hasil yang diharapkan adalah Kabupaten Gunungkidul menjadi destinasi wisata unggulan dengan infrastruktur yang handal; seluruh potensi sumber daya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat sasaran dengan data yang akurat untuk mendorong investasi serta pengembangan wisata budaya berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pada aspek sumberdaya manusia, prioritas arah kebijakan adalah keberpihakan dan pemberdayaan kepada masyarakat menengah kebawah untuk memperoleh kemudahan akses layanan pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya. Hasil yang diharapkan adalah: anak usia dini terlayani PAUD; Anak usia sekolah lulus SLTA dan memiliki keterampilan bahasa Inggris, komputer, agrobisnis, dan kewirausahaan; Angkatan kerja menjadi pekerja profesional atau wirausaha yang peduli memajukan daerahnya; Rumah Sakit, Puskesmas, dan Jaringannya memenuhi standar mutu serta mampu menjangkau/dijangkau oleh masyarakat di wilayahnya; Keluarga sadar gizi, berperilaku hidup bersih sehat, dan menerapkan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera; serta pemuda-pemudi Gunungkidul meraih prestasi regional, nasional, dan internasional.

Sedangkan tata kelola pemerintahan, prioritas kebijakan adalah peningkatan Sistem Pelayanan Publik dengan Menerapkan PrinsipPrinsip Good Governance. Hasil yang diharapkan adalah: seluruh SKPD dan pemerintahan desa memiliki aparatur yang kompeten sesuai kebutuhan serta menerapkan akuntabilitas kinerja dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan dilaksanakan secara tepat waktu dan terintegrasi dengan data yang akurat; pelayanan publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima serta menciptakan iklim usaha yang kondusif; serta masyarakat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatannya secara tertib dan damai.

V.1.3. Arah kebijakan Pembangunan Lima Tahun Ketiga (2016 – 2021)

Pada tahap ini, pembangunan diarahkan untuk menciptakan dasar yang semakin kokoh untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera dengan mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya.

Upaya yang akan dilakukan adalah melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional, meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah, mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif, serta peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pada aspek tata kelola pemerintahan (*Good Governance*), hal penting yang menjadi prioritas adalah peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan ketaatan masyarakat terhadap hukum. Aspek tata kelola ini sangat terkait dengan aspek peningkatan iklim investasi daerah. Pada iklim investasi ini, hal penting yang menjadi prioritas adalah optimalisasi sektor yang menjadi basis dan sektor unggulan daerah menuju struktur perekonomian daerah yang tangguh. Diharapkan pembangunan sektor basis dan sektor unggulan daerah ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan masyarakat serta ketahanan pangan.

Pada aspek daya saing sumber daya manusia hal penting yang menjadi prioritas adalah peningkatan karakter dan mental sumber daya manusia yang berkualitas untuk pengurangan angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin.

Pada aspek pemantapan pengelolaan pariwisata yang profesional, hal penting yang menjadi prioritas adalah peningkatan daya saing pariwisata serta perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan.

Pada aspek infrastruktur hal terpenting yang prioritas adalah percepatan pembangunan infrastruktur publik wilayah untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah serta mewujudkan pemerataan pembangunan, percepatan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sedangkan pada aspek pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan akan difokuskan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup serta peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

V.1.4. Arah kebijakan Pembangunan Lima Tahun Keempat (2021 – 2025)

Lima tahun keempat adalah tahapan terakhir pembangunan jangka panjang. Pada tahapan terakhir ini diharapkan seluruh visi dan misi pembangunan jangka panjang dapat tercapai.

Pencapaian visi dan misi pada tahapan terakhir adalah periode yang terberat mengingat bahwa pembangunan ditahapan terakhir ini harus mampu untuk mewujudkan Pemantapan dan mempertahankan pariwisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera.

Pembangunan dititikberatkan pada masyarakat yang mandiri dan sejahtera berupa peningkatan kualitas hidup yang merata di seluruh wilayah. Pada lima tahun terakhir pembangunan diarahkan pada pembentukan sikap dan budaya

masyarakat yang memasuki tahapan masyarakat yang semakin responsif terhadap masalah kesejahteraan sosial dilingkungannya, tanggap dini terhadap setiap gejala yang mengganggu kesejahteraan masyarakat, mampu mengelola sumberdaya dan fasilitas, serta mengembangkan kemampuan terhadap perkembangan dinamika masyarakat. Sumber daya manusia tenaga kerja sudah mengalami transformasi yang memenuhi basis budaya masyarakat, standarisasi, kompetensi, dan profesionalisme sehingga mampu bersaing dan siap pakai di pasar kerja regional maupun internasional. Masyarakat Gunungkidul yang sejahtera didukung oleh suatu struktur ruang yang fungsional yang mantap dan mampu mengakomodasi dinamika sosial ekonomi masyarakat sehingga pada lima tahun keempat Gunungkidul akan menjadi alternatif pilihan hunian/tempat tinggal yang nyaman bagi penduduk seiring dengan struktur penduduk yang semakin menua (*aging society*) serta kepadatan penduduk kabupaten/kota lain di Istimewa Yogyakarta.

V.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH

Arah pembangunan wilayah yang ditetapkan pada hakekatnya merupakan berbagai upaya yang dilakukan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat, memperkecil kesenjangan pertumbuhan, dan mengurangi ketimpangan kesejahteraan antar wilayah.

V.2.1 Pembangunan Perdesaan

Pembangunan perdesaan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat dari berbagai ketertinggalan yaitu meliputi aspek sumberdaya manusia, sarana prasarana, kelembagaan, dan perekonomian dengan tetap mempertimbangkan keserasian pertumbuhan masing-masing wilayah di segala bidang.

Rencana pengembangan sistem perdesaan dilakukan melalui:

1. Pengembangan desa pusat pertumbuhan.
2. Pengembangan kawasan agropolitan.
3. Pengembangan kawasan minapolitan.
4. Pengembangan prasarana dasar perdesaan meliputi jalan, listrik, air bersih, telepon dan irigasi.

V.2.2 Pembangunan Perkotaan

Pembangunan perkotaan diarahkan untuk mencapai keseimbangan perkembangan pemanfaatan tata ruang dengan fasilitas sarana prasarana kota yang mendukungnya sesuai dengan hierarki dan fungsi kota. Rencana pengembangan perkotaan di Kabupaten Gunungkidul meliputi:

1. Rencana pengembangan sistem perkotaan dalam satu kesatuan wilayah secara spasial dan fungsional secara hirarki sebagai berikut:
 - a. Hirarki I : Kota Wonosari
 - b. Hirarki II : Ibu Kota Kecamatan (IKK) Semanu, IKK Playen, IKK Panggang, IKK Semin, IKK Karangmojo, IKK Rongkop, IKK Nglipar;
 - c. Hirarki III : IKK Ponjong, IKK Purwosari, IKK Saptosari, IKK Paliyan, IKK Tepus, IKK Tanjungsari, IKK Girisubo, IKK Patuk, IKK Gedangsari, IKK Ngawen, Satuan Permukiman (SP) Sambipitu dan SP Jepitu.
2. Rencana pengembangan sistem perkotaan untuk kesesuaian fungsi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai berikut:
 - a. Kota Sedang : Kota Wonosari;
 - b. Kota Kecil : IKK Semanu, IKK Playen, IKK Panggang, IKK Semin, IKK Karangmojo, IKK Rongkop, IKK Nglipar, IKK Ponjong, IKK Purwosari, IKK Saptosari, IKK Paliyan, IKK Tepus, IKK Tanjungsari, IKK Girisubo, IKK Patuk, IKK Gedangsari, IKK Ngawen, SP Sambipitu dan SP Jepitu.
3. Rencana pengembangan sistem perkotaan dalam sistem pelayanan wilayah sebagai berikut :
 - a. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp): Kota Wonosari
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) : IKK Semanu, IKK Playen, IKK Panggang, IKK Semin, IKK Karangmojo, IKK Rongkop, IKK Nglipar.
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) : IKK Ponjong, IKK Purwosari, IKK Saptosari, IKK Paliyan, IKK Tepus, IKK Tanjungsari, IKK Girisubo, IKK Patuk, IKK Gedangsari, IKK Ngawen, SP Sambipitu dan SP Jepitu.
4. Pengembangan sistem perkotaan dalam sistem pelayanan wilayah diwujudkan melalui peningkatan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, pelayanan perekonomian dan pelayanan infrastruktur sesuai dengan skala pelayanan perkotaan.
5. Pengembangan fasilitas perkotaan untuk mendukung pengembangan sistem perkotaan dalam sistem pelayanan wilayah, meliputi:
 - a. PKWp, fasilitas kawasan perkotaan yang dikembangkan berupa fasilitas perdagangan dan jasa, pemerintahan, pendidikan menengah dan tinggi, kesehatan dan sosial, perindustrian untuk skala kabupaten;

- b. PKL, fasilitas perkotaan yang dikembangkan terutama adalah fasilitas pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan sosial, untuk skala kecamatan.
 - c. PPK, fasilitas perkotaan yang dikembangkan terutama adalah fasilitas pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan sosial, untuk skala kawasan.
6. Penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana perkotaan jalan, listrik, telepon, air bersih, drainase, persampahan, dan sanitasi.

V.2.3. Pemanfaatan Ruang

Penetapan alokasi pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Gunungkidul dilakukan dengan penetapan-penetapan kawasan yang sesuai secara fisik dan sosial ekonomi serta dengan mempertimbangkan struktur tata ruang.

1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung terdiri atas : kawasan lindung bawahan, kawasan lindung setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan lindung geologi dan kawasan rawan bencana alam.

a. Kawasan Lindung Bawahan

Kebijakan penetapan Kawasan Lindung Bawahan diarahkan untuk memantapkan fungsi lindung kawasan hutan fungsi lindung dan kawasan resapan air.

b. Kawasan Lindung Setempat

Kebijakan penetapan Kawasan Lindung Setempat diarahkan untuk memantapkan fungsi lindung kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan waduk, embung, telaga, laguna, jaringan irigasi, dan kawasan sempadan mata air. Untuk mewujudkan kelestarian kawasan lindung setempat maka setiap kegiatan perlu mengendalikan, mengawasi dan mengarahkan serta mencegah kegiatan budi daya di yang dapat mengganggu fungsi pantai, sungai, waduk, embung, telaga, laguna, jaringan irigasi, mata air, dan goa.

c. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya Kebijakan penetapan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya diarahkan untuk memantapkan fungsi lindung kawasan cagar alam, kawasan suaka alam ekosistem pantai, kawasan suaka margasatwa, kawasan taman hutan raya, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Guna mewujudkan pengelolaan kawasan cagar alam agar tetap lestari maka melarang kegiatan budi daya yang tidak berkaitan

dengan fungsinya, melarang mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan, dan ekosistem yang ada, melindungi dan mengembangkan hutan tanaman langka (Aboretum) lokal melalui kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pariwisata dan pendidikan. Selain itu, juga perlu menindak dengan tegas pelaku perusakan kawasan cagar alam.

d. Kawasan Lindung Geologi

Kebijakan penetapan kawasan lindung geologi diarahkan untuk memantapkan fungsi lindung kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam dan kawasan keunikan proses geologi.

Penetapan kawasan lindung ekosistem karst ditujukan untuk melindungi kelestarian fenomena topografi kars yang mempunyai karakteristik yang cukup spesifik dan langka.

Kawasan karst di Kabupaten Gunungkidul terbentuk dengan dipengaruhi oleh litologi, musim kering yang panjang dan curah hujan yang tinggi sehingga akan menghasilkan kenampakan di atas permukaan yaitu kubah- kubah karst dengan goa-goa horisontal, telaga karst (doline maupun uvala dengan ponor dan sinkhole) serta kenampakan bawah permukaan seperti goa-goa vertikal, sungai bawah tanah, stalaktit, dan stalakmit. Masing- masing fenomena tersebut membentuk satu kesatuan ekosistem. Potensi sumber daya lahan di daerah kawasan karst mempunyai nilai manfaat yang cukup berarti bagi penduduk sekitar sebagai penghasil bahan pangan sehari-hari. Lahan yang berpotensi cukup tinggi di kawasan berbatuan karbonat terdapat lembah-lembah atau doline di daerah kars. Potensi lahan akan meningkat apabila proses fluvial mulai bekerja disamping proses solusional. Tanah yang berkembang di lembah-lembah atau doline pada umumnya terra rosa dengan tekstur lempungan, kedalaman sedang, warna kemerah-merahan. Lahan di daerah lembah kawasan kars dapat ditanami tanaman semusim tahan kering atau sawah tadah hujan.

e. Kawasan Rawan Bencana Alam

Kebijakan penetapan kawasan rawan bencana alam diarahkan untuk memantapkan fungsi lindung dan upaya menyelamatkan manusia serta kegiatan hidupnya.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan budi daya terdiri atas:

a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kebijakan penetapan kawasan hutan produksi sebagai berikut :

- 1) Menjamin keberadaan hutan produksi dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.
 - 2) Mengoptimalkan fungsi hutan produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari.
 - 3) Mengukuhkan kawasan hutan produksi.
 - 4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi hutan.
 - 5) Meningkatkan pengawasan, pemantauan, pencegahan dan pengendalian terhadap kegiatan yang menyebabkan kerusakan areal hutan.
 - 6) Meningkatkan rehabilitasi dan reklamasi hutan.
- b. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat
- Kebijakan penetapan kawasan hutan rakyat sebagai berikut :
- 1) Menjamin keberadaan hutan rakyat dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.
 - 2) Mengoptimalkan fungsi hutan rakyat untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari.
 - 3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi hutan rakyat.
 - 4) Memperluas kawasan hutan rakyat bersertifikat.
 - 5) Meningkatkan pengawasan, pemantauan, pencegahan dan pengendalian terhadap kegiatan yang menyebabkan kerusakan areal hutan.
- c. Kawasan Peruntukan Pertanian
- Kebijakan penetapan kawasan peruntukan pertanian sebagai berikut :
- 1) Pada kawasan pertanian lahan basah dengan :
 - a) Melestarikan kawasan pertanian lahan basah sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan, menjaga ketersediaan lapangan kerja di bidang pertanian, dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup.
 - b) Melakukan pemanfaatan dan pengelolaan lahan berdasarkan kesesuaian lahan.
 - c) Mengendalikan secara ketat alih fungsi lahan pertanian lahan basah.
 - d) Mengarahkan pemanfaatan lahan untuk pembangunan pada lahan pertanian yang telah dikonversi sesuai dengan Rencana Rinci Tata Ruang.
 - 2) Pada kawasan pertanian lahan kering dengan :
 - a) Melakukan pemanfaatan, pengelolaan pengembangan dan ekstensifikasi kawasan pertanian lahan kering berdasarkan

kemampuan dan kesesuaian lahan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi.

- b) Mengembangkan komoditas-komoditas unggulan pertanian lahan kering sebagai identitas daerah.
 - c) Mengembangkan kawasan pertanian lahan kering untuk diversifikasi sumber pangan, dan sumber energi serta untuk menciptakan peluang ekonomi.
 - d) Melakukan pengalihan fungsi lahan dari kawasan pertanian lahan kering tidak produktif menjadi peruntukan lain secara selektif tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat.
 - e) Mengarahkan pemanfaatan lahan untuk pembangunan pada lahan pertanian yang telah dikonversi sesuai dengan Rencana Rinci Tata Ruang.
- 3) Pada kawasan perkebunan dan hortikultura dengan :
- a) Mengembangkan kawasan-kawasan perkebunan dan hortikultura sebagai pusat pengembangan agroindustri dan agrowisata secara terencana dan terpadu.
 - b) Melakukan pemanfaatan dan pengelolaan lahan berdasarkan kesesuaian lahan.
 - c) Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.
 - d) Pemanfaatan lahan untuk pembangunan diarahkan pada lahan pertanian yang telah dikonversi sesuai dengan Rencana Rinci Tata Ruang.
- 4) Pada kawasan peternakan dengan :
- a) Menjaga kualitas lingkungan kawasan peternakan.
 - b) Lokasi kawasan peternakan diarahkan jauh dari permukiman.
 - c) Pemanfaatan lahan diarahkan pada lahan pertanian yang telah dikonversi sesuai dengan Rencana Rinci Tata Ruang.
 - d. Kawasan Peruntukan Perikanan
Kebijakan penetapan kawasan peruntukan perikanan dengan :
 - 1) Mengembangkan kegiatan penangkapan, budi daya, dan industri pengolahan hasil perikanan;
 - 2) Mengembangkan kawasan perikanan yang tidak mengganggu lingkungan hidup; dan
 - 3) Pemanfaatan lahan untuk pengembangan budi daya perikanan diarahkan pada lahan pertanian lahan kering yang telah dikonversi sesuai dengan Rencana Rinci Tata Ruang.
 - e. Wilayah Pertambangan
Kebijakan penetapan wilayah pertambangan dengan menyelenggarakan kegiatan usaha pertambangan secara berdaya

guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

f. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kebijakan penetapan kawasan peruntukan pariwisata dengan memantapkan kawasan pariwisata budaya dan kawasan pariwisata alam dengan menyelenggarakan kegiatan pariwisata secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

g. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kebijakan penetapan kawasan peruntukan permukiman sebagai berikut :

- 1) Pada kawasan permukiman perdesaan dikembangkan menjadi kesatuan tempat tinggal, tempat kerja, dan fasilitas pelayanan sosial ekonomi penduduknya.
- 2) Pada kawasan permukiman perkotaan dikembangkan untuk :
 - a) Memberikan tempat bermukim dan lingkungan kehidupan yang layak.
 - b) Menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, tertib, sehat, bersih, dan nyaman.
 - c) Mengendalikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup di sekelilingnya.

h. Kawasan Peruntukan Industri Kebijakan penetapan kawasan peruntukan industri sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri menengah dan kecil.
- 2) Mengembangkan kawasan perdesaan berbasis agroindustri.
- 3) Mengembangkan kegiatan industri yang tidak menimbulkan pencemaran.

i. Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa

Kebijakan penetapan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan perdagangan dan jasa diperuntukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 2) Peletakan bangunan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kawasan peruntukan perdagangan dan jasa disesuaikan dengan kebutuhan konsumen dan

mempertimbangkan sisi permintaan dan sisi penawaran masyarakat.

- 3) Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa disesuaikan dengan besaran kota dan skala pelayanannya.

j. Kawasan Peruntukan Pendidikan Tinggi

Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan pendidikan tinggi sebagai berikut:

- 1) Memantapkan kawasan pendidikan tinggi yang ada.
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kawasan pendidikan tinggi.

k. Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Kebijakan pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil perencanaan dan pengelolaan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara menyeluruh dan terpadu yang berorientasi pada penataan ruang yang partisipatif, terwujudnya kesejahteraan masyarakat, terpeliharanya lingkungan hidup, serta terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

1. Kawasan Peruntukan Militer Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan militer mendukung kebijakan nasional mengenai pertahanan dan keamanan negara.

V.2.4. Pembangunan Wilayah Tertinggal dan Terisolasi

1. Mengembangkan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya dalam mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulannya, terutama di wilayah-wilayah tertinggal, sehingga dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan yang dapat menggerakkan pertumbuhan wilayah.
2. Mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan dengan arah kebijakan wilayah-wilayah perbatasan yang bersifat outward looking, sehingga wilayah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan wilayah perbatasan.

V.2.5. Pengembangan Hubungan Kerjasama Antar Daerah

Untuk mengembangkan wilayah di bidang sumber daya, sarana prasarana, dan pelayanan, maka perlu tetap terus dilanjutkan kerjasama antar daerah secara terpadu yang sudah ditetapkan antara lain:

1. Kerjasama antar daerah antara Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Pacitan dan Wonogiri (PAWONSARI) serta dalam kerangka Jaringan Geopark Global UNESCO (Global Geoparks Network UNESCO).
2. Kerjasama antar daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Klaten.
3. Kerjasama antar daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Bantul.
4. Kerjasama antar daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Sleman.

V.3. SASARAN POKOK DAERAH

Sasaran Pokok Daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Visi dan Misi jangka panjang Daerah, berupa hasil pembangunan Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) sehimpunan program Perangkat-perangkat Daerah. Pencapaian Sasaran Pokok Daerah merupakan substansi dari pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD. Karena itu rumusan sasaran pokok daerah ini harus dipedomani dalam merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul.

V.3.1. Sasaran Pokok Misi Pertama: Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Sasaran Pokok Daerah dari misi pertama pembangunan jangka panjang Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, serta masyarakat sipil dan masyarakat politik yang mandiri;
- b. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta profesional, yang mampu mendukung tugas- tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan sosial kemasyarakatan;
- c. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi publik; dan
- d. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Variabel yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian sasaran pokok daerah dari misi pertama ini adalah sebagai berikut:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi Daerah,
- b. Indeks Demokrasi Indonesia DIY,
- c. Opini Pemeriksa terhadap pengelolaan keuangan daerah,
- d. Tingkat Maturitas SPIP,
- e. Capaian Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten Gunungkidul.

- f. Persentase temuan yang telah ditindaklanjuti,
- g. Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat
- h. Nilai kualitas penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (SAKIPDA)
- i. Indeks Kepuasan Masyarakat.

V.3.2. Sasaran Pokok Misi Kedua: Pemantapan Sistem dan Kelembagaan serta Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Sasaran Pokok Daerah dari misi kedua pembangunan jangka panjang Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya karakter masyarakat yang maju, mandiri, kompetitif, dan bermoral tinggi yang dicirikan sebagai masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bijaksana, kerja keras, gotong royong, dan mandiri;
- b. Kualitas sumberdaya manusia yang semakin meningkat, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang;
- c. Ketersediaan berbagai jenis pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dengan akses dan kualitas yang memadai baik di bidang perumahan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya, pelayanan pendidikan, dan kesehatan.

Variabel yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian sasaran pokok daerah dari misi kedua ini adalah sebagai berikut:

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan komponen-komponen penyusunnya, yaitu: Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH); Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS); serta PNB Perkapita
- b. Indeks Pembangunan Gender (IPG),

V.3.3. Sasaran Pokok Misi Ketiga: Pemantapan Sistem dan Kelembagaan Perekonomian

Sasaran Pokok Daerah dari misi ketiga pembangunan jangka panjang Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

- a. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Sektor pertanian dalam arti luas, usaha mikro, kecil, menengah, dan pariwisata menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara ekonomis dan berkelanjutan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing sehingga mampu menjadi penggerak perekonomian;

- b. Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan sehingga terjadi peningkatan pendapatan perkapita yang signifikan, dengan tingkat pengangguran yang rendah dan penurunan jumlah penduduk miskin;
- c. Tersedianya pasokan kebutuhan air bersih yang merata dan cukup di semua wilayah kabupaten; dan
- d. Tingkat pembangunan daerah merata ke seluruh wilayah, berupa terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah.

Variabel yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian sasaran pokok daerah dari misi ketiga ini adalah sebagai berikut:

- a. Rerata pertumbuhan produktivitas sektoral;
- b. Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara dan wisatawan Mancanegara;
- c. Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara;
- d. Indeks Pelestarian Budaya;
- e. Angka Pertumbuhan Ekonomi;
- f. Nilai Koefisien Gini (Tingkat Pemerataan Pendapatan);
- g. Jumlah penduduk miskin (P_0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) serta Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I;
- h. Tingkat pengangguran;
- i. Stabilitas Tingkat Inflasi Daerah;
- j. Jumlah Desa Rawan Pangan;
- k. Pendapatan Perkapita Penduduk;
- l. Indeks Ketimpangan Regional Daerah;
- m. Indeks Desa Membangun

V.3.4. Sasaran Pokok Misi Keempat: Pemantapan Kemampuan Keuangan Daerah

Sasaran Pokok Daerah dari misi keempat pembangunan jangka panjang Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah;
- b. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah.

Variabel yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian sasaran pokok daerah dari misi keempat ini adalah sebagai berikut:

- a. Nilai kapasitas fiskal daerah;
- b. Nilai kemandirian keuangan daerah.

V.3.5. Sasaran Pokok Misi Kelima: Pemantapan Prasarana Sarana Dasar yang Memadai

Sasaran Pokok Daerah dari misi kelima pembangunan jangka panjang Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya jaringan infrastruktur daerah yang handal dan memadai meliputi sarana transportasi jalan, jembatan, ketenagalistrikan, pos, telepon, dan telematika menuju *smart city*.

Variabel yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian sasaran pokok daerah dari misi kelima ini adalah sebagai berikut:

- a. Indeks infrastruktur daerah;
- b. Cakupan jalan dan jembatan dalam kondisi baik;
- b. Telematika menuju *smart city*: Cakupan wilayah yang terakses dengan internet.

V.3.6. Sasaran Pokok Misi Keenam: Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Sasaran Pokok Daerah dari misi keenam pembangunan jangka panjang Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada dengan tetap menjaga keseimbangan fungsi lingkungan;
- b. Terwujudnya konservasi sumberdaya hayati dan non hayati yang mampu menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keberlanjutan fungsi sumber air;
- c. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi dan daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari;
- d. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumberdaya alam untuk mewujudkan nilai tambah dan daya saing daerah, serta modal dasar pembangunan daerah; dan
- e. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Variabel yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian sasaran pokok daerah dari misi keenam ini adalah sebagai berikut:

- a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- b. Indeks Konservasi Sumberdaya Hayati dan Non Hayati;
- c. Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah;
- d. Persentase desa tangguh bencana.

Secara lebih ringkas, variabel-variabel yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian sasaran pokok daerah dari tiap misi jangka panjang, yang harus menjadi fokus dari tiap RPJMD Kabupaten Gunungkidul dalam periode dua puluh (20) tahun adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1. Variabel Penilaian Pencapaian Visi dan Misi Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Periode 2005 – 2025

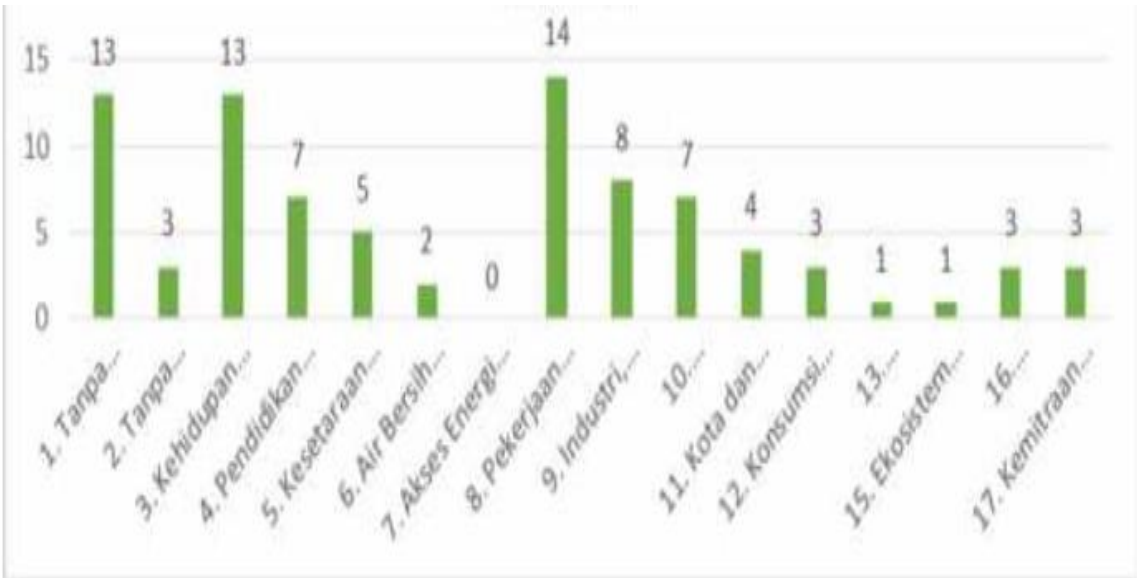
VISI JANGKA PANJANG: Gunungkidul yang BERDAYA SAING, MAJU, MANDIRI, dan SEJAHTERA tahun 2025		
NO	MISI JANGKA PANJANG	INDIKATOR SASARAN POKOK DAERAH
1.	Pemerintahan yang Baik dan Bersih	a. Indeks Reformasi Birokrasi Daerah, b. Indeks Demokrasi Indonesia DIY, c. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah, d. Tingkat Maturitas SPIP e. Capaian Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten Gunungkidul; f. Persentase temuan yang telah ditindaklanjuti g. Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat; h. Nilai kualitas penyelenggaraan SAKIPDA i. Indeks Kepuasan Masyarakat.
2.	Pemantapan Sistem dan Kelembagaan serta Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) b. Indeks Pembangunan Gender (IPG),
3.	Pemantapan Sistem dan Kelembagaan Perekonomian	a. Rerata pertumbuhan produktivitas sektoral; b. Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara dan wisatawan Mancanegara; c. Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara; d. Indeks Pelestarian Budaya; e. Angka Pertumbuhan Ekonomi; f. Pembentukan PMTB; g. Nilai Koefisien Gini (Tingkat Pemerataan Pendapatan); h. Jumlah penduduk miskin (P₀), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) serta Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I; i. Tingkat pengangguran; j. Stabilitas Tingkat Inflasi Daerah; k. Jumlah Desa Rawan Pangan; l. Pendapatan Perkapita Penduduk; m. Indeks Ketimpangan Regional Daerah; n. Indeks Desa Membangun

4.	Pemantapan Kemampuan Keuangan Daerah	a. Nilai kapasitas fiskal daerah; b. Nilai kemandirian keuangan daerah.
5.	Pemantapan Prasarana Sarana Dasar yang Memadai	a. Indeks infrastruktur wilayah b. Cakupan jalan dan jembatan dalam kondisi baik; c. Telematika menuju <i>smart city</i> : Cakupan wilayah desa yang terakses dengan internet.
6.	Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup b. Indeks Konservasi Sumberdaya Hayati dan Non Hayati c. Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah; d. Persentase desa tangguh bencana

V.4. CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

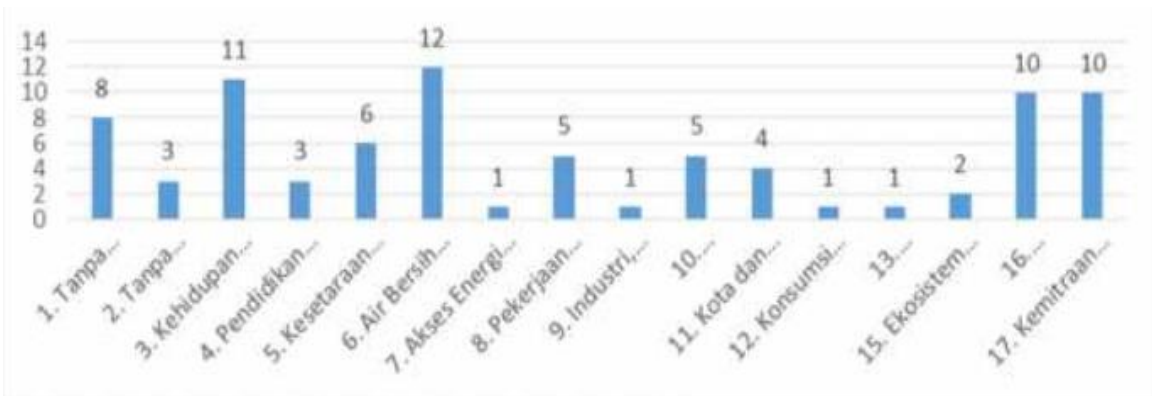
Capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di masa depan dan capaian indikator TPB setiap Organisasi erangkat Daerah (OPS) dapat dilihat pada sub bab ini. Sebelum penjelasan detail tentang capaian indikator TPB pada setiap OPD, akan dijelaskan lebih dahulu capaian indikator TPB secara keseluruhan di Kabupaten Gunungkidul. Kategori capaian TPB Kabupaten Gunungkidul berdasarkan hasil analisis data terbagi atas 4 (empat) kategori yaitu:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional;



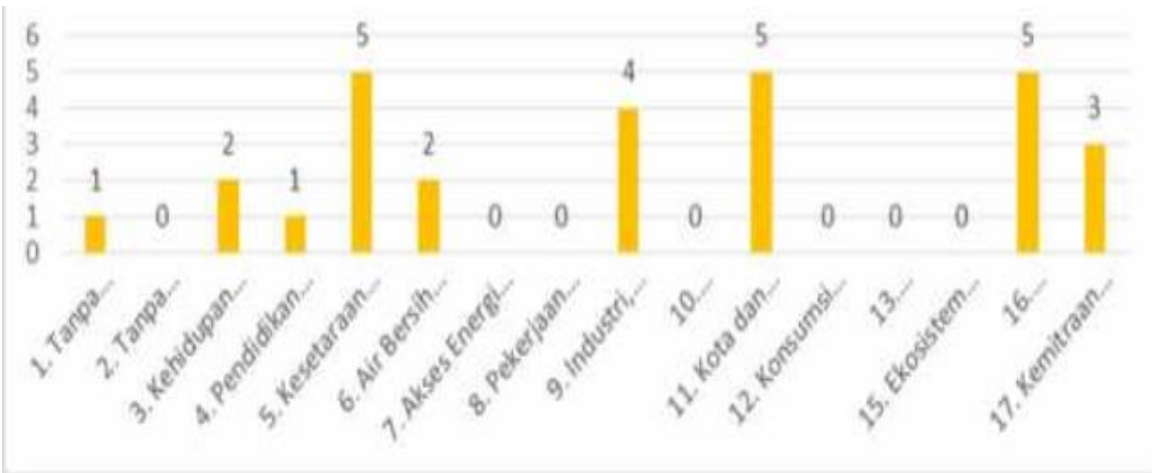
Gambar 5.1. Jumlah Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Menjadi Target RPJMN 2019

2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional;



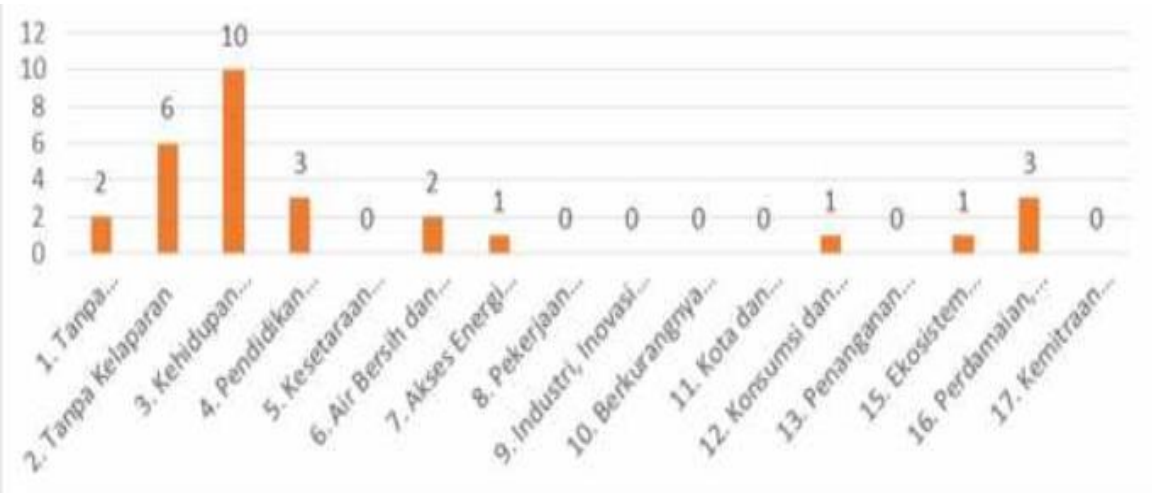
Gambar 5.2. Jumlah Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

3. Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional;



Gambar 5.3. Jumlah Indikator yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

4. Indikator TPB yang tidak / belum memiliki data



Gambar 5.4. Jumlah Indikator yang belum Memiliki Data

Secara umum, Kabupaten Gunungkidul masih menghadapi tantangan yang cukup panjang dalam menghadapi pencapaian indikator TPB. Hal ini didasarkan atas capaian jumlah indikator yang telah mencapai target nasional. Berdasarkan

hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan bahwa indikator TPB di Kabupaten Gunungkidul yang telah dilaksanakan dan mencapai target nasional baru mencapai 38% (87 indikator) dari total 227 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten. Capaian Indikator TPB Kabupaten Gunungkidul terhadap target nasional diperoleh proporsi seperti dalam tabel dan gambar dibawah ini.

Tabel 5.2. Capaian Indikator TPB Kabupaten Gunungkidul terhadap Target Nasional

No	Kriteria	Jumlah Indikator	Persentase
1.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target Nasional	87	40%
2.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target Nasional	76	35%
3.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional	28	13%
4.	Indikator yang belum memiliki data	29	13%
	Total Indikator yang menjadi urusan dan kewenangan Kabupaten Gunungkidul	220	100%

Sumber : hasil pengolahan data 2018

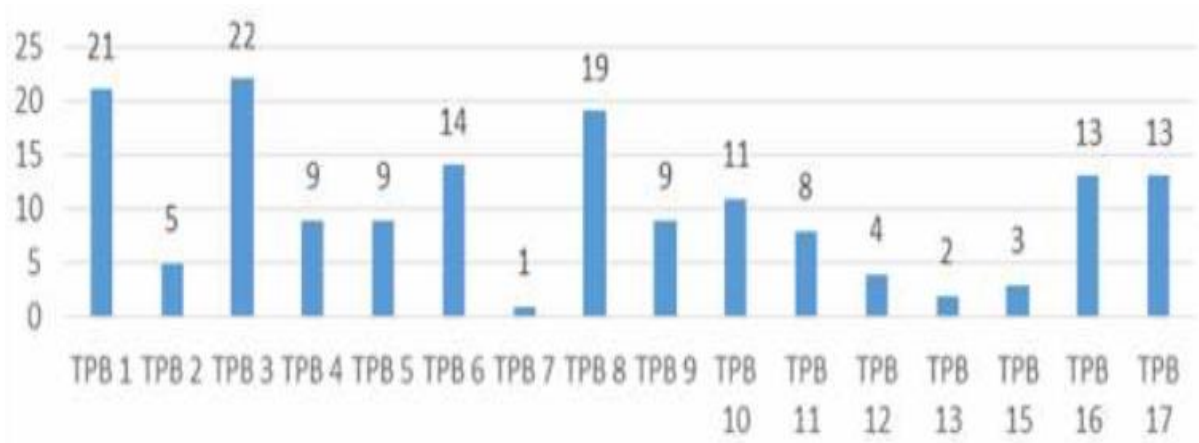


Gambar 5.5. Persentase Capaian Jumlah Indikator TPB terhadap Target Nasional

Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan indikator TPB meliputi 16 tujuan. Adapun tujuan yang tidak bisa dilaksanakan adalah tujuan 14 (ekosistem laut). Tujuan tersebut tidak bisa dilaksanakan oleh Kabupaten Gunungkidul karena bukan kewenangan Kabupaten. Untuk jelasnya sebaran inikator TPB di Kabupaten Gunungkidul dalam setiap tPB dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.3. Jumlah Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dalam Setiap Tujuan TPB

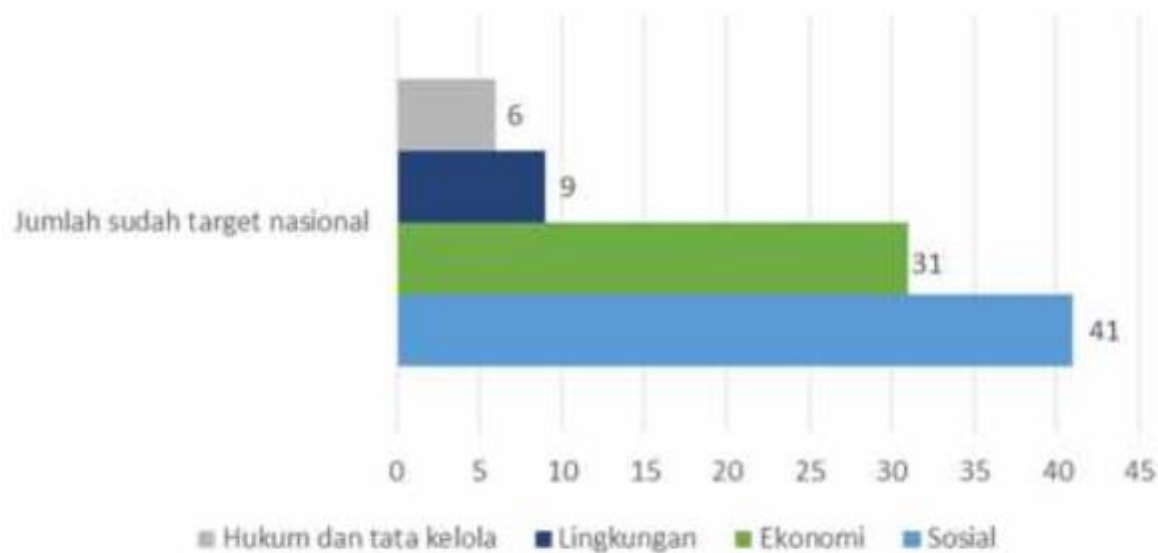
No	TPB	Jml Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target RPJMN 2019	Jml Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target RPJMN 2019	Total Jumlah Indikator yang sudah dilaksanakan
1.	Tanpa Kemiskinan	13	8	21
2.	Tanpa Kelaparan	3	2	5
3.	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	13	9	22
4.	Pendidikan Berkualitas	7	2	9
5.	Kesetaraan Gender	5	4	9
6.	Air Bersih dan Sanitasi Layak	2	12	14
7.	Akses Energi Berkelanjutan	0	1	1
8.	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	14	5	19
9.	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	8	1	9
10.	Berkurangnya Kesenjangan	7	4	11
11.	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	4	4	8
12.	Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan	3	1	4
13.	Penanganan Perubahan Iklim	1	1	2
15.	Ekosistem Daratan	1	2	3
16.	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Akuntabel	3	10	13
	Kemitraan Mencapai Tujuan	3	10	13
	Jumlah	87	76	163
	Persen	53%	47%	100%



Gambar 5.6. Total Jumlah Indikator yang Sudah Dilaksanakan

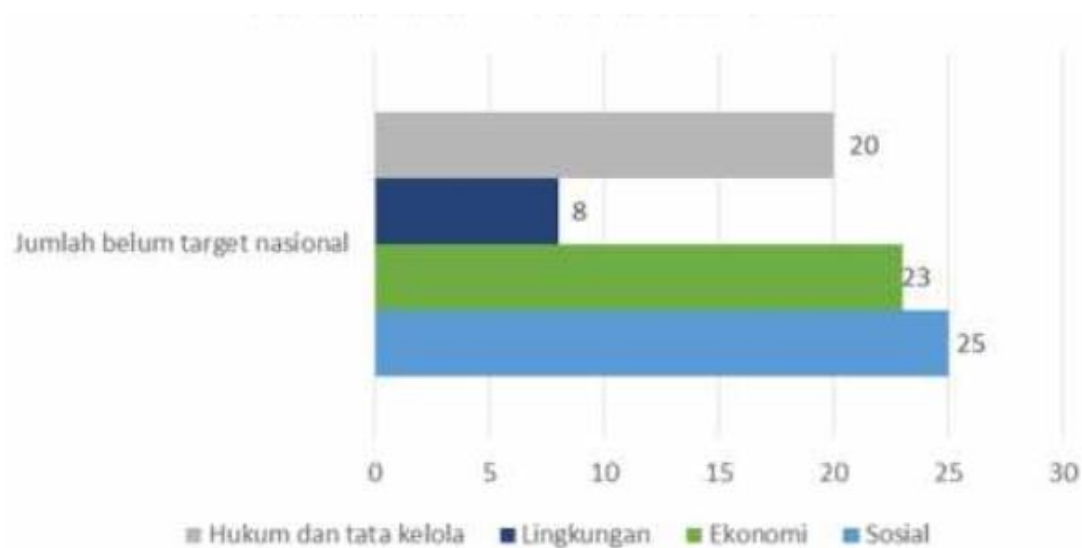
Kategori TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional di Kabupaten Gunungkidul telah mencapai 87 (delapan puluh tujuh)

indikator (53%) dari total 220 indikator. Indikator terbanyak yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional terdapat dipilar sosial sebesar 41 indikator. Sedangkan indikator paling rendah yang sudah mencapai target nasional adalah pilar hukum dan tata kelola sebesar 6 indikator. Untuk lebih jelas indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional dapat dilihat pada gambar berikut.



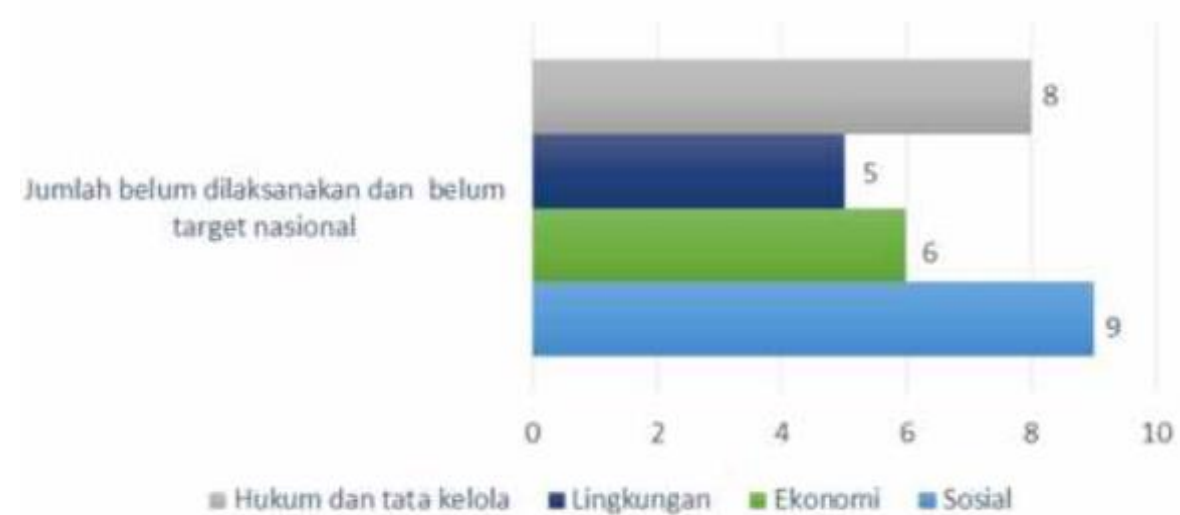
Gambar 5.7. Jumlah Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional Setiap Pilar

Kategori TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional di Kabupaten Gunungkidul telah mencapai 76 (Tujuh puluh enam) indikator (47%) dari total 220 indikator. Indikator terbanyak yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional terdapat dipilar sosial sebesar 25 indikator. Sedangkan indikator paling rendah adalah pilar lingkungan sebesar 8 indikator. Untuk lebih jelas indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional dapat dilihat pada gambar berikut.



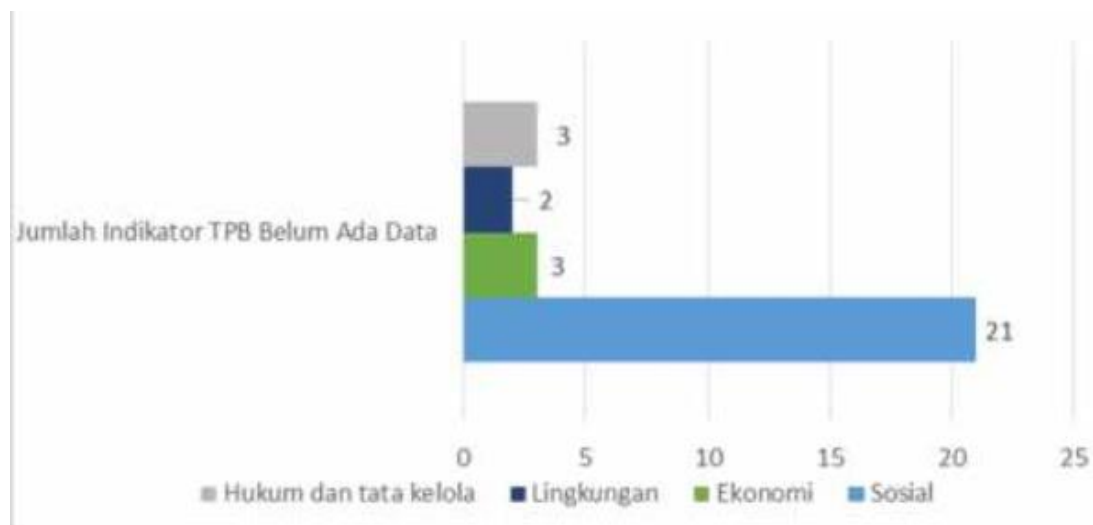
Gambar 5.8. Jumlah Indikator yang Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target Nasional pada Setiap Pilar

Kategori indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional di Kabupaten Gunungkidul hanya mencapai 28 (dua puluh delapan) indikator (13%) dari total 220 indikator. Indikator terbanyak yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional terdapat dipilar sosial sebesar 9 indikator. Sedangkan indikator paling rendah adalah pilar lingkungan sebesar 5 indikator. Untuk lebih jelas indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5.9. Jumlah Indikator yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional pada Setiap Pilar

Kategori indikator TPB yang belum ada data di Kabupaten Gunungkidul hanya mencapai 29 (dua puluh sembilan) indikator (13%) dari total 220 indikator. Indikator terbanyak yang belum ada data terdapat di pilar sosial sebesar 21 indikator. Sedangkan indikator paling rendah adalah pilar lingkungan sebesar 2 indikator. Untuk lebih jelas indikator yang belum ada data dapat dilihat pada gambar berikut.

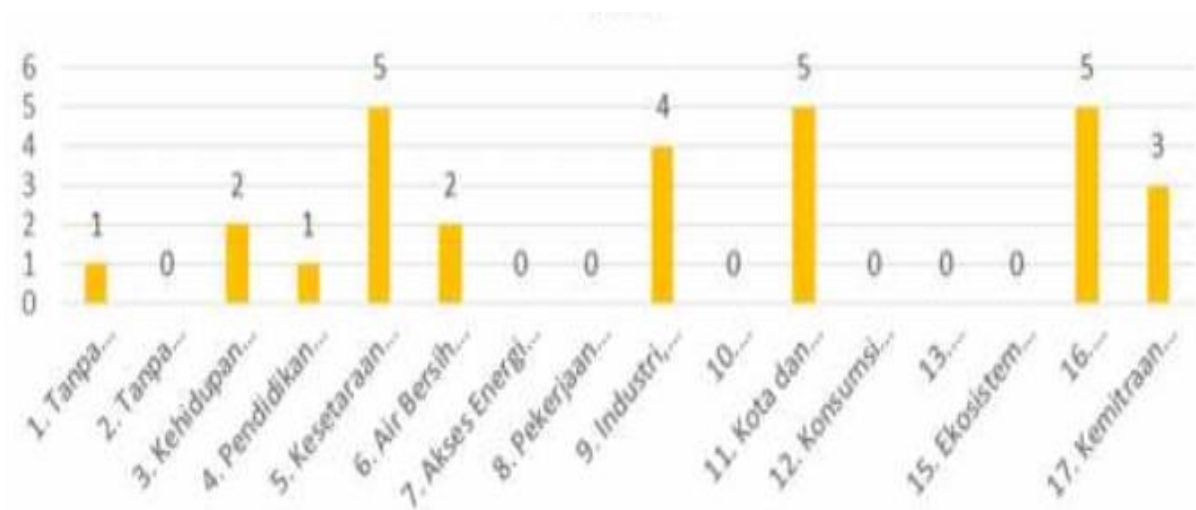


Gambar 5.10. Jumlah Indikator TPB yang Belum ada Data Setiap Pilar

Berikut akan diuraikan mengenai penilaian dan analisis mengenai capaian indikator TPB di masa depan dan capaian indikator TPB setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

1.1. Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target

Berikut ini adalah indikator-indikator yang termasuk dalam kategori belum dilaksanakan namun belum mencapai target nasional. Berdasarkan hasil telaah yang dilakukan, indikator pada kategori ini belum terangkum pada program dan kegiatan OPD pada LKPJ Gunungkidul 2017, dan belum memenuhi target RPJMN 2019. Indikator pada kategori ini terdapat pada 9 tujuan, dengan jumlah dengan jumlah indikator pada setiap tujuan ditunjukkan pada grafik sebelumnya.



Gambar 5.11. Jumlah Indikator yang Belum Dilaksanakan dan Belum mencapai Target Nasional

BAB VI

PENUTUP

RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025 ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang memuat filosofi, visi, misi, dan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek di Daerah selama kurun waktu dua puluh tahun ke depan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang ini, khususnya pencapaian pada substansi visi, misi, dan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah merupakan koridor dalam menyusun visi, misi, dan program bagi calon Bupati serta menjadi pedoman untuk menyusun RPJMD pada masa jabatannya. Semua sumberdaya dan kepentingan harus diarahkan untuk mewujudkan visi Daerah Kabupaten Gunungkidul, yaitu: **“Terwujudnya masyarakat Gunungkidul yang BERDAYA SAING, MAJU, MANDIRI, dan SEJAHTERA tahun 2025”**.

Pencapaian Visi bersama itu, sangat tergantung pada peran aktif seluruh lapisan masyarakat serta sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan kedisiplinan para penyelenggara pemerintahan. Selain itu juga perlu didukung oleh komitmen dari kepemimpinan daerah yang akuntabel, kapabel, berkualitas, inovatif, dan demokratis serta adanya konsistensi dalam melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah.

Keberhasilan Pencapaian Visi bersama itu juga memerlukan keterlibatan masyarakat, dunia usaha, serta *stakeholders* lainnya secara nyata mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/pengawasan pelaksanaan, serta evaluasi hasil pembangunan, agar semboyan/filosofi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul “Dhaksinarga BhumiKarta”, Gunungkidul yang subur makmur di masa mendatang dapat diwujudkan.

Hasil pembangunan yang akan dicapai harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat dalam usaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan adil, baik lahiriah maupun batiniah. Keadilan dan kesejahteraan yang ingin dicapai akan dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan untuk memperkuat ketahanan nasional, yang pada gilirannya dapat meratakan jalan bagi generasi penerus bangsa untuk mencapai cita-citanya yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk bagi seluruh lapisan masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Gunungkidul.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

BADINGAH